



Library CAVR

# Chega!

Bagian

3.

Sejarah Konflik



## Bagian 3. Sejarah konflik

### 157 | Pendahuluan

### 159 | Penjajahan Portugis atas Timor-Leste

#### 159 | Tinjauan

#### 160 | Kedatangan Portugis

#### 161 | Konsolidasi kekuasaan kolonial

#### 162 | Pemerintahan Portugis dan resistansi rakyat Timor

#### 164 | Timor Portugis pada abad ke-20

##### 164 | Perang Dunia Kedua

#### 165 | Gerakan internasional untuk dekolonisasi dan posisi Portugal

#### 166 | Rencana pembangunan Portugis dan berkembangnya sentimen anti-penjajah

### 167 | Perubahan di Portugal dan proses dekolonisasi

#### 167 | Tinjauan

#### 168 | MFA dan Revolusi Anyelir

##### 168 | Dekolonisasi yang cepat, kekacauan di Portugal

#### 170 | Dampak Revolusi Anyelir di Timor Portugis

#### 170 | Pembentukan partai-partai politik di Timor Portugis

### 172 | Suasana internasional dan kebijakan Indonesia terhadap Timor Portugis

#### 172 | Tinjauan

#### 173 | Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Timor Portugis

#### 174 | Indonesia dan masyarakat internasional

#### 176 | Kebijakan Indonesia terhadap Timor Portugis

### 180 | Proses dekolonisasi dan partai-partai politik

#### 180 | Tinjauan

#### 180 | Permulaan kesadaran politik

#### 181 | Susunan partai-partai politik

#### 183 | Perkembangan dan ketegangan internal

##### 183 | Kompetisi antara UDT dan Fretilin

##### 183 | Pelatihan militer Apodeti di Timor Barat

- 183 | Partai-partai politik bersiap menghadapi konfrontasi bersenjata
  - 184 | Mahasiswa dari Portugal
  - 185 | ASDT menjadi Fretilin
  - 185 | Istilah 'Maubere'
- 186 | Fretilin dan ancaman komunisme
- 188 | Tidak adanya toleransi politik
- 189 | 'Misi mustahil' Lemos Pires
- 190 | Koalisi antara UDT dan Fretilin

## 192 | Keterlibatan Indonesia yang semakin besar di Timor Portugis: Destabilisasi dan diplomasi

- 192 | Tinjauan
- 192 | Operasi Komodo dan peningkatan operasi rahasia militer
- 193 | Diplomasi Indonesia
  - 193 | Pertemuan di Lisabon antara Portugal dan Indonesia, 14 - 15 Oktober 1974
  - 195 | Pertemuan di London antara Portugal dan Indonesia, 9 Maret 1975
  - 196 | Pertemuan antara Soeharto dan Whitlam, di Wonosobo, 6 September 1974, dan di Townsville, 4 April 1975
  - 198 | Pertemuan Makau, 26 - 28 Juni 1975
  - 199 | Pertemuan antara Presiden Soeharto dan Presiden Gerald Ford, 5 Juli 1975

## 200 | Gerakan Bersenjata 11 Agustus dan konflik bersenjata internal

- 200 | Tinjauan
- 201 | UDT melancarkan gerakan bersenjata 11 Agustus
- 203 | Kegagalan negosiasi: Konflik bersenjata internal
- 205 | UDT mundur ke perbatasan
- 206 | Tanggapan Portugal terhadap konflik internal
- 206 | Tanggapan Indonesia
  - 206 | Partai-partai politik Timor-Leste berada di bawah pengaruh Indonesia
  - 207 | Operasi Flamboyan: operasi Indonesia memasuki tahapan baru

## 208 | Timor Portugis di bawah administrasi Fretilin

- 208 | Tinjauan
- 208 | Fretilin mengisi kekosongan
- 209 | Tahanan dan kekerasan politik
  - 209 | Ekses Fretilin di akhir Agustus menjelang September
  - 210 | Penjara Fretilin dan Komisi Penyelidikan

- 211 | Memulihkan ketertiban
- 212 | Pemerintahan
- 214 | Balibó: Indonesia meningkatkan intensitas operasi militer

..... 216 | Deklarasi kemerdekaan sepihak Fretilin, dan tanggapan terhadapnya

- 216 | Tinjauan
- 216 | Latar belakang deklarasi kemerdekaan sepihak Fretilin
- 218 | Deklarasi kemerdekaan
- 221 | Reaksi atas deklarasi kemerdekaan
  - 221 | Deklarasi Balibó
  - 221 | Portugal
  - 222 | Indonesia
  - 222 | Tanggapan internasional yang lebih luas
- 223 | Invasi besar-besaran di ambang pintu

..... 224 | Invasi besar-besaran

- 224 | Tinjauan
- 224 | Keputusan Indonesia untuk menginvasi dan melakukan perang terbuka
- 226 | Dili mempersiapkan strategi pertahanan
- 226 | Berbagai persiapan militer Indonesia: Operasi Seroja
- 227 | Invasi Dili dan Baucau
  - 227 | Penyerangan
  - 228 | Kontrol informasi: Upaya menyembunyikan keterlibatan ABRI
  - 229 | Kekerasan besar-besaran terhadap penduduk sipil
  - 231 | Para pemimpin Fretilin menyingkir ke pedalaman
  - 231 | Pasukan invasi menduduki Baucau
  - 231 | Harga invasi besar-besaran
- 232 | Tanggapan PBB terhadap invasi besar-besaran

..... 233 | Pengalaman rakyat Timor pada awal pendudukan dan upaya Indonesia untuk meresmikan integrasi

- 233 | Tinjauan
- 234 | ABRI melakukan konsolidasi; Indonesia mendirikan 'pemerintahan sementara'
- 235 | Fretilin mundur, pembantaian tahanan
- 235 | Pergerakan ABRI, awal 1976
- 236 | Pengalaman rakyat Timor pada awal pendudukan
- 237 | Fretilin kembali menyusun kekuatan

- 238 | Indonesia meresmikan integrasi
- 240 | Operasi Seroja berlanjut – pesawat Bronco OV-10 buatan AS mulai digunakan
- 240 | Kebuntuan militer, akhir 1976

#### 241 | 'Pengepungan dan penghancuran': tahap akhir Operasi Seroja, 1977 - 1979

- 241 | Tinjauan
- 242 | Penduduk sipil di gunung-gunung
- 242 | Kapasitas ABRI terkuras dan kepercayaan diri awal Fretilin
- 243 | Amerika Serikat memimpin dalam mempersenjatai-ulang militer Indonesia
- 244 | Perpecahan internal Fretilin dan pembersihan berdarah
- 246 | ABRI mengintensifkan operasi militer: pengepungan dan penghancuran, Agustus 1977 - Agustus 1978
  - 246 | Penghancuran sumber pangan, Fretilin mundur ke gunung bersama penduduk sipil
  - 247 | Serangan di wilayah tengah
  - 248 | Operasi (atau Gearakan) Cahaya, dengan sasaran para pemimpin Fretilin
  - 249 | Operasi militer Indonesia di wilayah tengah dan timur, akhir 1978: Jatuhnya Matebian
- 250 | Penyerahan diri: Turun dari Matebian
  - 251 | Setelah Matebian: Serangan ABRI di wilayah tengah dan timur

#### 251 | Penyerahan diri, pemukiman kembali, dan kelaparan

- 251 | Tinjauan
- 252 | Penyerahan dan eksekusi tahanan
- 253 | Kamp-kamp penampungan sementara
- 254 | Kamp penahanan jangka panjang dan strategi keamanan ABRI
- 255 | Wilayah tertutup
- 256 | Bantuan ICRC dan CRS
- 257 | Ataúro sebagai pulau penjara
- 258 | Berbagai kamp penahanan ditutup

#### 259 | Operasi keamanan

- 259 | Tinjauan
- 260 | Situasi di Dili dan seluruh Timor-Leste, 1979 - 1980
- 261 | Pemberontakan pertama: Dili, Juni 1980

- 261 | 'Pagar Betis': Operasi Kikis
  - 262 | Mobilisasi massal penduduk sipil
  - 263 | Pembantaian Lacluta
- 264 | Konsekuensi operasi
  - 264 | Hasil militer
  - 264 | Berbagai konsekuensi kemanusiaan

## 265 | Membangun kembali Resistansi

- 265 | Tinjauan
- 266 | Sejumlah anggota Fretilin yang bertahan setelah serangan 1978 - 1979
- 267 | Kembali menyusun kekuatan
- 269 | Konferensi Reorganisasi Nasional (Maret 1981)
- 270 | Pertumbuhan Resistansi
- 271 | Resistansi di bawah pimpinan Xanana Gusmão: Menuju persatuan nasional
- 272 | Gereja Katolik

## 273 | Gencatan senjata 1983 dan masa sesudahnya

- 273 | Tinjauan
- 274 | Pemilu Indonesia di Timor-Leste: 1982
- 275 | Perubahan personel sipil dan militer Indonesia, dan berbagai aksi Resistansi
- 275 | Pendekatan baru militer Indonesia: Negosiasi
- 277 | Gencatan senjata
- 277 | Pengangkatan Benny Moerdani sebagai Panglima ABRI: 1983
- 278 | Monsignor Costa Lopes dicopot
- 278 | Gencatan senjata dirongrong
- 280 | Berakhirnya gencatan senjata

## 282 | Konsolidasi dan awal perubahan: 1984 - 1991

- 282 | Tinjauan
- 283 | Perkembangan Resistansi
- 284 | Represi dan pemenjaraan
- 285 | Kebangkitan gerakan pemuda klandestin
- 286 | Gereja Katolik
- 287 | Situasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa

- 288 | Kunjungan Paus Yohanes Paulus II
- 290 | Jakarta membuka Timor-Leste
- 291 | Perkembangan internasional menjelang akhir dasawarsa 1980-an
  - 291 | Perjanjian Celah Timor
  - 291 | Akhir Perang Dingin

## 292 | Titik-balik

- 292 | Tinjauan
- 292 | Pembantaian Santa Cruz, 12 November 1991
- 295 | Dampak internasional Santa Cruz
- 296 | Penangkapan Xanana Gusmão
- 297 | Jaringan klandestin pelajar
  - 297 | Klandestin di Timor-Leste dan kebangkitan kekuatan paramiliter
  - 297 | Gerakan mahasiswa di Indonesia
- 299 | Rencana damai CNRM dan inisiatif diplomatik
- 300 | Kasus pengadilan internasional: Portugal vs. Australia, 1991 - 1995
- 301 | Hadiah Nobel Perdamaian 1996
- 302 | Perserikatan Bangsa-Bangsa

## 303 | Dari Reformasi ke pengumuman tentang Jajak Pendapat

- 303 | Tinjauan
- 304 | Jatuhnya Soeharto
- 306 | CNRT dan kampanye diplomatik
- 306 | Dampak Reformasi di Timor-Leste
- 307 | Munculnya para milisi
- 310 | Xanana Gusmão mengimbau toleransi
- 310 | Negosiasi tentang paket otonomi
- 312 | Peningkatan teror milisi
- 314 | Kesepakatan 5 Mei
- 315 | Pengaturan keamanan dalam Kesepakatan 5 Mei

## 316 | Jajak Pendapat

- 316 | Tinjauan
- 317 | Penempatan UNAMET
- 317 | Komisi Pemilihan
- 318 | Pilihan



- 318 | Koordinasi pemerintah Indonesia untuk Jajak Pendapat
- 318 | Kehadiran masyarakat internasional di Timor-Leste
- 319 | Pemantau dari Timor-Leste dan Indonesia
- 319 | Pengamanan untuk Jajak Pendapat
- 321 | Kekerasan oleh TNI-Milisi: Juni - Juli
- 322 | Dare II
- 322 | Pendaftaran pemilih
- 323 | Kampanye
  - 323 | Kelompok prokemerdekaan
  - 324 | Kelompok aktif pro-otonomi
  - 325 | Pemerintahan sipil Indonesia di Timor-Leste
  - 326 | Periode kampanye resmi
- 326 | Situasi keamanan memburuk: Agustus
- 328 | Persiapan terakhir Jajak Pendapat
- 328 | Jajak Pendapat
- 329 | Penghitungan dan hasil

..... 330 | Indonesia meninggalkan Timor-Leste: Bumi hangus

- 330 | Tinjauan
- 332 | Tindak kekerasan sesudah pengumuman hasil pemungutan suara
- 333 | TNI resmi mengambil kendali
- 335 | Markas UNAMET
- 336 | Meningkatnya tekanan internasional
- 338 | Evakuasi penduduk secara paksa
- 339 | Interfet datang: TNI ditarik
- 340 | Pembentukan UNTAET: Resolusi Dewan Keamanan 1272, 25 Oktober 1999
- 341 | Pulang



# Sejarah konflik

## Pendahuluan

1. Bagian ini memberi konteks historis pada kejadian-kejadian yang tercakup dalam bab-bab pelanggaran Laporan ini. Bagian ini didasarkan pada sumber primer Komisi ini sendiri; dari pernyataan, wawancara, dan kesaksian yang diberikan pada audiensi publik; dari bukti dokumenter yang tersedia bagi Komisi; dan dari analisis sumber-sumber sekunder yang relevan. Pada umumnya bagian ini terbatas pada ulasan singkat atas berbagai kejadian penting, momen, dan titik balik dalam periode mandat komisi yang relevan terhadap konflik-konflik politik; upaya untuk menyelesaikan konflik ini; dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam konflik-konflik ini. Dalam cakupan Laporan ini, tidak mungkin untuk memberikan penjelasan pasti mengenai berbagai persoalan kunci yang terus menjadi dugaan sejarah mengenai masa dan kejadian-kejadian tersebut. Bukan tugas Komisi ini untuk membuat penilaian pasti yang seperti itu. Bagian ini memang berupaya untuk mengidentifikasi apa saja persoalan-persoalan ini, dan Komisi mendorong penelitian, penulisan, serta analisis lebih lanjut terhadap berbagai aspek penting dalam sejarah Timor-Leste.

2. Analisis dan penulisan sejarah Timor-Leste ini merupakan langkah penting dalam pembangunan bangsa, dan cara hal ini dilakukan akan mencerminkan masyarakat seperti apa yang akan ditumbuhkan oleh negeri baru kita ini. Laporan Komisi didasarkan pada umumnya atas pernyataan dan wawancara yang diberikan oleh warga Timor biasa dari seluruh penjuru negeri, dan berupaya untuk menarik suara mereka ke dalam sebuah dialog berkelanjutan untuk membangun negeri kita yang baru ini. Laporan ini tidak dimaksudkan untuk menjadi sejarah yang eksklusif, yang hanya merekam pandangan dan pencapaian para pemimpin nasional, atau dari salah satu pihak dalam percaturan politik. Laporan ini didasarkan pada gagasan bahwa perekaman dan analisis sejarah haruslah bersifat terbuka bagi informasi dan gagasan baru, dan bagi informasi

dan pandangan yang belum tentu populer secara politis. Sementara sejarah adalah sesuatu yang penting bagi pembangunan bangsa, versi sejarah simplistik yang ingin menyembunyikan segala kenyataan buruk atau menghilangkan kontribusi orang dari berbagai bidang kehidupan tidak akan dapat membangun bangsa yang kuat dan tangguh. Penulisan sejarah yang mengakui kompleksitas, yang memberi ruang bagi suara-suara yang sering terbungkam, dan membuka jalan bagi renungan terbuka dapat memberi sumbangan dalam pembangunan suatu bangsa di mana gagasan mengenai kekuatan didasarkan pada penghormatan orang lain, keberagaman, dan demokrasi yang didasarkan pada kesetaraan semua warga negaranya.

3. Penulisan sejarah Timor-Leste adalah penting sebagai dasar bagi hubungan kita dengan tetangga internasional kita, khususnya Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh sejarawan Indonesia, Asvi Warman Adam, kepada Komisi pada audiensi nasional tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional:

*Ingatan kolektif kedua bangsa akan menentukan sifat serta kuat-lemahnya hubungan antara kedua bangsa itu. Hal ini akan tecermin dalam penulisan sejarah kedua bangsa ini.<sup>1</sup>*

4. Bagian ini dimulai dengan ulasan singkat tentang sejarah kolonial Timor-Leste di bawah kekuasaan Portugal. Bagian ini sengaja memberi penekanan pada periode menjelang konflik internal Agustus - September 1975, serta invasi Indonesia setelah itu. Ulasan ini membahas berbagai kejadian dan hubungan seputar proses dekolonisasi Timor Portugis, di dalam wilayah ini, di Indonesia, dan di dalam konteks regional dan geopolitik yang lebih luas. Hal ini penting bagi pemahaman akan penyebab konflik politik di Timor-Leste, tentang berbagai kesempatan yang hilang untuk menghindari perang dan mencari penyelesaian damai atas persoalan politik berdasarkan prinsip hukum internasional, dengan melibatkan aktor Timor, Indonesia, serta internasional.

5. Segmen-segmen berikutnya membahas kampanye militer besar-besaran oleh Indonesia pada dasawarsa 1970-an dan 1980-an, serta upaya politiknya untuk mendapatkan pengakuan internasional bagi pencaplokannya atas Timor-Leste. Segmen-segmen tersebut juga membahas mengenai penderitaan warga Timor-Leste selama tahun-tahun perang yang gencar, di gunung dan kamp-kamp pada masa pengeboman dan kelaparan yang membinasakan penduduk. Segmen-segmen ini menelusuri pergeseran strategi oleh Fretilin/Falintil setelah mereka hampir dihancurkan dalam serangan-serangan pada 1978; pertumbuhan jaringan klandestin di kota dan desa di seluruh negeri; dan ekspansi teritorial militer Indonesia serta jaringan intelijen yang intensif. Tahun-tahun konsolidasi baik oleh pemerintahan Indonesia maupun Resistansi, selama dasawarsa 1980-an, dijelaskan dengan fokus pada upaya mengembangkan rasa persatuan nasional dan bangkitnya generasi baru pemuda dalam perlawanan terhadap pendudukan.

6. Kejadian seperti Pembantaian Santa Cruz, tertangkapnya Xanana Gusmão, dan Penganugerahan Nobel Perdamaian pada dasawarsa 1990-an digambarkan sebagai titik-titik balik dalam perjuangan bangsa Timor-Leste dalam mendapatkan pengakuan atas hak untuk menentukan nasib sendiri. Segmen-segmen berikutnya membahas dampak krisis keuangan Asia di Indonesia dan di Timor-Leste, serta intensifikasi upaya internasional di bawah Sekretaris Jenderal PBB yang baru, Kofi Annan, untuk menemukan solusi bagi persoalan Timor-Leste. Dengan kejatuhan Presiden Soeharto, segmen ini menelusuri upaya di dalam Timor-Leste dan di kancah internasional untuk mencari penyelesaian, serta kemunculan milisi di Timor-Leste ketika menjadi jelas bahwa upaya tersebut dapat mencakup pilihan bagi warga Timor-Leste untuk merdeka. Segmen ini menggambarkan perkembangan pesat pada 1999 menjelang Kesepakatan 5 Mei, dan kekerasan oleh milisi-TNI terhadap penduduk sipil menjelang pengumuman hasil Jajak Pendapat. Masa UNAMET dan bagaimana Jajak Pendapat ini dijalankan juga dijelaskan. Segmen ini lebih lanjut membahas secara mendalam mengenai kegagalan Indonesia untuk menjamin keamanan selama dan sesudah Jajak Pendapat, dan peran TNI serta kelompok milisi dalam peningkatan kekerasan di seluruh wilayah setelah pengumuman Jajak Pendapat yang menolak paket otonomi khusus. Dijelaskan juga mengenai upaya warga Timor dan internasional untuk menjamin intervensi guna menghentikan kekerasan dan memastikan bahwa hasil Jajak Pendapat dihormati oleh Indonesia. Segmen ini berakhir dengan kedatangan Interfet serta kembalinya para pengungsi Timor-Leste secara bertahap dari Timor Barat dan wilayah Indonesia lainnya, dari Portugal, Australia, dan banyak negara lain di dunia tempat mereka menyebar selama masa konflik.

7. Harapan Komisi ialah bahwa sejarah singkat ini akan membantu pembaca memahami isi dari bagian dan bab-bab lain dalam Laporan ini, dan bahwa hal ini akan mengilhami generasi sejarawan Timor-Leste sekarang dan masa mendatang untuk terus bekerja dalam memahami masa lalu kita sebagai bagian dari upaya berkesinambungan untuk membangun masa depan yang didasarkan pada penghormatan pada sesama, pada hak asasi manusia, dan pada rasa cinta damai.

## Penjajahan Portugis atas Timor-Leste

### Tinjauan

8. Keterlibatan Portugal di Timor dimulai pada abad ke-16 saat orang-orang Portugis mencari kayu cendana. Pada akhir abad ke-16 Gereja Katolik pertama dibangun di Lifau, Oecussi, yang menjadi basis pemerintahan Portugis pertama di Timor. Portugal dan Belanda mempunyai hubungan yang tegang sebagai dua kekuatan penjajah utama di kepulauan ini, dan pada abad ke-18 kekuatan militer Belanda menjadi seimbang dengan kekuatan Portugal. Portugal memindahkan basisnya ke Dili pada 1771 dan semakin menitikberatkan upaya penjajahannya pada belahan timur kepulauan ini. Pada paruh kedua abad ke-19, Portugal secara paksa memperkenalkan tanaman perdagangan seperti kopi

di Timor dan berusaha mengonsolidasikan pemerintahan kolonialnya dengan menerapkan pajak dan kerja paksa, yang mendorong terjadinya sejumlah pemberontakan rakyat Timor. Taktik penjajah untuk memecah-belah dan menguasai digunakan untuk memecah-belah dan melemahkan kepemimpinan tradisional Timor.

9. Pada 1913, batas wilayah kolonial antara Timor Portugis dan Timor Belanda ditetapkan melalui sebuah keputusan oleh mahkamah internasional di Den Haag, yang dikenal dengan nama *Sentenca Arbital*, di mana Portugal mengambil paruh timur pulau dan wilayah kantong Oecussi. Pada abad ke-20, Portugal didominasi oleh rezim otoriter Perdana Menteri Salazar. Timor merupakan wilayah jajahan Portugal paling terpencil, dan sebagian besar pembangunan di sana, baik fisik maupun politik, dilupakan.

10. Perang Dunia Kedua mendatangkan kekerasan luarbiasa di Timor, saat Tentara Sekutu mendarat di wilayah netral Timor Portugis, diikuti oleh pasukan pendudukan Jepang. Jumlah kematian di antara penduduk Timor mencapai antara 40.000 sampai 60.000 orang. Setelah Perang Dunia Kedua, pemerintahan kolonial Portugis kembali. Timor tetap menjadi pulau yang miskin meskipun relatif tenang sampai Revolusi Anyelir pada 25 April 1974 akhirnya membuka peluang untuk dekolonisasi di Timor-Leste.

11. Komisi mengidentifikasi tiga dampak penting kolonisasi Portugal atas Timor-Leste. Pertama, taktik penjajah mengadu domba berbagai kelompok sosial melemahkan aliansi politik pribumi. Hal ini menghambat berkembangnya persatuan sebagai prasyarat membangun bangsa. Kedua, tradisi memerintah sendiri tidak berkembang. Sebagian besar masyarakat Timor-Leste dibelenggu sistem feodal. Ketiga, rezim penjajah Portugis tidak mengembangkan atau melembagakan nilai-nilai demokrasi dan hak-hak asasi manusia, terlepas dari telah adanya norma tradisional dan norma keagamaan yang dikembangkan oleh pihak Gereja. Karena itu, aktivitas politik yang muncul pada 1974 - 1975 menghadapi risiko distorsi dan manipulasi yang luas. Semua faktor ini turut berperan dalam munculnya kekacauan dan konflik internal yang terjadi selama proses dekolonisasi pada 1975. Selama perang saudara pada Agustus 1975, Portugal menarik diri. Partai Fretilin keluar sebagai pemenang dalam perang saudara tersebut, dan memulai suatu administrasi pemerintahan sementara yang hanya berfungsi sebagian. Semua faktor ini turut berperan memuluskan invasi Indonesia ke Timor-Leste pada 1975 tanpa banyak protes internasional.

## Kedatangan Portugis

12. Orang Portugis datang pertama kali ke Timor untuk mencari kayu cendana putih pada awal abad ke-16. Setelah menaklukkan Malaka pada 1511, misionaris Portugis membangun gereja pertama di pulau ini pada 1590.<sup>2</sup> Ini mengawali periode pemukiman di Lifau (Oecussi), yang terletak di pantai utara bagian barat Timor, oleh para biarawan Fransiskan, pedagang cendana, dan *Topasses*, kelompok ras

campuran berayahkan pelaut, pedagang, dan tentara Portugis, yang keturunannya masih ada di Timor sampai saat ini. Portugal telah membentuk koloni di berbagai pulau lain di kawasan ini, tapi semuanya tidak aman. Belanda segera mengusir orang-orang Portugis dari Malaka, dari Makassar di Sulawesi, dan pada 1652, dari benteng yang baru dibangun Portugis di Kupang, Timor bagian barat, hanya lima tahun sesudah benteng itu selesai dibangun.\*

13. Pada 1702, Pemerintah Portugis secara resmi hadir di Lifau, dan memerintah Timor dari koloninya di Goa. Pendekatan gubernur dengan memberikan pangkat militer kepada raja-raja setempat (*liurai*) menciptakan preseden bagi pemerintahan Timor yang akan berlanjut hingga abad ke-20. Namun, Portugal menghadapi perlawanan dari para *liurai* yang gemar menjelajah serta dari para *Topasses*, yang pada masa itu menguasai perdagangan cendana dan, meskipun keturunan Portugis, mereka jarang mau bekerja sama. Karena tidak mampu memantapkan kekuasaannya di Lifau, Portugal pindah ke Dili pada 1769. Kepindahan ini mempertemukan mereka dengan masyarakat Belu yang mendiami bagian timur pulau ini.

## Konsolidasi kekuasaan kolonial

14. Dari basis barunya di Dili, Portugal memiliki pengaruh dan kontrol geografis yang terbatas atas Timor-Leste. Resistansi lokal dan kurangnya kemampuan militer membatasi kekuasaan Portugal di pantai utara untuk waktu yang cukup lama. Pada 1851, Gubernur Lopes da Lima memulai serangkaian perundingan rumit mengenai wilayah darat dengan pejabat kolonial Belanda, yang melibatkan para *liurai* dan tanah-tanah warisan di sejumlah wilayah perbatasan seperti Maucatar, lebih jauh di dalam Timor-Leste di Maubara, dan Pulau Flores yang dikuasai Portugal. Berbagai perundingan tersebut melahirkan prinsip pertukaran wilayah antara Portugal dan Belanda dengan tujuan menetapkan garis batas berdasar pembagian timur-barat pulau di antara kedua kekuatan kolonial. Hal ini meringankan beban Portugal karena tidak perlu terlibat perang kolonial dengan Belanda, sehingga memungkinkannya memperkuat kekuasaannya di timur pulau tersebut. Pada 1895, Portugal membentuk unit-unit militer/pemerintahan di kesepuluh distrik di wilayah Timor-Leste. Oecussi ditambahkan sebagai distrik kesebelas Timor-Leste.<sup>3</sup> Portugal membangun barak militer, kantor, sejumlah sekolah, rumah sakit, dan penjara di distrik-distrik tersebut sebelum akhir abad ke-19. Gereja Katolik, yang sempat dilarang selama 20 tahun sejak 1834, dipulihkan kembali dan Uskup Medeiros diterima dengan tangan terbuka.

15. Berbagai perundingan wilayah yang dimulai oleh Gubernur Lopes da Lima pada 1851 berpuncak pada kesepakatan antara Portugal dan Belanda untuk membawa

---

\* Perang Penfui antara kekuatan kolonial Portugis dan Belanda terjadi pada pertengahan abad ke-17, dan merupakan titik balik untuk Portugal. Penfui berada di utara Kupang, dekat dengan lokasi lapangan udaranya sekarang. Kekalahan Portugal di tangan kekuatan tentara Belanda berarti bahwa para *topasses* dengan dukungan Portugal secara efektif diusir dari pelabuhan besar pulau tersebut di Kupang, sebagai bukti nyata kejayaan tentara Belanda. Tempat peperangan tersebut juga terletak berdekatan dengan penjara tempat 69 tahanan politik dari Timor-Leste diambil pada 1983, di dalam operasi setelah pembantaian Kraras. [Lihat Bab 7.4 Penahanan Sewenang-wenang, Penyiksaan, dan Penganiayaan.]

masalah tersebut ke Mahkamah Internasional di Den Haag, tempat kesepakatan mengenai batas-batas wilayah jajahan diputuskan dalam *Sentença Arbitral* pada 1913. Pertukaran wilayah terakhir antara Belanda dan Portugal sesuai dengan keputusan tersebut terjadi pada 1917.<sup>4</sup> Hasilnya, Timor-Leste menjadi satu-satunya wilayah kolonial Portugal di kepulauan ini, sehingga Belanda menjadi kekuasaan kolonial yang mulai dominan.

16. Putusan akhir resmi mengenai batas-batas internasional antara Belanda dan Portugal menjadi titik acuan yang sangat penting bagi masa depan politik Timor-Leste. Pada saat Indonesia berjuang dan meraih kemerdekaan setelah Perang Dunia Kedua, Indonesia mengklaim wilayah nasionalnya di Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan bekas garis batas wilayah jajahan Belanda. Atas dasar inilah Indonesia terus memperjuangkan dan akhirnya berperang untuk merebut Irian atau Papua Barat pada dasawarsa 1960-an. Sementara pernah berkembang sejumlah wacana mengenai suatu konsep “Indonesia Raya” selama perjuangan kaum nasionalis, yang meliputi wilayah Malaya dan Borneo Inggris, hal ini tidak pernah secara sungguh-sungguh diajukan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam submisinya kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai klaim atas Irian pada akhir dasawarsa 1950-an, Indonesia membantah secara eksplisit klaim apapun atas Timor Portugis.<sup>5</sup> Belakangan, pada 1974 - 1975, dan dalam tahun-tahun sesudahnya, Pemerintah Indonesia tidak pernah secara sungguh-sungguh mencoba untuk mengajukan klaim bahwa Indonesia memiliki klaim teritorial atas wilayah Timor Portugis terdahulu.

17. Sama pentingnya dan bersumber dari hubungan kolonial ini, Pemerintah Portugal tidak pernah melepaskan posisinya sebagai penguasa administrasi yang sah atas Timor-Leste selama periode mandat Komisi. Ini memungkinkan persoalan Timor-Leste tetap hidup dalam agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai wilayah yang tidak berpemerintahan sendiri, dan merupakan faktor yang secara fundamental membedakannya dengan perjuangan nasionalis atau separatis lainnya dalam wilayah negara kepulauan Indonesia dalam abad ke-20.

## Pemerintahan Portugis dan resistansi rakyat Timor

18. Portugal menjalankan pemerintahan tidak langsung melalui para *liurai*, yang kerja samanya didapat Portugal dengan memberi mereka otonomi di wilayah mereka masing-masing. Portugal memanfaatkan perseteruan antara para *liurai*. Dengan melakukan hal itu, mereka dapat mengakses kekuatan pasukan kecil mereka, atau kelompok-kelompok milisi<sup>\*</sup> yang mereka gunakan untuk memperbesar sumberdaya militer mereka sendiri yang terbatas.<sup>6</sup> Portugal pertama kali menggunakan milisi para *liurai* yang loyal pada 1642 dalam kampanye memerangi Kerajaan Wehale,<sup>7</sup> dan terus melakukan hal itu sampai penumpasan pemberontakan Viqueque pada 1959. Bagi Portugal, harga kebijakan memecah-belah dan menguasai ini adalah perlawanan kecil-kecilan yang terus-menerus terhadap kekuasaan Portugis. Bagi rakyat Timor-Leste, harganya adalah kelemahan dan perpecahan yang tak kunjung berakhir.

\* Dalam bahasa Portugis disebut *moradores* atau *arraias*.



19. Kekuasaan dan kemakmuran Portugal menurun selama abad ke-17 dan ke-18. Dari semua wilayah jajahannya, Timor Portugis adalah yang paling terpencil dan tidak penting. Portugal membuat investasi ekonomi dan politik yang terbatas di wilayah ini. Menurunnya harga cendana mendorong Portugal untuk memperkenalkan tanaman pertanian baru pada abad ke-19 untuk membangun sektor ekspor. Namun, ekonomi pertanian subsisten Timor Portugis hanya menyisakan sedikit sekali tenaga kerja, yang dibutuhkan untuk tanaman pertanian jenis ini. Pada sekitar 1859, Gubernur Castro menerapkan penanaman paksa untuk tanaman perdagangan baru ini, terutama kopi, tapi juga gandum dan spesies tanaman asing lainnya. Portugal tetap menjajah Timor secara tidak langsung, yang membuat pemerintahan sulit diatur, khususnya dengan adanya resistansi terhadap berbagai kebijakan ekonominya yang memaksa. Gubernur Celestino da Silva melanjutkan sistem kerja paksa ini pada dasawarsa 1890-an dan 1900-an, dengan ciri khususnya yaitu pembangunan jalan. Kebijakan pajak yang mencekik dan kerja paksa, yang keduanya merupakan akibat dari investasi Portugal yang terlalu sedikit di wilayah jajahan ini, sangat tidak populer.

20. Resistansi para *liurai* muncul segera setelah pengangkatan seorang gubernur di Lifau. Pemberlakuan upeti, yang disebut *finta*, pada sekitar 1710, memicu pemberontakan dan kebencian yang terus berlanjut yang punya andil dalam memaksa Portugal untuk pindah ke Dili pada 1769.<sup>8</sup> Portugal tidak mengalami perlawanan yang berarti sampai ketika Gubernur Castro menggunakan kekuatan militer untuk memaksakan penanaman kopi. Kebijakan yang tidak populer ini memicu pemberontakan pada 1861 yang diikuti oleh serangkaian pemberontakan lokal yang dipimpin oleh para *liurai* terhadap berbagai eksekusi penjajahan. Sebagai tanggapannya, pemerintahan Portugis memberlakukan kontrol langsung atas Timor-Leste pada 1895 ketika Gubernur Celestino da Silva membentuk pemerintahan dan militer di seluruh Timor-Leste, membagi wilayah tersebut menjadi sebelas distrik, termasuk daerah kantong Oecussi.<sup>9</sup>

21. Akibatnya, Portugal memisahkan Timor dari Goa, menjadikannya distrik pemerintahan terpisah pada 1896. Namun demikian pemberontakan terus berlanjut. Yang terakhir dan terbesar adalah pemberontakan yang dipimpin oleh *liurai* Manufahi, Dom Boaventura, yang memberontak melawan pajak kepala pada 1908. Resistansi Dom Boaventura ini berawal dari pemberontakan yang dipimpin oleh ayahnya; *liurai* Dom Duarte memimpin berbagai pemberontakan pada akhir abad ke-19 sampai Gubernur Celestino da Silva menyerang kerajaan Same pada 1895 dan Dom Duarte dipaksa untuk menyerah pada 1900. Setelah Gubernur da Silva mengganti *finta* dengan pajak kepala pada 1908, Dom Boaventura, anak Dom Duarte, memberontak pada 1911. Pihak Portugal mengerahkan pasukan tentara *liurai* yang amat besar yang berjumlah 12.000, serta mendatangkan pasukan dari Mozambik, dan dengan kejam menumpas pemberontakan ini pada 1912. Aksi ini menciptakan suatu stabilitas, tetapi dengan harga kematian dan penderitaan yang amat besar. Diperkirakan 25.000 orang meninggal dalam kampanye menumpas pemberontakan ini.<sup>10</sup> Dom Boaventura ditangkap dan diasingkan ke Pulau Ataúro dan meninggal di sana. Setelah itu Portugal memberikan kewenangan langsung pada

desa (*suco*) sebagai pemerintahan lokal, dengan demikian memotong kewenangan *liurai*, mengurangi pengaruh mereka, dan menetapkan kontrol Portugal yang lebih langsung terhadap semua daerah di pedalaman Timor Portugis.

## Timor Portugis pada abad ke-20

22. Sepanjang abad ke-20, Portugal sendiri menghadapi ketidakstabilan di dalam negeri. Pada 1912, Kerajaan Portugis berubah menjadi republik, yang kemudian berganti menjadi negara satu partai pada 1928. Pada masa ini, banyak orang Tionghoa yang masuk wilayah koloni Timor Portugis, dan memulai peran mereka sebagai perantara usaha, pengeksport, dan pedagang. Melengkapi aktivitas ekonomi orang Tionghoa ini, meskipun menghadapi banyak masalah di dalam negeri, Portugal membentuk SAPT (*Sociedade Agricola Pátria e Trabalho*), konglomerat perdagangan yang membawa infrastruktur baru untuk produksi dan ekspor.<sup>\*</sup> Biarpun demikian, Timor Portugis tetap merupakan wilayah jajahan terpencil yang berjalan dengan personil atau investasi yang minim dari Portugis. Pada 1929, hanya terdapat 200 warga negara Portugis, ditambah 300 serdadu.<sup>11</sup> Portugal terus memerintah melalui perantara lokal. Pada 1930, Undang-Undang Kolonial Perdana Menteri Salazar membentuk dewan perwakilan lokal yang pada dasarnya lemah, dan memungkinkan penduduk lokal secara terbatas untuk memperoleh status kewarganegaraan Portugis.

## Perang Dunia Kedua

23. Setelah Jepang menyerang Pearl Harbor pada Desember 1941, Australia mengantisipasi bahwa Jepang akan menduduki Timor dan menggunakan Timor sebagai pangkalan untuk meluncurkan serangan terhadap Australia. Pasukan Australia, Inggris, dan Belanda mendarat di Dili pada 17 Desember 1941 dalam aksi yang disebut tindakan pencegahan memprotes pelanggaran terhadap kenetralan Portugis. Jepang menyerang Timor pada 19 Februari 1942. Masih menjadi bahan perdebatan historis apakah pelanggaran yang dilakukan Tentara Sekutu terhadap kenetralan Portugis benar-benar diperlukan untuk menangkal serangan Jepang, atau apakah kehadiran Australia di Timor Portugis justru telah memancing militer Jepang ke wilayah yang sebetulnya tidak akan diserangnya.<sup>12</sup>

24. Dampak perang tersebut terhadap rakyat Timor sungguh membinasakan. 40.000 dan 60.000 penduduk Timor dilaporkan meninggal.<sup>13</sup> Banyak yang dibunuh dan disiksa oleh tentara Jepang karena dicurigai membantu gerilyawan Australia. Perbudakan seksual terhadap perempuan Timor yang dilakukan oleh para tentara Jepang banyak terjadi. Selain itu, wilayah ini menjadi miskin akibat perang tersebut, dan benih perpecahan tersebar antara mereka yang mendukung Jepang dan mereka yang mendukung pasukan kecil gerilya Australia. Komisi mendengar kesaksian mengenai dampak berkepanjangan dari konflik ini terhadap masyarakat Timor

---

\* SAPT dijalankan oleh perusahaan kontraktor Brasil yang bernama Moniz da Maia Serra e Fortunato.

dalam audiensi publik mengenai konflik internal 1974 - 1976.<sup>14</sup> Tidak pernah ada penyelidikan internasional mengenai berbagai kejahatan perang yang dilakukan oleh kedua negara yang menduduki, dan tidak pernah ada reparasi perang kepada orang-orang Timor.<sup>15</sup>

## Gerakan internasional untuk dekolonisasi dan posisi Portugal

25. Pasal 73 dalam Piagam PBB 1945 menyerukan kepada negara-negara penjajah untuk memberikan perhatian serius kepada berbagai aspirasi negara-negara jajahannya dan secara bertahap memberikan otonomi. Kesepakatan internasional ini terus berkembang sejalan dengan sebagian besar penjajah memberikan kemerdekaan kepada wilayah-wilayah jajahannya setelah Perang Dunia Kedua, dan diungkapkan melalui berbagai mekanisme seperti Sidang Umum PBB yang pada 1960 mengakui penjajahan sebagai pengingkaran terhadap hak-hak asasi manusia.\* Pada 1960, Timor Portugis dicantumkan sebagai Wilayah Tidak Berpemerintahan Sendiri dalam Komite Khusus PBB untuk Dekolonisasi, yang mengakui hak penentuan nasib sendiri rakyat Timor, yang tetap relevan sampai Jajak Pendapat yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1999.

26. Menanggapi kesepakatan internasional yang semakin berkembang mengenai pentingnya dekolonisasi ini, Portugal menamai ulang wilayah-wilayah jajahannya sebagai 'provinsi seberang lautan' pada 1951. Hal itu merupakan langkah paternalistik yang dirancang untuk "memberadabkan" rakyat jajahannya dan meredam kritik, namun tidak mengubah banyak. Hal ini khususnya terjadi di Timor Portugis, yang tetap sangat terisolasi. Tidak pernah ada gerakan kemerdekaan seperti yang terjadi di wilayah jajahan Portugal di Afrika. Sebaliknya, kehidupan orang-orang Timor-Leste pada 1950-an masih jauh dari beradab. Pastor Martinho da Costa Lopes mengatakan bahwa selama 400 tahun penjajahan Portugis tidak satu pun pengacara, insinyur, atau dokter lahir di Timor.<sup>16</sup> Sangat sedikit orang pribumi Timor yang menikmati hak yang sama dengan penjajahnya, dan terus diperlakukan dengan buruk dan hak atas kepemilikan mereka terus dilanggar oleh Portugal.<sup>17</sup> Dalam suatu kesempatan, Uskup Carlos Belo membicarakan tentang hal ini:

Saya sering melihat orang Portugis mengambil tuak dari penduduk asli yang sebenarnya untuk dijual, tanpa membayar, padahal orang pribumi itu sudah berjalan jauh ke pasar untuk menjual tuaknya dan berharap mendapatkan sedikit uang untuk dibawa kembali ke desanya. Mereka ditindas, tapi tidak membela dirinya. Setiap kali saya melihat hal ini hati saya sakit dan saya menangis di dalam hati. Tetapi saya tidak bisa berbuat apa-apa.<sup>18</sup>

\* Resolusi Sidang Umum PBB 1514 (XV), 1960: "Deklarasi Pemberian Kemerdekaan kepada Negara-negara dan Rakyat Jajahan."

27. Meskipun penggunaan pecut dan pentungan dilarang oleh Portugal pada 1956, kebiasaan mencambuk terus terjadi.<sup>19</sup> Xanana Gusmão pernah mengatakan:

Saya melihat tahanan dicambuk di pos-pos [pemerintah]. Mereka mengerang kesakitan karena dipaksa berdiri di batu karang yang panas karena terik matahari, dengan kaki yang dirantai. Kadang-kadang ketika saya jalan-jalan dengan teman-teman sekolah—anak-anak *liurai*—saya juga melihat pejabat atau orang lokal dikirim dalam kelompok-kelompok atau kembali dengan orang-orang yang bersimbah darah, karena mereka tidak datang untuk kerja paksa membangun jalan, atau bekerja sebagai *asu-lear* [sic] [buruh] di lahan para penjajah, orang Cina, atau orang Timor yang sudah bercampur.<sup>20</sup>

28. Pada 1959, sekelompok orang Indonesia yang diasingkan terlibat dalam suatu pemberontakan di Viqueque melawan pemerintahan kolonial Portugis. Portugal mengetahui rencana tersebut dan menghancurkannya dengan bengis, mengakibatkan pertumpahan darah hebat. Latar belakang dari berbagai peristiwa tersebut sampai sekarang sebagian besar tetap tidak diketahui. Sebuah laporan resmi Portugis dari masa itu menyalahkan Indonesia atas terjadinya pemberontakan tetapi masih belum pasti apakah memang demikian kejadiannya. Setelah berbagai peristiwa tersebut, pada 1959, pemerintah Portugis membuka cabang polisi rahasia (*Polícia Internacional e de Defesa do Estado*, PIDE) di Dili untuk memonitor kegiatan Indonesia dan sentimen anti Portugis.<sup>21</sup>

## Rencana pembangunan Portugis dan berkembangnya sentimen anti-penjajah

29. Pada 1953, pemerintah pusat Portugal mulai menjalankan serangkaian rencana pembangunan<sup>\*</sup> untuk menghidupkan kembali ekonomi dalam negerinya yang stagnan. Di Timor Portugis rencana ini mencakup meningkatkan produksi dan ekspor kopi, eksplorasi pertambangan, dan pembangunan pariwisata di Timor Portugis. Perbaikan infrastruktur mencakup pembangunan jalan, perbaikan pelabuhan Dili dan pelabuhan udara Baucau, serta listrik dan sistem air bersih di Dili.<sup>22</sup> Pada 1975, terdapat 17 atau 18 dokter yang bekerja di rumah sakit Dili dan berbagai klinik di daerah.<sup>23</sup>

30. Namun, kesempatan penduduk Timor-Leste untuk memperoleh pendidikan tetap terbatas selama masa penjajahan Portugis. Anak-anak *liurai* mulai dapat merasakan pendidikan dasar pada 1860, kemudian pada 1904 para Yesuit membuka sekolah misionaris di Soibada dan menjadi tempat pembelajaran penting untuk rakyat Timor dari seluruh wilayah negeri.<sup>†</sup> Meski demikian, pendidikan ala Barat

\* *Plano de Fomento*.

† Sekolah-sekolah tersebut, Colégio Nuno Alveres Pereira (untuk laki-laki) dan Imaculada da Conceição (untuk perempuan), mengadakan perayaan 100 tahunnya pada 2004.

masih merupakan hak eksklusif warga negara Portugis dengan sedikit pengecualian. Pada 1964, hanya sepuluh orang Timor yang memiliki gelar.<sup>24</sup> Menurut data statistik Portugis, antara 1950 dan 1970, pendaftaran di pendidikan dasar meningkat sepuluh kali lipat, dari 3.249 menjadi 32.937.<sup>25</sup> Sensus 1970 menunjukkan sekitar 10 persen penduduk yang bisa baca tulis di wilayah koloni ini.<sup>26</sup> Pada waktu itu pemerintah Portugis telah membangun sekolah menengah di Dili, *Liceu* Dr. Francisco Machado, dengan 767 murid.<sup>26</sup> Renungan mengenai terbatasnya kesempatan atas pendidikan di negeri ini terlihat dari kenyataan bahwa para pelopor utama gerakan kemerdekaan Timor-Leste sebagian besar adalah didikan seminari.

31. Semakin menyadari ketimpangan yang terjadi, suatu generasi baru orang-orang Timor-Leste yang terpolitisasi juga merasa frustrasi dengan ketiadaan sarana politik untuk menyalurkan aspirasi rakyat Timor. Orang-orang Timor mempunyai peran yang kecil dalam mengatur urusan wilayah jajahan ini. Gubernur provinsi ini mewakili pemerintah Portugis, bukan mewakili rakyat Timor, dan memegang kekuasaan eksekutif yang luas. Meskipun terdapat Dewan Legislatif yang beranggotakan 11 orang, hanya tiga orang wakil yang dipilih. Dewan tidak mungkin dapat mewakili aspirasi rakyat, dan hanya memiliki kewenangan yang terbatas.<sup>27</sup> Meskipun ada resolusi PBB yang mendesak Portugal untuk memberikan kebebasan politik kepada wilayah-wilayah jajahannya,<sup>28</sup> rezim Salazar dan kemudian Caetano mengingkari demokrasi bagi warga negaranya sendiri, apalagi bagi rakyat jajahannya. Keadaan ini baru berubah seiring naiknya Jenderal Spínola ke tampuk kekuasaan setelah Revolusi Anyelir pada 25 April 1974.

## Perubahan di Portugal dan proses dekolonisasi

### Tinjauan

32. Gerakan pembebasan nasional dasawarsa 1960-an di berbagai koloni Portugal di Afrika berubah menjadi perjuangan bersenjata untuk mencapai kemerdekaan. Terpaksa terlibat secara serempak dalam beberapa perang terpisah di sejumlah wilayah yang berjauhan, Portugal, negara kecil yang relatif miskin, mengalami tekanan politik dan ekonomi yang luarbiasa pada saat negara ini semakin mengandalkan Eropa untuk masa depan ekonominya. Pada 1968, setelah 40 tahun berkuasa, Perdana Menteri Salazar yang otoriter digantikan oleh Marcelo Caetano, yang gagal menemukan jalan keluar bagi berbagai konflik bersenjata yang semakin menguras dana tersebut. Putus asa dengan berbagai kegagalan ini, Gerakan Angkatan Bersenjata (*Movimento das Forças Armadas*, MFA) muncul dalam tubuh militer dan pada 25 April 1974 memimpin kudeta yang berhasil menggulingkan rezim Caetano tanpa pertumpahan darah, yang dikenal dengan nama Revolusi Anyelir. Meskipun MFA telah membuka jalan untuk dekolonisasi, MFA juga menyebabkan terjadinya pergolakan politik di Portugal selama beberapa tahun. Kekacauan ini dan tersitanya

---

\* Persentase buta huruf di Dili adalah 14% dan di kota-kota distrik lain 45%.

perhatian Portugal pada wilayah jajahannya yang lebih besar di Afrika, merupakan faktor penting penyebab kegagalan Portugal untuk memberikan perhatian yang layak kepada dekolonisasi di wilayah jajahannya yang paling jauh, Timor.

## MFA dan Revolusi Anyelir

33. Pada awal dasawarsa 1960-an, gerakan kemerdekaan di wilayah-wilayah jajahan Portugal di Afrika mulai melakukan perjuangan bersenjata. MPLA (*Movimento Popular de Libertação de Angola*) di Angola mengangkat senjata pada 1961, diikuti oleh PAIGC (*Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde*) di Guinea Bissau pada 1963 dan Frelimo (*Frente de Libertação de Moçambique*) di Mozambik pada 1964. Goa, koloni Portugis, “dibebaskan” oleh pasukan India pada 1961.<sup>29</sup> Memerangi tiga perang sekaligus sangat membebani Portugal secara keuangan dan militer. Pada saat yang sama, setelah bergabung dengan Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa (*European Free Trade Association*, EFTA) pada 1961, Portugal menjadi semakin terikat dengan Eropa dalam hal ekonomi dengan akibat terlantarnya wilayah-wilayah jajahannya di Afrika. Pada awal 1970-an, berbagai kebijakan ekonomi proteksionis yang dirancang untuk membantu mengembangkan perdagangan dan investasi dengan wilayah-wilayah jajahannya tidak lagi sesuai dengan kepentingan para konglomerat Portugis yang perhatiannya semakin mengarah ke Eropa.

34. Karena telah hilang kepercayaannya pada kemampuan Salazar, kemudian pada Caetano untuk menemukan pemecahan atas perang di Afrika, angkatan bersenjata berpaling pada Jenderal António Spínola, yang adalah rekan dekat Caetano. António Spínola pernah mengusulkan sebuah program reformasi, yang ditolak oleh Caetano. Untuk menyebarluaskan gagasan-gagasannya, Spínola menerbitkan sebuah buku berjudul *Portugal and its Future* (Portugal dan Masa Depan), yang mengusulkan penyelesaian atas perang kolonial melalui Jajak Pendapat tentang hubungan federasi dengan Portugal. Ketika MFA berdiri pada 5 Maret 1974, gerakan tersebut memilih Jenderal Spínola sebagai pemimpinnya, dan pada waktu MFA meluncurkan Revolusi Anyelir pada 25 April 1974, Spínola dipilih oleh gerakan tersebut sebagai presiden.

## Dekolonisasi yang cepat, kekacauan di Portugal

35. Meskipun Revolusi Anyelir pada awalnya berjalan mulus di Portugal, bulan-bulan dan tahun-tahun setelahnya merupakan masa ketidakstabilan politik, saat beberapa pemerintahan minoritas berturut-turut terbentuk, dan runtuh, sampai Partai Sosialis berkuasa pada 1982. Ketidakstabilan ini membatasi kemampuan Portugal untuk secara efektif menangani berbagai peristiwa yang terjadi di Timor. Dengan destabilisasi aktif yang dilancarkan oleh Indonesia, Pemerintah Portugal tidak mampu menjalankan proses dekolonisasi.

36. Pada April 1974, MFA segera membentuk Dewan Penyelamat Nasional (*Junta de Salvação Nacional*, JSN) dan mengangkat Spínola sebagai pemimpinnya. Manifesto JSN mengusulkan demokratisasi di dalam negeri Portugal, termasuk pembubaran polisi rahasia, dan pembebasan para tahanan politik. Mengenai masalah kolonial,

Manifesto JSN secara samar menyerukan pemecahan politis melalui debat nasional yang mengarah pada suatu pemecahan secara damai,<sup>30</sup> namun menghindari penyebutan penentuan nasib sendiri dan otonomi.<sup>31</sup> Presiden Spínola membentuk pemerintahan sementara yang baru pada 15 Mei 1974, dengan Adelino de Palma Carlos sebagai Perdana Menteri. Pada hari yang sama, pemerintahan tersebut mengeluarkan Dekrit No. 203/1974, yang mengemukakan kebijakan dekolonisasi. Dekrit tersebut mengikat pemerintah untuk melakukan penyelesaian politik berdasarkan prinsip penentuan nasib sendiri.<sup>32</sup>

37. Solusi federal Spínola tidak memperoleh dukungan yang berarti. Di Portugal, opini publik semakin condong memilih mundur dari wilayah-wilayah jajahan mereka. Sadar akan keunggulan militer mereka atas militer Portugis yang terkepung, wilayah jajahan Guinea-Bissau dan Mozambik tidak berniat untuk melakukan kompromi mengenai tuntutan mereka untuk merdeka. Beberapa anggota kabinet yang berpengaruh, termasuk Menteri Luar Negeri dan Ketua Partai Sosialis, Mario Soares, juga memilih kemerdekaan sebagai jalan keluar.

38. Pada pertengahan 1974, bahkan dalam tubuh MFA sendiri dukungan untuk federasi semakin melemah, dan penarikan secepatnya menjadi opsi militer yang lebih disukai. Berbagai tekanan ini berbuntut pengunduran diri Adelino de Palma Carlos sebagai Perdana Menteri, dan penggantinya oleh Vasco Gonçalves. Pada 27 Juli, pemerintahan yang baru mengeluarkan Undang-Undang No. 7/1974, mengakui kemerdekaan sebagai hasil yang bisa diterima dalam proses penentuan nasib sendiri di wilayah-wilayah jajahan Portugal.<sup>33</sup> Pergeseran kebijakan ini berbuntut pengunduran diri Spínola pada September 1974. Dalam waktu satu tahun, lima wilayah jajahan Portugal di Afrika telah meraih kemerdekaan.

39. Setelah mengambil alih kekuasaan pada April 1974, MFA telah melakukan pembersihan terhadap unsur-unsur yang mereka anggap reaksioner dalam pemerintahan sipil Portugis. MFA dengan cepat mengganti semua gubernur di wilayah-wilayah jajahannya di Afrika, tapi lebih lambat dalam melakukan tindakan yang sama di Timor Portugis. Meskipun dia telah membuat pidato yang mengkritik MFA atas radikalismenya, hanya dua hari sebelum 25 April, Gubernur Timor Portugis, Alves Aldeia, tetap menduduki jabatannya hingga tiga bulan kemudian. Perhatian Portugal pada waktu itu dan yang mengakibatkan terlantarnya Timor dirangkul oleh Gubernur Portugis terakhir untuk Timor, Mayor Jenderal Mário Lemos Pires, dalam kesaksian yang ia berikan kepada Komisi:

*Bangsa Portugis yang muncul dari revolusi tersebut adalah bangsa yang lemah, tidak terpadu, dengan segala kesulitan dan tanpa kredibilitas di antara para mantan sekutu [Barat]-nya. Bangsa ini sangat khawatir tentang revolusinya dan berupaya untuk mencapai stabilitas politik, mengurus warga negaranya yang datang dari Afrika, dan dengan tegas memutuskan untuk mengakhiri perang di negara-negara Afrika... Apa yang orang Portugis pikir tentang Timor-Leste pada tahun 1974, setelah revolusi? Nihil, tidak banyak, sedikit. Nihil. Pikiran mereka adalah tentang revolusi dan keluarga mereka di wilayah-wilayah Afrika.<sup>34</sup>*

## Dampak Revolusi Anyelir di Timor Portugis

40. Di Timor, berita tentang Revolusi Anyelir disambut dengan perasaan yang campur aduk antara kegembiraan dan kekhawatiran. Komisi mendengarkan kesaksian dari berbagai tokoh Timor dalam audiensinya mengenai Konflik Politik Internal tahun 1974 - 1976. Mereka mengisahkan tentang kegembiraan yang ditimbulkan oleh berbagai peristiwa di Lisabon dan berbagai wilayah jajahan lainnya di kalangan orang-orang muda yang tertarik politik. Tapi, pada umumnya mereka juga setuju bahwa sejarah Timor-Leste tak cukup mempersiapkan masyarakatnya untuk terlibat dalam kegiatan politik.<sup>35</sup>

41. Pada awal Mei 1974, ketika Gubernur Alves Aldeia bertanya kepada JSN di Lisabon untuk menjelaskan kebijakan kolonialnya yang baru, ia diinstruksikan untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip program MFA dan, dengan mempertimbangkan berbagai kondisi setempat, berupaya untuk tidak memperburuk hubungan dengan Indonesia.

42. Pada 13 Mei Alves Aldeia membentuk Komisi Timor untuk Penentuan Nasib Sendiri yang, antara lain, mendorong terbentuknya serikat-serikat sipil.<sup>36</sup> Pada akhir Mei, Mayor Arnão Metello, kepala staf militer setempat, ditunjuk sebagai perwakilan MFA di koloni tersebut.<sup>37</sup>

43. Bertolak belakang dengan sikapnya terhadap wilayah-wilayah jajahannya di Afrika, Pemerintah Portugis cenderung menganggap kemerdekaan Timor Portugis tidak realistis. Pada 3 Agustus 1974, Menteri Koordinator Antar-Wilayah, Antonio de Almeida Santos, berkeberatan dengan kemerdekaan penuh Timor Portugis, dan menyatakan federasi sebagai pilihan yang paling realistis.<sup>38</sup> Pendapat ini memicu reaksi keras dari serikat-serikat politik orang-orang Timor yang baru terbentuk, UDT (União Democrática Timorense, Uni Demokratik Timor) dan Fretilin.\* Tapi pada hari yang sama, pemerintah Portugis mengajukan memorandum kepada Sekretaris Jenderal PBB yang mengakui hak penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan semua wilayah di bawah kekuasaannya, posisi yang dikuatkan kembali dua bulan kemudian oleh Menteri Luar Negeri Portugal, Mário Soares, di hadapan Sidang Umum PBB.<sup>39</sup> Hak penentuan nasib sendiri untuk semua wilayah jajahan juga dicantumkan sebagai suatu kewajiban bagi negara Portugal dalam konstitusi 1975. Ketentuan ini terbukti menjadi penting dalam melanjutkan komitmen resmi Portugal atas penentuan nasib sendiri rakyat Timor-Leste dalam tahun-tahun selanjutnya yang berat.

## Pembentukan partai-partai politik di Timor Portugis

44. Komisi mendengarkan kesaksian yang menggambarkan bagaimana Revolusi Anyelir segera menggelorakan perhatian rakyat Timor mengenai masa depan

\* Domingos Oliveira, mantan Sekjen UDT, memberi kesaksian tentang perasaan marah rakyat Timor dengan pernyataan ini, di Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Politik Internal 1974 - 1976, 15 - 18 Desember 2003.



politik wilayah tersebut. Domingos de Oliveira, yang menjadi Sekretaris Jenderal UDT pada masa itu, menggambarkan fenomena tersebut:

*Sebelum 25 April di Timor, kita biasa bicara tentang pacar-pacar kita, sepak bola, dan hal-hal semacam itu di kafe dan restoran, sambil minum bir dan bertemu teman-teman. Setelah 25 April, kita hanya bicara tentang konsekuensi 25 April. Apa yang harus kita sebagai orang Timor lakukan? Apa yang semestinya dilakukan dalam situasi baru seperti ini?<sup>40</sup>*

45. Di Dili, orang-orang Timor yang tertarik politik mulai memikirkan pembentukan serikat-serikat politik, dan mengadakan berbagai pertemuan untuk membahas prinsip-prinsip dan asasnya. Begitu terbentuk, serikat-serikat tersebut secara efektif berfungsi sebagai partai-partai politik, meskipun secara teknis partai-partai politik masih dilarang beroperasi.<sup>41</sup>

46. Serikat yang pertama terbentuk adalah Uni Demokratik Timor (*União Democrática Timorense*, UDT), yang didirikan pada 11 Mei 1974. Para pendirinya cenderung konservatif secara politik dan banyak di antaranya memiliki hubungan dengan penguasa kolonial Portugis, yang mencerminkan keistimewaan status dan fungsi sosial mereka sebagai perantara antara orang-orang Timor dan penjajah Portugis. Presiden pertama UDT adalah Francisco Lopes da Cruz. Para pendiri yang lain yaitu César Augusto da Costa Mouzinho sebagai Wakil Presiden; Carrascalão bersaudara, Manuel Carrascalão, Mario Carrascalão, dan João Carrascalão; serta Domingos de Oliveira, Sekretaris Jenderal serikat tersebut. Manifesto awal UDT mengusulkan 'otonomi progresif' di bawah Portugal, meskipun UDT juga mendukung hak untuk penentuan nasib sendiri. UDT mengumumkan perubahan posisinya pada 1 Agustus 1974 ketika menyatakan bahwa tujuan akhirnya adalah kemerdekaan setelah satu periode federasi dengan Portugal. UDT juga secara spesifik menolak integrasi dengan negara lain.<sup>42</sup> Pergeseran UDT menunjukkan partai ini bisa berubah-ubah, dalam hal ini menanggapi perubahan dalam tatanan politik di Portugal dan kenyataan bahwa nasionalisme merupakan kekuatan yang semakin berkembang di dalam Timor.

47. Sembilan hari setelah berdirinya UDT, pada 20 Mei, Asosiasi Sosial Demokratik Timor (*Associação Social Democrata de Timor*, ASDT) didirikan. Para pendiri ASDT sebagian besar adalah pemuda Timor yang terpelajar, dari beragam latar belakang; beberapa dari dalam pemerintahan Portugis, yang lain dari kelompok bawahtanah antipenjajah pada awal 1970-an. Karena lebih tua dan lebih dikenal ketimbang para pendiri asosiasi yang berusia muda, Francisco Xavier do Amaral diangkat sebagai Presiden. Para tokoh kunci yang lain termasuk Mari Alkatiri, José Ramos-Horta, Nicolau Lobato, dan Justino Mota. ASDT menerbitkan manifestonya pada 22 Mei, yang menegaskan hak untuk merdeka serta sikap antipenjajahan dan nasionalisnya. Asosiasi itu juga menyatakan komitmennya untuk suatu kebijakan "bertetangga baik" dengan negara-negara kawasan ini tanpa merugikan kepentingan rakyat Timor.

48. Serikat ketiga yang terbentuk adalah Asosiasi Rakyat Demokratik Timor (*Associação Popular Democrática Timorense*, Apodeti), yang didirikan pada 27 Mei. Rencana awalnya adalah menamakan serikat tersebut 'Asosiasi untuk Integrasi Timor dengan Indonesia', namun meskipun nama ini secara lugas dapat menjabarkan tujuan utama Apodeti, nama itu tampaknya dianggap terlalu transparan. Presiden pendiri asosiasi ini adalah Arnaldo dos Reis Araújo, tapi ahli strateginya adalah José Fernando Osorio Soares, yang keluar dari ASDT untuk menjadi Sekretaris Jenderal Apodeti. Tokoh penting lain adalah pemilik perkebunan kopi, Hermenegildo Martins. *Liurai* Atsabe, Guilherme Maria Gonçalves, bergabung dengan Apodeti tidak lama setelah pembentukannya, dengan membawa pendukung yang berasal dari basis kekuasaan regionalnya. Konsul Indonesia di Dili, Elias Tomodok, menjadi penghubung penting untuk saran dan dukungan keuangan bagi Apodeti selama periode 1974 - 1975.<sup>43</sup> Manifesto Apodeti menyatakan tujuan integrasi yang bersifat otonom dengan Indonesia, sesuai hukum internasional, meskipun hal ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Indonesia. Senada dengan dua partai besar yang lain, Apodeti mengutuk sejumlah keburukan dalam pemerintahan Portugis seperti korupsi dan diskriminasi, dan juga berjanji akan menghormati hak-hak asasi manusia dan kebebasan individu.

49. Tiga partai politik yang lebih kecil didirikan beberapa waktu setelah tiga partai politik yang pertama. José Martins, salah satu pendiri Apodeti, keluar dari Apodeti dan mendirikan sebuah partai para monarki (*liurai*), Perkumpulan Kesatria Putra Timor (*Klibur Oan Timor Aswain*, KOTA) pada 20 November 1974.<sup>44</sup> Martins sempat dikenal berkarier sebagai propagandis untuk pendudukan Indonesia, dan seorang kolaborator utama bagi intelijen Indonesia (Bakin) pada 1975. Partai Buruh (*Trabalhista*), didirikan pada September 1974 dan mempunyai tujuan kemerdekaan melalui federasi transisi dengan Portugal.<sup>45</sup> Partai yang ketiga, Asosiasi Demokratik untuk Integrasi Timor-Leste dengan Australia (*Aditla*), mengajukan bergabung dengan Australia, tetapi menghilang begitu Australia menolaknya pada Maret 1975.<sup>46</sup>

50. Segera menjadi jelas bahwa UDT dan ASDT adalah dua partai yang memiliki dukungan rakyat di wilayah Timor-Leste.

## Suasana internasional dan kebijakan Indonesia terhadap Timor Portugis

### Tinjauan

51. Kesempatan dekolonisasi Timor Portugis muncul pada saat yang penting dalam Perang Dingin. Kemenangan Vietnam Utara di Vietnam pada April 1975 dan runtuhnya pemerintahan pro-Amerika Serikat yang hampir bersamaan di negara-negara Indocina lainnya, yakni Kamboja dan Laos, mengobarkan ketakutan di antara pembuat kebijakan Barat dan sekutu Asia mereka bahwa negara-negara di kawasan Asia Tenggara lainnya juga rentan dan bahwa penyebaran komunisme

perlu dibendung dengan cara apapun. Dalam suasana seperti ini, Amerika Serikat dan sekutunya memandang Indonesia sebagai komponen yang penting dari strategi pasca-Vietnamnya untuk mencegah penyebaran komunisme lebih lanjut. Pada saat yang hampir bersamaan, Revolusi Anyelir menciptakan situasi politik yang sangat tak terkendali di Portugal, yang hasilnya mungkin akan memberi kemenangan kepada pihak kiri dan kekalahan berikutnya bagi pihak Barat.

52. Selain dukungan yang dinikmati sebagai akibat dari citranya yang antikomunisme, Indonesia juga berada dalam posisi untuk mengambil keuntungan dari statusnya sebagai pendiri Gerakan Non-Blok, hubungannya dengan negara-negara Islam lainnya melalui Organisasi Konferensi Islam, dan sebagai negara terbesar di Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nations, atau ASEAN). Dukungan luas Indonesia, keengganan Portugal untuk menginternasionalkan persoalan, dan ketidakpedulian yang luas tentang nasib wilayah yang dipandang sebagai sisa kekuatan kolonial minor, semuanya menjadi faktor pemberat melawan peran aktif PBB atas persoalan Timor-Leste. Semua faktor ini memberi keuntungan bagi Indonesia dalam kampanyenya untuk menggalang dukungan bagi kebijakannya mengenai Timor-Leste.

## **Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Timor Portugis**

53. Selama 1975, Perang Dingin antara Timur dan Barat mencapai titik kritis, terutama karena perkembangan di Asia Tenggara. Pada April 1975, dua tahun setelah penarikan mundur pasukan AS dari Vietnam, Saigon jatuh ke tangan Vietnam Utara yang komunis. Pergeseran perimbangan kekuatan ini memengaruhi bangsa-bangsa besar dan kecil, serta memiliki dampak mendalam kepada apa yang terjadi di Timor Portugis.<sup>47</sup> Perang Dingin memberikan efek yang cukup mencekik di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada masa ini. Blok-blok kekuatan utama di dunia sering kali melumpuhkan lembaga-lembaga utamanya, seperti Dewan Keamanan. Salah satu ciri dalam krisis yang tengah berkembang di Timor Portugis selama 1974 - 1975 adalah kegagalan untuk menginternasionalisasikan persoalan ini dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa. Portugal melakukan serangkaian negosiasi bilateral dengan Indonesia, dan walaupun dalam negosiasi-negosiasi Portugal pernah menggunakan ancaman "internasionalisasi" sebagai senjata dalam tawar-menawarnya, pada praktiknya Portugal hanya menggunakan opsi ini ketika sudah amat terlambat dan secara efektif tidak mampu untuk memengaruhi situasi.<sup>48</sup>

54. Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertugas untuk mengawasi dekolonisasi, Komite Khusus PBB untuk Dekolonisasi, disibukkan dengan keadaan di berbagai koloni Portugal di Afrika, dan tidak banyak memberi perhatian kepada Timor Portugis. Pada Juni 1975, Komite Khusus PBB untuk Dekolonisasi membahas Timor Portugis dan menganjurkan pencapaian tujuan-tujuan Piagam PBB mengenai Deklarasi Kemerdekaan bagi Negara dan Bangsa Kolonial. Walau telah diminta untuk menilai situasi di lapangan, Komite ini tidak melakukannya.<sup>49</sup> Kurangnya perhatian atas Timor Portugis ini pada 1974 - 1975 berarti bahwa ketika perang saudara pecah pada Agustus 1975, dan ketika kegiatan terselubung

Indonesia berubah menjadi operasi militer besar-besaran pada Oktober - November 1975, Perserikatan Bangsa-Bangsa relatif tidak menyadari akan situasi di wilayah ini. Kurangnya keterlibatan Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan kesempatan yang hilang untuk menghindari kekerasan dan pengambilalihan kekuasaan militer wilayah Timor Portugis oleh Indonesia (lihat Bab 7.1: Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri).

## Indonesia dan masyarakat internasional

55. Dengan penduduk yang mendekati 165 juta pada pertengahan 1970-an, Indonesia merupakan negara yang paling banyak penduduknya di Asia Tenggara. Di bawah Presiden Soeharto, Indonesia mengutamakan pembangunan ekonominya yang kaya sumberdaya. Setelah kekacauan pada tahun-tahun terakhir kekuasaan Sukarno, baik negara-negara Barat maupun negara-negara tetangganya memandang perubahan di Indonesia secara positif. Selain itu, status Indonesia sebagai negara pendiri Gerakan Non-Blok<sup>\*</sup> membuat Indonesia dapat menggali dukungan yang besar dari kelompok negara-negara ini. Selain itu Indonesia adalah juga negara terbesar dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI), dan dapat mengandalkan dukungan sebagian besar negara-negara Islam. Dukungan luas bagi Indonesia adalah salah satu faktor bagi tidak adanya upaya serius untuk mencegah tindakan-tindakan agresifnya di Timor Portugis, termasuk dalam forum PBB.

56. Walaupun secara resmi nonblok, rezim Soeharto yang antikomunis berarti bahwa Indonesia lebih condong ke kubu Barat yang menawarkan kesempatan perdagangan dan investasi yang besar.<sup>50</sup> Rezim Orde Baru Presiden Soeharto telah membuktikan citra antikomunismenya kepada Amerika Serikat dengan memberantas Partai Komunis Indonesia (PKI) setelah kekacauan pada 1965 - 1966. Pada tahun-tahun itu, ABRI memimpin dalam penumpasan PKI, membunuh sampai satu juta anggota dan pendukungnya, dan memenjarakan lebih daripada satu juta orang lainnya.<sup>51</sup> Orde Baru melarang Komunisme, membekukan hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Cina, dan mengukuhkan diri dengan mantap di kubu Barat. Indonesia mengupayakan investasi dan bantuan ekonomi dari teman-teman Baratnya.

57. Selain menempatkan dirinya dengan Blok Barat, Indonesia juga memperbaiki hubungannya dengan negara-negara antikomunis di kawasan Asia Tenggara seperti Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Pada 1967, Indonesia bergabung dengan negara-negara ini untuk membentuk Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN), untuk memerangi penyebaran Komunisme di kawasan tersebut, khususnya dari Vietnam Utara dan Republik Rakyat Cina. Indonesia takut bahwa komunisme akan menyusup ke negaranya dan membangkitkan kembali unsur-unsur komunisme yang laten. Karena itu, bahkan dengan semakin meningkatnya tekanan

\* Gerakan Non-Blok terdiri atas lebih daripada 100 negara yang menganggap diri mereka tidak beraliansi dengan blok kekuatan utama, yang dalam konteks perang dingin pada saat pendiriannya berarti blok kapitalis dan komunis. Indonesia menjadi tuan rumah pendiriannya pada 1955.

internasional, Soeharto belum siap untuk membebaskan ratusan ribu tahanan yang ditangkap menyusul kudeta 1965.

58. Dalam dasawarsa sejak 1965, Orde Baru tidak pernah surut dalam semangat antikomunismenya di dalam negeri. Selama 1965 – 1966, antara 250 ribu dan satu juta anggota dan pengikut PKI terbunuh, dan satu juta orang lainnya atau lebih dipenjara. Namun, antikomunisme memang merupakan unsur penting tetapi bukan satu-satunya tolok ukur loyalitas dalam rezim tersebut. Di bawah Orde Baru Soeharto, batasan perdebatan politik menjadi sangat sempit, dan didefinisikan tidak hanya oleh perasaan antikomunisme rezim tersebut, tetapi juga oleh ketidaksukaannya kepada politik pluralis pada umumnya. Berbagai aturan baru ditetapkan oleh struktur otoriter yang didominasi oleh militer.<sup>52</sup> Pada masa ketika persepsi Barat mengenai Asia Tenggara dicirikan oleh ketakutan bahwa negara-negara lainnya di wilayah tersebut adalah bagaikan sederetan domino yang berisiko mengikuti contoh Indocina dan jatuh ke kubu Komunis, pihak Barat bersedia mengabaikan represi yang menjadi andalan Orde Baru, asalkan Indonesia terus menjadi benteng dalam mencegah penyebaran komunisme.

59. Banyak negara Barat dan sekutunya di Asia berpandangan sama seperti Soeharto bahwa Timor Portugis sebaiknya disatukan dengan Indonesia, baik karena mereka memiliki asumsi strategis yang sama dan pola pikir antikomunisme yang mendasarinya, maupun hanya karena mereka tidak ingin mengasingkan Jakarta. Pola pikir ini terangkum dalam saran dari Duta Besar Inggris, Sir Archibald Ford, ke London:

Bahkan tanpa intervensi Soviet atau Cina, wilayah tersebut dapat menjadi “anak bermasalah” [di kawasan ini]... Bagi Inggris, lebih baik jika Indonesia mengintegrasikan wilayah tersebut... Dan jika ada krisis dan perdebatan di PBB, kita semua harus diam dan tidak mengambil posisi yang menentang Indonesia.<sup>53</sup>

60. Indonesia juga dapat mengandalkan dukungan negara-negara Asia yang nonkomunis. Walaupun terdapat perbedaan dalam tingkat dukungan yang siap mereka berikan, anggota-anggota ASEAN siap memberikan dukungan luas kepada Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara. Di dalam ASEAN sendiri terdapat bermacam pandangan mengenai kebijakan Indonesia terhadap Timor Portugis, mulai dari pandangan Singapura, yang sebagai negara pulau kecil dengan budaya tersendiri memandang dirinya seperti Israel di Asia Tenggara dan ragu mengenai niat Indonesia, sampai Malaysia, yang menjadi pendukung terbesar Jakarta.

61. Persekutuan dalam Perang Dingin bukan satu-satunya alasan mengapa berbagai negara di kawasan tersebut mendukung Indonesia. Jepang memiliki kepentingan ekonomi yang besar di Indonesia, dan menjadi semakin bergantung pada minyak dan gas alam Indonesia untuk mendorong ekonomi Jepang yang tengah berkembang pesat. Kebijakan Australia mengenai Timor Portugis didasarkan pada keinginannya untuk membentuk kembali kebijakan luar negerinya secara keseluruhan dengan

memberi warna regional dan khususnya memperbaiki hubungannya dengan Indonesia. Perdana Menteri Australia, Gough Whitlam, berpandangan sama dengan Indonesia bahwa Timor-Leste yang merdeka bukanlah opsi yang baik dan diberi tahu bahwa aneksasi Timor Portugis sudah menjadi kebijakan Indonesia yang “tetap”. Apapun niat dia sebenarnya, dalam kedua pertemuannya dengan Presiden Soeharto pada 1974 - 1975, Whitlam memberi Presiden Soeharto kesan yang kuat bahwa ia melihat perlunya pengambilalihan oleh Indonesia, bahkan meski mengakui pentingnya menegaskan prinsip penentuan nasib sendiri.

## Kebijakan Indonesia terhadap Timor Portugis

62. Selama tahun-tahun awal pembentukan negara Indonesia, sejumlah orang nasionalis Indonesia memimpikan terciptanya Indonesia Raya seperti yang pernah dicapai pada masa keemasan ketika Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit menguasai kawasan kepulauan ini. Walau tidak ada dasar historisnya, Indonesia Raya akan mencakup wilayah Malaysia dan Filipina, serta Timor Portugis. Republik Indonesia tidak pernah bermaksud untuk mewujudkan Indonesia Raya. Justru sebaliknya, ketika hendak menggalang pengakuan internasional di akhir dasawarsa 1940-an dan kemudian pada dasawarsa 1950-an dan 1960-an, ketika mencoba mengklaim Irian Barat (kemudian Irian Jaya, kini Papua), Indonesia menyatakan bahwa batas-batas negaranya adalah batas-batas Hindia Belanda. Alasannya pragmatis: mengklaim kedaulatan atas Indonesia Raya akan berkesan ekspansionis di dunia yang mengakui bahwa negara-negara merdeka harus mewarisi batas-batas yang telah ditetapkan oleh penguasa kolonialnya.

63. Khusus untuk Timor Portugis, sebelum 1975, Indonesia tidak pernah mengklaim bahwa ia memiliki hak untuk menggabungkan Timor Portugis. Pada 1961, ketika Indonesia mengupayakan klaim atas Irian Barat, Menteri Luar Negeri ketika itu, Soebandrio, secara eksplisit menyatakan bahwa Indonesia tidak memiliki klaim atas Timor Portugis karena itu merupakan wilayah Portugal sehingga bukan milik Indonesia.<sup>54</sup> Pada 1974, setelah bertemu dengan utusan luar negeri ASDT, José Ramos-Horta, Menteri Luar Negeri Indonesia ketika itu, Adam Malik, menulis kepada Ramos-Horta:

Pemerintah dan juga rakyat Indonesia tidak memiliki niat untuk menambah atau memperluas wilayah mereka, atau untuk menduduki wilayah-wilayah selain yang tercantum dalam Konstitusi mereka. Penegasan kembali ini untuk memberi Anda gambaran yang jelas, sehingga tidak ada keraguan dalam pikiran rakyat Timor dalam mengungkapkan keinginan mereka sendiri... Oleh karena itu, siapapun yang akan memerintah di Timor di masa depan setelah kemerdekaan, dapat dipastikan bahwa Pemerintah Indonesia selalu akan berusaha untuk memelihara hubungan baik, persahabatan, dan kerjasama demi manfaat kedua negara.<sup>55</sup>

64. Walaupun tidak pernah menjadi gagasan arus utama, anggapan bahwa Timor Portugis adalah milik Indonesia karena alasan historis, geografis, dan etnis, tetap hidup sebagai arus bawah dalam pembicaraan politik di Indonesia, yang dapat sewaktu-waktu dimunculkan bila diperlukan. Ancaman penyatuan dan integrasi Timor Portugis dengan Indonesia selalu membayangi hubungan Indonesia dengan Timor Portugis. Gubernur-gubernur Timor Portugis pascaperang selalu mencurigai niat Indonesia, dan senantiasa berusaha membatasi kontak antara kedua belahan pulau tersebut. Walaupun tingkat keterlibatan Indonesia dalam pemberontakan 1959 masih dipertentangkan (lihat 3.1, di atas), represi yang terjadi setelahnya dan analisis pemerintahan Timor Portugis mengenai asal-usul pemberontakan tersebut, menunjukkan bagaimana seriusnya pihak Portugis berpikir bahwa Indonesia memiliki rencana bagi wilayah tersebut. Indonesia bukannya tidak mengacuhkan ketakutan-ketakutan tersebut. Pada Juli 1961, contohnya, dalam sebuah pidato yang mengingatkan Portugal untuk tidak mengabaikan dukungan internasional atas kemerdekaan Angola, Menteri Luar Negeri Indonesia ketika itu, Soebandrio, mengingatkan pendengarnya dengan nada ancaman mengenai kedekatan Indonesia dengan Timor Portugis.<sup>56</sup> Pada 1962, sebuah laporan (Komite Khusus PBB untuk Dekolonisasi) mencatat bahwa sebuah “Biro Pembebasan Republik Timor” telah dibentuk di Jakarta. Sekitar Mei - Juni 1963 Biro tersebut mengumumkan bahwa Biro ini telah membentuk pemerintahan dengan 12 menteri di Batugade.<sup>57</sup> Pada September 1963, Menteri Penerangan Indonesia, Ruslan Abdulgani menyatakan:

walaupun kami bukanlah negara ekspansionis, kami tidak dapat membiarkan bangsa yang nenek moyangnya sama dengan kami ditindas dan dipenjarakan hanya karena mereka ingin bergabung dengan tanah air nenek moyang mereka.\*

65. Walau demikian, integrasi Timor Portugis tidak pernah menjadi tujuan dari kebijakan resmi di bawah Presiden Sukarno. Berbagai pernyataan dan infiltrasi yang sesekali muncul, tidak pernah sampai menjadi komitmen serius untuk menggabungkan Timor Portugis karena Indonesia tidak pernah memandang koloni tersebut sebagai ancaman. Indonesia menjaga hubungan yang stabil dengan pemerintahan Salazar: Ia membuka konsulatnya di Dili dan Sukarno sendiri mengunjungi Portugal pada 1959.

66. Sampai 1974 penerus Sukarno, Soeharto, tidak pernah melenceng dari posisi pendahulunya, namun, setelah Revolusi Anyelir, berbagai argumen “kembali ke pangkuan ibu pertiwi” untuk mengambil alih Timor Portugis mulai muncul. Tokoh-tokoh politik Timor-Leste mengingat di hadapan Komisi kekhawatiran mereka saat pidato John Naro, wakil ketua DPR-RI, yang menyatakan bahwa Indonesia memiliki klaim historis atas Timor Portugis.<sup>58</sup> Orang-orang yang mendekati masalah ini dari

\* James Dunn, *East Timor: A rough passage to independence*, Longueville, 2003, hal. 87. Juga perlu dicatat, peneliti CSIS, Harry Tjan Silalahi menyebut bahwa Indonesia menyelenggarakan operasi klandestin di Timor Portugis selama “konfrontasi”, dalam suatu pembicaraan dengan staf Kedutaan Australia di Jakarta, 2 Juli 1974. Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), *Australia and the Indonesian Incorporation of Portuguese Timor 1974-1976*, 2000, hal. 62, dokumen 12.

sisi strategis melihat pentingnya pandangan-pandangan ini. Dalam wawancara mereka dengan Komisi, Jusuf Wanandi dan Harry Tjan Silalahi, dari *Center for Strategic and International Studies* (CSIS), yang keduanya sangat terlibat dalam mengembangkan kebijakan tentang Timor Portugis pada 1974 - 1975 atas nama mentor mereka Jenderal Ali Moertopo, keduanya menyebutkan kuatnya pandangan-pandangan seperti ini.<sup>59</sup> Kolonel Aloysius Sugianto, seorang anggota seksi operasi khusus Jenderal Ali Moertopo dalam badan intelijen, Bakin, yang memainkan peran penting dalam berbagai kegiatan rahasia awal di Timor Portugis 1974 - 1975, mengatakan kepada Komisi bahwa ia melihat dirinya bekerja untuk menyatukan kembali bangsa yang terpecah akibat kolonialisme.

*Kalau kita begitu. Apodeti itu landasannya selalu, kita ini satu saudara, satu pulau. Kita jadi pecah, jadi dua antara Timor Dili sama Timor Kupang. Itu karena penjajah. Mereka itu, kalau kita lihat, benar kan? Karena penjajah jadi pecah. Di sana menjadi daerah Portugal, di sini daerah Belanda. Sebetulnya solusi kita satu. Logika itu benar, cara berpikir rakyat itu benar.*<sup>59</sup>

67. Setelah invasi Timor-Leste, pejabat-pejabat Indonesia menghidupkan kembali argumen historis (dan etnis) bagi integrasi. Dalam pidatonya di hadapan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 13 Desember 1975, enam hari sesudah invasi Dili dan sepuluh hari setelah ia menyangkal mengenai ambisi teritorial Indonesia di Timor Portugis, Duta Besar Indonesia untuk PBB Anwar Sani menyatakan:

Perkenankan saya terlebih dahulu menjelaskan mengapa Indonesia sangat peduli akan apa yang terjadi di Timor Portugis. Timor Portugis adalah bagian dari Pulau Timor, bagian lain dari pulau tersebut adalah wilayah Indonesia. Timor terletak di tengah-tengah kepulauan Indonesia, satu dari ribuan pulau yang membentuk kepulauan. Penduduk Timor Portugis... berasal dari etnis yang sama dengan penduduk yang berada di wilayah Indonesia. Pemisahan selama 450 tahun karena dominasi kolonial tidak menghapuskan ikatan erat darah dan kultur antara penduduk wilayah ini dan kerabat mereka di Timor Indonesia. Kedekatan geografis dan kekerabatan etnis adalah alasan-alasan penting mengapa Indonesia sangat peduli dengan keamanan dan stabilitas di Timor Portugis, tidak hanya karena kepentingan Indonesia sendiri tetapi juga untuk kepentingan seluruh wilayah Asia Tenggara.<sup>60</sup>

.....  
\* Jusuf Wanandi menyatakan bahwa "dalam lingkaran tertentu" Timor-Leste dilihat sebagai 'wilayah irredentist'. 'Irredentism' adalah gerakan yang berusaha menyatukan kembali wilayah-wilayah yang terpisahkan. [Wawancara CAVR dengan Jusuf Wanandi, Jakarta, CSIS, Jakarta, 24 Juli 2003.] Harry Tjan Silalahi mengamati: Saya pikir teori yang menyatakan bahwa Timor-Leste adalah bagian integral dari Indonesia memang ada, tanpa secara eksplisit dinyatakan, sejak masa Sukarno, setelah pembebasan Irian. [Wawancara CAVR dengan Harry Tjan Silalahi, Jakarta.]



68. Yang lebih kuat dalam pemikiran Indonesia, selain alasan historis, adalah alasan-alasan strategis bagi penggabungan. Menurut James Dunn, mengutip sumber-sumber Indonesia, “kelompok Bakin/Opsus melihat kembali posisi mereka pada akhir 1972 atau 1973 dan berkesimpulan bahwa mereka sangat menentang ide Timor-Leste merdeka”, yang dapat “menambah dimensi baru bagi persoalan keamanan Indonesia”.<sup>61</sup> Buku setengah resmi, *Integrasi*, mengklaim bahwa kepentingan Indonesia di Timor Portugis sudah ada jauh sebelum komitmen Portugal kepada dekolonisasi. Buku tersebut juga menegaskan bahwa Indonesia mengambil pendekatan evolusioner, yang pada tahap awalnya akan membangkitkan keinginan rakyat Timor untuk merdeka. Yang melatari kebijakan Indonesia tersebut adalah perlunya menjamin “bahwa Timor-Leste tidak akan menjadi ‘tempat bermasalah’ dan dengan demikian tidak akan digunakan sebagai *alat tawar-menawar* melawan Indonesia.”<sup>62</sup>

69. Setelah Revolusi Anyelir di Portugal pada April 1974, pendekatan strategis, yang dibentuk oleh rasa antikomunisme yang mendalam dari rezim Orde Baru, dengan cepat mendominasi pemikiran mengenai persoalan Timor Portugis di antara kalangan elite Indonesia. Pendekatan ini bersumber dari ketakutan bahwa Timor-Leste yang merdeka akan menjadi basis bagi infiltrasi oleh negara-negara komunis ke Indonesia. Pandangan ini sudah muncul setidaknya sejak 22 Mei 1974, ketika anggota Bakin mengatakan kepada Kedutaan Australia di Jakarta mengenai pandangan berikut ini: “Indonesia sudah mengatasi Cina di pintu depannya dan mungkin sekarang harus menangani ancaman dari pintu belakangnya.”<sup>63</sup>

70. Soeharto sendiri juga mengambil pandangan strategis ini. Pada pertemuannya dengan Perdana Menteri Australia Gough Whitlam di Wonosobo dekat Yogyakarta pada September 1974, ia menyebut Cina dan Uni Soviet sebagai negara-negara yang mungkin akan mencampuri Timor Portugis.<sup>64</sup> Dalam pertemuan keduanya di Townsville, Queensland, pada April 1975, Soeharto mengatakan kepada Whitlam bahwa intelijen Indonesia telah mendapat informasi bahwa orang-orang komunis dari Cina sedang berupaya masuk ke Timor Portugis melalui Australia dengan bantuan Kedutaan Cina di Canberra.<sup>65</sup> Pejabat Indonesia tidak semuanya sepaham mengenai sifat ancaman komunisme ini. Kepala intelijen di Departemen Pertahanan dan Keamanan dan wakil ketua Bakin, Letnan Jenderal Benny Moerdani meyakini bahwa armada Soviet adalah ancaman utamanya: Ia memprediksi bahwa Timor merdeka akan memberi Uni Soviet pangkalan Angkatan Laut yang akan memungkinkan Soviet membagi wilayah laut Indonesia menjadi dua zona.<sup>66</sup> Direktur eksekutif CSIS Jusuf Wanandi mengatakan kepada Komisi bahwa orang lainnya lebih khawatir tentang maksud Vietnam: mereka berargumen bahwa kalau Kuba dapat mengirimkan pasukannya ke Angola yang jaraknya 2.000 km jauhnya dari pangkalan mereka, kenapa Vietnam tidak bisa mengirimkan pasukannya ke Timor-Leste?<sup>66</sup> Perbedaan penilaian mengenai ancaman komunis ini seharusnya dapat memicu negara-negara luar untuk mempertanyakan kebenaran argumen tersebut.

\* Lihat Dokumen 123 di DFAT, *Australia and the Indonesian Incorporation of East Timor*, hal. 248. Whitlam mengatakan bahwa Indonesia tidak punya bukti mengenai ini.

# Proses dekolonisasi dan partai-partai politik

## Tinjauan

71. Revolusi Anyelir seketika mengubah situasi percaturan politik di Timor Portugis, yang sampai saat itu belum memiliki partai politik aktif dan hanya sedikit kegiatan antikolonial. Dengan hukum-hukum baru untuk perserikatan politik, partai-partai cepat terbentuk. Dua partai muncul sebagai kelompok dominan, UDT dan ASDT. Landasan kedua partai tersebut menyerukan kemerdekaan sebagai hasil akhir dari proses dekolonisasi. Mereka berbeda dalam laju dekolonisasi tersebut, dengan ASDT menghendaki kemerdekaan segera, sementara UDT yang lebih konservatif ingin sebuah proses yang lebih bertahap. Namun yang benar-benar memisahkan kedua partai sentris ini, adalah ideologi militan di kedua ekstrem yang saling menuduh, sebagai “fasis” atau “komunis”. Partai ketiga, Apodeti, mendapatkan dukungan di sana-sini, namun jumlah pendukungnya berada jauh di bawah kedua partai utama, dan ciri utamanya adalah posisinya yang prointegrasi dan dukungan Indonesia yang mereka raih.

72. Kampanye politik dengan cepat berubah menjadi serangan verbal dan terkadang fisik, dan kedua partai utama tidak melakukan banyak untuk mengendalikan ini. Kedua partai menggunakan siaran radio untuk menyebarkan propaganda dan serangan pribadi satu sama lain, sehingga meningkatkan ketegangan sosial. Tidak adanya pengalaman politik ini dimanfaatkan oleh agen-agen Indonesia, termasuk anggota dinas intelijen yang melakukan operasi terselubung di dalam Timor Portugis. Mereka berupaya memecah-belah orang Timor untuk mencapai integrasi dengan Indonesia. Hal ini memicu pihak-pihak militan di kedua partai, dan memuncak pada kegagalan kedua partai menemukan cara untuk bekerja bersama bagi kepentingan nasional. Hasilnya adalah pecahnya koalisi yang berusia empat bulan antara UDT dan Fretilin pada akhir Mei 1975. Dari situ, ketegangan antara kedua partai meningkat sampai UDT meluncurkan aksi bersenjata yang terkoordinasi di seluruh wilayah, yang kemudian berubah menjadi konflik bersenjata berdarah. Fretilin menanggapi juga dengan kekerasan.

## Permulaan kesadaran politik

73. Sistem kolonial Portugis menafikan hak orang Timor-Leste untuk bersuara dalam menentukan urusan mereka sendiri. Namun, penyebaran pendidikan yang bertahap setelah Perang Dunia Kedua mulai menumbuhkan pemikiran kritis mengenai sistem kolonial yang ciri utamanya adalah keterbelakangan ekonomi, korupsi, tingkat pengangguran yang tinggi, diskriminasi rasial, dan kekejaman. Penderitaan orang Timor-Leste mulai mendapatkan penyaluran lewat kalangan terdidik.

74. Direnggut hak suaranya dan belajar dari pemberontakan Viqueque 1959 tentang harga yang harus dibayar dalam konfrontasi langsung dengan sistem kolonial, pada awal 1970-an kalangan yang sadar politik mengadopsi pendekatan politik baru yang lebih berhati-hati dan rahasia. Pada 1970, kalangan generasi muda terdidik memulai sebuah kelompok diskusi antikolonial, yang di antara anggotanya terdapat Mari

Alkatiri, José Ramos-Horta, Nicolau Lobato, Justino Mota, dan Francisco Borja da Costa. Sebuah kelompok antikolonial kecil dibentuk pada 1967 yang berfungsi pada masa Revolusi Anyelir, diorganisasi dalam berbagai kelompok kecil yang berjalan tanpa saling mengetahui. Kelompok ini tampaknya tidak memiliki dampak politik yang besar.<sup>67</sup>

75. Pada awal 1970-an, orang Timor mulai diperbolehkan untuk menulis tentang topik-topik yang terbatas dan dengan kebebasan ekspresi yang dibatasi. *Seara*, majalah yang diterbitkan oleh Diones Dili, menjadi sarana pengungkapan pendapat yang penting setelah Pastor Martinho da Costa Lopes mengambil alih redaksi pada September 1972. Mari Alkatiri, José Ramos-Horta, Nicolau Lobato, Abílio Araújo, dan Francisco Xavier do Amaral semuanya menulis artikel untuk *Seara* mengenai permasalahan sosial di bawah redaksi Pastor Martinho da Costa Lopes.

76. Pemerintah tidak ragu-ragu untuk menekan segala tanda pembangkangan. Pada 1970, José Ramos-Horta diasingkan ke Mozambik selama dua tahun setelah DGS<sup>\*</sup> melaporkan Ramos-Horta mengatakan kepada seorang turis Amerika bahwa kalau Portugal tidak sanggup membangun Timor, lebih baik Amerika mengambil alih koloni ini.<sup>68</sup> Sejumlah artikel oleh Amaral dan Ramos-Horta—dalam kasus Ramos-Horta adalah sebuah esai berjudul “*Maubere Meu Irmão*” (“Maubere Saudaraku”) dianggap sangat menghina—menarik perhatian pemerintah. Di bawah tekanan pemerintah, *Seara* mengumumkan, tanpa penjelasan, dalam edisi 24 Maret 1973 bahwa majalah tersebut akan tutup.<sup>†</sup>

77. Pada 1973, di Dili terjadi kerusuhan antara pemuda dan militer Portugis.<sup>69</sup> Terjadi ketegangan, dan tidak lama kemudian kegalauan generasi muda dapat menemukan bentuk yang lebih jelas.

## Susunan partai-partai politik

78. Begitu Revolusi Anyelir menghilangkan larangan ekspresi politik, kalangan terdidik Timor dengan cepat mengambil kesempatan untuk terjun ke kancah politik. Sementara komposisi kelas, etnis, dan kedaerahan sulit dijelaskan secara sederhana, terdapat berbagai pola latar belakang orang-orang yang ikut masuk ke dalam partai. Para pemimpin Timor dari berbagai partai umumnya saling mengenal dengan baik dan terkadang berhubungan keluarga. Domingos de Oliveira, Sekretaris Jenderal partai UDT ketika itu, mengatakan kepada Komisi mengenai kedekatannya dengan Wakil Presiden Fretilin, Nicolau Lobato, dan bagaimana ia sering berbincang mengenai politik dengan sepupunya, José Osorio Soares, Sekretaris Jenderal Apodeti. Timor-Leste 1975 merupakan dunia kecil yang terdiri atas jaringan dan aliansi politik.<sup>70</sup>

---

\* PIDE berubah nama menjadi DGS (Direcção Geral de Segurança) pada 1968.

† Ramos-Horta menuliskan bahwa ia dipanggil lagi oleh gubernur karena kata-kata “Maubere Saudaraku”, tetapi tidak terlalu jelas bagaimana pikiran pemerintahan Portugis terhadap tulisan Xavier do Amaral pada saat itu. Tapi ini diterima banyak kalangan nasionalis bahwa *Seara* ditutup karena tulisan Xavier do Amaral. Lihat Abílio Araújo, *Timor-Leste: Os Loricos Vontaram a Cantar*, 1977, Lisabon, hal. 187.

79. Latar belakang yang terpendang adalah sesuatu yang umum di kalangan pemimpin partai. Menjadi terpendang pada ujung masa kolonial di Timor Portugis dapat berarti beberapa hal: latar belakang *liurai*, keturunan ras campuran (*mestizo*), keluarga tuan tanah, pendidikan menengah di gereja atau sekolah negeri. Sering orang-orang yang memiliki ciri seperti ini bekerja sebagai pegawai negeri. Karakteristik seperti ini mempersatukan banyak pemimpin partai. Mereka sering hanya bisa dibedakan dengan gradasi sosial yang lebih halus lagi. Tidak mengherankan, bila melihat landasan politik federalisnya, beberapa pemimpin UDT mempunyai kedudukan kuat dalam sistem kolonial, baik karena memegang jabatan yang cukup senior di pemerintahan sipil, melalui keanggotaan *Acção Nacional Popular* (ANP) yang Salazaris, atau melalui kedekatan mereka dengan Gereja Portugis.<sup>71</sup> Walaupun sering memiliki latar belakang yang serupa, para pemimpin Fretilin tidak memiliki keterikatan emosional kepada rezim kolonial Portugal. Apodeti mendapatkan kepemimpinan mereka dari wilayah-wilayah tertentu yang memiliki hubungan dengan Indonesia yang bisa saja bersifat geografis (berdasarkan kedekatannya dengan perbatasan Indonesia) atau politis (berhubungan dengan keterlibatan mereka dalam pemberontakan Viqueque 1959).

80. Penguasa tradisional Timor-Leste menyediakan jalur penting untuk menggalang kekuatan secara lokal bagi semua partai. Partai KOTA yang kecil bermaksud untuk menjadikan sistem tradisional ini sebagai basis programnya. Apodeti juga menggalang dukungan dari pemimpin tradisional dan regional ini, dan cukup berhasil. Guilherme Gonçalves, *liurai* Atsabe, memberi basis dukungan regional yang cukup besar bagi partai ini di daerah perbatasan dengan Indonesia. Namun, para *liurai* tidak memberikan basis tunggal yang kuat bagi satu partai manapun. Francisco Xavier do Amaral menjelaskan kepada Komisi tentang perbedaan-perbedaan antara cara Fretilin dengan UDT di dalam mencari dukungan masyarakat:

*Partai ASDT memiliki metode ini. Kita bisa melihat bahwa partai pertama yang dibentuk ialah UDT, dan saya lihat taktik mereka. UDT berkampanye dengan fokus kepada administrator, dan mendekati administrator subdistrik dan penguasa lokal [liurai]. Mereka tidak secara langsung mendekati rakyat. Jadi saya pikir, kita butuh rakyat, saya tidak butuh liurai, mereka mendukung Portugis. Saya butuh rakyat. Jadi mereka berangkat dari atas ke bawah, sedangkan saya memulai dari bawah. Saya memulai dari akarrumpun kemudian ke atas. Terkadang, kami bertemu di tengah-tengah.*<sup>72</sup>

81. Partisipasi politik dalam suatu tradisi demokrasi Barat yang individualistik tetap menjadi hak khusus segelintir kalangan elite yang membentuk partai-partai tersebut. Proses politik yang terjadi setelah Revolusi Anyelir berjalan cepat, dan tanpa pendidikan kewarganegaraan atau politik, banyak orang Timor biasa yang membuat pilihan keanggotaan atau afiliasi partai berdasarkan kesetiaan lokal atau karena ikut-ikutan ketimbang karena prinsip atau kebijakan partai.<sup>73</sup> Desa-desa atau wilayah-wilayah tertentu sering setia terhadap satu partai saja. Mario Carrascalão dari UDT menjelaskan bagaimana kesetiaan politik suatu komunitas terbentuk:

*Orang-orang di Maubisse, karena mereka dekat dengan tentara-tentara Portugis, maka seluruh Maubisse adalah UDT. Hampir semua orang Maubisse adalah UDT. Tetapi jika Anda melihat Uatolari, semua orang adalah Fretilin, dan di Uato Carbau semua orang adalah Apodeti. Ini adalah kenyataan yang terjadi ketika kami mempersiapkan pemilihan-pemilihan [di desa] [pada 1975].<sup>74</sup>*

## Perkembangan dan ketegangan internal

### Kompetisi antara UDT dan Fretilin

82. Tidak diragukan lagi bahwa dua partai terbesar adalah UDT dan ASDT. Apodeti menjadi penting karena hubungan dengan dan dukungannya dari pemerintah Indonesia. Sementara UDT dan ASDT memiliki perbedaan, dalam tujuan akhir kemerdekaannya mereka sama. Dan memang selama 1974 -1975 mengenai persoalan kemerdekaan, UDT dan Fretilin bergerak semakin dekat dan keduanya pada akhirnya menerima jadwal waktu yang diajukan Portugal yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 7/75 pada 17 Juli 1975.<sup>75</sup> ASDT mulai membicarakan untuk membentuk sebuah front yang berbasis luas sejak Juli 1974, namun menolak gagasan membentuk koalisi dengan UDT.<sup>76</sup> Pada Agustus, pendukung UDT dan ASDT menyelenggarakan serangkaian pertemuan untuk membentuk koalisi, namun sekali lagi gagal menyetujui landasan bersama.<sup>77</sup> Kedua partai dengan cepat tenggelam ke dalam serangan verbal terhadap yang lainnya dan retorika agresif yang memecah-belah secara sosial dan menciptakan landasan bagi kekerasan yang segera menyusul.<sup>78</sup>

### Pelatihan militer Apodeti di Timor Barat

83. Sementara itu Apodeti menjalin kontak dengan militer Indonesia untuk mendapatkan senjata dan pelatihan militer. Utusan Apodeti, Tomas Gonçalves, anak *liurai* Atsabe, Guilherme Gonçalves, pergi ke Timor Barat pada Agustus 1974 untuk pelatihan militer. Pada September, ia pergi ke Jakarta, tempat ia bertemu dengan panglima ABRI, Jenderal Maraden Panggabean, yang ketika itu melihat Apodeti sebagai alat yang tepat untuk mencapai hasil integrasi. Kunjungan-kunjungan ini terjadi dengan keterlibatan dan bantuan konsulat Indonesia di Dili.<sup>79</sup>

### Partai-partai politik bersiap menghadapi konfrontasi bersenjata

84. Apodeti merupakan partai pertama, namun bukan satu-satunya, yang mengembangkan kemampuan paramiliter. Ini merupakan kecenderungan kuat di antara ketiga partai. UDT dan Fretilin secara aktif mengincar dukungan di kalangan orang Timor yang menjadi anggota tentara kolonial Portugal.<sup>80</sup> Di samping persoalan kesetiaan kepada Portugal, Gubernur Mário Lemos Pires juga khawatir tentang

prospek terjadinya perpecahan di antara pasukan Timor-Leste yang didasarkan pada kesetiaan terhadap partai politik. Mantan perwira tingkat menengah (*aspirante*), Rogério Lobato, belakangan mengenang:

*Dapat saya katakan bahwa UDT membuat kampanye untuk memperoleh dukungan terutama dari lulusan sekolah militer, para sersan. Namun Fretilin juga membuat kampanye terbuka ... di antara pasukan-pasukan tersebut untuk memobilisasi para serdadu.<sup>81</sup>*

85. Ini menjadi kekhawatiran pemerintah kolonial. Ketika Fretilin mendeklarasikan pasukan Timor sebagai bagian dari koalisi UDT – Fretilin, Mayor Francisco Mota, Kepala Kantor Urusan Politik Gubernur, melarang militer terlibat dalam politik, sesuai tradisi militer Portugis untuk berada di luar politik (*apartidarismo*).<sup>82</sup> Namun, pada April 1974, tentara Portugis sendiri baru memberi contoh mengenai keterlibatan militer dalam politik. Banyak serdadu Timor dalam tentara dan polisi kolonial Portugis bingung oleh apa yang mereka pandang sebagai ketiadaan disiplin dan kesetiaan pada tugas yang diperlihatkan oleh orang Portugis dalam tentara kolonial setelah Revolusi Anyelir.<sup>83</sup> Walaupun sudah terjadi kegaduhan sebelum 11 Agustus, tentara Timor umumnya tetap loyal kepada prinsip *apartidarismo* sampai pecah perang saudara. Beberapa orang bahkan terus menolak untuk berpihak setelah itu.

## Mahasiswa dari Portugal

86. Sumber lain bagi ketegangan di masa itu, dan juga yang merupakan bahan pembicaraan semenjak itu, adalah peran tujuh orang mahasiswa Timor yang baru kembali dari Portugal pada September 1974, beberapa hari sebelum ASDT mengganti namanya menjadi Fretilin.<sup>\*</sup> Mereka membawa pengalaman politik radikal mereka dari kelompok-kelompok mahasiswa di Lisabon<sup>†</sup> dan sikap antikolonial yang keras.<sup>84</sup> Sementara beberapa politikus Timor dari masa itu yakin bahwa para mahasiswa tersebut bertanggung jawab mendorong ASDT menjadi partai yang lebih revolusioner,<sup>85</sup> Komisi mendengar kesaksian dari anggota Komite Sentral Fretilin Mari Alkatiri bahwa ketika mereka kembali ke Timor, para mahasiswa, tidak seperti anggota Komite Sentral, memandang kolonialisme Portugis sebagai ancaman yang lebih besar daripada neokolonialisme Indonesia.<sup>86</sup> Para mahasiswa tersebut bergabung dengan Fretilin, yang mampu meredam beberapa gagasan mereka yang lebih radikal,<sup>87</sup> dan partai tersebut kemudian terpengaruh oleh semangat dan gagasan baru mereka. Para mahasiswa ini menjadi anggota Fretilin yang menonjol. Sementara peran mereka dalam pembentukan Fretilin dan radikalisasi kebijakan partai tersebut masih dipertentangkan, para anggota UDT mengingat pengaruh

\* Lima mahasiswa tersebut adalah Abílio Araújo, Guilhermina Araújo, Antonio Carvarinho, Vicente Manuel Reis, dan Venâncio Gomes da Silva. Relatório da CAEPDT, hal. 54.

† Mereka termasuk MLTD atau Movimento Libertação Timor Dili dan FULINTIDI atau Frente Unica de Libertação de Timor Dili.

mereka yang memanas-manasi melalui grafiti (“Matilah Fasis!”)<sup>88</sup> dan hinaan tentang UDT yang dituduh konservatif.<sup>89</sup> Perilaku seperti ini membuat para mahasiswa ini dipersalahkan atas kebijakan-kebijakan Fretilin yang lebih radikal.

## ASDT menjadi Fretilin

87. Pada 11 September 1974, ASDT mengubah namanya menjadi *Frente Revolucionário de Timor-Leste Independente*, Fretilin (Front Revolusioner bagi Timor-Leste Merdeka). Sejak saat itu partai ini mengambil sikap yang lebih radikal. Manifestonya, *Manual e Programa Politicos da Fretilin*, menyebut Fretilin sebagai “front yang mempersatukan kelompok-kelompok nasionalis dan antikolonialis di bawah satu visi—pembebasan bangsa Timor dari kolonialisme”.<sup>90</sup> Manifesto tersebut juga menegaskan bahwa Fretilin merupakan “satu-satunya wakil sah” rakyat Timor. Tidak ada dasar elektoral bagi klaim ini, yang oleh Fretilin didasarkan pada kesetiaannya kepada mayoritas rakyat pribumi Timor yang agraris. Walau demikian, berdasarkan nilai-nilai yang diklaimnya dimiliki oleh “seluruh orang Timor-Leste,” Fretilin menuntut kemerdekaan Timor-Leste secara *de jure* dari Portugal. Di satu sisi, Fretilin berupaya untuk mencapai kemerdekaan dari penjajahnya Portugal. Di sisi lain, beberapa pemimpinnya ketika itu melihat kekuatan neokolonial Indonesia sebagai ancaman yang lebih besar dan bermaksud untuk membangun front nasional yang luas untuk menghadapi ancaman ini.<sup>91</sup>

88. Peran sebagai satu-satunya wakil rakyat Timor-Leste yang diproklamasikan secara sepihak oleh Fretilin membuat khawatir pemimpin-pemimpin partai lain, yang menganggap hal ini memicu rasa tidak toleran dalam politik.

*Mereka tidak menerima partai-partai lain. Mengapa?... Inilah yang mereka inginkan, yaitu menjadi satu-satunya perwakilan rakyat Timor yang sah. Mereka tidak mengenali orang-orang di partai lain...*<sup>92</sup>

## Istilah ‘Maubere’

89. Walau bermaksud menjadi wakil tunggal bangsa Timor-Leste, Fretilin tidak mencapai hal ini. Yang dicapai oleh Fretilin adalah pengembangan nasionalisme Timor-Leste dengan menggunakan gagasan-gagasan seperti menjadikan istilah ‘*Maubere*’ sebagai simbol rakyat Timor biasa, dan slogan dalam bahasa Tetum, “*Ukun Rasik An*”, yang berarti kebebasan dan pemerintahan sendiri. Ketika pertama kali digunakan pada 1974 - 1975, istilah ‘*Maubere*’ dipandang oleh orang Timor yang bergabung dengan UDT sebagai memecah-belah ras, karena membedakan-bedakan orang Timor “berdarah murni” dengan ras campuran, ‘*mestizo*’. Komisi mendengarkan kesaksian dari mantan anggota senior partai UDT, yang menggambarkan istilah ‘*Maubere*’ sebagai sumber perpecahan penting di masyarakat.<sup>93</sup> José Ramos-Horta menjelaskan lahirnya istilah tersebut sebagai slogan politik pada audiensi publik nasional Komisi mengenai Konflik Internal 1974 - 1976:

*Saya menulis sebuah artikel di jurnal di Timor [Seara], bukan pada tahun 1975 atau 1974, tetapi tahun 1973...Saat kita membentuk ASDT, dalam sebuah pertemuan ASDT/Fretilin saya jelaskan bahwa semua partai politik perlu mempunyai citra. Jika kita ingin meyakinkan pemilih, kita tidak bisa melakukannya dengan filsafat yang rumit...Jadi saya bilang sebaiknya kita mengidentifikasi Fretilin dengan Maubere sebagai slogan, atau simbol identitas Fretilin. Jelas bahwa 90 persen penduduk Timor tidak memakai alas kaki, tidak punya kartu penduduk, tetapi mereka menganggap diri mereka sebagai Maubere...Kita perlu [memahami] bahwa tidak ada filsafat lain dalam istilah ini. Ini adalah identitas partai.<sup>94</sup>*

90. Di tahun-tahun belakangan, selama pendudukan Indonesia, simbol-simbol ini tumbuh menjadi penegasan yang kuat akan aspirasi Timor-Leste untuk merdeka, dan pada saat yang sama terus memecah Fretilin dan UDT.

## Fretilin dan ancaman komunisme

91. Terdapat banyak perdebatan mengenai seberapa jauh Fretilin dipengaruhi oleh komunisme pada 1974 - 1975, dan apakah hal ini menjadi alasan sebenarnya bagi aksi bersenjata UDT dan intervensi Indonesia. Komisi mendengar banyak kesaksian mengenai isu ini pada audiensi publik nasional mengenai Konflik Internal tahun 1974 - 1976. Jelas bahwa beberapa anggota Fretilin adalah komunis, tapi tidak benar apabila menyimpulkan berdasarkan hal ini bahwa partai tersebut adalah partai komunis pada 1974 - 1975. Rangkuman yang lebih tepat adalah bahwa arus utama kepemimpinan Fretilin adalah kiri-tengah, walaupun partai ini mencakup serangkaian opini yang bervariasi dari ekstrem-kiri sampai unsur-unsur yang lebih konservatif.

92. Berikut ini adalah pandangan João Carrascalão, pemimpin UDT yang merupakan salah satu pendiri Gerakan Anti-Komunis setelah 11 Agustus:

*Dalam tubuh Fretilin, beberapa pemimpin adalah komunis, tetapi Fretilin bukan partai komunis. Dalam tubuh UDT, beberapa pemimpin adalah sosialis, tetapi UDT bukan partai sosialis, UDT adalah partai demokrat sosial...<sup>95</sup>*

93. José Ramos-Horta, satu-satunya tokoh politik yang hadir pada pembentukan UDT dan ASDT, juga mengomentari tuduhan bahwa Fretilin adalah partai komunis:

*Kalau orang bilang bahwa Fretilin itu komunis pada tahun 1974 - 1975, ini tidak benar. Fretilin adalah front politik. Alarico Fernandes itu orang komunis. [Sebastião] Montalva orang komunis dan beberapa orang lain yang saya lupa namanya. Nicolau Lobato bukan seorang komunis. Anda bisa menyebut Nicolau Lobato sebagai seorang Marxis Kristen sekuler, seperti teologi pastor Amerika Latin. Para pastor di Brasil, Uskup Brasil, Nikaragua, El Salvador,*



*semua Marxis dan beragama Katolik tanpa timbul pertentangan ... Saya katakan bahwa Nicolau Lobato adalah seorang yang percaya pada Marxisme tetapi juga 100% Katolik. Xavier Amaral, Anda mungkin menyebut dia sebagai seorang komunis atau sosial demokrat, tetapi saya tidak setuju—dia sedikit konservatif.<sup>96</sup>*

94. Selama periode sebelum konflik bersenjata internal, program dan retorika Fretilin mengandung unsur-unsur yang mencerminkan komunisme. Bahasanya, dimulai dari namanya, adalah revolusioner sosial. Ideologi Mauberanya ditujukan pada sebuah revolusi sosial rakyat, untuk membangun identitas nasional dari akar rumput. Kebijakan-kebijakannya tidak diragukan lagi adalah kiri, yang fokusnya adalah perombakan radikal terhadap pendidikan, kesehatan, dan produksi pertanian. Manifestonya mengklaim bahwa ia adalah “satu-satunya wakil” rakyat Timor-Leste. Retorika seperti ini didengungkan oleh banyak gerakan revolusioner-sosial Marxis yang lain, khususnya dalam gerakan pembebasan di koloni-koloni Afrika.<sup>97</sup>

95. Anggota MFA Portugal juga tidak luput dari debat politik masa itu, dan partai UDT menganggap anggota-anggota Portugis dari MFA [*Movimento das Forças Armadas*: Gerakan Angkatan Bersenjata] menyebarkan ide-ide komunis di Timor. Mario Carrascalão bersaksi kepada Komisi bahwa berbagai unsur sayap kiri dan kanan di pemerintahan Portugis sudah lama bermaksud untuk menyebarkan pandangannya di Timor-Leste:

*Ketika MFA datang ke Timor mereka memiliki orang-orang yang beraliran kiri yang ingin menciptakan kondisi-kondisi di Timor sehingga Timor dapat menjadi, saya tidak yakin bagaimana mengatakannya, komunis atau Marxis-Leninis atau Maois...[Sementara itu] polisi rahasia Portugis [DGS] mengatakan kepada UDT bahwa Fretilin telah mengatur pelatihan militer di dua tempat. Siapakah para pelatihnya? Pelatih-pelatih ini berasal dari Vietnam [Komunis] [kata mereka].<sup>98</sup>*

96. Beberapa pemimpin UDT sangat peka terhadap saran bahwa Fretilin itu komunis. Komisi mendengar kesaksian bahwa Presiden UDT, Francisco Lopes da Cruz, dan Wakil Presidennya, César da Costa Mouzinho, menjadi semakin ekstrem dalam anti-komunismenya selama 1975 setelah berkunjung ke Australia dan Jakarta.<sup>99</sup>

97. Sering sulit untuk mengatakan apakah propaganda antikomunis Indonesia merupakan ungkapan yang tulus, meskipun salah, dari semangat membara antikomunisme rezim tersebut atau upaya memanipulasikan persoalan untuk membenarkan intervensi. Setelah koalisi dibubarkan pada akhir Mei, siaran radio Indonesia dari Kupang mulai mengecap baik UDT maupun Fretilin sebagai komunis, dengan mengatakan bahwa pemimpin UDT João Carrascalão adalah komunis yang pro-Soviet dan Fretilin pro-Cina. Namun selama masa ini, pejabat Indonesia juga bertemu dengan pemimpin UDT dan mengatakan kepada mereka bahwa Fretilin merupakan ancaman komunis.<sup>100</sup> Hal ini menunjukkan kepada sebagian pemimpin politik Timor

bahwa isu komunisme ini digunakan oleh Indonesia sebagai alasan untuk menekan UDT dan belakangan untuk melakukan intervensi langsung ke Timor Portugis.<sup>101</sup> Dalam konteks Perang Dingin, seperti yang dikatakan oleh José Ramos-Horta kepada Komisi, komunisme ialah tuduhan yang mudah dibuat tanpa harus ada dasarnya.<sup>102</sup>

## Tidak adanya toleransi politik

98. Walaupun di tingkat nasional terdapat banyak partai politik, dalam banyak kasus pola-pola politik yang muncul di tingkat lokal tidak pluralistik. Militan masing-masing partai secara agresif mempertahankan wilayah politiknya. Tomas Gonçalves dari Apodeti menceritakan tentang pengalamannya ketika mencoba berkampanye di komunitas-komunitas distrik:

*UDT sudah masuk Ermera, orang-orang mau memukul saya... jadi saya pergi ke Letefoho dan di sana juga sudah penuh dengan orang-orang UDT. Sepupu saya menjadi camat di sana, dan dia bilang kepada saya, "Kamu sebaiknya kembali, tidak perlu kampanye di sini."<sup>103</sup>*

99. Komisi mendengar banyak kesaksian dan pernyataan tentang tidak adanya toleransi politik di tingkat komunitas pada 1974 - 1975. Hal ini terwujud dalam banyak cara, dan tidak jarang berubah menjadi kekerasan. Suatu kebiasaan umum yang sering disebut adalah pemberian kartu identitas oleh partai politik kepada anggotanya, atau memaksa orang membawa kartu tersebut walaupun mereka tidak memutuskan untuk menjadi anggota partai. Para militan partai akan meminta orang-orang untuk menunjukkan kartu mereka, dan bila mereka menunjukkan kartu partai yang "salah", mereka bisa ditahan dan dipukuli.<sup>104</sup> Komisi juga mendengar cerita mengenai para guru yang memaksa murid-muridnya untuk menyatakan kesetiaan kepada suatu partai tertentu, dengan ancaman akan dikeluarkan dari sekolah.<sup>105</sup>

100. Xanana Gusmão menceritakan kepada Komisi bagaimana intoleransi ini mendorong terjadinya kekerasan:

*Tiap partai menyatakan pandangan mereka sebagai kepentingan nasional, tetapi tidak mempertimbangkan bahwa kita semua adalah orang Timor, juga tidak mempertimbangkan apa yang sedang diperjuangkan oleh seluruh bangsa. Dan karena hal ini, kami melihat kurangnya kemauan para pemimpin partai untuk mengurangi tingkat kekerasan, untuk menyelesaikan apa yang sedang terjadi. Kerap kami melihat bahwa partai-partai tersebut cukup senang ketika para pendukungnya datang dan berkata "Kami pukul orang ini" atau "Kami bunuh orang itu." Hal seperti ini dianggap sebagai kemenangan kecil... Apabila suatu partai memiliki jumlah anggota terbanyak di suatu subdistrik, partai tersebut tidak memperbolehkan partai-partai lain berkampanye di daerah itu. Dan kemudian ketika partai-partai lain akan pergi ke daerah itu, penduduk akan menyerang, menutup jalan mereka, memboikot, saling melempar batu, dan saling memukul."<sup>106</sup>*

## ‘Misi mustahil’ Lemos Pires

101. Tahap baru dalam proses dekolonisasi Timor Portugis dimulai dengan penunjukan Kolonel Mário Lemos Pires sebagai gubernur pada November 1974. Ia menjadi gubernur terakhir Timor Portugis. Lemos Pires menulis bahwa sebelum mengambil jabatan ini, ia bertanya kepada Presiden Portugis, Jenderal Francisco da Costa Gomes, apabila pemerintah bermaksud untuk menyerahkan Timor Portugis kepada Indonesia. Ia mengatakan kepada presiden bahwa apabila rakyat Timor-Leste tidak diperbolehkan untuk menentukan nasibnya sendiri, dan bila memang itu kebijakannya, ia tidak akan menerima posisi gubernur tersebut.<sup>107</sup> Presiden Portugal dilaporkan menjawab bahwa tidak ada kebijakan seperti itu, walaupun Indonesia merupakan bagian dari realita di mana mereka beroperasi.<sup>108</sup> Dalam sebuah wawancara dengan Komisi, Lemos Pires mengingat kekhawatirannya ketika ia meninggalkan Portugal untuk mengambil posnya sebagai gubernur:

*Saya pergi ke Timor-Leste dengan dugaan bahwa dukungan yang akan saya terima dari Pemerintah Portugis akan sangat terbatas, dan lebih buruk dari itu, bahwa fokus politik Portugis atas proses Timor-Leste akan minimal. Ternyata saya benar.<sup>109</sup>*

102. Tanpa tugas yang jelas dari atasannya di Lisabon, pada saat kedatangannya di Timor Portugis Gubernur Mário Lemos Pires berharap menjalankan program untuk mengatasi apa yang ia pandang sebagai masalah mendesak yang tengah dihadapi oleh koloni ini. Masalah-masalah tersebut ia definisikan sebagai: kondisi militer yang kehilangan semangat; perlunya suatu kebijakan dekolonisasi; perlunya menghidupkan kembali pemerintahan sipil yang lumpuh; dan perlunya mempersiapkan orang Timor-Leste untuk menjalankan pemerintahan negaranya sendiri. Ia mampu menangani beberapa masalah ini, seperti reformasi pendidikan, dengan cepat. Namun mengatasi masalah yang paling mendesak, seperti reformasi militer dan menemukan suatu rumusan dekolonisasi, ternyata jauh lebih sulit. Salah satu persoalannya adalah bahwa ia mendapat sedikit dukungan dari Portugal. Permintaannya untuk mendapatkan arahan yang jelas, diabaikan. Pandangannya sendiri akan dekolonisasi tidak sejalan dengan pandangan tokoh-tokoh kunci seperti Menteri Koordinator Antarwilayah Antonio de Almeida Santos. Sebelum kedatangannya di Timor, komunikasi dengan Portugal dipersulit dengan adanya persaingan antara perwakilan MFA di koloni ini, Mayor Arnão Metello, dan gubernur untuk mendapatkan perhatian pemerintah. Mário Lemos Pires berupaya mencari jalur komunikasi yang lebih jelas, tapi tim yang ia susun di Kantor Gubernur hanya mencerminkan perpecahan yang juga terjadi di Portugal. Ia tidak dapat berbuat banyak untuk meningkatkan semangat pasukan Portugis yang sudah pupus, yang sebagian besar hanya ingin kembali ke Portugal sesegera mungkin.<sup>110</sup>

103. Kondisi setempat juga tidak mendukung. Upaya awal gubernur dalam menciptakan mekanisme untuk berkonsultasi dengan partai-partai dalam dekolonisasi selalu menemui hambatan. Ketika mekanisme ini terwujud, yakni dalam bentuk Komisi Dekolonisasi Timor (*Comissão de Descolonização de Timor*, CDT), pada akhir April 1975, perbedaan politik antara partai-partai sudah begitu mendalam, sehingga hal ini mungkin sudah

sangat terlambat. Hal ini, dan juga inisiatif lain seperti rencana implementasi reformasi pendidikan yang dibuat untuk melayani secara lebih baik komunitas penduduk Timor terinterupsi oleh perang saudara Agustus 1975.<sup>111</sup> Sejak awal, UDT dan Fretilin menolak untuk duduk bersama dengan Apodeti; Apodeti menolak untuk menerima kemerdekaan sebagai opsi dan bersikukuh untuk periode transisi dekolonisasi yang pendek. Kegagalan koalisi Fretilin/UDT pada akhir Mei benar-benar merusak segala kesamaan yang dimiliki kedua partai. Tampak jelas mengapa Mário Lemos Pires berada di Lospalos untuk pengumuman hasil pemilihan lokal, salah satu prakarsa reformasinya, pada 10 Agustus 1975, sehari sebelum UDT melancarkan aksi bersenjata.

104. Di kalangan serdadu Timor yang merupakan bagian terbesar tentara, tumbuh anggapan bahwa Portugal sedang dalam proses berpaling dari Timor.<sup>112</sup> Banyak anggota tentara Timor mulai terlibat dalam politik pada waktu yang mereka anggap sebagai momen yang penting dalam sejarah negeri mereka. Mário Lemos Pires merenung di hadapan Komisi:

*Mereka semua ingin berpihak pada suatu garis politik, namun yang lebih buruk ialah bahwa partai-partai politik, terutama UDT dan Fretilin, masing-masing berusaha meyakinkan mereka untuk membantu dan mendukung partai mereka sendiri. Dengan begitu, yang saya lihat adalah bahwa tentara tidak bisa memenuhi misinya.<sup>113</sup>*

105. Portugal menolak permintaan Mário Lemos Pires untuk menambah pasukan Portugis, dan hanya memberikan dua kompi pasukan terjun payung elite. Sebagai akibatnya, kekuasaan Portugis berkurang pada saat ketegangan semakin memuncak di koloni dan ketika tekanan luar dari Indonesia mulai muncul. Lemos Pires menyadari bahwa kebijakan Timorisasinya dapat dengan mudah menimbulkan konflik yang tak akan dapat dia kendalikan. Mario Carrascalão mengenang peringatan dari Lemos Pires di hadapan Komisi:

*Kalian harus berhati-hati dengan politik kalian. Para penerjun payung yang ada di Timor sekarang bukan untuk melindungi kalian...Mereka di sini untuk mengurus orang asing di Timor, orang Portugis.<sup>114</sup>*

## Koalisi antara UDT dan Fretilin

106. Pada 21 Januari 1975, didorong dan didukung oleh Gubernur, dan setelah berulang kali mencoba, Fretilin dan UDT membentuk koalisi. Dua partai tersebut bersatu berlandaskan komitmen bersama untuk kemerdekaan sepenuhnya, penolakan terhadap Apodeti dan integrasi dengan Indonesia, dan pendirian pemerintahan transisional di mana kedua partai tersebut berperan. Sementara Fretilin dan UDT memiliki banyak kesamaan, hubungan mereka tidak harmonis, dan khususnya UDT semakin merasa terancam oleh massa yang mengikuti Fretilin dan klaim berkelanjutan Fretilin yang menyatakan diri sebagai wakil tunggal rakyat Timor-Leste.<sup>115</sup> Kedua partai terus saling menyerang secara verbal, dan perseteruan

ini meluas ke distrik-distrik. Koalisi ini tidak memiliki mekanisme politik untuk mengatasi berbagai perbedaan dan menyatukan partai-partai tersebut.<sup>116</sup>

107. Sementara sejumlah elemen Fretilin terus menganggap UDT sebagai kelompok reaksioner ultrakonservatif, sejumlah anggota UDT menjadi semakin khawatir dengan apa yang mereka lihat sebagai pengaruh radikal dalam Fretilin. Mulai akhir 1974, Indonesia meningkatkan propaganda antikomunismenya. Siaran propaganda mereka dari Kupang meliputi uraian tentang kejadian sehari-hari, yang menunjukkan bahwa mereka memiliki jaringan intelijen yang sangat efektif di wilayah Timor Portugis.<sup>117</sup> Komisi mendengar dari mantan Gubernur Mário Lemos Pires bahwa pemerintah Indonesia khawatir dengan persatuan rakyat Timor yang diperlihatkan oleh koalisi tersebut, dan mengambil tindakan untuk melemahkannya.<sup>118</sup>

108. Wakil militer Indonesia yang terlibat dalam Operasi Komodo mengunjungi Timor Portugis sepanjang bulan-bulan tersebut. Pada awal April 1975, delegasi yang terdiri atas Kolonel Sugianto, Kolonel Soeharto, dan beberapa yang lain bertemu dengan Gubernur Mário Lemos Pires dan para pemimpin tiga partai politik utama tersebut. Pada April 1975, Ali Moertopo mengundang perwakilan Fretilin dan UDT secara bersamaan tetapi terpisah untuk berkunjung ke Jakarta.<sup>119</sup> Menurut José Ramos-Horta, yang bersama dengan Alarico Fernandes mewakili Fretilin dalam pertemuan Jakarta pada April tersebut:

Kunjungan ini...dipandang berbeda oleh kami dan oleh Indonesia. Kami melihat kunjungan ini dapat menjernihkan keadaan, mereka melihatnya sebagai kesempatan untuk semakin memecah-belah kita.<sup>120</sup>

109. Sekembali para wakilnya dari kunjungan ke Jakarta, UDT mengadakan pertemuan Komite Sentral dan memilih mundur dari koalisi. Komisi mendengarkan kesaksian bahwa UDT membuat keputusan ini setelah pertemuan yang panjang dan sulit, yang memperlihatkan perpecahan besar dalam tubuh partai mengenai masalah tersebut. Domingos Oliveira mengatakan kepada Komisi:<sup>121</sup>

*Mayoritas mutlak memutuskan untuk mundur dari koalisi, mengakhiri koalisi. Mereka berkata "koalisi ini dimaksudkan untuk menolong kita, untuk menolong menciptakan perdamaian, mempersatukan kita saat kita berjuang menuju kemerdekaan, tetapi kita justru saling menyerang. Maka lebih baik koalisi diakhiri." Namun ini adalah suatu kesalahan... Karena ketika kami mengakhiri koalisi, situasi semakin buruk.*<sup>122</sup>

110. Komisi mendengar bahwa setelah koalisi pecah, ketegangan dan ancaman kekerasan meningkat.<sup>123</sup>

111. Suatu akibat langsung perpecahan koalisi ini adalah bahwa jalan menjadi semakin terbuka bagi Indonesia untuk memanfaatkan ketakutan para pemimpin UDT tentang apa yang dianggap sebagai ancaman komunis. Suatu akibat politik jangka panjang adalah bahwa kedua partai politik Timor utama ini menjadi berseteru selama bertahun-tahun.

# Keterlibatan Indonesia yang semakin besar di Timor Portugis: Destabilisasi dan Diplomasi

## Tinjauan

112. Sementara pemerintah Portugis di Timor-Leste mulai menerapkan program dekolonisasi, dan partai-partai politik Timor-Leste berebut menggalang dukungan, Indonesia aktif pada dua front untuk mendapatkan hasil yang akan memuaskan kepentingannya di wilayah itu.

113. Tak lama setelah Revolusi Anyelir di Portugal, Indonesia semakin meningkatkan operasi pengumpulan intelijen di dalam Timor Portugis. Indonesia juga berupaya untuk memengaruhi kalangan politikus Timor-Leste untuk mendukung opsi integrasi. Dari awal 1975, Indonesia mulai menyusun rencana solusi militer. Kebijakan yang tampak semakin militeristik yang diambil Indonesia terhadap Timor Portugis dapat ditelusuri pada keyakinannya bahwa tujuan integrasinya tidak akan mungkin tercapai tanpa kekerasan. Setelah awalnya meminta jaminan kepada Portugal bahwa Timor-Leste tidak akan menjadi ancaman bagi keamanannya, Indonesia segera berkesimpulan bahwa kepentingan keamanannya hanya akan tercapai apabila Timor-Leste tidak menjadi negara merdeka. Perubahan ini didasari oleh persepsi mengenai kepentingan keamanan Indonesia yang sangat terkondisi oleh pandangan antikomunisme Perang Dingin pada masa itu. Indonesia mampu mendapatkan pendukung untuk pandangannya mengenai Timor-Leste di antara para sekutu Barat dan Asianya, dan sedikit banyak di Portugal juga.

## Operasi Komodo dan peningkatan operasi Rahasia Militer

114. Pada awal 1975, campur tangan Indonesia di Timor Portugis telah mencapai taraf yang tidak lagi dapat disebut rahasia. Agen Bakin, Luis Taolin, adalah pengunjung reguler ke Dili dari basisnya di Timor Barat. Pasukan khusus Indonesia diketahui melatih simpatisan Apodeti di Timor Barat. Kampanye disinformasi Operasi Komodo semakin ditingkatkan, melalui berbagai siaran radio yang gencar ke Timor Portugis dari Kupang, dan dengan menyebarluaskan berbagai cerita di media Indonesia dan luar negeri. Siaran radio mengklaim bahwa Portugal akan segera menarik diri dari koloni tersebut, menyebarkan cerita-cerita tanpa dasar mengenai infiltrasi Vietnam dan Cina ke wilayah tersebut, dan beralih bahwa integrasi adalah satu-satunya pilihan. Mereka semakin memanaskan-manasi rasa saling curiga di antara berbagai pihak, dan menimbulkan keraguan di antara orang Timor yang tidak terikat dengan partai politik tertentu.<sup>124</sup>

115. Setelah UDT dan Fretilin membentuk koalisi mereka pada akhir Januari 1975, pihak Indonesia semakin meningkatkan aktivitas militer. Pada Februari, diadakan latihan lintas-angkatan secara besar-besaran di Sumatera Selatan, yang secara efektif

merupakan gladiresik bagi invasi berskala penuh,<sup>125</sup> serta peningkatan kehadiran pasukan di sepanjang perbatasan dengan Timor Portugis.<sup>126</sup>

116. Antara Desember 1974 dan Februari 1975, Tim Kopassandha (Komando Pasukan Sandi Yudha) beranggotakan delapan orang, yang dipimpin oleh Kolonel Dading Kalbuadi, tiba di Atambua. Tim ini mempersiapkan medan untuk apa yang nantinya menjadi 'Operasi Flamboyan.'\* Sebagai operasi taktis intelijen, Operasi Flamboyan merupakan buah pikiran Mayor Jenderal Benny Moerdani atas perintah Departemen Pertahanan dan Keamanan. Mereka membentuk jaringan agen lintas-batas Komodo,<sup>127</sup> dan mengambil alih pelatihan 216 orang Timor yang direkrut, yang dikenal dengan nama Partisan, di Atambua, yang dipimpin Tomas Gonçalves dari Apodeti. Komisi mendengar kesaksian bahwa pelatihan Partisan Apodeti semakin ditingkatkan setelah kedatangan Tim Kopassandha pimpinan Kolonel Kalbuadi. Menurut Tomas Gonçalves, orang Indonesia juga tertarik untuk mengumpulkan informasi intelijen tentang militer dan hal lain mengenai Timor Portugis.<sup>128</sup>

*Di sana, mereka [orang-orang Indonesia] tidak berbicara dengan kami. Mereka menyebut kita anggota 'partisan', dan anggota partisan tidak berbicara dengan mereka... Ketika mereka memanggil saya mereka bertanya, "Kira-kira berapa banyak senjata dimiliki Timor? Berapa kompi? Apakah banyak orang yang bisa menggunakan senjata api? Apakah mereka tahu bagaimana menjadi pejuang gerilya?"<sup>129</sup>*

117. Pada Januari 1975, pemerintah Portugis mengirim delegasi ke Atambua untuk mencoba meyakinkan para Partisan Apodeti untuk kembali ke Timor Portugis, namun mereka tidak berhasil.<sup>130</sup> Sementara itu, Kapten Yunus Yosfiah mulai merekrut dan melatih lebih banyak lagi pasukan Kopassandha di Jawa Barat. Pada akhir April, sebuah tim Kopassandha beranggotakan 80 orang tiba di Atambua.<sup>131</sup>

## Diplomasi Indonesia

118. Keputusan Indonesia untuk meningkatkan aktivitas militernya dengan pelatihan, latihan perang, dan pengumpulan informasi intelijen dilakukan bersamaan dengan kontak dengan negara-negara yang punya kepentingan atas masa depan Timor Portugis, terutama Portugal dan Australia serta Amerika Serikat.

### Pertemuan di Lisabon antara Portugal dan Indonesia, 14 - 15 Oktober 1974

119. Sebelum pengunduran diri Presiden Spínola pada September 1974, Indonesia telah meminta diadakan pertemuan dengan pemerintah Portugal untuk membahas masalah Timor. Pada pertengahan Oktober 1974, Presiden Soeharto mengirim

.....  
\* Menurut *Korps Marinir TNI AL, 1970 - 2000*, hal. 285, Operasi Flamboyan dilancarkan pada 5 Oktober sampai 5 Desember 1975.

delegasi Indonesia yang dipimpin oleh orang kepercayaan, Jenderal Ali Moertopo, ke Lisabon untuk membahas Timor Portugis. Mereka bertemu Presiden Costa Gomes, Perdana Menteri Vasco Gonçalves, Menteri Luar Negeri Mario Soares, dan pejabat senior di kementerian luar negeri, sekretaris negara Jorgé Campinos.

120. Kelahiran Fretilin dan kejatuhan Presiden Spínola yang konservatif pada September 1974 telah memicu kekhawatiran Indonesia dan membuat mereka yakin akan perlunya mendapatkan pernyataan pemerintah baru Portugal mengenai masa depan wilayah ini. Menurut laporan delegasi Indonesia, terdapat kesepakatan di antara para pemimpin Portugis bahwa integrasi dengan Indonesia akan menjadi hasil terbaik. Menurut versi laporan ini yang diterbitkan, Presiden Costa Gomes mengatakan kepada delegasi bahwa satu-satunya opsi yang realistis adalah hubungan dengan Portugal yang terus berlanjut atau integrasi dengan Indonesia. Ia konon pernah mengatakan secara pribadi bahwa Portugal tidak mempertahankan hubungan dengan koloninya tersebut. Sekali lagi menurut pihak Indonesia, Sekretaris Negara dan Perdana Menteri lebih tidak ragu-ragu menyatakan dukungan mereka bagi integrasi, walaupun mereka juga menyebut perlunya menyerahkan hal ini kepada kehendak rakyat Timor-Leste.<sup>132</sup>

121. Delegasi Indonesia memberi tahu Presiden Soeharto bahwa para pemimpin Portugis berpandangan bahwa integrasi adalah opsi terbaik yang ada. Mário Lemos Pires menulis dalam bukunya:

Bisa saja, delegasi Indonesia menyadari bahwa posisinya lebih baik daripada yang mereka bayangkan sebelumnya - bahwa Portugal tidak menentang integrasi dengan Indonesia dan Portugal juga tidak memandang kemerdekaan sebagai suatu opsi. Tapi Jenderal Ali Moertopo lupa bahwa, meskipun belum ada kebijakan yang ditetapkan, pemerintah Portugis tetap mendukung prinsip penentuan nasib sendiri rakyat Timor. Dia terlalu cepat menyimpulkan, entah karena dia sangat senang atau karena nada percakapan pada waktu itu memungkinkannya menarik kesimpulan bahwa Portugal menyukai gagasan integrasi dengan Indonesia dan akan memfasilitasi tindakan Indonesia ke arah itu.<sup>133</sup>

122. Analisis mengenai pertemuan ini bisa memberi pemerintah Portugal terlalu banyak pujian. Laporan komisi penyelidikan militer Portugis mengenai dekolonisasi Timor mengemukakan pendapat yang lebih keras, yang menyimpulkan bahwa “pertemuan di Lisabon gagal melewati ujian yang diberikan Indonesia mengenai ketetapan hati Portugal untuk menentang integrasi Timor dengan Indonesia, sehingga dapat disimpulkan bahwa sikap Portugal ini telah sedikit banyak mendorong Indonesia dalam niatnya”.<sup>134</sup>

123. Kesimpulan ini sebagian dikonfirmasi oleh sikap pemerintah Portugal setelah pertemuan tersebut. Sekretaris negara untuk administrasi mengirimkan telegram kepada Menteri Koordinator Antar-Wilayah, Antonio de Almeida Santos, yang ketika itu sedang berkunjung ke Timor. Telegram tersebut meminta bahwa



mengingat pertemuan dengan Jenderal Ali Moertopo, selama kunjungannya menteri ini agar tidak memberi angin pada opsi kemerdekaan dalam pernyataan-pernyataan publiknya. Menteri tersebut menuruti permintaan ini. Dalam pidatonya pada sebuah acara penerimaan di *Palácio das Repartições* (kini *Palácio do Governo*), Almeida Santos, walau menekankan bahwa rakyat Timor harus bebas menentukan nasibnya sendiri, berbicara dengan lebih bersemangat mengenai kemungkinan mempertahankan hubungan dengan Portugal atau integrasi dengan Indonesia ketimbang kemerdekaan, yang ia katakan tidak akan realistis mengingat Timor masih jauh dari “kemerdekaan ekonomi”.<sup>135</sup>

## **Pertemuan di London antara Portugal dan Indonesia, 9 Maret 1975**

124. Terusik oleh semakin meningkatnya aktivitas rahasia Indonesia, Portugal meminta pertemuan kedua dengan Indonesia.<sup>136</sup> Pertemuan tersebut diadakan di London pada 9 Maret 1975 dengan Jenderal Ali Moertopo kembali memimpin delegasi Indonesia.<sup>\*</sup> Pihak Indonesia mengambil garis tegas, dan menolak rencana Portugis bagi suatu pemerintahan transisi dan segala langkah untuk membawa permasalahan ini ke kancah internasional, dan mengklaim bahwa integrasi adalah satu-satunya solusi dan mengajukan agar Indonesia memiliki peran penasihat dalam pemerintahan koloni ini. Portugal menegaskan kembali prinsip bahwa rakyat Timor-Leste perlu didengar mengenai status masa depan koloni tersebut. Tapi, sekali lagi, tampaknya lagi-lagi Portugal memberi angin kepada Indonesia, ketika, contohnya, Portugal mengatakan bahwa Indonesia berhak untuk memberi dukungan aktif kepada Apodeti. Dengan demikian, Portugal memberi Indonesia status yang melampaui status ‘pengamat berkepentingan’.

125. Seperti dalam pertemuan di Lisabon lima bulan sebelumnya, Indonesia menganggap bahwa mengalahnya Portugal berarti bahwa Portugal memiliki pandangan yang sama bahwa integrasi dengan Indonesia adalah hasil terbaik. Presiden Soeharto mengungkapkan pandangannya mengenai apa yang terjadi dalam pertemuan London kepada Gough Whitlam, sebulan kemudian dalam sebuah pertemuan di Townsville. Dia memberikan penafsiran yang sangat berbeda mengenai posisi pihak Portugis dibanding catatan resmi pihak Portugis sendiri, dan rangkuman versi Soeharto mengenai pertemuan tersebut, seperti yang diungkapkan kepada Whitlam berbunyi sebagai berikut:

Dalam pertemuan di London, Pemerintah Portugis berkata bahwa integrasi dengan Indonesia adalah hasil terbaik, asalkan, tentu saja, hal ini adalah yang diinginkan oleh penduduk wilayah tersebut. Portugis juga setuju bahwa tidak perlu ada “campur tangan

---

<sup>\*</sup> Delegasi Portugal terdiri atas Menteri Koordinator Antar-Wilayah Antonio de Almeida Santos, Menteri tanpa portofolio Vitor Alves, Sekretaris Negara Urusan Luar Negeri Jorgê Campinos, dan Kepala Kantor Urusan Politik di pemerintahan Timor, Mayor Francisco Mota. Delegasi Indonesia terdiri atas Ali Moertopo, Duta Besar Indonesia di Inggris dan Prancis, dan Kapten Suharto dari Badan Intelijen BAKIN.

internasional” dalam kebijakan Portugis tentang dekolonisasi di Timor. Terserah Indonesia untuk mencapai integrasi dengan wilayah ini. Untuk tujuan di atas, Indonesia memperoleh persetujuan pemerintah Portugis untuk membantu dan membangun ... Apodeti, dan untuk melakukan pendekatan kepada, dan untuk mempengaruhi garis kebijakan partai UDT dan Fretilin.<sup>137</sup>

### **Pertemuan antara Soeharto dan Whitlam, di Wonosobo, 6 September 1974, dan di Townsville, 4 April 1975**

126. Soeharto bertemu dengan Perdana Menteri Australia Gough Whitlam dua kali selama periode 1974 - 1975. Pertama di Wonosobo, dekat Yogyakarta pada 6 September 1974, dan di Townsville, Queensland pada 4 April 1975. Timor Portugis dibahas dalam kedua pertemuan tersebut, dan dalam kedua pertemuan Whitlam diyakini telah memberi Soeharto lampu hijau untuk mengambil alih wilayah tersebut, seperti yang ditunjukkan oleh notula Australia yang kini merupakan arsip umum (lihat Bab 7.1.: Hak Menentukan Nasib Sendiri). Dalam kedua kesempatan tersebut, Whitlam mengatakan kepada Soeharto bahwa pemerintahnya menganggap Timor seharusnya menjadi bagian dari Indonesia untuk alasan-alasan yang hampir identik dengan apa yang dinyatakan Soeharto: bahwa Timor tidak bisa bertahan sebagai negara merdeka dan oleh karenanya akan selalu menjadi “pusat perhatian” negara-negara yang lebih kuat.<sup>138</sup> Pada pertemuan di Wonosobo, Soeharto secara eksplisit menyatakan bahwa Indonesia dan Australia memiliki kepentingan strategis yang sama di Timor Portugis--Timor-Leste yang merdeka akan menjadi mangsa bagi Cina atau Uni Soviet sehingga akan menjadi “duri dalam mata Australia dan duri di punggung Indonesia”.<sup>139</sup>

127. Pada saat yang sama mereka sepakat bahwa integrasi harus terjadi melalui proses yang mengakui hak rakyat Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri, dengan tambahan dari Whitlam bahwa hal ini harus dilakukan “dengan cara yang tidak akan mengusik rakyat Australia” seperti yang dikatakannya di Townsville.<sup>140</sup> Keduanya tidak menjelaskan tujuan mana yang akan lebih dipentingkan apabila tidak mungkin mencocokkan kehendak orang Timor atas penentuan nasib sendiri dengan keinginan Indonesia untuk integrasi. Di Townsville pada April 1975, walaupun masih menghindari menggunakan senjata, Soeharto tampaknya sudah hampir memutuskan persoalan ini dengan mengatakan bahwa tindakan penentuan nasib sendiri tidak dapat dijadikan tolok ukur untuk menentukan kehendak sebenarnya rakyat Timor. Whitlam bersimpati, dan mengungkapkan pendapatnya bahwa orang biasa di Timor “tidak memahami politik” dan akan memerlukan waktu “untuk menyadari hubungan kekerabatan etnisnya dengan tetangga Indonesia mereka”.<sup>141</sup>

128. Di samping segala keraguannya, terdapat bukti bahwa pandangan Whitlam yang diungkapkan di pertemuan Yogyakarta tampaknya telah sangat memengaruhi keputusan Indonesia bahwa tidak ada alternatif selain penggabungan. Pada 14

Oktober 1974, Duta Besar Australia untuk Portugal melaporkan ke pada Pemerintah Australia mengenai perbincangan antara Ali Moertopo selama kunjungannya ke Lisabon: "Ali [Moertopo] mengatakan bahwa sebelum kunjungan Whitlam ke Jakarta mereka belum membuat keputusan mengenai Timor. Namun dukungan Perdana Menteri mengenai gagasan penggabungan dengan Indonesia membantu mereka menjernihkan pemikiran mereka dan kini mereka sangat yakin tentang kebijakannya langkah ini".<sup>142</sup>

129. Juga terdapat bukti bahwa dalam mengatasi dilema antara penggabungan dan penentuan nasib sendiri, Gough Whitlam cenderung lebih memilih yang pertama. Ia mengungkapkan pandangannya mengenai hal ini secara jujur dalam sebuah pesan rahasia yang ia kirim kepada Menteri Luar Negerinya pada 24 September 1974, dua minggu setelah pertemuannya di Wonosobo: "Saya mendukung penggabungan, tapi penentuan nasib sendiri perlu dituruti."<sup>143</sup> Duta besar Whitlam di Jakarta, Richard Woolcott, juga yakin bahwa dalam pandangan Perdana Menteri, penggabungan adalah tujuan yang lebih utama. Dan tampaknya juga menjadi pandangan Woolcott bahwa hal ini harus menjadi tujuan utama Australia hanya karena ini merupakan tujuan utama Indonesia. Dalam pesan telegramnya kepada Menteri Luar Negerinya, Don Willessee, pada 17 April 1975, tak lama sesudah pertemuan Townsville, Woolcott mempertentangkan pendapat menteri mengenai hal ini dengan pendapat Perdana Menteri:

[Anda] cenderung menekankan proses tindakan penentuan nasib sendiri yang selayaknya bagi Timor Portugis...[J]elas dalam pertemuan Townsville bahwa Perdana Menteri terus menganggap bahwa logika situasinya adalah bahwa Timor harus menjadi bagian dari Indonesia dan kita akan 'menyambut' hasil seperti itu dibandingkan tindakan pilihan sendiri. Walaupun kita mendukung prinsip penentuan nasib sendiri, dan meskipun kita tidak bisa membenarkan penggunaan kekuatan, Perdana Menteri tetap tidak menginginkan munculnya Timor-Leste yang merdeka dan ia percaya bahwa penekanan secara terbuka mengenai penentuan nasib sendiri, pada tahap ini, akan semakin memperkuat tekanan bagi kemerdekaan.<sup>144</sup>

130. Dalam otobiografinya Richard Woolcott mengutip dari telegram lain untuk menjelaskan pemikiran di belakang posisi ini:

Indonesia akan bertindak untuk menyatukan Timor. Sementara Presiden Soeharto ingin agar penyatuan ini dicapai dengan cara yang sedapat mungkin terlihat baik, Indonesia tidak akan mundur dari tujuan kebijakan yang mendasar ini. Indonesia menganggap hasil ini sangat esensial bagi kepentingan nasional jangka panjangnya dan, memang, merupakan juga kepentingan kawasan tersebut seutuhnya. Indonesia secara konsisten meyakini keputusan ini sejak beberapa bulan sebelum saya menduduki pos ini Maret lalu.<sup>145</sup>

## Pertemuan Makau, 26 - 28 Juni 1975

131. Pada April 1975 Gubernur Mário Lemos Pires membentuk Komisi untuk Dekolonisasi Timor (*Comissão de Descolonização de Timor*, CDT). Pertemuan Mei dengan koalisi UDT-Fretilin, yang diboikot oleh Apodeti, membahas program dekolonisasi yang didasarkan atas hak untuk merdeka, pemerintah transisi, dan majelis permusyawaratan lokal. Namun pada 27 Mei UDT memutuskan koalisinya dengan Fretilin, yang menyebabkan pembicaraan terhenti.<sup>146</sup> Sebagai tanggapannya, Portugal membuat rencana untuk mengadakan pembicaraan tingkat tinggi mengenai dekolonisasi di Makau.

132. Pada 26 - 28 Juni, Antonio de Almeida Santos, Menteri Koordinator Antar-Wilayah Portugal, bertemu dengan UDT, Apodeti, dan pengamat diplomatik Indonesia di Makau. Fretilin berkeberatan atas partisipasi Apodeti dan Indonesia, dan memboikot pertemuan tersebut. Fretilin curiga bahwa pertemuan tersebut merupakan bagian dari strategi Portugal untuk menyerahkan Timor-Leste kepada Indonesia:

*Mereka menjajah kami selama 450 tahun dan mereka sudah bosan, maka mereka berikan kami kepada orang lain sambil berkata, "Pergilah dan dirikan pemerintahan di sana sekarang." Jadi berapa lama kami akan menjadi budak? Karena itulah saya tidak bersedia pergi ke sana. Konferensi di Makau adalah taktik Portugal dan Indonesia untuk mengintegrasikan Timor ke Indonesia.<sup>147</sup>*

133. Anggota senior Fretilin lebih memilih untuk menghadiri upacara kemerdekaan Mozambik.<sup>148</sup> Pertemuan puncak Makau hanya menguntungkan kepentingan Indonesia karena pertemuan ini mengakui bahwa baik Apodeti maupun Jakarta memiliki kepentingan dalam proses ini. Hasil pertemuan tersebut adalah Undang-Undang 7/75, yang memaparkan: struktur pemerintahan sementara dengan partisipasi semua partai; jadwal untuk pemilihan umum 1976; dan berakhirnya kedaulatan Portugis pada 1978. Pertemuan ini juga menyusun dasar legislatif yang menutup upaya Indonesia untuk mendapat jaminan agar integrasi menjadi hasil akhir dari proses dekolonisasi sebagai hasil kesepakatan langsung. Tapi, sebagai langkah mundur dari pengakuan CDT pada Mei, Undang-Undang 7/75 hanya mengakui hak atas penentuan nasib sendiri. Pertemuan tersebut merancang proses dekolonisasi yang akan membentuk pemerintahan transisi, yang terdiri atas orang Timor-Leste yang dipilih dan orang-orang Portugis yang diangkat, dan sebuah dewan penasihat pemerintahan. Lembaga-lembaga nasional ini akan didukung di tingkat distrik oleh dewan-dewan lokal.

134. Partai-partai politik memiliki reaksi yang berbeda-beda terhadap program dekolonisasi yang diputuskan di Makau. Fretilin mengambil posisi yang tidak jelas, tidak menyatakan kesiapannya untuk ikut serta dalam pemerintahan transisi yang diusulkan, juga tidak sepenuhnya menolak, tapi hanya mengatakan bahwa mereka akan ambil bagian dalam pemilihan umum 1976 yang diusulkan.<sup>149</sup> UDT menerima hasilnya. Apodeti, seperti Indonesia, menolaknya dengan dasar bahwa kemerdekaan

memang merupakan satu-satunya pilihan, dan jangka waktunya terlalu lama. Setelah pertemuan ini, ketegangan antarpartai meningkat, UDT tersinggung atas boikot Fretilin, dan Fretilin marah karena Apodeti terlibat. Kedua partai besar Timor-Leste tersebut juga merasa bahwa Portugal tidak berterusterang, dan mengetahui tentang pertemuan bilateral antara Portugal dan Indonesia. Mario Carrascalão mengenang dampak dari pertemuan-pertemuan bilateral ini:

*Indonesia... mendampingi Apodeti ke Makau dan mengadakan pertemuan di Hong Kong dengan delegasi Pemerintah Portugis di sana. Apa yang mereka rencanakan? Sampai hari ini mereka tidak mengatakan apa yang mereka lakukan dalam rapat tersebut. Kami tidak tahu... Apa yang mereka lakukan? Ini bukan masalah Indonesia. Ini adalah masalah Timor, tetapi [Indonesia] merekalah yang mengadakan pertemuan. Pertemuan rahasia dengan mereka [Portugis]. Kenapa? Orang-orang memanfaatkan hal ini, akibatnya rakyat menjadi terbagi-bagi.<sup>150</sup>*

### **Pertemuan antara Presiden Soeharto dan Presiden Gerald Ford, 5 Juli 1975**

135. Pada 5 Juli, dalam sebuah pertemuan di Camp David dengan Presiden Gerald Ford selama kunjungan kenegaraannya ke Amerika Serikat, Presiden Soeharto menggariskan kebijakan Indonesia mengenai Timor-Leste. Ia menutup kata-katanya dengan kalimat:

Jadi, satu-satunya jalan adalah integrasi dengan Indonesia.

136. Soeharto berpendapat bahwa sebuah Timor Portugis merdeka tidak akan dapat berjalan, dan bahwa akan sulit bagi Portugal untuk bisa terus menjalankan negara ini karena keterpencilannya dari wilayah itu.<sup>151</sup>

137. Sebelumnya ia meyakinkan Presiden Ford bahwa Indonesia tidak akan menggunakan kekuatan terhadap wilayah negara lain. Seperti halnya dalam pertemuannya dengan Whitlam di Townsville, Soeharto membesar-besarkan argumen bahwa karena “tekanan kuat” oleh partai prokemerdekaan, akan sangat sulit untuk memastikan kehendak sebenarnya rakyat Timor-Leste. Indonesia menghadapi masalah “bagaimana mengatur sebuah proses penentuan nasib sendiri agar mayoritas ingin bersatu dengan Indonesia”. Selama percakapan mereka, Presiden Ford tidak mengungkapkan pandangannya mengenai posisi Amerika Serikat dalam persoalan ini.

138. Bungkamnya Ford mungkin merupakan cerminan kebijakan Amerika Serikat terhadap Timor Portugis. Menurut Mantan Duta Besar Australia untuk Indonesia, Richard Woolcott:

Amerika Serikat, terlibat di Timur Tengah, terbebani oleh dampak Watergate, dan kelelahan akibat kegagalannya di Vietnam, benar-benar tidak peduli akan masa depan Timor-Leste. Duta Besar Amerika Serikat di Jakarta bahkan diminta pada tahun 1975 untuk mengurangi laporan kedutaan tersebut mengenai masalah itu.<sup>152</sup>

## Gerakan Bersenjata 11 Agustus dan konflik bersenjata internal

### Tinjauan

139. Kurang dari dua minggu setelah kembali dari Jakarta, para pemimpin UDT melancarkan Gerakan Bersenjata 11 Agustus. Kadang disebut kudeta, percobaan kudeta, gerakan, atau pemberontakan, aksi bersenjata ini dimulai di ibukota Dili dan dengan cepat menyebar ke seluruh negeri. UDT merebut beberapa instalasi penting, dan memberikan daftar permintaan kepada pemerintah Portugis. Mereka mengklaim bahwa gerakan tersebut ditujukan untuk menghilangkan elemen-elemen ekstremis dari negeri tersebut untuk mencegah intervensi Indonesia.<sup>153</sup> Fretilin mundur ke basis pertahanan mereka di perbukitan Aileu. Karena dia tidak dapat menjamin keamanan, berbagai usaha Gubernur Portugis untuk mengajak kedua pihak ke meja perundingan tidak berhasil. Pada 20 Agustus, Fretilin membalas, dengan dukungan sebagian besar anggota militer Portugis yang orang asli Timor. Konflik ini meluas ke sebagian besar wilayah negeri tersebut. Para pemimpin kedua partai besar tersebut mengatakan kepada Komisi bahwa mereka kehilangan kendali atas situasi tersebut. Konflik bersenjata ini relatif cepat selesai, dan pada awal September, sekitar 20.000 orang yang sebagian besar dari UDT, tetapi juga termasuk anggota dari partai-partai lain, telah terdesak menuju perbatasan dengan Timor Barat. Mereka menyeberang ke Timor Barat sebelum akhir bulan.

140. Pemerintahan Portugis berusaha membawa partai-partai tersebut ke meja perundingan. Gubernur menyimpulkan bahwa dia tidak dalam posisi untuk mengendalikan situasi tersebut dengan cara-cara militer.<sup>154</sup> Tidak berdaya untuk memengaruhi kejadian-kejadian dan terkurung di zona netral di Farol, Pemerintahan Portugis menarik diri ke Pulau Ataúro pada malam hari 26 Agustus.

141. Pada September 1975 Indonesia mengharuskan UDT dan sekutu-sekutunya yang telah lari melintasi perbatasan untuk menandatangani petisi prointegrasi kepada Presiden Soeharto. Sebagai imbalannya, Indonesia menawarkan dukungan materi dan logistik. Indonesia meningkatkan operasi-operasi militernya sendiri, dengan pertama melancarkan beberapa serangan lintas-batas, dan kemudian, sejak awal Oktober, operasi-operasi militer berskala lebih besar yang berhasil menguasai sejumlah kota-kota strategis di dekat perbatasan.<sup>155</sup>

## UDT melancarkan gerakan bersenjata 11 Agustus

142. Sejak pecahnya koalisi mereka pada Mei, ketegangan antara UDT dan Fretilin terus meningkat, baik di Dili maupun di distrik-distrik.<sup>156</sup> Pada awal Agustus, UDT memutuskan untuk mengirim sekretaris jenderal mereka, Domingos de Oliveira, dan anggota Komite Sentral yang bertanggung jawab atas hubungan luar negeri, João Carrascalão, ke Jakarta. Mereka berharap dapat bertemu dengan Presiden Soeharto. Namun mereka justru ditemui oleh Ali Moertopo. Domingos de Oliveira mengatakan pada Komisi bahwa keputusan untuk mengirim delegasi ke Jakarta didorong oleh adanya kebutuhan “untuk menghancurkan semua dalih Indonesia untuk menginvasi Timor”. Misi kedua wakil UDT tersebut adalah untuk meyakinkan Moertopo bahwa Fretilin sesungguhnya adalah gerakan nasionalis dan bahwa UDT mampu “membersihkan pekarangan kami sendiri” dengan mengusir pejabat-pejabat Portugis dan para pemimpin Fretilin yang bersimpati kepada komunis. Menurut cerita João Carrascalão tentang pertemuan tersebut, Moertopo mengatakan jika mereka memang mampu membersihkan pekarangannya sendiri, Indonesia akan menghormati hak penentuan nasib sendiri rakyat Timor. Dengan merenungkan kembali, João Carrascalão sekarang menganggap kedua wakil UDT tersebut sungguh naif karena memercayai kata-kata Moertopo dan bahwa sesungguhnya “semuanya telah direncanakan untuk pengambilalihan Timor-Leste”, seperti yang dikatakan padanya dalam suatu percakapan pribadi di Kupang dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur, El Tari, dalam perjalanannya kembali ke Dili.<sup>156</sup>

143. Tentu saja ini juga merupakan pandangan dari diplomat yang mungkin paling banyak tahu di Jakarta, Duta Besar Australia Richard Woolcott, bahwa jauh sebelumnya sudah “menjadi kebijakan Indonesia yang tetap untuk menggabungkan Timor”.<sup>157</sup> Pada pertemuan tersebut Ali Moertopo mengatakan bahwa Indonesia telah menerima informasi dari intelijen bahwa Fretilin merencanakan kudeta pada 15 Agustus.<sup>158</sup>

144. Para anggota UDT telah mempertimbangkan aksi antikomunis selama beberapa minggu sebelum 11 Agustus.<sup>159</sup> Tujuan utama dari gerakan bersenjata adalah, seperti yang ditekan para pemimpinnya sekarang, bukan untuk mengambilalih kekuasaan melainkan untuk meluruskan kembali proses dekolonisasi yang dipercaya UDT telah dibajak oleh elemen-elemen “ambisius, tidak bertanggung jawab, dan bermaksud buruk”, dan untuk mencegah kudeta Fretilin, yang konon direncanakan pada 15 Agustus.<sup>160</sup> Tetapi, ada banyak pertanyaan yang tidak terjawab, khususnya tentang peran Indonesia dalam berbagai kejadian ini dan apa tujuan sebenarnya dari para pemimpin kudeta tersebut. Sejumlah kesaksian yang diterima Komisi sedikit menjelaskan pertanyaan-pertanyaan ini, tapi tidak cukup untuk memberi jawaban yang pasti atas sejumlah pertanyaan tersebut.

.....  
\* Dalam submisinya kepada CAVR, mantan Sekretaris Jenderal UDT Domingos de Oliveira, memberikan daftar tentang insiden yang terjadi antara Juni dan awal Agustus yang menunjukkan rusaknya hubungan kedua partai. [Submisi diberikan tertulis setelah kesaksian dalam Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Politik Internal 1974 - 1976, 15-18 Desember 2003. Arsip CAVR.]

145. Meskipun daftar sasaran mereka jauh lebih panjang dan termasuk semua fasilitas militer utama, gerakan bersenjata tersebut merebut markas polisi dan ‘menangkap’ komandannya Letnan Kolonel Rui Magiolo Gouveia serta pasokan senjatanya, dan menguasai sejumlah instalasi penting, termasuk pelabuhan, bandar udara, dan fasilitas radio dan telepon di Dili.<sup>161</sup> Pemimpin gerakan bersenjata João Carrascalão bertemu dengan Gubernur Lemos Pires sekitar pukul 1 pagi pada 11 Agustus, dan menyatakan maksud UDT untuk menghilangkan berbagai elemen komunis dari pemerintah dan dari Fretilin. Mantan gubernur menulis beberapa tahun kemudian bahwa gerakan tersebut tidak bermaksud untuk menyingkirkan pemerintah Portugis, dan bahwa gerakan itu tidak mengharapkan intervensi militer. Keesokan harinya gerakan ini mengajukan tuntutan kepada Gubernur Lemos Pires. Tuntutan tersebut termasuk: penggantian anggota militer tertentu, proses dekolonisasi yang dipercepat, mengalihkan kekuasaan kepada UDT, dan mengakui wewenang ekstra-yudisial UDT sebagai gerakan pembebasan.<sup>162</sup>

146. Unjuk kekuatan UDT tersebut konon tidak diarahkan kepada Fretilin, tetapi lebih kepada “unsur-unsur komunis” di dalam Fretilin. Namun segala harapan UDT bahwa Fretilin akan serta-merta membuang para “ekstremis”-nya dan bergabung dengan UDT untuk bersama-sama memperjuangkan kemerdekaan segera pupus. Fretilin tetap bersatu dan menuntut pemerintah kolonial Portugis untuk melucuti UDT.<sup>163</sup> UDT menahan ratusan anggota Fretilin, termasuk beberapa pemimpin partai di markasnya di Palapaço, Dili, di mana penganiayaan adalah sesuatu yang biasa dan ada beberapa orang yang meninggal dalam keadaan yang tidak jelas.<sup>164</sup>

147. Momentum awal berada pada UDT. Selama beberapa hari setelah “percobaan kudeta” pada 11 Agustus, para pendukung UDT menahan ratusan pemimpin Fretilin dan pendukungnya di seluruh wilayah tersebut. Gubernur Lemos Pires memutuskan untuk tidak menentang UDT dengan kekerasan. Beberapa pertimbangan membuatnya tidak melakukan tindakan tersebut. Dia tidak yakin apakah kesetiaan para *tropas* (tentara) Timor pada pemerintahan kolonial lebih kuat dibanding simpati mereka pada salah satu partai yang bersaing. Jika tidak, ada risiko para prajurit Portugis akhirnya akan berperang melawan orang Timor. Konfrontasi antara orang Portugal dan orang Timor tidak saja akan menjadi bencana politik; tetapi bisa juga berakhir dengan kekalahan militer bagi Portugis. Lemahnya kekuatan pasukan Portugis dalam beberapa bulan sebelumnya tidak bisa tergantikan dengan kedatangan 75 pasukan terjun payung untuk memperkuat tentara kolonial.<sup>165</sup>

148. Sementara itu, para pemimpin Fretilin mundur ke Aileu, sebuah basis pertahanan Fretilin dan markas pusat pelatihan tentara (*Centro de Instrução*). Pada 13 Agustus di Dili, UDT dan para simpatisannya dalam angkatan bersenjata membentuk sebuah front, Gerakan untuk Persatuan dan Kemerdekaan Rakyat Timor (*Movimento para Unidade e Independência de Timor-Dili*, MUITD), berdasarkan prinsip-prinsip “persatuan, kemerdekaan, dan antikomunisme”. Mereka meramalkan adanya peleburan semua partai prokemerdekaan dan kesetiaan para anggotanya pada MUITD.<sup>166</sup> Dalam dua hari berikut, UDT berhasil meyakinkan kepala polisi,



Magiolo Gouveia, yang berada dalam tahanan UDT, dan banyak warga Timor di bawah komandonya, juga sebagian militer, termasuk kompi-kompi yang berbasis di Baucau dan Lospalos.<sup>167</sup> Pada 16 Agustus, UDT mengeluarkan pernyataan tertulis mengimbau pengusiran semua orang komunis dari wilayah tersebut, termasuk mereka yang berada dalam “Kantor Gubernur Portugis”, pelarangan Fretilin, pembatalan Undang-Undang 7/75, dan dilanjutkannya negosiasi tentang kemerdekaan Timor-Leste. Pada 17 Agustus, yang tampaknya merupakan sebuah konsesi terhadap UDT, kedua orang delegasi MFA, Mayor Mota, kepala Kantor Urusan Politik dan Mayor Jonatas, yang keduanya dituduh oleh UDT (dan pihak Indonesia) sebagai wakil “sayap komunis” di pemerintahan, dikirim ke Lisabon, tampaknya untuk memberi laporan kepada pemerintah pusat tentang perkembangan di Timor-Leste.<sup>168</sup>

## Kegagalan negosiasi: Konflik bersenjata internal

149. Pada 11 Agustus, dari basis mereka di Aileu, Fretilin memberikan daftar berisi 13 syarat untuk berpartisipasi dalam negosiasi kepada pemerintahan Portugis. Di antaranya adalah pelucutan senjata UDT dan memberikan tanggung jawab keamanan pada para serdadu Timor-Leste, dengan alasan bahwa polisi telah terbukti tidak dapat diandalkan.<sup>169</sup> Pihak Portugis kemudian mengirim Rogério Lobato, serdadu Timor dengan pangkat paling tinggi dalam tentara Portugis, sebagai utusan kepada pimpinan Fretilin. Tetapi ini justru berbalik, dan dia berperan penting ketika kembali ke Dili dan meyakinkan mayoritas serdadu Timor-Leste untuk bergabung dengan pihak Fretilin. Meskipun sebelumnya bersumpah untuk bersikap netral secara politik (*apartidarismo*),<sup>170</sup> tentara Timor-Leste ikut terbawa dalam arus kebebasan politik baru seperti rekan-rekan sipilnya.<sup>171</sup> Pada 15 Agustus, Komite Sentral Fretilin di Aileu mengumumkan apa yang mereka sebut “dilanjutkannya perjuangan bersenjata umum melawan semua pengkhianat dan musuh-musuh rakyat”.<sup>172</sup> Pada 20 Agustus, Fretilin melancarkan serangan melawan UDT.

150. Pada 18 Agustus, pegawai pemerintah Portugis yang tersisa telah mundur ke lingkungan Farol, tempat sebagian besar dari mereka tinggal dan yang membentuk pusat zona di Dili yang dinyatakan netral. Pasukan terjun payung Portugis dikerahkan ke zona netral untuk melindungi mereka.

151. Pada pukul 01.00 20 Agustus, Rogério Lobato dan Hermenegildo Alves melancarkan pemberontakan bersenjata Fretilin dengan mengambil alih *Quartel Geral* (markas tentara) di Taibessi dan menahan tentara Portugis yang berada di situ, termasuk wakil kepala staf.<sup>173</sup> Pada 22 Agustus, pemimpin Fretilin kembali ke Dili. Garis depan konflik di Dili pada awalnya berada di Colmera, tapi pertempuran menyebar ke seluruh kota selama dua minggu berlangsungnya pertempuran tersebut. Komisi menerima kesaksian bahwa senjata tersedia dalam jumlah besar di Dili, dan bahwa kedua pihak membagikannya dengan sembarangan.<sup>174</sup> Dalam konflik bersenjata singkat tersebut para partai politik bersekutu dengan partai lain melalui segala kemungkinan. Mario Carrascalão menggambarkan fenomena ini dalam Audiensi Publik tentang Konflik Internal:

*Kami melihat pendekatan yang berbeda di sana [di distrik-distrik]...  
Di Atsabe kami melihat Fretilin bersama dengan UDT melawan  
Apodeti. Apodeti di Same berbeda, mereka bersama UDT melawan  
Fretilin. Di Dili, Fretilin dan Apodeti melawan UDT.*<sup>175</sup>

152. Angka kematian tertinggi terjadi di perdesaan, tempat ketegangan yang bersumber dari pertikaian antarsuku yang sudah lama dan dendam-dendam pribadi, lebih dipicu lagi oleh berbagai perbedaan militan kepertaian, dan meledak menjadi kekerasan.<sup>176</sup> Kekerasan paling hebat terjadi di Liquiçá, Ermera, Ainaro, Manufahi, dan Manatuto, meskipun tidak terbatas di berbagai distrik ini saja.

153. Komisi menerima kesaksian dan pernyataan dari seluruh negeri tentang dampak konflik terhadap rakyat biasa. Kebrutalan rakyat Timor-Leste melawan sesamanya dalam konflik singkat ini telah meninggalkan luka yang dalam pada masyarakat Timor-Leste yang terus dirasakan hingga hari ini. Para anggota UDT bertanggung jawab atas pembunuhan berbagai tahanan Fretilin di sejumlah tempat pada Agustus, setelah semakin jelas bahwa Fretilin semakin memperkuat kekuasaan mereka. Sebanyak 348 pembunuhan selama periode konflik internal telah dilaporkan kepada Komisi. Berdasarkan pada penelitiannya serta pada laporan masa itu dari organisasi seperti ICRC, yang bekerja di Timor-Leste saat itu, Komisi memperkirakan bahwa antara 1.500 dan 3.000 orang terbunuh semasa konflik bersenjata internal. (Lihat Bab 7.2: Pembunuhan dan Penghilangan Paksa; dan Bagian 6: Profil Pelanggaran Hak Asasi Manusia.)<sup>177</sup> Data Komisi menunjukkan bahwa sebagian besar pembunuhan dilaksanakan oleh Fretilin, meskipun pembunuhan massal juga dilakukan oleh UDT (lihat Bab 7.2: Pembunuhan Tidak Sah dan Penghilangan Paksa).<sup>\*</sup> Suatu pembantaian terjadi pada 27 Agustus 1975 di pantai selatan di Wedauberek, Manufahi, tempat para anggota UDT mengeksekusi 11 anggota organisasi pemuda Fretilin, Unetim.<sup>178</sup> Pada 28 Agustus, dengan semakin mendekatnya pasukan Fretilin ke basis pertahanan UDT di Ermera, 20 orang yang ditahan oleh UDT sesudah gerakan bersenjata dibunuh.<sup>179</sup>

154. Dalam kesaksiannya kepada Komisi, Xanana Gusmão menjelaskan tanggapan Fretilin sebagai balas dendam atas aksi-aksi yang dilakukan UDT.<sup>180</sup> Rogério Lobato, yang memimpin pasukan bersenjata Fretilin saat itu, mengatakan kepada Komisi bahwa ada beberapa motivasi berbeda untuk kekerasan tersebut :

*Kadangkala ini bukan karena mereka memiliki masalah dengan [yang lain] tentang situasi [politik] ini, tetapi dari masalah lama. Saya tahu kadang itu karena mereka merebut pacarnya sehingga sekarang mereka menggunakan kesempatan itu untuk menghajarnya. Saya tahu ini. Orang memanfaatkan perang ini untuk menghajar orang lain dan main hakim sendiri. Tapi sebagian dari mereka memang menghajar [lawanannya] karena mereka marah selama perang... Saya ingin mengatakan bahwa*

.....  
\* CAVR telah melaksanakan Survei Tingkat Kematian Retrospektif yang didasarkan pada pengalaman dari 1.396 rumah tangga yang dipilih secara acak di Timor-Leste. Dari survei ini, CAVR mengekstrapolasi perkiraan pelanggaran total untuk 1974 - 1999.

*dalam proses perang ini banyak sekali yang meninggal... memang benar Fretilin membunuh banyak tahanan UDT... UDT juga membunuh para tahanan Fretilin.*<sup>181</sup>

155. Dalam Audiensi Publik Komisi tentang Konflik Internal, para pemimpin politik UDT dan Fretilin memberi kesaksian bahwa partai mereka tidak memiliki kebijakan untuk membunuh tahanan, atau kekerasan terhadap rakyat sipil, tetapi mereka tidak dapat mengendalikan kader mereka di seluruh negeri.<sup>182</sup> Namun, Komisi menerima sejumlah kesaksian yang menyatakan adanya keterlibatan para anggota senior kedua partai tersebut dalam pembunuhan, meskipun tidak disertai dengan bukti bahwa partai-partai tersebut mengambil keputusan institusional dalam melakukan kejahatan-kejahatan ini (lihat Bagian 8: Tanggung jawab dan pertanggungjawaban).<sup>183</sup>

156. Orang Timor yang menjadi anggota militer dan polisi Timor Portugis, dan sebagian orang Portugis, tidak berdiri di luar konflik ini. Sementara UDT mendapat dukungan anggota polisi orang Timor (dan beberapa orang Portugis) dan beberapa unit militer, mayoritas pasukan Timor mendukung Fretilin.<sup>184</sup> Dukungan militer ini memungkinkan Fretilin untuk unggul dengan cepat setelah melancarkan pemberontakan bersenjata umum. Pelanggaran prinsip *apartidarismo* ini juga mengakibatkan tersebarnya senjata-senjata api ke tangan partai-partai politik dan pendukung mereka, yang sangat meningkatkan dampak kekerasan tersebut. Di Dili, UDT mundur ke bandar udara, dan pada awal September telah mundur ke barat melalui Liquica ke arah Indonesia.

## UDT mundur ke perbatasan

157. Sebagai akibat dari serangan balasan Fretilin, pada September para anggota dan simpatisan partai UDT, Apodeti, Klibur Oan Timor Aswain (KOTA), dan TRABALHISTA lari; pertama ke daerah perbatasan Batugade, dan kemudian melintasi perbatasan ke Timor Barat.<sup>185</sup> Kekalahan UDT dan para sekutunya mendorong para pemimpinnya, bagaimanapun enggan, menerima permintaan Indonesia untuk menandatangani petisi yang mengimbuai integrasi Timor Portugis ke dalam Indonesia sebagai harga bagi keselamatan perjalanan mereka ke Timor Barat. Jumlah warga Timor-Leste yang dipindahkan ke Timor Barat telah dipertentangkan. Pejabat-pejabat Indonesia saat itu menyebut angka sekitar 40.000 – 50.000 orang.<sup>186</sup> Warga Timor-Leste yang ikut dalam pelarian tersebut menyebut angka yang jauh lebih rendah, sekitar 10.000 sampai 30.000, dan menyatakan bahwa perbedaan antara perkiraan mereka dan perkiraan Indonesia ini karena Indonesia ingin membesarkan angka jumlah pengungsi, baik untuk membesarkan skala dan parahnya konflik internal, ataupun untuk menarik jumlah bantuan internasional yang lebih besar.<sup>187</sup>

## Tanggapan Portugal terhadap konflik internal

158. Portugal menanggapi konflik internal dengan mengirim utusan ke koloni dari Lisabon. Indonesia menghalangi usaha utusan pertama Kolonel José Gomes untuk sampai ke Dili pada 14 Agustus. Pada 22 Agustus sebuah pesan dari Kantor Kepresidenan di Lisabon sampai ke Gubernur Lemos Pires, memberikan informasi bahwa Menteri Koordinator Antar-Wilayah, Antonio de Almeida Santos, akan tiba di Darwin pada 27 Agustus. Mário Lemos Pires berusaha mengatur gencatan senjata untuk memungkinkan negosiasi. UDT setuju untuk melakukan gencatan senjata terbatas, tapi Fretilin menolak usulan tersebut mentah-mentah.<sup>188</sup> Pada malam hari 26 Agustus, orang-orang yang tersisa dari pemerintahan Portugis meninggalkan Dili menuju Pulau Ataúro, dan tidak pernah kembali.<sup>189</sup>

159. Setelah berusaha mencari dukungan ke PBB dan Australia, Almeida Santos tiba di Ataúro pada 28 Agustus. Karena tidak berhasil menghubungi UDT, yang para pemimpinnya saat itu berada di Indonesia, Almeida Santos menghubungi Fretilin dan meminta agar para tahanan Portugis dibebaskan. Fretilin mengabaikan permintaan ini. Tetapi, pada 9 September, Portugal memberi petunjuk kepada Almeida Santos untuk menghindari mengakui Fretilin sebagai satu-satunya wakil rakyat Timor-Leste, salah satu syarat yang ditetapkan Fretilin untuk ikut negosiasi.<sup>190</sup> Pada 22 September, Almeida Santos meninggalkan Ataúro menuju Lisabon. Di sana, dia merekomendasikan negosiasi dengan tiga partai politik utama. Ini menjadi problematis. Karena sudah menguasai sebagian besar Timor-Leste, Fretilin mau bernegosiasi dengan Portugal—namun tidak dengan UDT dan Apodeti. Meskipun terjadi banyak deklarasi dari pertemuan bilateral terakhir antara Menteri Luar Negeri Indonesia dan Portugal, yang diadakan di Roma pada 1 - 2 November, bahwa kedua pihak pemerintah akan bekerja untuk meyakinkan sejumlah partai tersebut tentang perlunya melanjutkan pembicaraan dengan pemerintah Portugal, Indonesia tidak menunjukkan itikad untuk membiarkan UDT dan Apodeti terlibat dalam pembicaraan seperti itu. Usaha yang terlambat dari Portugal untuk menyertakan negara-negara lain dalam menyelesaikan masalah Timor Portugis juga tidak berbuah. Hari-hari akhir sebelum invasi ditandai dengan satu lagi krisis politik di Lisabon, yang mengakibatkan Portugal tidak lagi memiliki pemerintah yang fungsional. Pada akhirnya, usaha-usaha Portugal yang setengah-setengah ini dilumatkan oleh keputusan Indonesia untuk melancarkan invasi militer skala penuh.<sup>191</sup>

## Tanggapan Indonesia

### Partai-partai politik Timor-Leste berada di bawah pengaruh Indonesia

160. Dengan larinya para anggota UDT dan sekutunya—partai Apodeti, Trabalhista, dan KOTA—ke daerah perbatasan, atau melintas ke Timor Barat, mereka semakin berada dalam pengaruh kekuasaan militer Indonesia.

161. Selama dan sesaat setelah konflik internal, pada awal September, berbagai kelompok Timor-Leste di Maliana dan Suai melakukan dua proklamasi integrasi dengan Indonesia.<sup>192</sup> Pada 7 September 1975, di Batugade, para pemimpin UDT, KOTA, dan Trabalhista mengeluarkan petisi bersama yang ditujukan pada Presiden Soeharto, kembali meminta Timor Portugis untuk diintegrasikan dengan Indonesia.<sup>193</sup> Mario Carrascalão memberi kesaksian pada Komisi tentang latar belakang penandatanganan Petisi Batugade:

*Kami tetap di sana dan setiap hari orang dari Indonesia datang. Louis Taolin [dari Bakin], [Kolonel Aloysius] Sugianto [dari Opsus] selalu datang dan menanyakan kami memerlukan bantuan apa... Apa yang ingin mereka lakukan adalah memanipulasi kami, untuk menandatangani... sebuah petisi yang meminta Indonesia untuk masuk ke Timor... Sebagian orang menandatangani di bawah todongan senjata. Sebagian pergi ke Atambua, dan mereka menandatangani di sana. Kondisinya bagus di sana. Petisi ini kemudian dikirim ke Presiden Soeharto, dan tak lama kemudian Gubernur El Tari memberikan tanggapan pada Senhor [bapak] Francisco Lopes da Cruz. Dia mengatakan bahwa dia setuju untuk memberi kami materi, bahwa tidak perlu khawatir. Ini bukan integrasi, saya melihat ini hanya sebagai fasilitas.<sup>194</sup>*

## **Operasi Flamboyan: operasi Indonesia memasuki tahapan baru**

162. Pada 31 Agustus, operasi Indonesia dialihkan dari badan intelijen, Bakin, ke sebuah komando militer yang khusus dibuat bernama Komando Tugas Gabungan (Kogasgab). Pengalihan ini menandai perubahan penting dalam operasi-operasi Indonesia di wilayah tersebut, perubahan dari destabilisasi skala kecil ke operasi militer berskala lebih besar.<sup>195</sup>

163. Pada akhir Agustus dan September, berbagai unit Pasukan Khusus yang direkrut untuk operasi baru tersebut, yang disebut Operasi Flamboyan, sering melakukan sejumlah penyusupan ke dalam Timor Portugis. Jumlah korban yang tinggi memaksa aktivitas mereka berhenti sejenak.<sup>196</sup> Yang pertama, Tim Susi, dipimpin oleh Kapten Yunus Yosfiah, memasuki Atsabe.<sup>197</sup> Para partisan Timor-Leste bergabung dengan sejumlah tim Pasukan Khusus. Ini merupakan pasukan yang dilatih oleh Indonesia termasuk, contohnya, unit Halilintar João Tavares (lihat Bagian 4: Rezim pendudukan). Mereka diperintahkan untuk menciptakan “teror, [dan] intimidasi.”<sup>198</sup> Pada 14 September, pasukan Fretilin bertempur dengan militer Indonesia dekat perbatasan Atsabe.<sup>199</sup> Pada hari yang sama, militer Indonesia melancarkan serangan-serangan serempak dengan sasaran Bobonaro, Atsabe, dan Suai.<sup>200</sup> Kota perbatasan Batugade jatuh pada 8 Oktober, dan pasukan-pasukan Fretilin mundur ke Balibó.<sup>201</sup>

# Timor Portugis di bawah administrasi Fretilin

## Tinjauan

164. Dengan berakhirnya pertikaian antara Fretilin dan UDT, pada awal September 1975, Fretilin kini berada dalam posisi sebagai penguasa *de facto* Timor Portugis yang tengah menghadapi keadaan darurat. Fretilin tetap menghormati kedaulatan Portugis atas wilayah ini sementara pemerintahan kolonial Portugis tetap tinggal di Pulau Ataúro. Kekurangan dana dan pengalaman pemerintahan, dan dihadapkan dengan kemungkinan krisis kemanusiaan, Fretilin melakukan upaya sungguh-sungguh untuk mendistribusikan makanan dan memelihara ketertiban masyarakat. Tapi, Fretilin terus menahan tahanan politik dari masa konflik bersenjata yang singkat dan menghadapi kesulitan mencegah berbagai pelanggaran oleh para kadernya sendiri. Sebagai tambahan, tanggapan Indonesia atas kemenangan Fretilin dalam konflik bersenjata internal adalah dengan meningkatkan kegiatan militernya. Mulai September 1975, Indonesia mulai melancarkan penyusupan bersenjata ke wilayah Timor Portugis. Pada Oktober, berbagai penyerangan ini menjadi semakin besar dan sebagai hasilnya Indonesia mampu merebut beberapa kota dekat perbatasan. Selain melakukan perlawanan langsung terhadap kekuatan Indonesia, Fretilin juga berusaha menarik dukungan internasional.

## Fretilin mengisi kekosongan

165. Untuk mengisi kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan Portugis, Fretilin membentuk administrasi pemerintahan sementara. Selama masa ini, Fretilin terus mengakui kedaulatan Portugis atas Timor-Leste dan berulang kali menyerukan kepada Portugal untuk kembali dan meneruskan proses dekolonisasi yang terputus. Fretilin membiarkan bendera Portugis berkibar di depan kantor gubernur dan membiarkan kantor tersebut kosong.<sup>202</sup> Fretilin juga melakukan hal-hal lain untuk memperlihatkan sikap bahwa mereka masih menganggap Portugal sebagai penguasa yang berdaulat, seperti menempatkan penjaga bersenjata di luar Banco Nacional Ultramarino (BNU), bank milik Portugis, yang berfungsi sebagai bank sentral *de facto* selama masa pemerintahan Portugis, dan melarang penggunaan kediaman gubernur untuk bermacam keperluan resmi.<sup>203</sup>

166. Selama September Fretilin terus berupaya mendorong Portugal untuk kembali. Pada 13 September Komite Sentral Fretilin mengeluarkan komunike yang menegaskan kembali pengakuannya atas kekuasaan Portugal dan menyerukan dilakukannya negosiasi untuk kembali melanjutkan proses dekolonisasi.<sup>204</sup> Fretilin menyatakan bahwa negosiasi harus dilakukan “di dalam wilayah nasional tanpa tekanan dari luar”, dan harus dilakukan hanya dengan Fretilin sebagai pemenang satu-satunya dalam konflik internal. Portugal tidak menerima Fretilin sebagai satu-satunya wakil yang sah dari rakyat Timor Portugis.<sup>205</sup> Pada 16 September, menanggapi serangan Indonesia di Atsabe, Fretilin mengeluarkan pernyataan lainnya, yang sekali lagi mengakui kedaulatan Portugis dan menyerukan dilanjutkannya perundingan mengenai dekolonisasi.<sup>206</sup>

167. Pernyataan-pernyataan ini juga mengusulkan diangkatnya permasalahan Timor-Leste ke kancah internasional dengan melibatkan negara-negara lain di kawasan itu. Fretilin merekomendasikan bahwa sebuah misi pencari fakta, yang terdiri atas negara-negara anggota ASEAN, Australia, Selandia Baru, bersama pengamat dari negara-negara lain, mengunjungi negeri tersebut. Pernyataan 16 September itu juga menyerukan diadakannya sebuah konferensi yang dihadiri oleh perwakilan dari Portugal, Australia, Indonesia, dan Timor-Leste, untuk “menjernihkan kabar burung dan kesalahpahaman”. Fretilin juga merekomendasikan pasukan perdamaian gabungan Indonesia - Timor-Leste untuk melakukan patroli perbatasan gabungan.

168. Pada Oktober, organisasi nonpemerintah dari Australia ACFOA (*Australian Council for Overseas Aid*) mengirim delegasi, yang dipimpin oleh James Dunn, untuk berusaha menyatukan Fretilin, UDT, dan Administrasi Portugis untuk berdialog. Tapi hal ini tidak terjadi, sebagian karena keengganan Portugal untuk bertemu dengan Fretilin maupun UDT.<sup>207</sup> Upaya terakhir Fretilin untuk mengajak Portugis dilakukan 25 Oktober, sembilan hari setelah Balibó jatuh ke tangan pasukan Indonesia. Fretilin mengirim undangan kepada pemerintah Portugis di Ataúro untuk mengirim delegasinya ke Dili untuk mengamati situasi di lapangan.<sup>208</sup> Seperti sebelumnya, Portugis hanya diam.<sup>209</sup>

## Tahanan dan kekerasan politik

### Ekses Fretilin di akhir Agustus menjelang September

169. Selama masa awal penguasaan Fretilin setelah konflik internal, terjadi berbagai ekses seperti kerja paksa, penyiksaan, dan eksekusi.<sup>210</sup> Sebagian besar pembunuhan yang terjadi di luar pertempuran dilakukan di perdesaan, setelah Fretilin melancarkan aksi balasannya. Kemarahan publik sering berubah menjadi kekerasan yang mematikan. Selama masa ini, pembunuhan oleh orang-orang yang terkait dengan Fretilin kadang terjadi akibat perseteruan lokal yang mendalam ketimbang politik.<sup>211</sup> Presiden Fretilin kala itu, Francisco Xavier do Amaral, menjelaskan kepada Komisi bahwa ketika itu:

*Ada banyak kebingungan. Semuanya naik pitam, darah mereka mendidih, dan karenanya orang-orang saling menyerang. Kekerasan terjadi. Kemenangan satu pihak akan menimbulkan pembalasan dari pihak lain. Inilah yang terjadi pada 1975... Contohnya, beberapa orang dipecat dari pekerjaannya. Mereka melakukan pembalasan kepada atasan mereka, ketika muncul kesempatan... Pihak yang satu memukul dan membunuh pihak yang lain. Dan karena itu siklus kebencian berlanjut.<sup>212</sup>*

170. Banyak pembunuhan balas dendam terjadi di Distrik Ermera, sebuah basis UDT. Sebuah kesaksian dari Ermera mengatakan bahwa:

*Pada 15 September 1975, [tiga] komandan milisi Fretilin... menangkap tujuh orang UDT... di desa Katrai Kraik, Letefoho, Ermera. Ketujuh orang tersebut dibawa ke Germano, Desa Katrai Leten, dan dibunuh. Kepala desa Lauana menyaksikan pembunuhan tersebut.<sup>213</sup>*

171. Seperti yang dikatakan para pemimpin Fretilin dalam kesaksiannya kepada Komisi, kenyataan bahwa senjata yang dirampas selama konflik tersedia dengan mudah, memperburuk situasi kekerasan.<sup>214</sup>

## **Penjara Fretilin dan Komisi Penyelidikan**

172. Selama masa konflik internal, Fretilin menangkap dan menahan 2.000 tahanan.<sup>215</sup> Sebagian besar adalah anggota UDT, namun ada juga anggota Fretilin, yang ditahan karena apa yang mereka sebut sebagai eksese selama konflik.<sup>216</sup> Posisi resmi Fretilin adalah bahwa mereka menahan orang-orang sampai pemerintahan Portugis kembali untuk mengadili mereka. Namun ketika harapan kembalinya Portugal semakin pupus, Fretilin memutuskan untuk menangani situasi tersebut sendiri. Pada 30 September Fretilin mengumumkan didirikannya sebuah Komisi Penyelidikan (*Comissão de Inquérito*) untuk memisahkan para pemimpin dari para anggota partai yang tidak terlibat.<sup>217</sup> Komisi Penyelidikan mengundang rakyat untuk memberi kesaksian dalam menentukan kesalahan tertuduh di sejumlah “pengadilan” umum. Metode peradilan seperti ini cenderung menghasilkan hukuman yang sewenang-wenang. Seorang mantan tahanan yang ditahan Fretilin, Monis da Maia, menggambarkan pengalamannya:

*Semua penduduk kampung diperintahkan untuk pergi ke pos militer dan para tahanan dibawa keluar satu demi satu dan “diadili”. Tahanan-tahanan yang dituduh melakukan kejahatan berat dibawa ke Aileu. Ketika tiba giliran saya, semua orang berdiam diri sampai H1 mulai memancing-mancing mereka. Ia menyuruh mereka mengatakan bahwa saya telah memukul mereka. Orang-orang itu menolak kecuali satu orang yang berkata, “Ia memaki kakek saya.” Karena ini saya dibawa ke Aileu, dituduh memaki kakek seseorang.<sup>218</sup>*

173. Fretilin memindahkan para pemimpin regional UDT ke Dili atau Aileu untuk diperiksa oleh komisi.<sup>219</sup> Di Aileu, para pemimpin UDT ditahan di gedung Companhia di Aissirimou, dan para anggota partai biasa ditahan di sebuah gudang besar.<sup>220</sup> Penduduk diperkenankan melampiaskan kemarahan mereka kepada para tahanan yang baru datang:

*Mayor Lorenço yang paling parah dipukuli saat ia tiba di Aileu karena ia adalah komandan. Mereka meletakkannya di atap mobil [yang ditumpangi saat dia datang] dan membawanya keliling Aileu dan mereka berteriak “Viva Fretilin”. Seseorang menusuknya dan ia berdarah. Wajahnya bengkok dan ia tidak dapat berbicara.<sup>221</sup>*



174. Para pemimpin UDT yang tertangkap, termasuk Wakil Presiden Partai, César Mouzinho, mendapat perlakuan yang paling buruk.<sup>222</sup> Tapi, para mantan tahanan bersaksi bahwa pemukulan dan penganiayaan adalah hal yang biasa, contohnya ketika seorang penjaga Fretilin memaksa para tahanan untuk baku-pukul di depan umum, seperti mengadu ayam.<sup>223</sup>

175. Selama masa pemerintahannya, Fretilin mengizinkan anggota ICRC (Komite Palang Merah Internasional) untuk mengakses berbagai penjaranya. Para pengamat Australia yang mengunjungi berbagai penjara Fretilin pada 1975 mengonfirmasikan bahwa beberapa tahanan dipukuli, termasuk mantan kepala polisi, Letnan Kolonel Magiolo Gouveia, walaupun mereka menyimpulkan bahwa secara umum, para tahanan dalam keadaan sehat dan diperlakukan dengan baik.<sup>224</sup>

176. Para anggota senior Fretilin yang bersaksi di hadapan Komisi mengakui bahwa selama masa itu anggota-anggota Fretilin melakukan penganiayaan terhadap para tahanan. Rogério Lobato, yang ketika itu menjabat kepala Angkatan Bersenjata Fretilin, mengatakan kepada Komisi:

*Sering kali mereka [Fretilin] memasuki penjara, mengejek para tahanan dan memukuli para tahanan tersebut... Orang-orang mengambil keuntungan dari konflik ini untuk memukuli orang lain dan untuk main hakim sendiri. Namun beberapa memang memukuli mereka karena marah pada mereka sehubungan dengan konflik ini.*<sup>225</sup>

177. Pada Oktober 1975, ketika serangan penyusupan Indonesia dimulai kembali, Fretilin menahan beberapa anggota Apodeti. Mari Alkatiri mengatakan kepada Komisi bahwa ia memerintahkan penahanan mereka setelah ia menerima informasi intelijen bahwa Apodeti tengah merencanakan kudeta melawan Fretilin, yang akan dimulai dengan melempar granat di tengah-tengah pertemuan Komite Sentral Fretilin.<sup>226</sup> Ini mungkin juga dipicu oleh penyusupan militer Indonesia di perbatasan.<sup>227</sup> Banyak tahanan Apodeti dibunuh setelah invasi Indonesia.

178. Tidak ada bukti bahwa perlakuan buruk atas tahanan selama September sampai awal Desember merupakan kebijakan resmi Fretilin. Walaupun dalam beberapa kasus anggota senior Fretilin turun tangan untuk menghentikan penganiayaan,<sup>228</sup> jelas bahwa Komite Sentral Fretilin mengetahui situasi ini dan tidak mengambil langkah yang cukup untuk mencegah malpraktik ini atau berupaya untuk mengendalikannya.<sup>229</sup>

## Memulihkan ketertiban

179. Pada awal September, setelah menguasai sebagian besar wilayah, Fretilin mulai bergerak untuk memulihkan ketertiban.<sup>230</sup> Mereka mengambil berbagai langkah keras untuk mencapai maksud ini. Beberapa orang asing yang mengunjungi sejumlah penjara Fretilin menyaksikan para serdadu Fretilin yang dipenjara karena melakukan kekerasan terhadap penduduk sipil.<sup>231</sup> Sampai awal September,

Fretilin menguasai seluruh wilayah Timor-Leste kecuali wilayah Batugade, wilayah perbatasan dengan Indonesia. Dua anggota Parlemen Australia membuat penilaian berikut ini setelah mengunjungi beberapa kota:

Kunjungan kami keliling negeri membenarkan klaim Fretilin bahwa situasi telah terkendali. Di wilayah-wilayah yang kami kunjungi sendiri, kami menerima informasi dari pekerja kemanusiaan dan Komite Palang Merah Internasional (ICRC) bahwa mereka juga berpendapat sama.<sup>232</sup>

## Pemerintahan

180. Selama masa konflik internal, 80% dari 3.000 tenaga ahli Timor dan staf asing pemerintahan Portugis telah meninggalkan negeri ini. Tidak ada kemungkinan untuk meyakinkan mereka kembali dan bekerja di bawah pemerintahan Fretilin. Fretilin memperluas keanggotaan Komite Sentral dengan mengangkat sejumlah besar perwakilan regional dan anggota militer aktif, yang mencerminkan pengaruh militer pasca-konflik-internal dan perlunya perwakilan geografis yang lebih luas.<sup>233</sup> Untuk mengatasi kekosongan pemerintahan di luar Dili ini, Fretilin mengangkat Komite-Komite Regional untuk memerintah di setiap distrik. Pada pertengahan September, Fretilin membentuk Komite Eksekutif untuk menjalankan pemerintahan sementara.<sup>234</sup> Komite ini terdiri atas 13 departemen, antara lain departemen urusan ekonomi, kesehatan, dan militer.<sup>235</sup> Pada Oktober, Fretilin membentuk serangkaian komisi untuk memfasilitasi pemerintahan di wilayah ini. Satu komisi yang utama adalah Komisi Pengelolaan dan Pengawasan Ekonomi, yang diketuai oleh José Gonçalves, mungkin satu-satunya ahli ekonomi yang masih berada di wilayah ini. Diresmikan pada 11 Oktober 1975, komisi ini bertindak sebagai wakil Fretilin dalam manajemen pusat pemulihan ekonomi negeri ini. Komisi ini juga bekerja dengan Komite-Komite Regional Fretilin dan LSM-LSM asing dalam pendistribusian bantuan makanan darurat, menggunakan aset-aset perusahaan niaga dan logistik semipemerintah, SAPT (*Sociedade Agrícola Pátria e Trabalho*).<sup>236</sup>

181. Gangguan terhadap sistem produksi dan distribusi akibat konflik internal dan ketidakmampuan Timor-Leste untuk memenuhi kebutuhannya sendiri<sup>237</sup> mengakibatkan krisis ekonomi perkotaan di mana Fretilin, dengan sejumlah dukungan lembaga-lembaga internasional, mengalami kesulitan untuk mengatasinya. Walaupun kekerasan memengaruhi beberapa kota yang lebih besar di wilayah tengah dan barat, dan pertikaian-pertikaian kecil menyebar luas, sebagian besar wilayah perdesaan luput dari konflik bersenjata yang menelan Dili. Warga perdesaan Timor umumnya bergantung pada pertanian subsisten untuk penghidupannya, sehingga tidak menjadi bagian dalam ekonomi tunai yang menjadi sandaran warga Timor-Leste perkotaan.<sup>238</sup> ICRC melaporkan akibat politik internal:

*Kerusakan dari perang hanya memengaruhi beberapa wilayah: Maubisse, Ainaro, Ermera, Same... [kekurangan makanan] pada dasarnya akan memengaruhi populasi perkotaan tapi tidak akan memengaruhi populasi perdesaan di mana orang-orang... hidup di dalam sistem ekonomi subsisten.*<sup>239</sup>

182. Satu cara yang digunakan Fretilin untuk mengatasi kelangkaan makanan ini adalah dengan memaksa para tahanan UDT untuk melakukan kerja paksa.<sup>240</sup> Satu tempat di mana ini terjadi adalah di perkebunan di Aissirimou, Aileu.<sup>241</sup>

183. Sesudah menguasai keadaan, Fretilin sadar bahwa Fretilin tidak memiliki sumberdaya untuk mengimpor makanan. Pada 13 September, Fretilin mengeluarkan permintaan untuk memohon bantuan makanan darurat. ICRC dan ACFOA (Australian Council for Overseas Aid) menanggapi hal ini dengan sedikit pasokan makanan, tapi tidak ada pemerintah manapun yang memberi bantuan selama masa ini. Fretilin kemudian menyerukan kepada orang-orang yang lari dari perdesaan ke kota selama konflik internal untuk kembali ke desa mereka masing-masing. Selain meningkatkan produksi pertanian, hal ini juga mengurangi jumlah orang yang akan bergantung pada pasokan pangan kota yang terbatas. Mengantisipasi ancaman kekurangan makanan, Fretilin berencana untuk menerapkan penjatahan makanan pada Desember, dan mulai melakukan sensus untuk dapat menjalankan suatu sistem penjatahan (lihat Bab 7.3.: Pemandahan Paksa dan Kelaparan).

184. Penutupan BNU dan kemustahilan untuk segera mendirikan sistem perbankan alternatif, yang memang bukan keahlian Fretilin,<sup>242</sup> tetap menjadi masalah selama pemerintahan Fretilin. Ketiadaan valuta asing berakibat benar-benar melumpuhkan kemampuan wilayah ini untuk menghidupkan kembali ekonomi tunai atau untuk menjalankan perdagangan internasional.\* Apapun yang tersisa dari komunitas pedagang Cina mampu untuk sedikit memompa ekonomi. Namun, banyak yang telah meninggalkan perdesaan untuk datang ke Dili dan kota-kota lainnya atau telah pergi ke luar negeri, dengan membawa serta modalnya. Kemerosotan nilai matauang memaksa Fretilin untuk membayar pegawai negeri dengan barang ketimbang uang tunai. Walau ada semua faktor negatif ini, kegiatan ekonomi mulai sedikit kembali ke pasar-pasar di Dili dan toko-toko Cina selama Oktober dan November.<sup>243</sup>

185. Pendidikan merupakan bidang penting dalam kebijakan Fretilin. Fretilin telah melakukan banyak sebelum terjadi konflik internal dengan mengembangkan program melek huruf yang diilhami oleh pendidik Brasil, Paulo Freire.<sup>†</sup> Setelah konflik internal, sistem pendidikan yang ada benar-benar lumpuh. Seperti halnya di bidang-bidang pemerintahan lainnya, sebagian besar personil yang cakap telah pergi. Baik sekolah-sekolah negeri maupun yang dijalankan Gereja tutup, yang terakhir ini tutup karena banyak suster dan pastor yang mengajar di sekolah-sekolah tersebut juga pergi, sehingga membuat Francisco Xavier do Amaral berkomentar:

Sungguh disesalkan bahwa para “gembala” pergi ketika “domba-domba” memerlukan bimbingan mereka.<sup>244</sup>

\* Kapal bantuan ACFOA berangkat dengan membawa kopi ke Australia. Namun, uang yang didapat harus disimpan di bank di Darwin.

† Sistem pendidikan masyarakat terutama ditujukan untuk memecahkan persoalan tingkat melek huruf yang rendah, yang dikembangkan oleh Paulo Freire, seorang pendidik Brasil.

186. Para guru yang tinggal dialih tugaskan sebagai serdadu Falintil atau sebagai pegawai pemerintah; kemampuan membaca mereka amat dibutuhkan.<sup>245</sup> Walaupun ada rencana membuka kembali sejumlah sekolah dasar pada November, dengan menggunakan siswa sekolah menengah atas sebagai guru, hal ini tidak terjadi dan sekolah-sekolah tetap tutup.

187. Konflik internal telah mengakibatkan ratusan orang terluka, baik anggota militer maupun warga sipil. Dokter-dokter Portugis telah ditarik mundur pada 26 Agustus, walaupun sebagian besar pekerja kesehatan Timor terus bekerja tanpa gangguan.<sup>246</sup> Masih cukup banyak pasokan obat-obatan di Dili, dan fasilitas medis mencukupi walaupun sederhana. Dengan perlengkapan dasar ini, dan dibantu oleh kedatangan sejumlah dokter dari ICRC dan sebuah NGO Australia, ASIAT (Australian Society for Inter-Country Aid), pada 1 September, Rumah sakit Dili terus buka. Walaupun ASIAT berencana untuk membuka berbagai sekolah pelatihan medis—dan selama masa ini Fretilin juga membuka sekolah perawat kesehatan di Aileu pada Agustus 1974—di luar Dili pelayanan kesehatan terbatas.<sup>247</sup>

188. Jelas bahwa antara September dan Desember 1975, Fretilin melakukan upaya sungguh-sungguh untuk membangun pemerintahan interim yang tepercaya di seluruh wilayah Timor-Leste tanpa kehadiran Portugal, sementara tetap menanti kembalinya Portugal untuk menuntaskan proses dekolonisasi. Terbentur oleh kurangnya kemampuan keuangan dan administrasi, dan dalam konteks ketidakstabilan politis akibat konflik politik Agustus serta peningkatan operasi militer lintas-batas oleh pasukan bersenjata Indonesia, pemerintahan yang baru lahir ini menghadapi tekanan yang luarbiasa.

## Balibó : Indonesia meningkatkan intensitas operasi militer

189. Pada 15 Oktober, Tim Susi dan batalion-batalion dari Brigade Infanteri Kedua ABRI melancarkan serangan ke Balibó, di mana lima wartawan internasional terbunuh. Para wartawan tersebut tengah meliput berita mengenai berbagai operasi militer Indonesia di dalam Timor Portugis. Tiga wartawan Australia dan dua wartawan Inggris yang bekerja untuk Televisi Australia ditembak atau ditikam dalam keadaan yang ditutup-tutupi oleh pejabat militer Indonesia ketika itu.\* Satu kemungkinan alasan atas eksekusi para wartawan itu adalah bahwa mereka menyaksikan besarnya skala operasi Indonesia di sekitar Balibó, yang jauh lebih besar dari penyusupan-penyusupan sebelumnya (lihat Bab 7.2.: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa).<sup>248</sup>

190. Pada 16 Oktober, ketika militer Indonesia menguasai Balibó dan Maliana, garis depan Fretilin pindah ke Atabae dan Bobonaro.<sup>249</sup> Komisi memiliki rekaman film dari operasi-operasi militer Indonesia ini, yang memperlihatkan penggunaan kapal

.....  
\* Meskipun hal ini diketahui pemerintah Australia dengan segera, tidak ada protes internasional atau seruan untuk diadakan penyelidikan. Memang, Pemerintah Australia tampaknya tidak memprotes baik secara diam-diam kepada pemerintah Indonesia tentang pembunuhan tersebut. Ini tetap menjadi masalah antara Indonesia dan Australia selama masa-masa pendudukan.

perang untuk membombardir posisi Fretilin dan pendaratan pesawat di Maliana, sesuatu yang jelas merupakan penyerangan besar-besaran.<sup>250</sup> Tidak seperti serangan di bulan Agustus atas Atsabe yang menggunakan pasukan Partisan untuk mendukung unit-unit Pasukan Khusus, serangan atas Balibó tidak banyak menggunakan orang Timor.<sup>251</sup> Walaupun demikian, Indonesia berusaha menyalahkan sekutu UDT/Apodeti mereka atas kematian para wartawan tersebut. Secara umum, pihak berwenang Indonesia berulang kali menyangkal bahwa pasukan-pasukan mereka terlibat secara militer di Timor Portugis pada September - November. Sebaliknya mereka menyatakan bahwa bentrokan apapun terjadi akibat para “Partisan” Timor-Leste yang berupaya menangkis serangan-serangan ke dalam wilayah Indonesia.

191. Selama Oktober, pasukan-pasukan lain yang dipimpin Kopassandhamelancarkan serangan, dan berharap untuk menjangkau lebih jauh ke dalam. Mereka menemui perlawanan yang sengit dan berhasil diusir kembali. Laporan harian CIA, *National Intelligence Daily*, melaporkan bahwa pada 20 Oktober serangan Indonesia “terhenti karena Jakarta gagal menguasai kota perbatasan Lebos”.<sup>252</sup> Tanpa perlindungan artileri laut di wilayah yang dekat dengan pantai, pasukan penginvansi Indonesia menemui kesulitan di wilayah pedalaman di mana kedua pihak lebih berimbang kekuatannya. Menurut Albino do Carmo, komandan Falintil/Fretilin, penyerangan tersebut terjadi:

*...Di [desa] Lela, berbatasan dengan Lamaknen, di daerah yang disebut Bulubulu. Saat itu kira-kira bulan Oktober, sekitar pertengahan bulan. Ada banyak orang di sana, mereka menembakkan mortir ke sini. Mereka memiliki senapan mesin, ada dua. Ada banyak orang. Kami lihat dari kejauhan. Ada informasi bahwa [mereka] dari Menpur. Lebih dari 100 [orang]. Kami tidak bisa melihat di belakang [mereka]. Mereka tidak bisa maju karena...tidak bisa ke depan karena kami menembaki mereka. Kami pun punya senapan mesin dan mortir. Saya punya 20 anak buah saat itu.<sup>253</sup>*

192. Pasukan Fretilin secara tak terduga memberi perlawanan sengit terhadap pasukan Indonesia, yang juga bermasalah dengan persenjataannya dan dihambat oleh permulaan musim hujan. Setelah jeda sejenak, operasi tersebut dimulai kembali pada 20 November dengan sebuah operasi yang diarahkan ke Atabae. Untuk pertama kalinya Pasukan Indonesia mendapatkan dukungan laut dan udara. Pada 27 November Atabae, yang dipertahankan oleh kompi kavaleri Portugis orang Timor-Leste yang loyal terhadap Fretilin, jatuh ke tangan penyerbu.<sup>254</sup> Militer Indonesia kini sudah bersiap untuk melancarkan invasi besar-besaran ke Dili.

# Deklarasi kemerdekaan sepihak Fretilin, dan tanggapan terhadapnya

## Tinjauan

193. Dengan semakin gencarnya operasi militer Indonesia dan invasi besar-besaran tampak semakin pasti, Fretilin semakin perlu mencari cara untuk melibatkan komunitas internasional.

194. Pada awal November 1975, Portugal mengadakan pembicaraan bilateral dengan Indonesia di Roma. Dalam pernyataan pers bersama setelah pertemuan tersebut, kedua pihak menegaskan kembali komitmen mereka kepada dekolonisasi Timor Portugis yang teratur dan setuju untuk bekerja dan menyelenggarakan perundingan antara Portugal dan semua partai politik Timor. Dengan pasukan Indonesia yang sudah menduduki bagian yang cukup besar dari wilayah tersebut dan pemerintahnya selalu menghalang-halangi terjadinya pembicaraan antar-semua pihak, pertemuan Roma tersebut gagal untuk mempertimbangkan realitas situasi di lapangan.

195. Fretilin memutuskan untuk melakukan deklarasi kemerdekaan sepihak tak lama setelah pasukan Indonesia menduduki kota Atabae di bagian barat. Fretilin melakukan ini pada 28 November 1975. Fretilin membentuk pemerintahan dan menyerukan kepada komunitas internasional untuk mencegah invasi besar-besaran yang akan terjadi.

196. Anggota empat partai politik Timor-Leste lainnya berkumpul di Bali. Pada 29 November, di bawah tekanan intelijen Indonesia, untuk membalas deklarasi sepihak Fretilin, mereka menandatangani apa yang disebut “Deklarasi Balibó”, yang mendeklarasikan “kemerdekaan dan integrasi” Timor Portugis ke dalam Indonesia. Portugal tidak mengakui kedua deklarasi tersebut. Indonesia bersiap untuk invasi besar-besaran.

## Latar belakang deklarasi kemerdekaan sepihak Fretilin

197. Mantan Presiden Fretilin Francisco Xavier do Amaral mengatakan kepada Komisi tentang dilema yang dihadapi Fretilin saat Pemerintah Kolonial Portugis tetap tinggal di Ataúro.

*Dari sudut pandang Fretilin, kebijakannya untuk terus mengakui kedaulatan Portugal tanpa ada tanda-tanda apapun dari Portugal bahwa mereka berniat menjalankan kewenangan itu, adalah suatu kebijakan yang berbahaya untuk dijalani. Walaupun sebagai penguasa de facto, Fretilin tidak memiliki legitimasi internasional sebagai penguasa. Fretilin bukan pemerintah yang dipilih dan ketakutannya adalah bahwa kekosongan politik ini akan memberikan dalih bagi Indonesia untuk melancarkan invasi besar-besaran ke Timor-Leste.<sup>255</sup>*

198. Undangan Fretilin tanggal 25 Oktober kepada pemerintahan Portugis di Ataúro untuk mengirim delegasi ke Dili untuk melakukan penilaian situasi politik tidak mendapat tanggapan. Posisi Fretilin semakin mengeras ketika mengetahui terjadinya pembicaraan antara Menteri Luar Negeri Portugal dan rekannya Menteri Luar Negeri Indonesia di Roma pada 1 - 2 November. Pernyataan pers bersama para Menteri Luar Negeri tersebut menyerukan dipulihkannya ketenteraman dan ketertiban sebagai syarat bagi proses dekolonisasi, akan tetapi samasekali tidak menyebutkan masuknya pasukan Indonesia jauh ke dalam wilayah Timor Portugis. Ketika diadakan pembicaraan di Roma, dan setelah kejatuhan Balibó dan Maliana ke pihak pasukan Indonesia pada 16 Oktober, garis depan Fretilin telah mundur ke Atabae dan Bobonaro.<sup>256</sup>

199. Bagi sebagian orang di Fretilin, kegagalan pembicaraan Roma merupakan pukulan terakhir. Ketika diwawancarai pada 2004, Francisco Xavier do Amaral menyatakan bahwa pemerintah Portugal telah mengkhianati rakyat Timor-Leste:

*Portugal dan Indonesia sudah setuju bahwa Indonesia tidak akan campur tangan dalam urusan Timor-Leste. Tapi pada akhirnya siapa yang turut campur? Indonesia. Dan apa yang dikatakan Portugal? Tidak ada. Mereka hanya berdiam diri. Bahkan tidak ada peringatan untuk Indonesia. Fretilin sudah cukup lama menunggu kesempatan untuk memulai negosiasi dengan Portugal, tapi mereka tetap diam, tidak menjawab. Apa sebenarnya alasan bagi penundaan-penundaan ini? Untuk membela kita atau mengkhianati?*<sup>257</sup>

200. Fretilin kini harus menghadapi tiga kenyataan pahit: ancaman luar yang amat besar dari tetangganya yang besar di perbatasan maupun di wilayahnya, ekonomi yang tidak memiliki infrastruktur administrasi yang diperlukan untuk menjalankan tugas pemerintahan sehari-hari, dan ketidakpedulian Portugal. José Gonçalves, ketua Komite Ekonomi dan Pengawas Fretilin, ditugaskan menghidupkan kembali ekonomi yang lumpuh. Ia menyatakan pada Oktober 1975:

*“Sekarang karena pemerintah Portugis sudah tidak ada dan negosiasi terus berjalan, kita harus mulai merencanakan untuk merdeka.”*<sup>258</sup>

201. José Gonçalves menyadari bahwa pemulihan ekonomi domestik dan perdagangan internasional tidak akan mungkin terjadi apabila BNU, satu-satunya bank di Timor Portugis, tidak buka kembali. Sebaliknya, apabila Fretilin terus mengakui pemerintahan Portugis sebagai penguasa yang sah di Timor-Leste, bank tersebut tidak bisa buka kembali. . Gonçalves menyatakan:

*Kita tidak bisa seterusnya menunggu bank ini berfungsi kembali. Bank ini sudah dinasionalisasi dan kita bermaksud untuk menyelesaikan proses ini.*<sup>259</sup>

202. Pada November, Fretilin mengirim delegasi ke Afrika untuk menggalang dukungan bagi deklarasi kemerdekaan sepihak.\* Delegasi tersebut terdiri atas dua anggota penting Komite Sentral Fretilin, Mari Alkatiri dan César Mau Laka. Mereka kembali ke Dili pada minggu ketiga November dan menyatakan bahwa 25 negara berjanji untuk memberi pengakuan apabila Timor-Leste mendeklarasikan kemerdekaan, di antaranya Cina, Uni Soviet, Zambia, Mozambik, Tanzania, Guinea-Bissau, Angola, Cabo Verde, São Tome dan Principe, Korea Utara, Vietnam Utara dan Selatan, Kamboja, Rumania, Belanda, Jerman Timur, Swedia, Aljazair, Kuba, Norwegia, dan Brasil (lihat Bab 7.1.: Hak penentuan nasib sendiri).<sup>260</sup>

203. Terlebih lagi, ancaman militer Indonesia semakin jelas, dan Fretilin mulai menumpuk senjata dan makanan di pedalaman untuk mengantisipasi invasi besar-besaran.<sup>261</sup> Fretilin juga mengambil langkah untuk memperbesar angkatan bersenjata. Walaupun pasukan Falintil tengah berperang di perbatasan dan sampai saat itu berhasil menahan tentara Indonesia, kemungkinan Falintil dilumpuhkan dalam suatu invasi besar-besaran cukup besar. Untuk mengantisipasi hal ini, Falintil mulai melatih dan mempersenjatai kelompok-kelompok milisi (*Milicia Popular de Libertacao Nacional*, Miplin).<sup>262</sup>

204. Bungkamnya komunitas internasional dan kegagalan Portugal untuk berkomunikasi dengan Fretilin setelah serangan 16 Oktober atas Balibó mulai membuat Fretilin yakin akan keterasingannya. Walaupun opini terpecah, pada minggu ketiga November 1975, tak lama setelah Mari Alkatiri dan César Mau Laka kembali dari Afrika, Komite Sentral Fretilin memutuskan untuk mendeklarasikan kemerdekaan.<sup>263</sup> Keputusan ini menjadwalkan deklarasi pada 1 Desember, hari Portugal merayakan kemerdekaannya dari penjajahan Spanyol.<sup>264</sup>

## Deklarasi kemerdekaan

205. Pada 26 November, setelah dua minggu pengeboman gencar dari laut dan udara, Atabae jatuh ke tangan pasukan bersenjata Indonesia. Komite Sentral menyimpulkan bahwa invasi besar-besaran sudah di ambang pintu. Dalam wawancaranya dengan Komisi pada 2004 Mari Alkatiri mengingat kata-kata wakil presiden Fretilin, Nicolau Lobato, kepada Komite Sentral:

*Pasukan Indonesia sudah masuk di Atabae... Mereka sudah menduduki Atabae! Kalau kita tunggu sampai 1 Desember, kita tidak akan punya waktu untuk mendeklarasikan kemerdekaan di Dili. Jadi sebaiknya kita proklamasikan kemerdekaan hari ini.*<sup>265</sup>

206. Walaupun ada penentangan terhadap keputusan mendeklarasi kemerdekaan, pada Jumat sore 28 November 1975, Fretilin membacakan deklarasi kemerdekaan

.....  
\* Sebelumnya, pada akhir September konferensi negara-negara Asia - Afrika yang diselenggarakan di Maputo, ibukota Mozambik memutuskan untuk "mendukung secara penuh perjuangan kemerdekaan yang dipimpin oleh Fretilin." Resolusi ini diusulkan oleh Presiden Mozambik Samora Machel dan mendapat dukungan dari negara peserta.



di hadapan 2.000 orang yang berkumpul di depan gedung pemerintahan Portugis.<sup>266</sup> Pasukan Falintil berparade mengenakan seragam loreng dan ikat kepala berwarna sesuai satuan-satuan mereka.<sup>267</sup> Francisco Xavier do Amaral datang dengan mobil Mercedes-Benz hitam, mobil resmi gubernur Portugis. Pada pukul 17.55 bendera Portugis, yang telah berkibar di Timor-Leste selama berabad-abad, diturunkan. Fretilin mengibarkan bendera baru Republik Demokratik Timor-Leste—merah, hitam, dan kuning dengan bintang putih—dan hening cipta selama satu menit dilakukan untuk mengenang “semua orang yang telah gugur dalam beberapa bulan terakhir ini dan selama perang-perang antikolonial di Timor-Leste”.<sup>268</sup> Sebuah meriam ditembakkan 20 kali sebagai tanda penghormatan bagi yang meninggal. Pemimpin Fretilin, Francisco Xavier do Amaral, kemudian membacakan proklamasi kemerdekaan:

Dengan menyatakan kehendak mulia rakyat Timor-Leste dan untuk melindungi kedaulatan nasional yang sangat sah secara hukum, Komite Sentral Fretilin secara sepihak memutuskan untuk memproklamasikan kemerdekaan Timor-Leste. Mulai tengah malam nanti, [kami] menyatakan [kelahiran] suatu bangsa yang antikolonial dan antiimperialis, negara Republik Demokratik Timor-Leste.

Hidup Republik Demokratik Timor-Leste!

Hidup Timor-Leste yang bebas dan merdeka!

Hidup Fretilin!

207. Setelah proklamasi, para hadirin menyanyikan *Pátria! Pátria!* (Tanah Air! Tanah Air!), dan mendeklarasikan lagu ini sebagai lagu kebangsaan. Timor-Leste kemudian menyiarkan berita deklarasi kemerdekaannya kepada dunia dari Pusat Komunikasi Marconi.<sup>269</sup>

208. Walaupun Fretilin telah merencanakan melakukan deklarasi kemerdekaan 1 Desember, deklarasi kemerdekaan sepihak 28 November terjadi secara tak terduga dan tiba-tiba. Beberapa hal mengonfirmasikan ini, termasuk penulisan proklamasinya<sup>270</sup> dan penjahitan benderanya<sup>271</sup> pada sore hari 28 November. Tidak semua pemimpin Fretilin hadir pada upacara proklamasinya.<sup>272</sup> Sekretaris Jenderal Fretilin, Alarico Fernandes, dan sekretaris urusan luar negeri, José Ramos-Horta, berada di Australia sejak 20 November untuk menggalang dukungan politik, sementara Juvenal Inacio (Sera Key) dan Vicente Reis (Sa’he) tengah memerangi pasukan Indonesia di perbatasan.

209. Keesokan harinya, 29 November, Komite Sentral Fretilin menunjuk Francisco Xavier do Amaral sebagai presiden republik baru ini. Dalam pidato pengangkatannya, Xavier do Amaral menekankan bahwa kemerdekaan adalah hak seluruh rakyat Timor-Leste. Ia mengatakan bahwa kemerdekaan tidak dapat dipisahkan dari kelalaian dan pengingkaran hak tersebut selama proses dekolonisasi pemerintah Portugis. Xavier do Amaral menegaskan:

Setelah 400 tahun penderitaan, kelaparan, pemiskinan, pengabaian, dan pembantaian, apa lagi yang kita tunggu? Kawan-kawan, baik atau buruk, kita harus menjadi orang yang pertama dan yang terakhir untuk menyelesaikan masalah kita sendiri. Jadi mulai hari ini, kita semua, ya kita semua, akan membangun bangsa kita, Timor-Leste.<sup>273</sup>

210. Menteri Pertahanan, Rogério Lobato, membacakan Konstitusi Republik Demokratik Timor-Leste (RDTL). Konstitusi, yang terdiri atas 55 pasal, ditulis hanya beberapa hari sebelum 28 November 1975.<sup>274</sup> Pada 1 Desember, Dewan Menteri diangkat di kediaman Gubernur Portugis di Lahane. Komite Sentral Fretilin menunjuk Wakil Presiden Fretilin, Nicolau Lobato, sebagai Perdana Menteri.

211. Konstitusi RDTL tersebut memasukkan pasal-pasal yang menetapkan Timor-Leste untuk melakukan hal-hal berikut:

- Penghapusan struktur-struktur kolonial dan menciptakan masyarakat baru yang terbebas dari segala jenis dominasi dan pemerasan (Pasal 2)
- Kebijakan-kebijakan pembangunan yang terfokus pada pembangunan pertanian dan industri (Pasal 6)
- Melaksanakan kebijakan pembangunan ekonomi terencana (Pasal 10)
- Memerangi buta huruf dan ketidaktahuan, melindungi dan mengembangkan budayanya (Pasal 12)
- Mengembangkan dan menjalankan sebuah sistem kesehatan (Pasal 13)
- Menjamin kesamaan hak terhadap laki-laki dan perempuan (Pasal 14)
- Menjamin kebebasan beragama (Pasal 15)
- Mengembangkan “hubungan kerjasama dan bersahabat” dengan “kekuatan-kekuatan dunia yang demokratis dan progresif, yang dianggap sebagai sekutu alamiah” (Pasal 16)
- Menjamin hak untuk ikut serta di dalam proses-proses konsolidasi demokratis (Pasal 23)
- Menjamin kebebasan untuk berpikir, berasosiasi, berseikat, dan berbicara (Pasal 24)
- Menjamin hak untuk memilih dan dipilih di dalam pemilihan umum (Pasal 25)
- Menjamin hak untuk bekerja, mendapat pendidikan, dan kesehatan (Pasal 27).

212. Konstitusi RDTL menetapkan sistem pemerintahan semipresidensial. Perdana Menteri adalah kepala Dewan Menteri (Pasal 40) yang bertugas menjalankan pemerintahan. Presiden adalah Kepala Negara (Pasal 42) dan Panglima Angkatan Bersenjata (pasal 4). Presiden diberi wewenang untuk menunjuk dan memecat Perdana Menteri, Ketua Mahkamah Agung, dan Gubernur Bank Timor-Leste (Pasal 42). Nicolau Lobato, yang ditunjuk sebagai Perdana Menteri, menyusun daftar menteri dan wakil menteri, dan mengajukannya kepada Presiden dan Komite Sentral Fretilin untuk disahkan.<sup>275</sup>

## Reaksi atas deklarasi kemerdekaan

### Deklarasi Balibó

213. Sehari setelah deklarasi kemerdekaan Timor-Leste sepihak oleh Fretilin, keempat partai politik Timor-Leste lainnya—UDT, Apodeti, KOTA, dan Trabalhista—mengeluarkan ‘Proklamasi Integrasi’ mereka untuk mengimbangi langkah Fretilin. Proklamasi tersebut menuduh Fretilin menghambat solusi damai atas konflik dan hak rakyat Timor Portugis atas penentuan nasib sendiri. Kemudian proklamasi itu menyatakan bahwa “seluruh bekas koloni Timor Portugis” akan diintegrasikan ke dalam Indonesia, dan menggambarkan hal ini sebagai “pengungkapan paling tegas dari perasaan rakyat Timor Portugis”. Pemerintah dan rakyat Indonesia diminta untuk “mengambil segala langkah untuk melindungi hidup rakyat yang kini menganggap dirinya orang Indonesia namun hidup di bawah teror dan praktik fasis Fretilin dengan persetujuan Pemerintah Portugis”.<sup>276</sup>

214. Di bagian paling bawah deklarasi tersebut tercantum kata-kata “Dilakukan di Balibó ” dan tanda tangan dari perwakilan keempat partai. Keadaan seputar pembuatan apa yang disebut Deklarasi Balibó telah menjadi sumber kontroversi selama bertahun-tahun.<sup>277</sup> Komisi mendengarkan kesaksian dari para pemimpin politik Timor-Leste yang hadir pada saat penandatanganan yang mengatakan bahwa deklarasi tersebut disusun di Jakarta dan ditandatangani di sebuah hotel di Bali oleh para pemimpin partai, yang seperti dikatakan seorang penandatangan, berada “di bawah pengawasan ketat”, namun tetap berusaha berargumentasi selama berjam-jam untuk tidak menandatangani dokumen tersebut.<sup>278</sup> Mereka bersaksi mengenai tekanan yang dikenakan kepada politikus Timor oleh anggota badan intelijen Bakin dalam penyusunan dan keputusan untuk memungut suara mengenai deklarasi tersebut.<sup>279</sup> Deklarasi tersebut dibacakan dari pemancar radio berkekuatan tinggi di Balibó .

### Portugal

215. Portugal menolak baik deklarasi kemerdekaan sepihak Fretilin maupun ‘Deklarasi Balibó’. Komunike Dewan Nasional Dekolonisasi Portugal pada 29 November menyatakan bahwa Portugal masih menganggap dirinya “penguasa yang memerintah” Timor.<sup>280</sup> Komunike tersebut juga mengutuk intervensi militer atas wilayah tersebut, dengan jelas mengacu kepada serangan militer Indonesia. Pemerintah Portugis bersikukuh bahwa Timor-Leste harus mencapai penyelesaian hasil perundingan ketiga partai politik, yang dapat memuaskan rakyat Timor-Leste dan dengan ketentuan bahwa “kepentingan sah wilayah geopolitik Indonesia” akan dipertimbangkan.<sup>281</sup>

\* Tiga dokumen lainnya, yang ditandatangani oleh orang Timor-Leste yang menyatakan atau membuat petisi untuk integrasi, Deklarasi Suai dan Bobonaro serta Petisi Batugade, sudah ada sebelum ‘Deklarasi Balibó’. Komisi menerima kesaksian bahwa dalam setidaknya dua dari dokumen-dokumen ini, Deklarasi Suai dan Petisi Batugade, agen-agen Indonesia juga terlibat dalam perumusan dan pemberian tekanan terhadap penandatangan [lihat Submisi Domingos de Oliveira, hal.31 dan Wawancara CAVR dengan Claudio Vieira, Kupang, 25 Agustus 2004].

## Indonesia

216. Deklarasi kemerdekaan sepihak Fretilin menjadi pemicu bagi Presiden Soeharto untuk mengesahkan invasi besar-besaran Indonesia atas Timor-Leste.<sup>282</sup> Setelah bertemu dengan Presiden Soeharto pada 29 November, Menteri Penerangan Indonesia Mashuri mengeluarkan pernyataan yang menyedihkan “tindakan sepihak” Fretilin dan posisi pemerintah Portugal yang “jelas-jelas merestui tindakan Fretilin.”<sup>283</sup> Indonesia mengutuk tindakan sepihak Fretilin tetapi “sungguh-sungguh memahami pernyataan UDT, Apodeti, KOTA, dan Tralabista yang atas nama rakyat Timor Portugis, mendeklarasikan integrasi dengan Indonesia.”<sup>284</sup>

217. Ketika Menteri Luar Negeri Indonesia Adam Malik menerima Proklamasi Integrasi pada 1 Desember, ia mengatakan bahwa “perjuangan berat” masih ada di depan dan Indonesia akan memberikan “dukungan yang terselubung atau terbuka secara menyeluruh.” Adam Malik menyimpulkan dengan mengatakan “Diplomasi sudah berakhir. Kini persoalan Timor-Leste akan diselesaikan di medan tempur.”<sup>285</sup>

## Tanggapan internasional yang lebih luas

218. Para pelaku penting dalam komunitas internasional telah lama menyadari bahwa invasi militer Indonesia atas Timor Portugis sangat mungkin terjadi. Australia sudah lama menerima bahwa penggabungan sudah menjadi kebijakan Indonesia yang “tetap” (lihat bagian 3.6: Keterlibatan Indonesia yang semakin besar: Destabilisasi dan Diplomasi, butir 112 - 138) dan mengetahui tentang skala keterlibatan militer Indonesia di wilayah tersebut.<sup>286</sup> Banyak dokumen juga menunjukkan bahwa Amerika Serikat juga mengetahui tentang rencana Indonesia untuk menguasai Timor-Leste dengan cara militer.<sup>287</sup> Australia menolak memberi pengakuan kepada bangsa baru ini dan memandang tindakan Fretilin sebagai “provokatif dan tidak bertanggung jawab”.<sup>288</sup> Amerika Serikat menegaskan posisinya untuk tidak terlibat.<sup>289</sup> Negara-negara Afrika yang baru merdeka, yakni Angola, Cape Verde, Guinea-Bissau, Mozambik, dan San Tomé dan Príncipe semuanya mengakui kemerdekaan Timor-Leste namun semua bangsa ini terlalu kecil untuk memiliki pengaruh dalam politik internasional. Cina dan Vietnam, pendukung Fretilin utama di Asia, memberi ucapan selamat yang hangat. Cina adalah satu-satunya anggota permanen Dewan Keamanan PBB yang mengakui deklarasi kemerdekaan tersebut.

219. Pada 6 Desember, sehari sebelum invasi, Presiden Gerald Ford dan Menteri Luar Negerinya, Henry Kissinger, berada di Jakarta. Para analis CIA memprediksikan bahwa invasi akan terjadi setelah keberangkatan Ford.<sup>290</sup> Pada 6 Desember, Kissinger menyatakan bahwa penggunaan senjata buatan AS dalam operasi militer semacam itu dapat menjadi masalah, tapi kemudian menambahkan bahwa:

[I]tu tergantung bagaimana kita menafsirkan hal ini: apakah untuk membela diri atau sebagai operasi luar negeri.<sup>291</sup>

220. Walaupun mengetahui hal ini, tidak pernah ada upaya oleh negara mana pun untuk mencegah Indonesia, dan tidak ada satu negara pun yang mendekati Fretilin, yang lalu menyadari keterkucilannya.

## Invasi besar-besaran di ambang pintu

221. Setelah deklarasi kemerdekaan situasi di Timor-Leste menjadi semakin tegang. Pimpinan Fretilin menunggu Indonesia menginvasi dan setiap malam anggota Komite Sentral melakukan patroli.<sup>292</sup> Pada 2 Desember delegasi Komite Palang Merah Internasional (ICRC) di Dili menerima telegram dari pemerintah Australia yang memperingatkan semua warga Australia di Timor-Leste untuk meninggalkan negeri tersebut demi keselamatan masing-masing.<sup>293</sup> Kenetralan ICRC sudah diakui oleh Fretilin, namun tidak oleh UDT, Apodeti, dan Indonesia. ICRC terpaksa mengungsi ke Pulau Ataúro pada 2 Desember, dan berencana untuk menjalankan klinik di situ untuk melayani Dili. Pada hari yang sama, Menteri Pertahanan RDTL, Rogério Lobato, mengeluarkan pernyataan:

Berdasarkan informasi dari sumber-sumber intelijen Fretilin, kami menduga bahwa serangan besar-besaran atas Timor-Leste, atas khususnya ibukota Dili ... Kami menyerukan dunia untuk menghentikan agresi kriminal ini, karena akan menyebabkan pertumpahan darah yang tiada henti. Bangsa Timor-Leste akan melawan.<sup>294</sup>

222. Pada 4 Desember, sebuah delegasi yang terdiri atas Menteri Urusan Ekonomi dan Politik Mari Alkatiri, Menteri Urusan Hubungan Luar Negeri dan Informasi José Ramos-Horta, dan Menteri Pertahanan Nasional Rogério Lobato, meninggalkan Timor-Leste.<sup>295</sup> Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste menugaskan delegasi untuk menjalankan kampanye diplomatik di luar negeri dan mencari persenjataan untuk membela republik baru ini.<sup>296</sup> Pada 6 Desember, kelompok pekerja ICRC terakhir meninggalkan Dili ke Ataúro. Sore itu orang-orang mulai mengungsi ke pegunungan. Malam itu Roger East, satu-satunya reporter luar negeri yang tinggal di Timor-Leste, menulis:

Dengan semakin memburuknya situasi keamanan, orang-orang perlahan mulai mengungsi ke perbukitan. Malam ini Dili sepi dan hampir kosong, ditinggalkan oleh penghuninya. Jam malam mulai diberlakukan pada hari keempat dan serdadu bersenjata menjaga pantai dan jalan-jalan.<sup>297</sup>

# Invasi besar-besaran

## Tinjauan

223. Keinginan Indonesia untuk melaksanakan invasi besar-besaran terhadap Timor-Leste menjadi jelas pada bulan Desember. Intelijen Australia sedang memantau situasi, dan pada 2 Desember Pemerintah Australia memberitahukan warga negaranya untuk meninggalkan Timor-Leste. Sebagian besar orang asing yang masih berada di wilayah itu pergi beberapa hari kemudian. Fretilin mengirim delegasi untuk melakukan kampanye diplomatik. Pasukan invasi mencakup sebagian kecil anggota UDT dan Apodeti. Pemerintah Indonesia berupaya untuk memberikan kesan bahwa mereka hanya dibantu oleh sejumlah “sukarelawan” Indonesia. Militer bahkan sampai menghapuskan tanda pengenal dari kapal pendarat dan menggunakan berbagai senjata yang dibeli khusus untuk penyerangan itu, yang tidak dapat ditelusuri hingga ke sponsor utama militernya, yakni Amerika Serikat. Walau demikian, invasi tersebut adalah serangan skala penuh dari udara dan laut, yang melibatkan sejumlah besar pasukan. Fretilin memberi perlawanan terhadap pasukan invasi ketika para pemimpin politiknya mundur ke berbagai bukit Aileu. Pada hari invasi, terjadi sejumlah kekejaman yang dilakukan pasukan Indonesia terhadap penduduk sipil Timor, termasuk banyak pembunuhan dan pembantaian.

224. Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan segera membahas invasi tersebut dan Dewan Keamanan dengan suara bulat mengeluarkan resolusi pada 22 Desember untuk mengutuk invasi itu, menuntut penarikan segera Pasukan Indonesia dan menegaskan kembali hak rakyat Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri. Seorang utusan PBB dikirimkan untuk menilai situasi di Timor-Leste, tetapi upayanya dihambat dan debat PBB pun dipindahkan ke Sidang Umum pada awal 1976.

## Keputusan Indonesia untuk menginvasi dan melakukan perang terbuka

225. Pada 28 November 1975, Pasukan Indonesia sudah menguasai cukup banyak daerah di Timor-Leste. Pemerintah Indonesia menyelesaikan persiapan akhir politiknya pada awal Desember, dan membulatkan tekadnya untuk mengambil alih wilayah itu. Ini bukanlah berita baru bagi para penguasa Barat. Intelijen AS dan Australia telah memantau penguatan pasukan Indonesia, dan pemerintah mereka telah terlibat dalam dialog yang terus-menerus dengan Indonesia selama periode operasi militer di bawah Operasi Flamboyan, terutama melalui Harry Tjan Silalahi dan Jusuf Wanandi dari CSIS, *think-tank* yang dibentuk oleh Kepala Intelijen, Jenderal Ali Moertopo. Setelah mendapat peringatan dari Pemerintah Australia pada 2 Desember, sebagian besar warga asing yang masih tersisa segera pergi dari Dili. Warga Australia Roger East adalah satu-satunya wartawan asing yang tersisa di wilayah itu.

226. Dalam pertemuannya di Townsville dan Wonosobo dengan Presiden Soeharto, Perdana Menteri Australia Gough Whitlam telah menyatakan persetujuannya kepada Indonesia untuk menggabungkan Timor-Leste ke dalam wilayah Indonesia.<sup>298</sup>

Menyadari akan adanya kunjungan Presiden AS Gerald R. Ford dan Menteri Luar Negeri Henry Kissinger ke Jakarta pada 5 Desember, Fretilin dengan putus asa mengirimkan surat kepada Presiden Ford:

Kami telah dituduh di Sidang Umum PBB sebagai negara agresor...  
Kini kami mendengar bahwa "Timor-Leste telah melakukan tindakan agresi" melawan Indonesia dan bahwa rakyatnya menuntut intervensi penuh. Pemerintah kami yakin bahwa tuduhan-tuduhan tidak berdasar ini adalah awal dari sebuah peperangan terbuka.<sup>299</sup>

227. Invasi terhadap Timor-Leste yang akan segera terjadi dibahas secara singkat antara Presiden Gerald R. Ford, Presiden Soeharto, serta Menteri Luar Negeri Kissinger. Pihak Amerika Serikat mengungkapkan persetujuannya terhadap penggabungan Indonesia atas Timor-Leste yang bakal terjadi:

[Soeharto] Kami meminta pengertian Anda jika kami merasa perlu mengambil tindakan yang cepat dan drastis.

[Ford] Kami akan memahami dan tidak akan mempermasalahkan hal ini. Kami memahami masalah yang Anda hadapi dan maksud Anda.<sup>300</sup>

228. Setelah berhasil mendapatkan dukungan utama internasional, Indonesia juga ingin mengesahkan keputusannya secara domestik melalui parlemen. Pada 6 Desember, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Indonesia menyatakan bahwa:

Mendukung Pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah penyelesaian terhadap masalah Timor-Timur.

Sangat menyesali tindakan Fretilin untuk mendeklarasikan kemerdekaan Timor Portugis pada 28 November 1975, yang jelas bertentangan...  
[proses dekolonisasi]...sesuai dengan persetujuan Roma.<sup>301</sup>

229. Pernyataan MPR diakhiri dengan menyatakan kembali prinsip antikolonial Indonesia.\* Pada hari yang sama, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan ketetapan yang menyatakan bahwa:

Terdapat kehendak dari rakyat Timor Portugis untuk bergabung dengan Republik Indonesia, yang harus diakui oleh DPR.<sup>302</sup>

.....  
\* Tidak ada persetujuan formal antara Portugal dan Indonesia dari pertemuan Roma pada November. Pada saat berlangsungnya pertemuan itu, pasukan Indonesia sudah menduduki beberapa bagian Timor Portugis, administrasi kolonial Portugis berada di Ataúro, dan berbagai upaya Fretilin untuk berkomunikasi dengan mereka pun tidak terjawab. Komisi mendengar sebuah submisi dari anggota CSIS Jusuf Wanandi bahwa deklarasi unilateral kemerdekaan oleh Fretilin menyebabkan terjadinya perselisihan di Indonesia "untuk mendukung operasi militer untuk melibatkan diri di Timor-Leste. Oleh karena itu, apa yang sebelumnya telah digolongkan dengan operasi intelijen dan merupakan rahasia, menjadi operasi militer gabungan dan didukung oleh semua pasukan..." Lihat submisi yang dibuat di audiensi publik nasional CAVR mengenai Konflik Internal 1974 - 1976, 16 Desember 2003.

## Dili mempersiapkan strategi pertahanannya

230. Fretilin dapat mengandalkan 10.000 pasukan untuk mempertahankan Timor-Leste, yang terdiri atas 2.500 serdadu profesional Timor dalam tentara Portugis, dan sekitar 7.000 warga sipil terlatih.<sup>303</sup> Pasukan itu dipersenjatai dengan senapan Mauser dan amunisi yang berlimpah dari persediaan NATO Portugis. Fretilin juga memiliki kepemimpinan militer yang kompeten, dipimpin oleh Fernando do Carmo, anggota militer Timor dalam angkatan bersenjata Portugis. Selama periode operasi rahasia Indonesia di perbatasan dari September 1975 sampai invasi Dili bulan Desember, pasukan Fretilin unggul di beberapa daerah, di mana pasukan Indonesia tidak memiliki dukungan artileri angkatan laut, dan mendapatkan pengalaman perang yang berharga.

231. Pada Oktober, Fretilin mengirim telegram kepada Presiden Dewan Keamanan PBB, menunjukkan keinginannya untuk melawan intervensi bersenjata oleh Indonesia:

Kami akan melawan sampai orang yang terakhir dan tidak akan pernah meletakkan senjata selagi hak demokratik rakyat kami tidak dihormati. Indonesia sangat terlibat dalam pelatihan pasukan gerilya di Timor Indonesia yang merupakan pelanggaran prinsip-prinsip piagam PBB dan hukum internasional. Kami menyerukan Anda untuk menghentikan agresi militer Indonesia terhadap bangsa kami.<sup>304</sup>

## Berbagai persiapan militer Indonesia: Operasi Seroja

232. Perlawanan yang dihadapi Pasukan Khusus selama serangan penyusupan mereka pada Agustus dan September mendorong dibentuknya Komando Tugas Gabungan Operasi Seroja\* pada Oktober 1975, dan jumlah pasukan ditambah hingga 3.200 orang.<sup>305</sup> Balabantuan ini termasuk Detasemen Tempur ke-2 Kopassandha,† Batalion Infanteri ke-5‡ Marinir dari Surabaya, kapal selam Ratulangi, dua pesawat pengangkut angkatan udara, dan tiga batalion dari Brigade Infanteri ke-2 (Jawa Timur).<sup>306</sup> Sementara berbagai serangan susupan di perbatasan berlanjut, yang berakibat majunya ABRI di kawasan perbatasan kota pesisir Balibó dan Atsabe, Komando Seroja merencanakan invasi besar-besaran terhadap Timor-Leste. Ini menjadi serangan dari dua sisi oleh pasukan gabungan terhadap Dili pada 7 Desember. Rencana itu menggunakan beberapa batalion Marinir dan Infanteri Angkatan Darat yang dibawa dengan kapal dari kota perbatasan Atabae di Distrik Bobonaro, yang telah diduduki oleh Brigade Infanteri ke-2 dan Tim Susi. Tujuannya adalah untuk melakukan sebuah pendaratan amfibi di Dili saat fajar, tidak lama kemudian diikuti oleh turunnya pasukan terjun payung dari Komando Pasukan Sandhi Yudha dan Kostrad ke pusat kota.<sup>307</sup>

\* Brigadir Jenderal Chamid Soeweno, yang saat itu bertugas sebagai Komandan Pusat Intelijen Komando Pasukan Sandhi Yudha (Kopassandha), adalah komandan terpilih. Kol. Dading Kalbuadi tetap menjadi Asisten Intelijen.

† Komando Pasukan Sandhi Yudha.

‡ Diganti menjadi Pasmar 1.



## Invasi Dili dan Baucau

### Penyerangan

233. Pada 7 Desember 1975, Indonesia melancarkan serangan besar-besaran atas Dili. Ini adalah ofensif militer besar yang melibatkan pasukan dengan dukungan penuh dari laut dan udara.<sup>308</sup> Penyerangan ini dilakukan tanpa adanya formalitas pernyataan perang.<sup>\*</sup> Kota Dili sudah berada dalam kondisi siaga selama sehari-hari, menantikan serangan. Pada 1975, jumlah penduduk Dili kurang-lebih 28.000 penduduk. Sementara beberapa unit bersenjata Fretilin bertahan untuk melakukan perlawanan terhadap pasukan invasi, penduduk sipil dan pemimpin Fretilin menyingkir menuju Aileu. Banyak yang tidak dapat melarikan diri. Pasukan invasi melakukan kekejaman terhadap masyarakat sipil dan membuat beberapa kesalahan militer besar yang mengakibatkan kematian yang signifikan di pihak mereka sendiri.

234. Pada 6 Desember sore hari, beberapa ratus Partisan Timor dan pasukan Indonesia dari Unit Marinir 1 menaiki Kapal Perang Angkatan Laut Teluk Bone di Atabae dan berlayar menuju Dili. Mereka akan melakukan persiapan pendaratan pada malam hari untuk invasi besar-besaran pada hari berikutnya.<sup>309</sup> Pada pukul 02.00 7 Desember, lima kapal perang Indonesia tiba lagi di Dili.<sup>310</sup> Melihat kehadiran mereka, Fretilin mematikan listrik kota pada pukul 03.00, menyelimuti kota dengan kegelapan. Kapal-kapal komando angkatan laut Indonesia pun mulai menembaki Dili, namun ini tidak terjadi sesuai rencana. Wartawan Indonesia Subroto menyertai pasukan invasi dan melaporkan:

Karena merasa faktor pendadakan telah hilang, maka Pangkogasgab Brigjen. TNI Soewono memerintahkan KRI Ratulangi, KRI Barakuda, KRI Martadinata, dan KRI Jayawijaya membuka tembakan ke arah pantai. Gempuran ini terlampau hebat sehingga unsur pendadakannya semakin tidak ada dan malah membuat satuan Pasmar 1 yang telah mendarat tidak dapat bekerja secara maksimal akibat tembakan meriam itu.<sup>311</sup>

235. Kira-kira pukul setengah lima pagi, 400 marinir<sup>†</sup> bersama dengan tank-tank amfibi ringan dan kendaraan pengangkut personil bersenjata mendarat di Kampung Alor yang terletak di barat Dili.<sup>312</sup> Perlawanan Fretilin/Falintil tidak banyak, dan pada pukul tujuh Marinir Indonesia telah berhasil menguasai daerah itu. Setelah itu Angkatan Laut Indonesia membombardir bagian timur dan barat kota Dili, yang mereka sangka adalah tempat artileri Fretilin, untuk persiapan kedatangan pasukan terjun payung.<sup>313</sup>

.....  
\* Jumlah pasukan yang menyerbu tidak diketahui dengan pasti. Namun, selain tambahan beberapa ribu yang mendarat pada 7 dan 10 Desember, 10-20.000 diperkirakan sudah mendarat selama beberapa minggu berikutnya, termasuk sejumlah besar lagi pada hari Natal. Lihat Carmel Budiardjo dan Liem Soei Liong, *The War against East Timor*, Zed Books, London, 1984, hal. 15, 23; Dunn 2003, hal. 244.

† Dari Batalion Tim Pendarat Ke-5 (Yonif 5, Brigif 1, Pasukan Marinir, yang disebut sebagai Pasmar 1).

236. Sebelumnya, sebelum pukul enam pagi, sembilan pesawat Hercules C-130B terbang di atas Dili dan menurunkan kontingen pertama pasukan terjun payung Kopassandha/Komando Pasukan Sandhi Yudha (Kelompok 1) dan Kostrad (Yonif 501).<sup>314</sup> Intelijen yang kurang baik menyebabkan pasukan ini diturunkan langsung di kota, tempat pendaratan yang sangat berbahaya.<sup>315</sup> Sebagian besar pasukan ini mendarat di timurlaut Dili. Beberapa pasukan terjun payung ditembaki oleh pasukan Fretilin/Falintil ketika masih di udara; yang lainnya terluka atau mati saat mereka mendarat di antara sejumlah gedung dan kabel listrik. Satu pesawat menurunkan sejumlah pasukan terjun payung di laut, sehingga mereka tenggelam, dan yang lainnya di belakang garis Fretilin.<sup>316</sup> Penerjunan kedua dilakukan menjelang pukul delapan pagi dan mengakibatkan beberapa unit ABRI saling bertempur dalam kebingungan. Karena penerjunan pagi hari tidak berlangsung dengan baik, penurunan pada sore harinya dibatalkan oleh Komando Pasukan Tugas Gabungan.<sup>317</sup>

237. Pasukan Fretilin/Falintil yang mempertahankan kota menikmati sukses awal. Ketika dua pesawat Dakota C 47 yang membawa 38 tentara Pasukan Khusus mencoba untuk mendarat dan menguasai pelabuhan udara Comoro di barat Dili, Fretilin berhasil menghalau salah satu pesawat itu.<sup>318</sup> Meskipun demikian, tidak lama kemudian dengan kekuatan senjata yang lebih besar ABRI mulai unggul. Seperti yang dikatakan serdadu Fretilin/Falintil Carlos Maria Soares:

*...Kami berada di Pos Fretilin di Bidau Santana. Kami mulai melakukan perlawanan terhadap TNI [ABRI] di bawah komandan Amandio. Pada saat itu kami berjumlah 21 orang...Perlawanan kami tidak bertahan lama karena kami tidak memiliki kekuatan yang seimbang dan kekurangan amunisi.*<sup>319</sup>

238. Pada tengah hari pasukan Indonesia berhasil menduduki *Palácio das Repartifões* (sekarang) yang berada di jantung kota Dili dan menempatkan tim-timnya di sepanjang jalan utama ke luar dari pusat kota. Pasukan Fretilin/Falintil tetap menguasai Taibessi dan Lahane di kaki bukit di selatan Dili, begitu juga beberapa bukit di selatan Fatuhada dan di dekat pelabuhan udara Comoro.

## **Kontrol informasi: upaya menyembunyikan keterlibatan ABRI**

239. Untuk mempertahankan dongeng bahwa tidak satu pun personil militernya terlibat, ABRI menghapus tanda pengenal pada pesawatnya.<sup>320</sup> Pasukan ABRI menggunakan AK-47 dan senjata ringan lainnya yang didapatkan oleh Jenderal Benny Moerdani khusus untuk menginvasi Timor-Leste. Tujuannya adalah untuk menyangkal keterlibatan ABRI dan menghindarkan pelibatan penyalur senjata utama ABRI, khususnya Amerika Serikat.<sup>321</sup> Sebagian besar dari persenjataan berat—pesawat, kapal, dan landasan pesawat—juga pelatihan kebanyakan tentara elite seperti brigade lintas udara – telah dipasok oleh Amerika Serikat.<sup>322</sup>

240. Satu-satunya wartawan asing yang tetap berada di Timor-Leste, warga Australia Roger East, dibawa dari Hotel Turismo pada pagi hari terjadinya pendaratan dan

dibunuh di pantai oleh pasukan Indonesia.<sup>323</sup> Jumlah wartawan asing yang mati karena dibunuh oleh militer Indonesia menjadi enam orang dalam waktu kurang dari dua bulan, dan ini memastikan bahwa cerita mengenai invasi Indonesia dan berbagai operasi setelahnya tidak diliput secara dekat oleh media internasional.

241. Militer Indonesia berupaya untuk mempertahankan cerita bohong bahwa invasi terhadap Dili telah dilakukan oleh Partisan Timor dari empat partai politik yang telah menandatangani Deklarasi Balibó. Sehari setelah invasi Dili, sebuah surat kabar resmi Indonesia menyebutkan “jatuhnya Dili pada 7 Desember ke tangan pasukan gabungan Apodeti, UDT, Kota, dan TRABALHISTA.”<sup>324</sup> Pernyataan ini hanya menyebut secara selintas pada halaman tiga tentang “sukarelawan” Indonesia yang terlibat dalam operasi itu. Enam hari kemudian Menteri Penerangan Indonesia mengatakan bahwa:

Para sukarelawan yang atas permintaan Apodeti, UDT, Kota, dan TRABALHISTA membantu saudara-saudaranya di Timor Portugis tidak mungkin lagi ditahan oleh Pemerintah [Indonesia].<sup>325</sup>

242. Para wartawan Indonesia menyebarkan dan berkali-kali memberitakan kebohongan ini, yang memperkuat mitos bahwa Indonesia tidak menginvasi melainkan partai pendukung integrasi Timor yang kembali mengambil kekuasaan di wilayahnya dengan bantuan dari sejumlah kecil “sukarelawan” Indonesia.<sup>326</sup> Sejarawan Indonesia Asvi Warman Adam, Profesor Peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), mengatakan kepada Komisi bahwa mitos ini punya dampak jangka panjang di Indonesia.<sup>327</sup> Dalam menilai beberapa titik sejarah penting dia percaya bahwa perlu ada pertimbangan kembali di Indonesia berkaitan dengan periode ini. Asvi Warman Adam mengatakan kepada Komisi bahwa:

*Istilah ‘sukarelawan’ jelas tidak benar sebab harus diakui bahwa mereka adalah tentara Indonesia.*

243. Mengenai skala penyerangan terhadap Dili, Asvi Warman Adam mengatakan kepada Komisi bahwa serangan ini dapat “disejajarkan dengan serangan untuk menumpas pemberontakan PRRI/Permesta [pada 1958] yang merupakan operasi militer terbesar dalam sejarah perang Indonesia”.

## **Kekerasan besar-besaran terhadap penduduk sipil**

244. Selain pembunuhan penduduk sipil yang sewenang-wenang, sejumlah pembunuhan besar-besaran terjadi selama beberapa hari pertama invasi. Komisi diberitahukan bahwa anggota komunitas Cina di Dili menjadi sasaran serdadu Indonesia, ketika sekelompok penduduk sipil dibunuh di daerah pusat kota di Colmera dalam dua hari pertama.<sup>328</sup> Pada 8 Desember terjadi pembunuhan terhadap beberapa kelompok penduduk sipil di pelabuhan Dili, termasuk Isabel Lobato, istri dari pemimpin Fretilin Nicolau Lobato, yang ditembak di bagian punggung di pagi hari, anggota Fretilin Rosa Muki Bonaparte, dan wartawan Australia Roger

East di sore hari.<sup>329</sup> Bukti menunjukkan bahwa para anggota Fretilin ditarik keluar dari sekumpulan penduduk sipil yang kebingungan dan telah berkumpul di dekat pelabuhan. Orang-orang ini kemudian dibawa ke pelabuhan dan dibunuh.<sup>330</sup> Komisi menerima bukti mengenai sebuah “daftar incaran” ABRI yang berisi para individu yang menjadi sasaran pembunuhan, yang disusun selama bulan-bulan berlangsungnya operasi intelijen rahasia menjelang invasi besar-besaran.<sup>331</sup>

245. Pada 8 Desember, Jenderal Benny Moerdani berkeliling di Dili didampingi oleh Kolonel Dading Kalbuadi, dan mengunjungi pelabuhan:

Siang itu Kolonel AL R. Kasenda, Kepala Staf Komando Tugas Gabungan, turun dari KRI Ratulangi untuk menginspeksi kota Dili. Inspeksi tersebut dilakukan dengan mengendarai kendaraan amfibi BTR-50 APC (pengangkut personil). Di pelabuhan Dili, Kapten AL R. Kasenda bertemu dengan Mayor Jenderal Benny Moerdani, lalu ia berjalan bersamanya menuju kantor Gubernur. Pada saat itu di jalanan masih tergeletak mayat-mayat Fretilin yang belum dikuburkan.<sup>332</sup>

246. Berbagai kelompok penduduk sipil lainnya dibunuh ketika pasukan Indonesia bergerak menuju markas Falintil di kaki bukit di selatan Dili. Komisi mendengar sejumlah kesaksian mengenai pembantaian 21 penduduk sipil di Gedung Assistência, dekat sebuah basis Fretilin di Gedung Matadouro:

*...mereka [ABRI] memisahkan yang laki-laki dari yang perempuan. Mereka membawa para lelaki itu ke sisi gedung yang tertutupi rumput yang tinggi... Segera setelah itu, kami mendengar suara tembakan dan ledakan sebuah granat. Tembakan berlangsung sangat lama... para lelaki yang telah dibawa ke sisi gedung itu semuanya telah dibunuh.*<sup>333</sup>

247. Pembunuhan penduduk sipil oleh pasukan Indonesia ini tampaknya merupakan sebuah pola yang terjadi berulang kali pada hari invasi.<sup>334</sup> Sebuah pernyataan kepada Komisi mengenai satu pembantaian lain di daerah Kaikoli di Dili tengah, mengatakan bahwa:

*Pada 7 Desember Indonesia melakukan invasi dengan pasukan terjun payung dini hari, mendarat di Dili. Pada saat itu komandan [Falintil] Sersan Constancio Soares ditembak mati tepat di depan toko Sang Thai Ho di Colmera. Tengah hari TNI menyerang markas besar polisi militer di Caicoli dan menangkap sekitar 50 orang. TNI memerintahkan mereka berbaris dan kemudian menembak mati mereka.*<sup>335</sup>

## **Para pemimpin Fretilin menyingkir ke pedalaman**

248. Komisi mendengarkan banyak kesaksian dan pernyataan mengenai pengungsian ke pedalaman ketika invasi terjadi.<sup>336</sup> Rencana Fretilin adalah untuk mengundurkan diri ke selatan, dengan memberikan perlawanan yang cukup untuk menghalang-halangi majunya pasukan Indonesia. Sejumlah besar penduduk sipil Dili lari dengan mereka menuju Aileu.<sup>337</sup>

249. Walaupun telah ada permohonan dari ICRC menjelang invasi besar-besaran, Fretilin tetap membawa para tahanan UDT dan Apodeti ketika mereka meninggalkan Dili.

## **Pasukan invasi menduduki Baucau**

250. Pada 9 Desember, empat kapal perang Indonesia membawa para marinir Indonesia dan 1.500 partisan Timor, dan dua kapal perang fregat Indonesia buatan Soviet meninggalkan perairan Dili menuju Baucau. Kira-kira pukul enam pagi 10 Desember, dengan dukungan artileri Angkatan Laut, satu tim Marinir yang dipandu oleh Manuel Carrascalão di bawah komando Kolonel Dading Kalbuadi mendarat di pantai dekat Laga di Distrik Baucau. Komisi mendengar kesaksian bahwa serangan di Baucau hampir tidak menemui perlawanan bersenjata sehingga pasukan Indonesia dapat menguasai kota itu dengan cepat.<sup>338</sup>

## **Harga invasi besar-besaran**

251. Berbagai kekejaman yang dilakukan terhadap penduduk sipil di Dili pada hari-hari pertama invasi terdiri atas pelanggaran berat hak-hak asasi manusia. Hampir tidak ada sanksi disipliner bagi pasukan Indonesia yang bertanggung jawab atas tindakan seperti itu. Tragisnya, ini menjadi pola impunitas penuh atas kekerasan terhadap penduduk sipil yang menjadi ciri dalam konflik di tahun-tahun mendatang. Pada hari kesembilan invasi, Fretilin mengirimkan lagi satu telegram kepada Dewan Keamanan PBB. Menteri Informasi Fretilin Alarico Fernandes melaporkan penjarahan yang merajalela di Dili, dan kehadiran 19 kapal di pelabuhan, yang terlibat dalam penjarahan tersebut.<sup>339</sup>

252. Harga yang harus dibayar dalam hal kematian bagi pasukan Indonesia juga tinggi. Invasi pertama ABRI berhasil mencapai tujuan militer yaitu mengambilalih Dili dan Baucau, tetapi perencanaan yang buruk dan perubahan pada saat-saat terakhir mengakibatkan kekacauan dalam pendaratan amfibi dan tingginya angka kematian pasukan terjun payung elite Kostrad dan Kopassandha. Jenderal Benny Moerdani, yang memainkan peran utama dalam merencanakan invasi itu, memberikan analisis berikut ini mengenai pasukan invasi Indonesia:

Pasukan (kami) tidak menerapkan disiplin, mereka saling menembak satu sama lain. Ini memalukan... Dari perspektif militer, kami tidak merasa bangga atas operasi tersebut.<sup>340</sup>

## Tanggapan PBB terhadap invasi besar-besaran

253. Komisi mendengarkan kesaksian mengenai situasi PBB di New York pada saat itu dari David Scott, seorang pekerja keadilan sosial senior Australia, yang telah dikirim oleh organisasi-organisasi masyarakat sipil ke New York untuk mendukung upaya José Ramos-Horta, tidak lama setelah terjadinya invasi:

*Sekretaris Komite Keempat, yang tengah membahas laporan invasi oleh Indonesia, mengatakan kepada saya bahwa sangat sedikit orang di New York dan di PBB yang mengetahui apapun tentang Timor. Delegasi Indonesia mengatakan bahwa “kita pergi ke Timor itu seperti memadamkan api di dapur di rumah sebelah, dan setelah itu kita akan mundur.”*

*Keesokan harinya Ramos-Horta datang dengan Araújo, dan sebuah momen penting adalah diterimanya Ramos-Horta sebagai perwakilan rakyat Timor... dalam dua minggu berikutnya, Ramos-Horta... berkampanye dengan gigih untuk mengangkat kasus pengakuan dan mempertahankan permasalahan Timor di agenda PBB dan mendukung resolusi-resolusinya, yang menyerukan Indonesia untuk menarik diri, dan menegaskan hak Timor atas penentuan nasib sendiri.<sup>341</sup>*

254. Pada 12 Desember Sidang Umum mengesahkan Resolusi 3485, yang mengutuk invasi itu dan menyerukan penarikan pasukan Indonesia dari Timor Portugis. Dewan Keamanan melangsungkan pertemuan tiga kali pada Desember untuk mendiskusikan situasi di Timor-Leste, dan pada 22 Desember dengan suara bulat mengeluarkan Resolusi 384 yang menuntut Indonesia untuk menarik pasukannya dan menegaskan hak rakyat Timor atas penentuan nasib sendiri.

255. Resolusi Dewan Keamanan menginstruksikan Sekretaris Jenderal PBB untuk mengirim seorang utusan khusus ke Timor-Leste. Perwakilan itu, Winspeare Guicciardi, mengunjungi berbagai wilayah di Timor-Leste yang dikuasai oleh Indonesia pada akhir Januari 1976. Namun upayanya untuk bertemu dengan pimpinan Fretilin dihalang-halangi. Komisi mendengar kesaksian mengenai berbagai upaya untuk menyiapkan beberapa tempat pendaratan yang aman di pantai selatan, melalui siaran radio Fretilin ke sebuah set radio di Darwin. Meskipun demikian, berbagai tempat yang memungkinkan untuk dijadikan pendaratan itu dibom oleh militer Indonesia dan Pemerintah Australia menutup radio tersebut sehingga semakin mengacaukan upaya untuk berkomunikasi.<sup>342</sup> Indonesia juga mengancam akan menenggelamkan sebuah *corvette* Portugis yang akan digunakan untuk mendaratkan Guicciardi di pantai selatan Timor-Leste untuk pertemuan-pertemuan ini.<sup>343</sup>

256. Akibatnya adalah bahwa PBB tidak mendapatkan informasi yang baik mengenai situasi di Timor-Leste pada saat itu, dan PBB tidak berhasil mendengar pandangan kepemimpinan Fretilin di dalam wilayah itu atau melihat sendiri kondisi di sejumlah daerah yang dikuasai Fretilin. Setelah tanggapan awal ini, PBB tidak pernah mengambil

langkah yang berarti untuk segera mengunjungi Timor-Leste. Debat kembali pada Sidang Umum, yang walaupun terus mengutuk invasi itu dan menegaskan kembali hak rakyat Timor atas penentuan nasib sendiri, tidak pernah melakukan tekanan yang berarti untuk memaksa Indonesia menghentikan aksinya.<sup>344</sup>

## Pengalaman rakyat Timor pada awal pendudukan dan upaya Indonesia untuk meresmikan integrasi

### Tinjauan

257. Indonesia segera membentuk Pemerintahan Sementara pada 17 Desember 1975, yang sebagian besar terdiri atas para anggota Partai Politik Apodeti dan UDT yang ikut dalam invasi besar-besaran.<sup>345</sup> José Ramos-Horta diterima di PBB sebagai juru bicara bagi rakyat Timor, dan kegiatan diplomatik saat itu sungguh menegangkan.

258. Kepemimpinan Fretilin telah menarik diri ke wilayah pedalaman, dengan membawa para tahanan UDT dan Apodeti yang sebelumnya ditahan di penjara mereka di Taibessi Dili. Ketika pasukan Indonesia bergerak mendekat ke markas Fretilin di Aileu, para anggota Fretilin melakukan pembantaian terhadap sejumlah besar tahanan ini. Ketika mundur dari pasukan Indonesia yang semakin mendekat, pembantaian tahanan terjadi lagi di Maubisse dan Same pada akhir Desember dan Januari 1976.

259. Sejumlah besar penduduk sipil Timor telah mengosongkan wilayah permukiman di kota dan desa, dan menetap di berbagai daerah yang dikuasai Fretilin. Pada Mei 1976, Fretilin mengadakan konferensi nasional untuk membahas strateginya. Fretilin merumuskan suatu strategi perlawanan nasional yang didasarkan pada penduduk sipil yang tinggal di pegunungan bersama para pejuang di sejumlah kawasan bebas. Warga sipil akan memberikan dukungan logistik kepada para pejuang Fretilin. Berbagai organisasi perempuan dan pemuda melakukan sejumlah kegiatan pendidikan dan kegiatan sosial lainnya, serta membentuk jaringan kesehatan. Secara umum, masyarakat yang tinggal di beberapa daerah ini berada di luar jangkauan militer Indonesia selama sebagian besar 1976.

260. Pada 31 Mei 1976, Indonesia mencoba untuk mengesahkan pendudukannya atas Timor-Leste. Dalam sebuah upacara singkat di Dili, yang disebut sebagai 'Tindakan Integrasi', Indonesia membentuk sebuah Majelis Rakyat yang beranggotakan sekitar 30 orang dari beberapa distrik. Majelis itu membuat petisi kepada Presiden Soeharto, meminta integrasi Timor-Leste ke Indonesia. Anggota-anggota Majelis diterbangkan ke Jakarta untuk menyerahkan petisi itu kepada Presiden Soeharto, dan pada 17 Juli Soeharto menandatangani keputusan yang menyatakan bahwa Timor-Leste adalah bagian dari Indonesia. PBB menentang upaya ini melalui Resolusi 31/53 pada 1 Desember 1976, dan menyerukan diadakannya tindakan penentuan nasib sendiri yang dapat diterima secara internasional di wilayah itu.

## ABRI melakukan konsolidasi; Indonesia mendirikan ‘pemerintahan sementara’

261. Menanggapi invasi Indonesia terhadap Timor Portugis pada 7 Desember, Sidang Umum PBB mengesahkan Resolusi 3485 pada 12 Desember. Resolusi ini menyerukan penarikan pasukan Indonesia, tetapi diabaikan oleh Indonesia. Pada 17 Desember, Indonesia mendirikan Pemerintah Sementara Timor-Timur (PSTT), dengan Arnaldo dos Reis Araújo, Ketua Apodeti, sebagai Ketua, dan Francisco Lopes da Cruz, Ketua UDT, sebagai Wakil.<sup>346</sup> Dua puluh empat pria ditunjuk memegang berbagai jabatan dalam pemerintahan sementara ini dan dalam Dewan Pertimbangan. Enam belas orang di antaranya dari UDT dan Apodeti.<sup>347</sup>

262. Pada 18 Desember, Pemerintahan Sementara itu mengirim telegram kepada Presiden Soeharto untuk meminta bantuan militer:

Pemerintahan Sementara Timor Bagian Timur [*sic*] memohon kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan bantuan militer, sosial, dan ekonomi supaya kondisi keamanan dan ketertiban di wilayah Timor Bagian Timur [*sic*] dapat dipulihkan bebas dari gangguan dan ancaman sisa-sisa teroris yang ditinggalkan oleh Pemerintah Portugis.<sup>348</sup>

263. PSTT ini merupakan pemerintahan hanya dalam nama. Ia dibentuk untuk mempercepat proses integrasi Timor-Leste dengan Indonesia. Mario Carrascalão membenarkan ketidakberdayaan pemerintahan ini dalam pernyataannya kepada Komisi bahwa

*saya tidak dapat menyatakan bahwa PSTT benar-benar sebuah pemerintahan.*<sup>349</sup>

264. Indonesia tengah menghadapi perang diplomatik di PBB, di mana Indonesia mencoba untuk meredam kutukan internasional terhadap invasi Indonesia. Pada 22 Desember 1975, Arnaldo dos Reis Araújo mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal PBB yang menolak kunjungan tim pengamat ke wilayah itu karena alasan keamanan.<sup>350</sup> Mengabaikan resolusi Dewan Keamanan 22 Desember, Indonesia mendaratkan lagi sekitar 10.000 pasukan sekitar Natal.<sup>351</sup> Sementara komunitas internasional melakukan inisiatif perdamaian yang terbatas, berbagai satuan tempur ABRI bergerak maju sepanjang jalan-jalan utama, setelah menguasai Dili dan Baucau. Yang lainnya mendarat di titik-titik strategis sepanjang pantai selatan. Ini proses yang lamban. Satuan-satuan ABRI bergerak dengan waspada.<sup>352</sup> Pada awal 1976, pergerakan utama yang pertama adalah ke selatan Dili untuk mengejar para tentara Fretilin yang telah mundur ke basis mereka di pedalaman.



## Fretilin mundur, pembantaian tahanan

265. Fretilin menahan sejumlah besar\* tahanan UDT dan Apodeti di basisnya yang terletak di Aileu.<sup>353</sup> Terdesak oleh majunya pasukan Indonesia, Fretilin bersiap mundur lebih jauh ke daerah pedalaman. Komite Sentral Fretilin terpecah. Pada akhir Desember, sebagian berada di Aileu, dan sebagian lagi di Maubisse.<sup>354</sup> Dalam situasi seperti inilah Fretilin melakukan beberapa eksekusi massal terhadap para tahanan di daerah Aileu. Pembantaian yang pertama terjadi pada 26 Desember 1975 di Aissirimou di Aileu. Komisi diberitahukan bahwa para anggota Fretilin membunuh sekitar 22 orang. Di antara mereka terdapat mantan kepala polisi Portugis Mayor Gouveia yang berpihak dengan UDT selama perang.<sup>355</sup> Pembunuhan selanjutnya terjadi di Saboria dan Aituri.<sup>356</sup> Mantan Presiden Fretilin Xavier do Amaral menyampaikan analisisnya tentang bagaimana pembantaian ini terjadi:

*Kami di tengah peperangan... kami lari dari musuh kami, kami berlari, kami bawa orang-orang yang kami tahan, musuh-musuh kami yang kami tahan, bersama dengan kami...*

*Lalu kami harus memutuskan hal ini. Apakah kami tinggalkan mereka hidup-hidup di sini? Apakah kami berlari sendiri dan meninggalkan mereka? Atau kami bunuh mereka lalu lari?...*

*Karenanya, beberapa dari mereka [anggota Fretilin] memutuskan untuk membunuh mereka, sehingga musuh tidak dapat membahayakan kami. Mungkin opini ini umum dimiliki, lebih kurang secara umum, oleh para pemimpin di semua tingkat.<sup>357</sup>*

266. Pasukan Indonesia merebut Aileu pada 31 Desember 1975.<sup>358</sup> Fretilin mundur lebih jauh lagi ke pedalaman, pertama ke Maubisse dan kemudian ke pantai selatan. Pembantaian tahanan terjadi lagi ketika Fretilin bergerak mundur. Komisi mendengarkan kesaksian mengenai pembantaian Fretilin terhadap lima tahanan di Maubisse pada akhir Desember, terhadap 31 tahanan di sekolah dasar di Same di daerah pantai selatan pada 29 Januari 1976,<sup>359</sup> dan 8 tahanan di Hat Nipah, dekat Holarua, daerah pantai selatan pada akhir Januari atau awal Februari.<sup>360</sup> Selain mendengar tentang pembantaian yang terjadi di wilayah tengah, Komisi juga menerima kesaksian mengenai pembantaian Fretilin terhadap 37 orang di Desa Kooleu di Distrik Lautém, pada awal Januari 1976.<sup>361</sup>

## Pergerakan ABRI, awal 1976

267. Pasukan dari Komando Tempur ke-2 Kostrad (Kopur II) bergerak melalui Maubisse, dan pada akhir Januari mereka bertempur untuk menguasai Celah Fleixa yang strategis. Pada 23 Februari, pasukan ini tiba di Ainaro di mana mereka bergabung

\* Anggota UDT Antonio Serpa memberi kesaksian kepada Komisi bahwa dia ditahan oleh Fretilin di sebuah gudang kopi yang besar di Aileu bersama, dia mengira-ngira, 3000 tahanan. Lihat kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Politik Internal 1974 - 1976, 15-18 Desember 2003.

dengan tentara yang telah mendarat di Betano di daerah pantai selatan, dan dapat menguasai sementara rute tengah dari utara ke selatan. Front utama kedua terjadi di wilayah barat dekat perbatasan dengan Indonesia. Pasukan Brigade Infanteri ke-18 (Jawa Timur) bergerak melalui Bobonaro pada akhir Januari, kemudian melalui Atsabe dan Letefoho, sampai di Ermera pada 27 Maret 1976. Sementara pada 5 Februari, satu pasukan terjun payung lain turun di Suai di barat pantai selatan, dan bergerak ke timur menuju Zumalai. Militer Indonesia tidak bergerak di sepanjang pesisir utara di barat Dili hingga pertengahan tahun. Pada Juni, ABRI menyerang Liquica dan Maubara, sebelum melanjutkan ke daerah Ermera dalam serangkaian operasi singkat yang dimulai pada Juli.<sup>\*</sup> 362

268. Operasi di timur menyebar dari Baucau. Empat ribu tentara baru diterbangkan ke Baucau pada akhir Desember 1975, di mana mereka kemudian bergabung dengan berbagai unit yang sudah beroperasi di bawah Komando Lintas Udara Kostrad (Linud Kopur Kostrad).<sup>363</sup> Pasukan ini melancarkan operasi penyerangan sepanjang tiga jalur utama. Dari Baucau, beberapa batalion bergerak ke barat di sepanjang jalan pantai dan menguasai Manatuto pada 31 Desember. Dari Manatuto, pasukan ini kemudian bergerak ke selatan menuju Soibada. Ofensif kedua bergerak ke arah selatan dari Baucau menuju Viqueque, di mana mereka bergabung dengan pasukan marinir yang telah mendarat di Uatolari di daerah pantai selatan. Pasukan ketiga menyerang pasukan Fretilin di selatan Laga, di kaki bukit Gunung Matebian. Sasaran terakhir adalah Lautém di timur, dengan serangan pasukan terjun payung di Lospalos pada 2 Februari 1976 yang mendapat dukungan dari bala bantuan infanteri.<sup>364</sup> Setelah menguasai sebagian besar kota utama Timor-Leste, pada Agustus 1976 ABRI mendirikan Komando Pertahanan dan Keamanan Regional Timor-Leste (Kodahankam), membagi wilayah itu menjadi empat sektor operasional — Barat, Tengah dan Timur, juga Dili dan Oecussi.<sup>†</sup>

## Pengalaman rakyat Timor pada awal pendudukan

269. Sejumlah besar<sup>‡</sup> masyarakat sipil telah lari ke daerah pedalaman, untuk sementara aman dari militer Indonesia. Banyak kota hampir dikosongkan oleh penduduknya ketika mereka melarikan diri dari invasi.<sup>365</sup> Pemandahan adalah pengalaman yang terjadi di mana-mana, dan banyak masyarakat sipil tidak mendapatkan tempat berlindung, makanan, dan berbagai fasilitas kesehatan yang memadai.<sup>§</sup>

<sup>\*</sup> Operasi Shinta melawan Fatubesi, Operasi Tulada 1 melawan Hatolia, Operasi Tulada 2 melawan Railaco, dan Operasi Tulada 3 melawan Leorema.

<sup>†</sup> Sektor A (Dili dan Oecussi), Sektor B (Barat—Liquica, Bobonaro, Ermera, dan Covala; kurang lebih 10 Batalion), Sektor C (Tengah—Aileu, Ainaro, Manufahi, dan Manatuto; kurang lebih delapan batalion), dan Sektor D (Timur—Baucau, Viqueque, dan Lautém; kurang lebih dua belas batalion).

<sup>‡</sup> Kemungkinan sebanyak 300.000 orang; lihat Bab 7:3 Pemandahan paksa dan kelaparan.

<sup>§</sup> Lihat sebagai contoh, kesaksian Manuel Carceres da Costa mengenai kota Lacleo di Distrik Manatuto, dan Francisco Soares Pinto mengenai kota Iliomar di Distrik Lautém, keduanya di CAVR audiensi publik nasional mengenai Pemandahan Paksa dan Kelaparan, 28 - 29 Desember 2003.

270. Kekerasan militer Indonesia terhadap penduduk sipil mengejutkan beberapa pemimpin politik Timor yang telah membantu dalam invasi. Mengemukakan keburukan situasi itu dan kelemahan posisinya sendiri, ketua PSTT, Arnaldo dos Reis Araújo, menulis surat secara rahasia kepada Presiden Soeharto mengenai kekhawatirannya, pada Juni 1976:

Kami mengakui bahwa perampokan terhadap bisnis pribadi, kantor pemerintahan, dan badan keuangan negara dapat terjadi karena emosi saat perang, tetapi sulit dimengerti mengapa hal ini berlanjut enam bulan kemudian, membiarkan semua orang dalam keadaan tidak aman yang kejam... Pagi dan malam hari, di rumah dan kantor saya, para janda, yatim piatu, anak-anak, dan kaum cacat meminta susu dan pakaian. Saya tak dapat berbuat apa-apa kecuali menangis untuk mereka, karena Pemerintahan Sementara tidak memiliki apa-apa...<sup>366</sup>

271. Di Dili, militer Indonesia memulai kegiatan yang kelak menjadi pola penahanan dan penyiksaan pada periode ini, karena mereka berusaha untuk menguasai masyarakat sipil yang mereka curigai menjadi penghubung dengan mereka yang berada di gunung.<sup>367</sup> Pada pertengahan 1976, para pengungsi Timor pertama dari sejumlah kamp di Timor Barat berhasil pergi ke Portugal. Mereka memberikan beberapa pernyataan saksi mata mengenai skala kekerasan pada saat invasi.

## Fretilin kembali menyusun kekuatan

272. Dari 15 Mei sampai 2 Juni 1976, Fretilin mengadakan konferensi nasional di Soibada di daerah pedalaman timur untuk menentukan strateginya. Menyadari bahwa tidak mungkin untuk terus mengimbangi ABRI, Fretilin membuat keputusan untuk memobilisasi resistansi nasional. Strateginya mencakup resistansi semi-gerilya oleh Falintil. Hal ini akan didukung secara logistik oleh penduduk sipil, yang akan ikut dengan Fretilin di gunung dan hutan.<sup>368</sup> Fretilin mengambil keputusan ini tidak dengan suara bulat. Semuanya menyetujui perlunya melakukan perang resistansi, tetapi tidak semua mendukung usul untuk melakukan revolusi sosial dengan masyarakat sipil. Francisco Xavier do Amaral menyatakan kekhawatirannya mengenai kebijakan ini, sementara yang lainnya, seperti para anggota sayap militer Fretilin, mengambil sikap netral.<sup>369</sup>

273. Untuk melaksanakan strategi baru ini, Fretilin membentuk struktur resistansi di sejumlah 'zona bebas' (*zonas libertadas*). Dalam berbagai zona ini terdapat basis resistansi (*bases de apoio*), di mana penduduk sipil dikelilingi oleh sebuah lingkaran pertahanan yang terdiri atas pasukan Falintil, dengan dibantu oleh kompi milisi Fretilin (Miplin) dan beberapa unit pertahanan sipil (*arma branca* atau *força popular*).<sup>370</sup> Di belakang garis itu, penduduk sipil, terutama perempuan, memberi dukungan logistik bagi para tentara. Fretilin menjalankan pendidikan politik kepada penduduk sipil yang berada di sejumlah basis ini untuk membangun komitmen politik yang luas bagi pembebasan nasional (lihat Bab 5: Resistansi: struktur dan strategi).

274. Selain menjalankan sejumlah sekolah dan menanam tanaman pangan, juga ada berbagai upaya untuk memproduksi obat-obatan, walaupun dalam sebagian besar kasus orang-orang harus bergantung pada obat-obatan tradisional yang berbahan dasar tanaman.<sup>371</sup> Manuel Carceres da Costa menceritakan kepada Komisi mengenai kehidupan di berbagai daerah kekuasaan Fretilin di Laclo, Distrik Manatuto pada 1976:

*Di hutan kami membentuk dua organisasi: Organização Popular da Mulher Timorese [OPMT – Organisasi Rakyat Perempuan Timor] sebuah organisasi perempuan yang berafiliasi dengan Fretilin, dan Organização Popular Juventude de Timor [OPJT – Organisasi Rakyat Pemuda Timor] yaitu sebuah organisasi pemuda. Organisasi-organisasi ini membantu kami mengoordinasi kegiatan di antara masyarakat. Misalnya kami bekerjasama untuk berkebun dan bercocok tanam, dan kami menanam jagung di sekitar kota kecil Laclo. Tentara Indonesia belum mencapai Laclo.<sup>372</sup>*

275. Fretilin juga menjalankan penjara-penjara (Renal), di mana berbagai pelanggaran hak asasi manusia biasa terjadi.<sup>373</sup>

## Indonesia meresmikan integrasi

276. Tidak lama setelah pertemuan Fretilin di Soibada, Indonesia merancang apa yang disebut sebagai sebuah Undang-Undang Integrasi. Pemerintahan Sementara mengumpulkan orang-orang dalam suatu badan yang disebut Majelis Rakyat selama Mei 1976, diketuai oleh Guilherme Gonçalves. Majelis ini konon merupakan sekumpulan orang terpilih yang mewakili orang Timor. Para peserta dipilih oleh para pegawai pemerintah yang ditunjuk oleh Indonesia. Clementino Amaral berpartisipasi dalam majelis tersebut mewakili Baucau, dan mengatakan kepada Komisi:

*Proses apa ini? Mereka [pemerintah Indonesia] ingin dua orang dari tiap distrik mewakili distrik masing-masing, untuk membuat petisi yang meminta Indonesia mengizinkan kami masuk Indonesia. Di Baucau, bagaimana kejadiannya? Menyelenggarakan pemilihan umum? [Tidak.] Para pejabat yang dekat dengan mereka memilih dua orang tersebut.<sup>374</sup>*

277. Para anggota Majelis menyusun petisi kepada Presiden Soeharto yang meminta Indonesia untuk mengabulkan integrasi. Mario Carrascalão mengemukakan bahwa ini merupakan satu-satunya fungsi yang dilakukan Majelis Rakyat:

*Majelis Rakyat...yang bertemu sekali pada bulan Mei 1976, di sini, hanya membahas satu poin “perjanjiannya”, yakni, integrasi tanpa referendum...[satu-satunya] tujuan adalah membicarakan ‘petisi integrasi’ yang akan dikirimkan kepada Soeharto.<sup>375</sup>*

278. Petisi ini ditandatangani oleh Arnaldo dos Reis Araújo sebagai ketua PSTT, dan Guilherme Gonçalves selaku kepala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), walaupun badan ini belum dibentuk.<sup>376</sup> Mengklaim dirinya mewakili rakyat Timor, dan menyebut Deklarasi Balibó sebagai dasar bagi klaim tersebut, isi utama dari petisi singkat ini adalah agar Timor-Leste disatukan dengan Indonesia tanpa dilakukannya sebuah referendum. Kelompok itu pun diterbangkan seluruhnya ke Jakarta dengan pesawat militer untuk menyampaikan petisi tersebut kepada Presiden Soeharto.<sup>377</sup> Pada 7, Juni Arnaldo dos Reis Araújo, Guilherme Gonçalves, Francisco Xavier Lopes da Cruz, dan Mario Carrascalão menyerahkan petisi itu kepada Soeharto di Jakarta.

279. Pada 24 Juni, sebuah misi pencarian fakta para pejabat Indonesia dan sekelompok diplomat internasional yang terdiri atas sepuluh orang\* mengunjungi Dili, dengan didampingi oleh wartawan Indonesia dan wartawan asing, konon untuk memastikan keabsahan petisi tersebut. Ketua Komite Khusus PBB untuk Dekolonisasi juga diundang, tetapi ia menolak untuk bergabung dalam misi tersebut. Australia, AS, dan Jepang juga menolak untuk berpartisipasi, walaupun Selandia Baru mengirim seorang perwakilan untuk mengamati (lihat Bab 7.1: Hak penentuan nasib sendiri, untuk isi laporan Perwakilan Selandia Baru dan analisa dari proses tersebut). Misi itu mengunjungi Timor-Leste selama satu hari. Mereka menghadiri upacara di mana Kepala PSTT Arnaldo dos Reis Araújo menyampaikan pidato, dan kelompok itu mengunjungi beberapa kota yang dekat dengan Dili. Kunjungan mereka diawasi dengan ketat dan interaksi bebas dengan orang Timor, termasuk para anggota Majelis Rakyat, tidak diperbolehkan.<sup>378</sup> Walaupun demikian, misi itu melaporkan bahwa sebuah pemerintahan yang efektif telah berjalan dengan baik dan Dewan Perwakilan Rakyat berjalan sebagai “alat demokrasi”. Misi itu juga menemukan adanya keinginan untuk melakukan integrasi tanpa referendum, yang mereka anggap sebagai mekanisme yang asing bagi orang Timor.<sup>379</sup> Pada 17 Juli 1976, Presiden Soeharto menandatangani undang-undang yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), meresmikan tindakan Indonesia mengintegrasikan Timor-Leste.<sup>†</sup>

280. Indonesia menyebut ini sebagai sebuah tindakan penentuan nasib sendiri yang sah. Tindakan ini tidak diakui oleh Portugal ataupun PBB, dan pada 1 Desember 1976, Sidang Umum PBB mengesahkan Resolusi 31/53 yang menolak aneksasi Indonesia atas Timor-Leste dan menegaskan kembali seruannya bagi suatu tindakan penentuan nasib sendiri yang dapat diterima secara internasional.

.....  
\* Anggota-anggota internasional misi tersebut adalah Duta Besar Korea Selatan, Malaysia, Suriah untuk Jakarta, *charge d'affaires* dari Afghanistan dan Irak, serta para perwira yang mewakili Panama, Yaman Selatan, dan India.

† Undang-Undang No. 7/1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor-Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor-Timur.

## Operasi Seroja berlanjut—pesawat Bronco OV-10 buatan AS mulai digunakan

281. Sekitar pertengahan hingga akhir 1976, pesawat serangan udara ke darat Bronco OV-10 pertama buatan AS tiba di Indonesia.<sup>380</sup> Kekuatan udara menjadi bagian penting dari strategi ABRI di Timor-Leste. Albino do Carmo, Komandan Falintil di gunung daerah Bobonaro-Covalima, mengingat:

*Pada bulan Agustus [1976] ABRI berusaha menyerang Gunung Lakirin lagi. Satu kompi bersama Hansip [pertahanan sipil] muncul. Saya datang untuk melihat dan mengusir mereka. Dua komandan bagian saya terbunuh. Kami saling menembak, hanya berjarak 10 - 20 meter. Kemudian ABRI berusaha menguasai gunung yang lain, dari Suai mereka masuk wilayah Gunung Fohorua. Mereka memasuki wilayah tersebut tiga kali. Setiap kali kami mengusir mereka... Mereka menggunakan pesawat pengebom di Lela, di mana saya bermarkas. Pesawat-pesawat tersebut hanya meluncurkan roket-roket besar... Setiap minggu mereka menembaki tempat kami, penduduk sipil, sekolah. Mereka mencari lokasi yang penuh orang. Kerap kali mereka bahkan menembaki ternak. Mereka melakukannya dengan senapan mesin.<sup>381</sup>*

282. Penembakan dan pengeboman udara digunakan untuk “memperlunak” berbagai sasaran menjelang sebuah serangan darat oleh pasukan infanteri. Di Lolotoe, José Pereira mengingat perubahan dari penggunaan helikopter sampai bom-bom besar dan akhirnya Pesawat Bronco OV-10 buatan AS:

*Pada tahun 1976, ABRI telah menggunakan pesawat terbang dan bom. Tahun 1976 - 1977 sering kali, dua atau tiga kali seminggu. [Pesawat udara] terbang cukup rendah. Pertama mereka menggunakan helikopter dan menembak. Mereka juga menggunakan pesawat terbang hitam besar. Mereka memakai bom. Dan ketiga mereka memakai pesawat udara besar dengan lubang di bagian belakang [Bronco OV-10]. Pesawat-pesawat ini dipakai sejak tahun 1976, kira-kira dimulai sekitar Agustus.<sup>382</sup>*

283. Penggunaan kekuatan udara memberikan tekanan yang sangat besar kepada Fretilin, karena kekuatan bersenjata Falintil hanya senjata ringan. Ini menjadi faktor utama yang membuat penduduk sipil di gunung menyerahkan diri, dan memberikan kemenangan militer kepada ABRI atas Fretilin/Falintil pada 1979.

## Kebuntuan militer, akhir 1976

284. Pada akhir 1976, militer Indonesia mampu menguasai koridor jalan-jalan utama; jalur selatan dari Dili ke Ainaro dan Betano; jalur Baucau-Viqueque; jalur Manatuto-Laclubar, dan jalur Lautém ke Tutuala. Walaupun ABRI cukup menguasai daerah-

daerah yang dapat dijangkau melalui jalan pesisir utara tersebut, berbagai daerah yang luas di pedalaman tetap berada di luar kekuasaan ABRI. ABRI mengharapkan dengan cepat dan mudah menguasai Timor-Leste, namun sebaliknya malah menghadapi perlawanan sengit dan amat baik dari Fretilin/Falintil. Perkembangan usaha ABRI untuk menguasai Timor-Leste berjalan lambat.

285. Walaupun Indonesia sudah menggunakan kekuatan udara tambahan yang dipasok dari Amerika Serikat, situasi pada akhir 1976 itu pada dasarnya merupakan kebuntuan. Pada April 1976, sebuah laporan dari kedutaan besar Amerika mengemukakan kesulitan-kesulitan yang dihadapi ABRI:

Jenderal Yogi (Soepardi, Asisten Perencanaan, Departemen Pertahanan)...memperkirakan kekuatan Fretilin sekitar 3.000 dengan hanya 5.000 dari 15.000 pucuk senjata yang sejauh ini disita oleh Indonesia. Indonesia belum-belum sudah mengalami terkurasnya sumberdaya, dengan kekurangan pasokan amunisi untuk senjata ringan, artileri, tank, dan meriam angkatan laut.<sup>383</sup>

## “Pengepungan dan penghancuran”: tahap akhir Operasi Seroja 1977 - 1979

### Tinjauan

286. Fretilin menghadapi persoalan besar mengenai apa yang harus mereka lakukan dengan penduduk sipil yang berjumlah besar di berbagai basis mereka di pedalaman. Beberapa orang berpendapat bahwa sudah saatnya untuk mengubah strategi, dan memperbolehkan penduduk sipil menyerahkan diri dan kembali bermukim di kota. Pertentangan mengenai masalah ini menyebabkan terjadinya perpecahan berdarah dalam tubuh Fretilin dan disingkirkannya Presiden Francisco Xavier do Amaral pada Agustus 1977. Penahanan, penyiksaan, dan pembunuhan sewenang-wenang dilakukan oleh Fretilin selama periode ini.

287. Pada paruh kedua 1977, operasi militer Indonesia semakin gencar, yang mencakup penghancuran sumber makanan di pedalaman untuk memisahkan masyarakat sipil dari resistansi bersenjata. Operasi ini mengakibatkan kematian masyarakat sipil dalam jumlah yang tak terkira akibat serangan langsung serta kelaparan dan wabah penyakit akibat dihancurkannya basis-basis Fretilin dan sumber makanan.

288. Dengan mundurnya Fretilin ke sejumlah kecil daerah yang lebih sempit, ABRI meluncurkan Operasi Cahaya, dengan maksud untuk memaksa para pemimpin utama Fretilin menyerah bersama penduduk sipil yang tersisa.<sup>384</sup> Gunung Matebian di wilayah timur dan beberapa wilayah di Suai dan Ermera di wilayah barat menjadi ajang pengeboman udara yang paling gencar, yang mengakibatkan kematian skala besar dan pada akhirnya penyerahan diri puluhan ribu penduduk sipil. Para

pemimpin utama Fretilin ditangkap, menyerahkan diri, atau dibunuh, sehingga resistansi bersenjata yang tersisa kacau-balau. Presiden Fretilin Nicolau Lobato terbunuh dalam pertempuran 31 Desember 1978.<sup>385</sup> Xanana Gusmão berhasil lolos ke timur. ABRI melanjutkan operasi penumpasan sampai pada awal 1979, dan pada Maret 1979 menyatakan wilayah ini sudah ditaklukkan.

## Penduduk sipil di gunung-gunung

289. Pada akhir 1976 kehidupan dalam zona bebas (*zonas libertadas*) yang dikuasai Fretilin amat berat bagi rakyat sipil, tetapi pada umumnya mereka tidak terlibat langsung dalam pertempuran. Militer Indonesia masih belum dapat secara permanen mengukuhkan kehadirannya di sejumlah wilayah pedalaman tempat berbagai zona ini berada. Penduduk sipil bersama Fretilin telah mampu menjalankan suatu fungsi dasar masyarakat yang dapat menyediakan berbagai kebutuhan pokok rakyat.<sup>386</sup> Fokus mereka adalah menanam tanaman pangan serta pemberian perawatan kesehatan dasar dan pendidikan bagi anak-anak. Komisi mendengarkan kesaksian ahli dari Gilman dos Santos, seorang pegawai negeri pemerintahan tingkat provinsi Indonesia yang bekerja dengan masyarakat pengungsi pada akhir 1970-an dan kemudian menjadi staf LSM Amerika Catholic Relief Services:

*Menurut perhitungan saya, situasi pangan di hutan antara tahun 1975 dan 1977 tidak begitu buruk. Orang-orang tidak mengalami banyak masalah karena pada waktu itu mereka masih dapat bergerak dan bebas menanam tanaman sesuai musim. Mereka dapat menghasilkan bahan makanan. TNI hanya menguasai kota-kota kabupaten dan kecamatan, meskipun TNI melakukan serangan ke hutan-hutan.<sup>387</sup>*

290. Keadaan ini berubah secara dramatis dalam paruh kedua 1977.

## Kapasitas ABRI terkuras dan kepercayaan diri awal Fretilin

291. Menyusul situasi kebuntuan militer antara pasukan Indonesia dan Fretilin pada akhir 1976, ABRI tiba-tiba menyadari bahwa kekuatannya tersebar di seluruh Nusantara pada awal 1977. ABRI terpaksa menarik sebagian pasukannya dari Timor-Leste untuk mendukung sejumlah operasi di Irian Jaya, Kalimantan Barat, dan Aceh. ABRI juga bertanggung jawab untuk menjaga keamanan pada pemilihan anggota DPR Indonesia pada Mei, dan ABRI menempatkan kira-kira 100 batalion di seluruh negeri.<sup>388</sup> Berbagai pengaruh eksternal ini benar-benar memengaruhi kemampuannya untuk menjalankan beberapa operasi tempur di Timor-Leste. Pengurangan pasukan ini dilaporkan dalam dokumen militer Indonesia:

Dalam kerangka pelaksanaan pemilihan umum tahun 1977 total kekuatan TNI di Timor-Leste berkurang hingga sepertiga yang ada [yang lain ditugaskan] sebagai petugas keamanan pemilihan umum tahun 1977 di bagian lain di Indonesia.<sup>389</sup>



292. Bukti dan berbagai laporan Fretilin di bawah ini menengarai bahwa antara Maret dan Juni 1977 terjadi pengurangan pasukan ABRI dan sejumlah operasi tempur yang cukup berarti.

293. Ini memberikan kelonggaran dan kesempatan bagi Fretilin. Selama paruh pertama 1977, Radio Maubere Fretilin berulang kali menyiarkan pemberitahuan mengenai rendahnya semangat Indonesia dan berbagai kemenangan Falintil. Pada 20 Mei, misalnya, Menteri Informasi dan Keamanan Nasional Alarico Fernandes melaporkan melalui radio bahwa 1.500 tentara Indonesia telah ditarik mundur dari wilayah itu.<sup>390</sup> Pada 4 Juni dia melaporkan:

Serangan-serangan utama Indonesia yang terakhir terjadi sejak November [1975] hingga Februari [1976]. Meskipun mengerahkan ribuan pasukan, serangan-serangan ini dikalahkan dengan meminta banyak korban pasukan Indonesia... Sejak bulan Februari, serangan-serangan Indonesia dilakukan dengan skala kecil, yang bertujuan meraih sedikit kesuksesan menghancurkan posisi Fretilin di pegunungan dengan mengabaikan kota-kota yang dikuasai Indonesia.<sup>391</sup>

294. Sementara propaganda Fretilin membesar-besarkan keberhasilannya, paruh pertama 1977 relatif merupakan periode yang positif bagi Resistansi. Pada Mei, Alarico Fernandes menyatakan bahwa:

Produksi makanan di wilayah yang dikuasai Fretilin adalah sektor lain yang dibangun bersamaan dengan perjuangan bersenjata. Kami telah mencapai produksi maksimum yang diraih pada masa dominasi kolonial Portugis, ketika terjadi kelaparan dan penyakit... Penduduk di Timor-Leste bekerja keras melakukan rekonstruksi nasional. Kelaparan tidak sebanyak sebelumnya.<sup>392</sup>

## Amerika Serikat memimpin dalam mempersenjatai-ulang militer Indonesia

295. Pada awal 1977 sebuah delegasi subkomite Kongres Amerika Serikat mengunjungi Timor-Leste. Kunjungan mereka diatur dengan seksama oleh militer Indonesia, dengan membatasi mereka ke berbagai daerah yang sudah mantap berada di bawah penguasaan Indonesia. Mereka tidak berupaya untuk bertemu dengan Fretilin ataupun sejumlah besar penduduk sipil di wilayah pedalaman. Selama masa kunjungan mereka sangat sedikit terjadi operasi tempur. Delegasi ini “tidak membuat kesimpulan tegas” sehubungan dengan perang.<sup>393</sup> Pada 1978, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Zbigniew Brzezinski memerintahkan agar “tekanan” terhadap masalah hak asasi di Indonesia diredam.<sup>394</sup> Selanjutnya selama 1978, Amerika Serikat dan pemerintah asing lainnya memberikan dukungan militer yang luas untuk Indonesia. Pada Januari, Amerika Serikat mengumumkan penjualan 16 unit F5,

sebuah Skuadron A4, dan sebuah fasilitas pembuatan senapan M-16.<sup>395</sup> Pada tahun yang sama Inggris mengumumkan niatnya untuk memasok pesawat Jet Hawk untuk serangan darat,<sup>396</sup> sementara Australia memasok helikopter serta pesawat angkut.<sup>397</sup> Ini menjadi pertanda yang jelas bagi Indonesia bahwa negara-negara Barat tidak menentang operasi militernya di Timor-Leste.

296. Pada 1979, Amerika Serikat berusaha untuk menjelaskan kebungkamannya mengenai penggunaan berbagai senjatanya di Timor-Leste atas dasar bahwa perang tersebut sudah selesai. Sumbernya untuk membuat kesimpulan ini adalah militer Indonesia:

Beberapa perlengkapan militer yang dipasok Amerika Serikat saat ini ada di Timor-Leste. Meskipun demikian, skala dan frekuensi perselisihan di Timor-Leste sudah begitu berkurang, sehingga menurut informasi terbaik yang ada perlengkapan itu sangat jarang digunakan dalam pertempuran.<sup>398</sup>

## Perpecahan internal Fretilin dan pembersihan berdarah

297. Meski ada optimisme pada awal 1977, Fretilin menghadapi permasalahan dan perpecahan internal, yang berakibat pada terjadinya kekerasan. Pada 1976<sup>9</sup> partai tersebut membunuh Aquilis Soares, *liurai* Quelicai, atas tuduhan menempatkan kepentingan lokal di atas kepentingan nasional.<sup>399</sup> Belakangan pada tahun yang sama, satu lagi unit yang memisahkan diri, yang dipimpin Francisco Hornai di Iliomar, juga ditangkap dan dibunuh.<sup>400</sup> Berbagai kejadian ini merupakan indikasi awal adanya perbedaan pandangan di antara para pemimpin Fretilin mengenai bagaimana menjalankan perjuangan, dan pertanda awal berbagai kekerasan yang akan digunakan oleh Fretilin untuk mendisiplinkan para kadernya.<sup>401</sup>

298. Pada akhir 1977 perawatan kepada orang yang sakit dan terluka, serta penyediaan makan kepada penduduk sipil, menjadi beban yang semakin berat bagi Fretilin. Presiden Fretilin ketika itu, Francisco Xavier do Amaral, mengatakan kepada Komisi bahwa kurangnya obat-obatan, bahkan untuk penyakit yang biasa, mengakibatkan semakin banyak penduduk sipil mati.<sup>402</sup>

299. Para anggota Komite Sentral Fretilin tidak sepaham mengenai beberapa persoalan, ketika para kader politik dan militer berselisih mengenai siapa yang seharusnya mengatur perjuangan. Yang menjadi kontroversi utama adalah peran penduduk sipil. Bagi para pemimpin Falintil, keharusan membela penduduk sipil dalam jumlah besar membatasi kemampuan mereka melakukan berbagai ofensif yang efektif. Presiden Fretilin Francisco Xavier do Amaral mendukung pandangan ini, dan menganggap perlu diambil suatu tindakan untuk menghindari penghancuran, dan sebagian besar penduduk diperbolehkan untuk menyerahkan

\* Sumber bulan bermacam-macam; Taylor, *Indonesia's Forgotten War*, hal. 95 mengatakan November, sementara Chamberlain, *The Struggle in Iliomar*, mengutip Gusmão, To Resist, mengatakan Maret.

diri dan melanjutkan resistansi dari berbagai kota dan desa. Para anggota Komite Sentral lainnya yakin bahwa rakyat adalah komponen penting dalam perjuangan rakyat, khususnya untuk memungkinkan partai melakukan revolusi sosial yang berdasar pada pendidikan politik bagi semua.<sup>403</sup>

300. Pada Agustus 1977, Komite Sentral Fretilin bertemu di Laline (Lacluta, Distrik Viqueque) dan bersepakat mengenai prinsip mengandalkan kekuatan sendiri. Dengan tidak adanya kemungkinan dukungan dari luar, Resistansi memutuskan untuk memerangi ABRI sendiri. Terjadi pertentangan mengenai masalah ini. Menteri Informasi Alarico Fernandes menganggap kemerdekaan tidak mungkin dicapai tanpa dukungan dari luar.<sup>404</sup> Presiden Fretilin Francisco Xavier do Amaral, yang mengambil sikap beroposisi, tidak menghadiri rapat di Laline. Tidak lama kemudian, pada September 1977, Fretilin menangkap dan memecatnya sebagai Presiden. Amaral menceritakan kejadian itu kepada Komisi:

*Jadi seperti inilah ide saya. Kami harus mengirim penduduk untuk menyerah. Hanya laki-laki yang kuat dan dapat bertempur di peperangan tetap tinggal bersama Komite Sentral. Karena kami tidak tahu berapa tahun lagi perang ini berakhir...[Pada 1976] mulai ada perbedaan pendapat dalam Fretilin....Beberapa orang berkata bahwa doktrin [Fretilin] ini tidak benar. Beberapa orang menyatakan bahwa doktrin ini benar tetapi orang-orang tidak mengikutinya secara tepat. Beberapa berkata doktrin ini baik. Kami mulai kehilangan kepercayaan satu sama lain...Sejak saat ini mereka menangkap saya, memenjarakan saya, dan menuduh saya...Bahwa saya mengirim penduduk untuk menyerah supaya di masa yang akan datang ketika saya menyerahkan diri kepada Indonesia, Indonesia akan memberikan jabatan sebagai jenderal atau menteri kepada saya. Inilah argumen mereka yang menyerang saya...<sup>405</sup>*

301. Suatu perintah yang ditandatangani oleh Wakil Presiden Nicolau Lobato menuduh Francisco Xavier do Amaral sebagai seorang pengalah dan pengkhianat, serta “kejahatan-kejahatan” lain seperti korupsi, poligami, sabotase, kekerasan, feodalisme, dan pembunuhan.<sup>406</sup> Dia juga dituduh memulai gerakan saingan yang akan melemahkan Fretilin. Dia dipenjara di sebuah lubang, dipukuli, dan diperlakukan dengan kejam.<sup>407</sup> Akibat serangan ofensif ABRI, Francisco Xavier do Amaral melarikan diri pada 1978, dan belakangan ditangkap oleh ABRI.

302. Pada 16 Oktober, Nicolau Lobato terpilih sebagai presiden baru. Tekanan dalam periode ini mendorong Fretilin mengadopsi ideologi yang lebih radikal. Marxisme diumumkan,<sup>408</sup> dan bersamaan dengan itu muncul sikap yang tidak toleran pada perbedaan pendapat. Penangkapan Amaral menjadi awal dari pembersihan di dalam tubuh Fretilin.<sup>409</sup> Terjadi berbagai eksekusi publik,<sup>410</sup> dan banyak orang yang ditahan, diperlakukan dengan kejam dan dipaksa untuk mengadukan orang lain.<sup>411</sup> Siapapun yang diketahui berhubungan dekat dengan Amaral atau yang berkolaborasi dengan militer Indonesia, ditangkap dan ditahan

(lihat Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa, dan Bab 7.4.: Penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penganiayaan).

## **ABRI mengintensifkan operasi militer: pengepungan dan penghancuran, (Agustus 1977 sampai Agustus 1978)**

303. Operasi militer antara pertengahan 1977 sampai pada awal 1979 sering disebut sebagai kampanye “pengepungan dan penghancuran.” Kampanye tersebut punya dua tujuan, yaitu untuk menghancurkan kepemimpinan Fretilin dan memaksa penduduk sipil yang tinggal di pedalaman bergunung-gunung menyerahkan diri kepada ABRI di dataran rendah.<sup>412</sup>

304. Pada Agustus 1977, ABRI melancarkan operasi militer besar baru,<sup>413</sup> yang didahului dengan pengerahan pasukan yang besar.<sup>414</sup> Data Komisi menunjukkan peningkatan dari tiga sampai lima batalion pada Juli, menjadi tujuh belas batalion pada Agustus. Fokus awal dari ofensif ini adalah sektor barat, yang dikenal dengan nama sandi Operasi Sisir.\*<sup>415</sup> Seperti pada berbagai operasi sebelumnya, dukungan artileri Angkatan Laut dan Udara adalah faktor penting bagi kemenangan ABRI. Di Fatumean, misalnya, pengeboman udara adalah alasan utama menyerahnya pasukan Falintil/Fretilin dan penduduk sipil pada November.<sup>416</sup> Di sektor timur, Marinir menjalankan Operasi Bedah Marinir 77 dengan tujuan untuk menguasai jalur antara Quelicai dan Uato Carbau.<sup>417</sup>

### **Penghancuran sumber pangan, Fretilin mundur ke gunung bersama penduduk sipil**

305. Militer Indonesia bergerak keluar dari kota dan koridor jalan yang telah mereka kuasai pada bagian pertama Operasi Seroja. Fretilin terpaksa mundur, dan bukannya menyuruh penduduk untuk menyerah, Fretilin memutuskan untuk membawa serta penduduk sipil dengan mereka. Komisi diberitahu mengenai pembunuhan ternak dan penghancuran sumber pangan lainnya oleh militer Indonesia selama operasi-operasi ini. Manuel Carceres da Costa dari Laclo, Distrik Manatuto, bersaksi:

*Ketika kami menebang sebuah pohon sagu, datang prajurit Indonesia dan menyerang kami... Ketika tentara menembak seorang anggota Falintil bernama Hermenegildo, kami terpaksa meninggalkan makanan kami dan melarikan diri. Setelah serangan itu, militer Indonesia menduduki daerah tersebut sehingga kami tidak dapat kembali lagi. Kerbau-kerbau dan ternak kami semua ditembak mati atau diusir. Kebun-kebun dan sawah kami dihancurkan.<sup>418</sup>*

306. Pengeboman udara juga dilakukan terhadap lahan pertanian, sehingga memaksa Fretilin dan penduduk sipil mundur lebih jauh ke gunung-gunung, dan membuat

\* Hal ini melibatkan Batalion Infanteri 131, 511, 527, 612, 621, 733, dan 741.

hidup menjadi semakin sulit. Dengan tanaman pangan hancur, dan penduduk sipil tidak lagi dapat tinggal di permukiman tempat mereka dapat bercocok tanam, tetapi terpaksa harus tetap bergerak, banyak orang kemudian mati. Komisi mendengar banyak kesaksian mengenai penderitaan berat dan ketidakberdayaan penduduk sipil di gunung selama operasi militer ini. Orang tua dan anak-anak adalah yang paling banyak mati.<sup>419</sup> Militer Indonesia mematahkan basis-basis resistensi Fretilin (*bases de apoio*) satu per satu, dan penduduk yang tersisa mundur ke daerah-daerah yang makin terpojok. Kehadiran demikian banyak penduduk sipil membuat Fretilin harus memikirkan perlindungan mereka, sehingga mengurangi kemampuannya melakukan serangan balasan kepada ABRI.

## Serangan di wilayah tengah

307. Militer Indonesia terus melancarkan serangan selama musim hujan dan selama paruh pertama 1978. Jumlah pasukan di wilayah tengah, yang sebelumnya hanya sedikit, ditambah sampai sebanyak yang berada di barat. Beroperasi di bawah komando Resimen Tempur (RTP) 11, pasukan ini melancarkan sebuah serangan di daerah Same-Kablaki-Fatuberliu.<sup>420</sup> Tapi, di bagian timur, jumlah pasukan tetap jauh lebih sedikit, dengan hanya empat sampai lima batalion.\* Selama musim hujan, pasukan di timur menyerang pertahanan Fretilin di perbatasan Baucau-Viqueque antara Gunung Ossoala dan Gunung Mundo Perdido, dan juga melanjutkan penyerangan di bagian utara kaki Gunung Matebian.<sup>421</sup> Selama periode ini kekuatan angkatan udara† digunakan di sektor barat dan tengah:<sup>422</sup>

*Setelah pengeboman atas Kablaki mereka pergi ke Dululau dan Mamelau ... Empat pesawat udara mengebom Dululau, dan ... roket dan ... meriam.*<sup>423</sup>

308. Komisi mendengar kesaksian langsung para korban yang selamat dari berbagai serangan pengepungan ini, di mana banyak penduduk sipil yang mati. Maria José da Costa menceritakan kepada Komisi mengenai pengalamannya di wilayah pegunungan tengah:

*Pada tahun 1978 musuh mengepung kami di Dolok dan banyak orang meninggal karena kelaparan. Semua persediaan makanan milik rakyat dibakar. Mereka mengepung kami dengan menyerang dari laut dengan kapal perang, dari udara dengan pesawat terbang, dan dari darat dengan membakar alang-alang dan mengirim pasukan angkatan darat. Pada waktu itu bulan Agustus yang merupakan musim kemarau. Tentara membuat api yang besar yang menjalar dengan cepat ibarat menyemprotkan bensin ke alang-alang. Banyak orang mati karena tidak dapat menghindari api yang mengepung kami.*<sup>424</sup>

\* Termasuk Batalion Infanteri 502 dan 503 Kostrad, Batalion Infanteri 408, dan satu Batalion Infanteri Marinir.

† Pesawat Bronco OV-10 yang disalurkan oleh AS.

309. Tekanan dari pengepungan dan serangan yang tiada henti menciptakan gelombang manusia yang perlahan-lahan menyerahkan diri kepada militer Indonesia.

### **Operasi (atau Gerakan) Cahaya, dengan sasaran para pemimpin Fretilin**

310. Pada 6 April 1978, Letnan Jenderal Mohammad Yusuf ditunjuk sebagai Panglima ABRI. Dia mengambil alih kendali secara pribadi berbagai operasi di Timor-Leste, memotong wewenang Moerdani dan Kalbuadi.<sup>425</sup> Di musim kemarau pada Mei 1978, Operasi Cahaya pun dilancarkan.<sup>426</sup> Operasi baru ini secara khusus menargetkan para pemimpin Fretilin. Tujuannya adalah agar para pemimpin yang berpengaruh menyerahkan diri sehingga masyarakat pun ikut menyerahkan diri secara besar-besaran, dengan demikian memisahkan masyarakat dari para gerilya. Komisi mendengar kesaksian Xanana Gusmão bahwa Operasi Cahaya ini lebih tepat disebut sebagai sebuah “gerakan”, dan bahwa Menteri Informasi dan Keamanan Fretilin Alarico Fernandes merupakan sekutu utama militer Indonesia setelah dia menyerahkan diri pada September 1978:

*Pada bulan Oktober atau November 1978 kami yang dikepung mendengar bahwa Alarico sudah melaksanakan [Operasi] Cahaya ... Kami mendengar di radio bahwa Alarico sudah melakukan gerakan... Dia bisa melihat bahwa Indonesia sangat kuat dan dia mengikuti Indonesia dan mencanangkan [Operasi] Cahaya.<sup>427</sup>*

311. Walaupun secara geografis konflik ini terus berubah sampai awal 1978, seiring berjalannya waktu dan Resistansi semakin terdesak ke daerah yang lebih sempit, sifat konflik ini berubah menjadi suatu pengepungan. Karena semakin terdesak, para pemimpin Fretilin berupaya untuk mempertahankan resistansi yang terpadu. Sebuah naskah pidato Nicolau Lobato pada 20 Mei 1978 menunjukkan tekanan yang dihadapi Fretilin:

*Akan tetapi mereka yang tidak bisa diyakinkan akan fakta tentang pertanyaan yang tidak bisa dijawab bahwa perjuangan kita adalah adil dan benar, bagi mereka yang berposisi dan bekerjasama secara fanatik dengan musuh untuk mengakhiri perjuangan kita, beberapa dari mereka yang telah gagal dalam hidup, mereka adalah bukan anggota Fretilin, mereka bukan bagian dari rakyat Maubere, mereka adalah musuh rakyat, mereka adalah pengkhianat Ibu Pertiwi. Persatuan ideologi yang telah diumumkan hanya akan dinyatakan ketika kita melaksanakannya secara praktis. \**

.....  
\* Dalam: Nicolau dos Reis Lobato, *Fretilin é a Liberdade do Povo em Marcha, Discursos*, Edições Comité 28<sup>de</sup> Novembro, Lisbon, tak bertanggal (mungkin 1979, setelah komunike resmi dari Fretilin yang mengumumkan kematian Nicolau Lobato, 6 Mei 1979), hal.59. Naskah ini kemudian disiarkan melalui radio dan ringkasannya dikirim ke Perwakilan Amerika Serikat di PBB, menyatakan: “Lobato menyerukan, antara lain, persatuan rakyat Timor-Leste, semua pejuang dalam Komite Sentral Fretilin,

## Operasi militer Indonesia di wilayah tengah dan timur, akhir 1978: Jatuhnya Matebian

312. Titik balik utama dalam operasi terjadi pada pertengahan 1978. Antara Agustus dan Desember 1977, pasukan tempur terkonsentrasi di sektor barat, dan selama paruh pertama 1978 pasukan tempur tersebar dengan jumlah yang sama kuat di sektor barat dan pusat; sementara pengerahan pasukan di timur jauh lebih rendah. Pada pertengahan 1978, perimbangan kekuatan akhirnya bergeser ke timur, dengan 13 batalion tempur yang ditugaskan di timur di bawah komando RTP 18 Kostrad.<sup>428</sup> Pengerahan ini melanjutkan proses pengepungan penduduk dan memuncak pada penyerangan terhadap Gunung Matebian. Operasi ini diatur dengan seksama, melibatkan sejumlah batalion Kostrad, batalion infanteri teritorial nonorganik (eksternal), batalion bantuan tempur, Marinir, dan Angkatan Udara. Seorang mantan perwira Kostrad yang diwawancarai di Indonesia menceritakan tentang taktik yang digunakan selama penyerangan di Gunung Matebian:

*Semua unit memiliki rute mereka sendiri dan menyerang dari berbagai arah. Sebelum melaksanakan serangan mereka berkoordinasi untuk menghindari saling-tembak antarunit. Kami berencana menyerang pada waktu yang bersamaan dengan memakai formasi L. [Ini] semua dilakukan dengan pertimbangan keamanan dalam upaya menghindari terbunuhnya kawan seperjuangan kami.<sup>429</sup>*

313. Ini menjadi serangan terbesar terakhir dalam operasi pengepungan dan penghancuran. Fretilin telah mempersiapkan Matebian sebagai wilayah pemunduran, dengan persediaan makanan. Ketika kampanye ini dimulai, Fretilin membawa orang-orang ke gunung, yang dipertahankan dengan kuat. Wilayah ini pada akhirnya jatuh pada 22 November, zona bebas terakhir yang ditundukkan.

314. Yang menjadi kunci kemenangan dalam serangan di Gunung Matebian adalah pengeboman udara dengan menggunakan pesawat Bronco OV-10, F-5, dan Sky Hawk A-4. Sebagian besar sumber mengatakan bahwa pengeboman udara di Gunung Matebian dimulai pada September atau Oktober 1978 dan berlangsung hingga pertengahan November.<sup>430</sup> Banyak pernyataan yang menggambarkan pengeboman yang tidak pandang bulu terhadap penduduk sipil dan pembantaian yang membinasakan.<sup>431</sup> Tomas Soares da Silva, yang pada saat itu berumur 16 tahun, menceritakan pengeboman di Gunung Matebian itu:

*Di Gunung Matebian, pengeboman mulai terjadi bulan Oktober dan November. Satu [jenis] bom adalah bom gas. Apabila para pengebom menjatuhkan bom-bom tersebut pada pagi hari, banyak orang menjadi korban. Kita dapat melihat kapan terjadi ledakan ketika*

---

dan menyerukan persatuan ideologis. Persatuan ideologis yang dicanangkan hanya akan menjadi tulus ketika kami (Fretilin) menerapkannya.” Juga, bahwa mereka yang tidak masuk dalam Fretilin adalah musuh penduduk—(mereka adalah) “pengkhianat ibu pertiwi [sic]”. Telegram, Misi AS di PBB New York kepada Menteri Luar Negeri AS di Washington, East Timor Question, 7 Juli 1978.

*rumput terbakar. Bom-bom membakar rumput, dan di wilayah ini semuanya dihancurkan. Bilamana terjadi ledakan baunya seperti solar atau bensin.*\* <sup>432</sup>

## Penyerahan diri: Turun dari Matebian

315. Pada pertengahan November, pengeboman itu memaksa para pemimpin Fretilin menyerukan penduduk sipil untuk menyerahkan diri kepada musuh. Dalam otobiografinya Xanana Gusmão menulis:

Segera musuh bergerak maju dan saya dikirim ke barat Matebian. Ledakan, kematian, bombardir, tangisan, dan mundur. Namun orang-orang tenang: mungkin pasrah, mungkin kami semua benar-benar siap untuk mati di sana. Pasukan kami mundur dan musuh merangsek maju. Suatu dini hari, saya terbangun karena pengeras suara Pasukan Indonesia, yang menyerukan nama saya: “Adjunto Xanana, tidak perlu meneruskan pertempuran. Perintahkan orang-orang untuk menyerah!” Mereka masuk dari Uato Carbau sepanjang malam dan menguasai titik strategis.<sup>433</sup>

316. Pada 22 November, diambil keputusan untuk menyerahkan diri di Matebian. Ketika penduduk sipil menuruni puncak gunung dan lembah panjang yang memisahkan Matebian Mane dan Matebian Feto, mereka disambut oleh para pasukan yang sudah menunggu. Beberapa orang dimasukkan ke kamp penahanan sementara, yang lainnya diinterogasi, dan yang lainnya disuruh kembali ke daerah asal mereka, baik di bawah pengawasan atau kembali sendiri.

317. Walaupun beberapa komandan Falintil seperti Xanana Gusmão berhasil lolos, hal ini memarakporandakan perlawanan Fretilin/Falintil. Dampak kehancuran dari kekalahan Fretilin sangat besar, dan Operasi Cahaya pada akhirnya mencapai beberapa kesuksesannya yang paling penting. Setelah sebelumnya Alarico Fernandes menyerah pada September, empat anggota Komite Sentral lainnya menyerahkan diri pada akhir 1978 di Sektor Tengah Utara, di Remexio. Dengan penyerahan diri Alarico Fernandes, Fretilin kehilangan satu-satunya radio, yang merupakan alat koordinasi yang sangat penting. Kesuksesan utama ABRI diraih pada 31 Desember 1978 ketika tim Kopassus berhasil menyergap Presiden Fretilin Nicolau Lobato yang mengakibatkan luka parah, di sebuah sungai dekat Maubisse.<sup>434</sup>

318. Komisi mendengar kesaksian ahli dari Pat Walsh mengenai hasil intensifikasi kampanye militer ini:

\* Kesaksian semacam ini menegaskan penggunaan bahan kimia terhadap penduduk sipil yang ditargetkan oleh pasukan udara Indonesia. Komisi memegang rekaman dokumenter mengenai pesawat OV-10 yang sedang dimuati dengan bom berlabelkan ‘Opalm’ (*napalm* dalam versi Soviet) di pelabuhan udara Baucau pada akhir 1970-an.



*Dari sudut pandang militer, ofensif ini sangat berhasil dalam menghancurkan Resistansi, meski sementara. Dari sisi kemanusiaan, ofensif ini merupakan bencana.*<sup>435</sup>

## Setelah Matebian: Serangan ABRI di wilayah tengah dan timur

319. Dengan jatuhnya basis Fretilin di Gunung Matebian dan penyerahan puluhan ribu warga sipil, pada awal 1979 militer Indonesia mengalihkan perhatiannya kepada sisa pasukan Fretilin dan penduduk sipil yang masih berada di Fatubesi, Distrik Ermera, dan Gunung Kablaki, yang terbentang di sepanjang perbatasan Ainaro-Manufahi, dan di lembah Sungai Dilor. Serangan ABRI di Fatubesi mengakibatkan perpecahan dalam kepemimpinan Fretilin setempat, dan pada awal Februari salah satu faksinya menyerahkan diri, sementara mereka yang menolak untuk menyerah, terus diburu. Di Gunung Kablaki, operasi infanteri memaksa sejumlah kelompok penduduk sipil yang tersisa untuk turun ke dataran yang lebih rendah di mana mereka menyerahkan diri atau ditangkap oleh pasukan yang sudah menunggu.<sup>436</sup>

320. Di selatan Manatuto, Marinir, dengan didukung oleh pesawat, melakukan operasi lanjutan, yang diberi nama Operasi Pembersihan.<sup>437</sup> Sementara itu, unit militer yang terlibat dalam penggepungan di Gunung Matebian berpindah dari Baucau ke Lautém dalam rangka pencarian sekelompok kecil pemimpin Fretilin dan para tentara Falintil yang lolos dari pengepungan.<sup>438</sup> Pada Februari, Mau Lear, pemimpin wilayah Timur, ditangkap dan dibunuh.<sup>439</sup> Orang-orang yang tertangkap dalam berbagai operasi ini dibawa ke kamp penampungan. Pada 26 Maret 1979, Operasi Seroja dibubarkan, dan ABRI menyatakan bahwa Timor-Leste “sudah ditaklukkan”.

## Penyerahan diri, pemukiman kembali, dan kelaparan

### Tinjauan

321. Periode antara akhir 1977 sampai 1979 merupakan masa tragedi kemanusiaan terbesar dalam sejarah Timor-Leste. Kelaparan hebat terjadi akibat operasi militer besar-besaran Indonesia untuk menumpas Resistansi Fretilin. Tujuan militer lebih penting daripada korban manusia. Pengamat dari luar tidak diperkenankan masuk sampai krisis ini benar-benar memuncak dan jumlah kematian amat tinggi.

322. Penduduk sipil di beberapa gunung menyerahkan diri dalam jumlah besar mulai akhir 1978. Setelah berbulan-bulan hidup selalu dalam pelarian untuk menghindari serangan, dan sumber pangannya dihancurkan oleh militer Indonesia, orang-orang berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan ketika mereka menyerah. Mereka ditampung dalam kemah-kemah sementara, tanpa persediaan pangan dan obat-obatan yang mencukupi. Penderitaan mereka diperburuk oleh

kontrol militer atas operasi bantuan domestik Indonesia, dan larangan bagi lembaga internasional untuk masuk ke wilayah tersebut. Media internasional juga dilarang. Setelah pemindahan penduduk ke dalam kamp-kamp penampungan, prioritas pihak militer Indonesia atas keamanan sangat membatasi gerak-gerik penduduk sipil sehingga juga membatasi kemampuan mereka untuk bertani dan bercocok tanam pangan, yang semakin memperburuk kelaparan, kematian, dan penderitaan dalam jumlah yang amat besar. Keinginan penguasa untuk memisahkan penduduk sipil dari Fretilin/Falintil mencapai puncaknya dengan pengungsian penduduk sipil ke Pulau Ataúro mulai 1980. Ribuan orang ditahan di pulau penjara itu, dan menderita penyakit dan kelaparan.

323. Setelah penundaan yang cukup lama, Komite Palang Merah Internasional (ICRC) dan organisasi nonpemerintah Amerika Serikat Catholic Relief Services (CRS) diizinkan untuk memasuki wilayah tersebut pada akhir 1979. Bekerja di bawah tekanan yang amat tinggi, upaya mereka sedikit banyak meringankan penderitaan penduduk dan menyelamatkan banyak nyawa.

## Penyerahan dan eksekusi tahanan

324. Sebagian besar penyerahan terjadi sepanjang 1978 ketika kampanye pengepungan semakin mendekat ke sejumlah posisi Resistansi. Kampanye pengeboman dan pengepungan yang ketat, ditambah tawaran amnesti Presiden Soeharto pada 1977 kepada para pejuang, tekanan akibat Operasi Cahaya, mendorong penyerahan diri sejumlah tokoh Fretilin. Banyak di antara mereka yang awalnya diberi amnesti belakangan menghilang. Di antara mereka terdapat pemimpin-pemimpin terkemuka seperti Sera Key,<sup>440</sup> juga para kader, seperti mereka yang dieksekusi pada saat menyerahkan diri di Quelicai awal 1979.<sup>441</sup> Ketika turun dari gunung, orang-orang diinterogasi oleh militer Indonesia guna mengidentifikasi dan memisahkan anggota Fretilin dan Falintil. Luis da Costa adalah pastor di gunung pada saat itu. Ia selamat, dan pada 1988 ia bersaksi di Lisabon mengenai penyerahan diri sekelompok kecil orang, yang sebagian besar kemudian dieksekusi:

*Orang-orang mulai mati kelaparan, dan kami membawa banyak orang yang terluka, juga anak-anak dan keluarga-keluarga. Ingatan terburuk saya adalah mengenai jasad-jasad yang saya lihat ketika melewati Natarbora pada bulan Desember 1978 – ada jenazah setiap sepuluh meter, jasad-jasad yang mengering dari orang-orang yang mati kelaparan, ada yang berpelukan, ada yang bersandar di pohon-pohon. Saya menyerahkan diri di Barique pada tanggal 13 Maret 1979 dengan enam orang lainnya. Selama sebulan lamanya kami hanya makan dedaunan. Penyerahan diri kami dinegosiasikan melalui perantara. Saya satu-satunya orang yang tidak dieksekusi.<sup>442</sup>*

325. Pada 1981 Administrator Apostolik Timor-Leste, Monsignor Martinho da Costa Lopes menantang Presiden Soeharto dengan bukti-bukti tentang sejumlah penghilangan ini.<sup>443</sup>

## Kamp-kamp penampungan sementara

326. Orang-orang yang tidak dibawa oleh militer kemudian ditahan. Selama akhir 1970-an dan sampai pertengahan 1980-an, berbagai macam kamp digunakan untuk menampung penduduk yang menyerahkan diri. Berbagai kamp ini dikenal dengan banyak nama. Indonesia menyebutnya kamp pemukiman kembali, sementara beberapa pengamat internasional, dan banyak korban selamat orang Timor yang bersaksi di hadapan Komisi, menggunakan istilah 'kamp konsentrasi.' Semua kamp ini memiliki ciri yang sama, yakni penelantaran dan pembatasan kebebasan bergerak. Tujuan penahanan ini adalah untuk memutuskan hubungan antara orang yang telah menyerah kepada ABRI dengan Falintil, untuk memutuskan dukungan penduduk sipil kepada pejuang gerilya, dengan demikian menghancurkan sisa-sisa resistansi yang tercerai-berai di gunung dan hutan.

327. Pada tahap awal penyerahan diri, orang-orang ditampung di mana saja, termasuk di sekolah, toko-toko tua, barak-barak militer, atau bahkan di tempat terbuka. Awalnya tidak ada infrastruktur khusus untuk menampung mereka. Komisi mendengarkan kesaksian ahli dari Gilman dos Santos, yang pada 1977 bekerja untuk pemerintah provinsi:

*Orang-orang yang lari ke gunung turun pada tahun 1977, 1978, dan 1979. Mereka yang menyerah atau yang ditangkap oleh militer Indonesia, semuanya ditempatkan di kamp-kamp konsentrasi, yang sangat tidak layak dihuni manusia mana pun. Orang-orang ditempatkan di tenda-tenda besar darurat, yang dibuat dari daun palem atau rumput, dan mereka menahan semuanya, tanpa membatasi jumlah orang.<sup>444</sup>*

328. Orang-orang pada umumnya berada dalam kondisi fisik yang lemah. Mereka sering menyerah setelah pengalaman yang buruk di gunung di mana banyak orang meninggal. Orang-orang yang datang ke kamp, tidak hanya luput dari kematian akibat perang, tapi juga dari kekurangan makan dan obat-obatan. Pengalaman kelaparan berlanjut di sejumlah kamp yang tidak memiliki fasilitas seperti sanitasi ataupun pasokan makanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang mendesak.

329. Pada 1978, banyak kamp didirikan. Konon tujuan berbagai kamp ini adalah untuk memproses orang-orang yang telah menyerahkan diri sebelum dimukimkan di tempat lain. Menurut teori, proses ini seharusnya memakan waktu tiga bulan. Pengamanan sangat ketat, dan kamp-kamp tersebut dikelilingi oleh pos-pos militer dan Hansip. Gerak-gerik orang umumnya dibatasi pada radius 300 meter, sehingga sangat membatasi kemampuan mereka untuk bercocok tanam atau mengumpulkan makanan. Orang-orang bertahan hidup dengan makanan apa saja yang dapat mereka kumpulkan di sekitar, ubi atau sagu kalau mujur, akar-akar dan umbi-umbian beracun kalau sial (lihat Bab 7.3.: Pemindahan paksa dan kelaparan).

330. Lamanya waktu dalam kamp-kamp ini bervariasi sesuai dengan tingkat kerawanan suatu daerah, dan bergantung pada individu yang ditahan dan persepsi ABRI mengenai ancaman bahaya orang tersebut.<sup>445</sup>

## Kamp penahanan jangka panjang dan strategi keamanan ABRI

331. Beberapa kamp penampungan sementara terus dipertahankan sebagai kamp penahanan jangka panjang. Desa pemukiman baru dibangun guna mendukung maksud ABRI menjalankan pemisahan penduduk sipil dari Fretilin dan Falintil. Pada akhir 1979, jumlah penduduk di kamp penahanan melampaui 300.000,<sup>446</sup> dan bila berbagai angka yang dilaporkan ABRI dari masa itu akurat, bisa saja melampaui 370.000.<sup>447</sup> Militer perlu mengontrol jumlah orang yang sangat besar ini, sementara itu juga tetap fokus pada tugas menumpas resistansi gerilya bersenjata. Dalam beberapa kasus, kamp-kamp ini dibangun di mana sebelumnya tidak pernah ada permukiman samasekali. Seluruh desa dibawa dan dipaksa pindah, khususnya bila berada di daerah-daerah yang rawan. Pergerakan penduduk sangat dibatasi. Dokumen militer Indonesia dari masa itu menjelaskan bagaimana menjalankan kebijakan ini:

Setiap kali siapapun keluar dari desa, ia harus memiliki surat jalan, dan setiap orang yang masuk ke suatu desa dari desa lain wajib lapor.

Tidak boleh ada kebun atau sawah penduduk yang letaknya jauh dari pemukiman atau desa.<sup>448</sup>

332. Keadaan ini menghasilkan kontrol atas penduduk sipil yang begitu ketat di sejumlah kamp sehingga mereka tidak dapat bercocok tanam sesuai pola tanam yang normal dan dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka dan keluarga mereka. Kontrol ini mengakibatkan penderitaan besar bagi banyak penduduk sipil yang ditahan dalam berbagai kamp ini, dan mengakibatkan kelaparan.<sup>449</sup>

333. Militer Indonesia terus mencurigai adanya hubungan antara penduduk yang ditahan dengan pejuang gerilya Fretilin. ABRI menggunakan anggota Hansip Timornya untuk memantau gerak-gerik penduduk. Hal ini menimbulkan keadaan saling curiga dan ketegangan di beberapa komunitas kamp. Di Dili dan kota-kota tempat penduduk sipil telah kembali, juga terdapat banyak pusat penahanan. Penangkapan sewenang-wenang oleh militer marak terjadi, dan tidak pernah ada pengadilan resmi atas tahanan politik sampai Desember 1983. (Lihat Bab 7.4: Penahanan sewenang-wenang, Penyiksaan, dan Penganiayaan; serta Bab 7.6: Pengadilan Politik.) Selama 1979 - 1980 banyak orang yang ditahan kemudian menghilang. Militer Indonesia menggunakan beberapa tempat sebagai lokasi pembunuhan, seperti di Quelicai setelah penyerahan diri massal dari Matebian,<sup>450</sup> dan di pinggir Dili di Areia Branca dan Tasitolu.<sup>451</sup>

## Wilayah tertutup

334. Selama periode ini, Timor-Leste ditutup dari dunia luar. Walaupun Indonesia telah menyatakan Timor-Leste sudah ditaklukkan, wilayah ini dalam banyak hal tetap terasa sebagai wilayah perang. Menutupi apa yang sebenarnya terjadi dari publik Indonesia, atau masyarakat internasional yang lebih luas, merupakan komponen penting dari strategi Indonesia untuk menguasai Timor-Leste. Akses media Indonesia ke Timor-Leste dikontrol dengan ketat, dan media internasional praktis dilarang. Lembaga-lembaga bantuan kemanusiaan internasional tidak diperkenankan masuk ke Timor-Leste, dan delegasi resmi hanya diizinkan datang dalam berbagai kunjungan yang dikontrol ketat.

335. Komisi mendengarkan kesaksian dari Gilman dos Santos, mengenai isolasi ini:

*Bahkan wartawan Indonesia tidak diizinkan untuk masuk ke sini. Mengenai telekomunikasi, izin untuk melakukan hubungan telepon jarak jauh atau internasional tidak diberikan. Dengan kondisi seperti ini, tidak ada informasi yang dapat keluar dari sini. Dipisahkannya Timor-Leste dari dunia luar oleh Pemerintah Indonesia, khususnya ABRI, jelas menunjukkan bahwa kebijakan Indonesia adalah untuk mempersulit masuknya bantuan dari negara-negara lain.<sup>452</sup>*

336. Gereja Katolik merupakan satu-satunya organisasi independen yang tetap berada di Timor-Leste dengan jaringan internasional yang luas. Gereja perlahan membocorkan berita mengenai krisis yang melanda Timor-Leste, biasanya melalui surat-surat yang diselundupkan ke luar wilayah ini.

337. Pada Juli 1979, Pat Walsh menyusun laporan mengenai krisis kemanusiaan di Timor-Leste untuk Action for World Development, sebuah LSM berbasis gereja di Australia. Ia memberi kesaksian pada Komisi bahwa laporan tersebut menyimpulkan bahwa di masa ini:

*Upaya bantuan kemanusiaan Indonesia adalah prioritas yang jauh lebih rendah ketimbang operasi militer dan lembaga-lembaga independen tidak akan diizinkan masuk sampai Indonesia telah mencapai tujuan militernya.<sup>453</sup>*

338. Walaupun berbagai LSM Australia mencoba untuk menginternasionalisasikan krisis kemanusiaan di Timor-Leste, pemerintah Australia memandang periode ini sebagai permulaan pengakuan *de jure*-nya bagi kedaulatan Indonesia atas wilayah ini. Posisi ini bertentangan dengan sebagian besar negara anggota di Perserikatan Bangsa-Bangsa.\* Sementara itu, warga Timor-Leste di luar wilayah tersebut juga

.....  
\* Pemerintah Australia menjadikan 14 Februari 1979 sebagai tanggal Australia memulai proses pemberian pengakuan *de jure* kedaulatan Indonesia atas Timor-Leste. Hari ini menandai dimulainya negosiasi antara Australia dan Indonesia mengenai cadangan minyak Laut Timor.[ Lihat Bab 7.1: Hak penentuan nasib sendiri].

mencoba untuk meningkatkan kesadaran internasional akan krisis kemanusiaan tersebut. Di Perserikatan Bangsa-Bangsa, submisi diajukan kepada Komite Khusus PBB untuk Dekolonisasi di New York, dan resolusi-resolusi Sidang Umum PBB pada masa itu mulai mengacu pada kelaparan dan berbagai kebutuhan kemanusiaan orang Timor-Leste. Hal ini memperkuat usaha yang dilakukan José Ramos-Horta dan rekan-rekannya di Perserikatan Bangsa-Bangsa.<sup>454</sup>

339. Pemerintahan sipil Indonesia dan Palang Merah Indonesia (PMI) menjadi satu-satunya lembaga yang memberi bantuan sampai 1979. Dengan sumberdaya yang kurang, dan ditambah dengan kontrol ketat militer Indonesia terhadap operasinya, bermacam lembaga ini tidak mampu memenuhi kebutuhan mendesak penduduk. Obat-obatan jarang tersedia; dan bantuan yang disalurkan melalui PMI sering masuk ke pasar gelap, di luar kemampuan orang Timor-Leste untuk membelinya.<sup>455</sup>

340. Setelah berbagai laporan mengenai bencana kemanusiaan dipublikasikan, pada September 1978 sebelas duta besar negara asing dan beberapa wartawan mengunjungi Timor-Leste didampingi oleh Menteri Luar Negeri Mochtar Kusumaatmadja.\* Mereka mewakili pemerintah Kanada, AS, Australia, Jepang, Selandia Baru, India, Korea Selatan, Bangladesh, Mesir, Suriah, dan Irak. Mereka diberi tahu bahwa sekitar 125.000 orang telah turun dari gunung, 20.000 - 30.000 dari mereka berada dalam kondisi yang amat mengenaskan. Empat duta besar (dari Australia, Kanada, Jepang, dan AS) menyerukan untuk segera dilakukan operasi bantuan kemanusiaan internasional.<sup>456</sup> Walaupun dalam keadaan mendesak seperti itu, satu tahun berlalu sebelum ICRC dan LSM Amerika Catholic Relief Services (CRS) tiba di Timor-Leste untuk menyediakan bantuan darurat. Hal ini terjadi setelah ABRI merampungkan Operasi Seroja, seperti yang disebut di atas.

## Bantuan ICRC dan CRS

341. LSM Amerika Serikat Catholic Relief Services (CRS) menjalankan misi survei awalnya pada Mei 1979. Komisi menerima submisi dari CRS, termasuk berbagai dokumen dari masa itu, yang memberi banyak informasi mengenai skala krisis tersebut dan kurangnya sumberdaya untuk menanggulangnya. Pada Oktober 1979, CRS dan ICRC memulai operasi bantuan darurat. Salah satu yang terlibat adalah Gilman dos Santos, yang meninggalkan posisinya sebagai pegawai negeri pada 1979 dan bergabung dengan tim darurat CRS. Ia bersaksi di hadapan Komisi bahwa kantornya bekerja 18 - 20 jam sehari, tujuh hari per minggu. Ia mengatakan kepada Komisi bahwa sementara banyak orang dalam pemerintahan sipil Indonesia yang membantu kerja darurat CRS dan ICRC, pihak militer dan polisi Indonesia bersikap tidak mendukung dan menciptakan banyak halangan bagi pekerja bantuan.<sup>457</sup>

\* Sejumlah organisasi kemanusiaan melaporkan situasi ini; termasuk Australia Council for Overseas Aid (ACFOA), perwakilan World Vision Indonesia, dan Palang Merah Indonesia. Lihat kesaksian Pat Walsh kepada CAVR dalam audiensi publik nasional tentang Kelaparan dan Pemindahan Paksa, 28 - 29 Juli 2003.

342. Jelas bahwa Indonesia tidak menggunakan sumberdayanya secara memadai untuk mencegah atau menanggapi kelaparan. CRS pernah dua kali kekurangan pasokan dan terpaksa meminjam beras kepada Bulog (Badan Urusan Logistik), badan penyalur beras pemerintah Indonesia, yang menyimpan stok berlebih di Dili pada masa ketika sejumlah besar penduduk menderita kelaparan dan penyakit yang berkaitan dengan kelaparan di dalam kamp-kamp yang dikuasai militer.<sup>458</sup>

343. Komisi mendengarkan kesaksian dari Pat Walsh bahwa CRS dan ICRC bekerja keras dan efisien. Ia mengatakan kepada Komisi bahwa selama 18 bulan berikutnya, ICRC bersama Palang Merah Indonesia (PMI) membantu 80.000 pengungsi di 15 desa dan menyelamatkan banyak nyawa. Walsh mengatakan bahwa selama periode ini, CRS menghabiskan USD4 juta, mendistribusikan 17.000 ton pangan serta obat-obatan, pakaian, sabun, benih, peralatan pertanian, dan kerbau.<sup>459</sup> Mengingat skala krisis, dan dibandingkan dengan jumlah lembaga bantuan internasional dan tingkat bantuan yang diberikan dalam krisis di Timor-Leste pada akhir 1999, paket bantuan ini relatif kecil dan penyampaiannya yang tertunda terbukti sangat terlambat bagi banyak orang. Kontrol militer Indonesia atas pendistribusian bantuan adalah hambatan utama usaha pemberian bantuan. Sementara Komisi menerima banyak kesaksian mengenai pentingnya bantuan yang terbatas ini, baik CRS maupun ICRC tidak membahas persoalan dasar konflik internasional tersebut yang menjadi penyebab bencana kelaparan tersebut.

## Ataúro sebagai pulau penjara

344. Ataúro memiliki sejarah digunakan sebagai pulau penjara oleh rezim yang silih berganti di Timor-Leste. Pemerintahan Kolonial Portugis sudah lama menggunakannya, seperti halnya pasukan pendudukan Jepang selama Perang Dunia Kedua. Rezim pendudukan Indonesia memulai kebijakan serupa pada 1980. Komisi menerima kesaksian ahli bahwa ini merupakan kepanjangan dari kebijakan memisahkan penduduk sipil yang dianggap dapat menjadi basis dukungan di masa mendatang bagi Resistansi bersenjata. Gilman dos Santos memberikan kesaksian:

*Pada tahun 1980, ABRI dan pemerintah setempat kembali memindahkan secara paksa ke Pulau Ataúro orang-orang yang dicurigai memiliki keluarga yang menjadi pejuang kemerdekaan yang berada di hutan-hutan.*<sup>460</sup>

345. Para korban selamat juga bersaksi kepada Komisi bahwa kebijakan ini dijalankan bersama oleh militer dan pemerintahan sipil.<sup>461</sup>

346. Sebagian orang pertama yang dikirim ke Ataúro adalah mereka yang ikut dalam pemberontakan (*levantamentos*) selama masa ini. Para tersangka pendukung serangan 10 Juni 1980 atas stasiun TV di Dili dibawa ke Ataúro setelah ditahan dan disiksa di Dili.<sup>462</sup> Orang yang datang belakangan termasuk sejumlah keluarga pejuang Resistansi, yang banyak datang dari berbagai distrik setelah operasi 'pagar betis' 1981.<sup>463</sup> Komisi mendengarkan kesaksian warga Mau Chiga di pegunungan tengah, yang diasingkan di Ataúro pada Agustus 1982, setelah percobaan pemberontakan.<sup>464</sup>

347. Komisi mendengarkan kesaksian ahli dari Ceu Lopes Federer, seorang pekerja kemanusiaan Timor bersama ICRC di Ataúro antara 1980 - 1982. Ia menceritakan kepada Komisi bahwa kapal yang datang dengan tahanan di Ataúro pada umumnya adalah perempuan, anak-anak, dan orang tua. Ia mengatakan kepada Komisi bahwa banyak yang diperdaya sampai percaya bahwa mereka hanya akan dibawa dari rumahnya selama satu atau dua hari, dan bahwa mereka datang hampir dengan tangan hampa.<sup>465</sup>

348. Tingkat kematian sangat tinggi. Ceu Lopes Federer mengingat kembali terjadinya wabah epidemi kolera akibat kondisi kamp-kamp yang mengenaskan, dan tingkat kematian yang tinggi di antara anak-anak.<sup>466</sup> Walaupun pengamanan di Ataúro lebih longgar dibandingkan di daratan utama, pulau ini dikenal memiliki sumber makanan dan air yang terbatas, dan ribuan tahanan yang datang menghadapi berbagai kesulitan berat.

349. Laporan ICRC ketika itu membenarkan bahwa pemindahan penduduk ke Ataúro telah “menipiskan” sumber makanan di pulau tersebut, sehingga lembaga tersebut menerapkan program makanan darurat.<sup>467</sup> Kesaksian kepada Komisi dari para korban selamat menceritakan mengenai pentingnya nilai bantuan ini dalam menyelamatkan nyawa.<sup>468</sup> Perkiraan jumlah total populasi tahanan bervariasi, dan kemungkinan besar melampaui 4.000.<sup>469</sup> Ceu Lopes Federer mengatakan kepada Komisi bahwa ia membuat daftar sampai 1982, ketika ia meninggalkan pulau tersebut, yang mencantumkan 6.400 nama orang yang pernah ditahan di Ataúro.<sup>470</sup> Komisi juga diberi tahu bahwa militer Indonesia melakukan pelanggaran seksual terhadap banyak perempuan di pulau tersebut.<sup>471</sup>

350. Pada pertengahan 1980-an para tahanan dipindahkan keluar pulau tersebut, walaupun dalam banyak kasus tampaknya mereka dipindahkan ke berbagai kamp di daratan utama yang disebut desa binaan, tempat mereka menjalani proses indoktrinasi ideologi Pancasila Indonesia, dan bukannya dikembalikan ke daerah asal mereka.<sup>472</sup>

## Berbagai kamp penahanan ditutup

351. Pada 1982 - 1983 sebagian besar orang diizinkan untuk meninggalkan kamp penahanan. Beberapa orang kembali ke desa asal mereka, apabila memungkinkan. Yang lainnya mendirikan desa baru, yang sering diberikan nama desa aslinya, yang kini telah ditinggalkan. Yang lainnya bermukim di desa jenis baru, yang disebut desa pemukiman.<sup>473</sup>

352. Penduduk di ibukota Dili bertambah pesat pada awal dasawarsa 1980-an. Pada 1975, penduduknya kurang lebih 28.000 jiwa, Biro Statistik Indonesia menghitung jumlah penduduk di distrik Dili 67.039 jiwa pada 1980.<sup>474</sup> Pola baru urbanisasi ini memungkinkan aparat militer Indonesia untuk memantau penduduk lebih mudah. Jaringan informan, Kartu Tanda Penduduk, dan kebebasan gerak yang terbatas serta penahanan sewenang-wenang menjadi ciri dari masyarakat yang dikontrol ketat ini.<sup>475</sup>



353. Selama periode ini, antara 1978 dan awal dasawarsa 1980-an, Militer Indonesia menjalankan program pemukiman yang secara radikal dan permanen mengubah pola pemukiman di Timor-Leste. Masyarakat Timor secara tradisional tinggal di dusun-dusun kecil yang terdiri atas beberapa rumah tempat beberapa keluarga inti tinggal, yang dalam bahasa Tetum disebut *knua*. Pola pemukiman terdahulu yang tersebar di pegunungan diubah dengan paksa menjadi penduduk yang pada umumnya tinggal di pesisir yang terkonsentrasi di berbagai kota sepanjang jalan utama. Tujuan strategis untuk memisahkan penduduk sipil dari pejuang Resistansi di gunung-gunung, dan menahan mereka di wilayah tempat mereka dapat dengan mudah dipantau, merupakan pergeseran fundamental dalam gaya hidup orang Timor. Walaupun suasana penahanan ini melonggar pada pertengahan dasawarsa 1980-an dengan diizinkan penduduk untuk meninggalkan kamp mereka, pola perubahan pemukiman dasar ini masih terasa sampai sekarang.

## Operasi keamanan

### Tinjauan

354. Dengan Timor-Leste dinyatakan takluk pada Maret 1979, Militer Indonesia memfokuskan diri pada operasi-operasi pembersihan yang lebih kecil dan pengawasan ketat terhadap penduduk di seluruh wilayah. Sisa-sisa Resistansi bersenjata ada di sejumlah kantong yang terisolasi.

355. Pada Juni 1980, satu dari sejumlah kelompok yang mampu bertahan ini meluncurkan serangan ke ibukota Dili, yang mengejutkan ABRI, dan menunjukkan bahwa Resistansi masih aktif. Militer Indonesia menanggapi serangan ini dengan melakukan ratusan penahanan dan lebih daripada 100 pembunuhan. Banyak tahanan yang dipenjara pada masa ini dikirim ke Ataúro (lihat Bab 7.2.: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa).

356. Pada 1981, Militer Indonesia meluncurkan serangan besar-besaran yang bertujuan menghancurkan sisa-sisa kelompok Resistansi. Serangan ini menggunakan taktik yang dikenal dengan sebutan 'kikis', atau 'pagar betis'. Sejumlah besar penduduk sipil, yang masih menderita akibat konflik di pegunungan dan penganiayaan di berbagai kamp tahanan ABRI, dipaksa bertugas untuk berjalan kaki melintasi wilayah itu dalam barisan seperti "pagar", untuk menjebak anggota Resistansi bersenjata yang masih tersisa. Perempuan, anak-anak, dan lelaki, termasuk orang tua, dipaksa ikut operasi ini. Kelaparan, sakit, dan perlakuan buruk oleh militer merupakan pengalaman lazim yang dirasakan penduduk sipil. Banyak yang mati. Tugas-paksa ini juga mengalihkan sejumlah besar penduduk sipil dari ladang mereka selama musim tanam, sehingga meningkatkan kerentanan mereka terhadap kelaparan, terutama karena gangguan terhadap pertanian selama tahun-tahun operasi militer besar-besaran sebelumnya.

357. Secara militer, operasi ini gagal menghancurkan gerakan Resistansi bersenjata yang sering bisa lolos dari "pagar" itu. Lebih daripada 4.000 orang yang dianggap

sebagai “simpatisan Fretilin” ditahan dan dipenjarakan di Pulau Ataúro ataupun kamp pemukiman-kembali lainnya yang dikontrol ABRI.

## Situasi di Dili dan di seluruh Timor-Leste, 1979 - 1980

358. Dengan tertangkap atau terbunuhnya para pemimpin utama gerakan Resistansi, Resistansi bersenjata dihancurkan dan mayoritas penduduk sipil Timor-Leste di pegunungan ditangkap dan menyerahkan diri di bawah kontrol mereka, militer Indonesia pada awal 1980 merasa yakin bahwa operasi militer besar di Timor-Leste telah selesai. Komando Pasukan Gabungan Operasi Seroja dibubarkan, dan Komando Operasi Militer pun dipindahkan dari Dili ke Bali, yang berarti bahwa Timor-Leste kini berada dalam struktur komando regional standar ABRI. Pada saat yang sama, kendali pemerintahan sipil secara resmi dialihkan dari Departemen Pertahanan dan Keamanan (Dephankam) kepada Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Secara militer, ABRI meneruskan berbagai operasi pembersihan untuk mengamankan kekuasaannya, namun secara umum, periode setelah penutupan Operasi Seroja secara komparatif cukup sepi dalam hal operasi militer.

359. Militer Indonesia terus mempertahankan peran dominan di dalam dan selama pengembangan pemerintahan sipil. Kehidupan bagi sebagian besar warga sipil pada masa itu penuh ketegangan dan ketakutan.<sup>476</sup> Dalam sebuah submisi dari Asosiasi Eks-Tahanan Politik Timor-Leste (*Associação dos Ex-Prisioneiros e Detidos Politicos de Timor-Leste*, Assepol), Komisi mendengar bahwa sepanjang masa ini, dengan membengkaknya jumlah penduduk di Dili, para agen intelijen Indonesia terlihat di mana-mana. Assepol mengatakan kepada Komisi bahwa tidak ada proses peradilan di tahun-tahun akhir 1970-an dan awal 1980-an ini, dan militer memiliki kekuasaan yang tak terbatas untuk melakukan penangkapan dan penyiksaan sewenang-wenang.<sup>477</sup> Banyak kesaksian individu kepada Komisi mendukung hal ini, dan menceritakan bahwa mereka diambil dari rumah mereka pada malam hari, atau dikumpulkan oleh militer untuk diinterogasi dan disiksa.<sup>478</sup> Komisi telah membuat peta pusat penahanan dan interogasi di Dili dan Baucau selama tahun-tahun ini, banyak di antaranya tidak resmi, namun dioperasikan oleh militer Indonesia. Jumlah pusat penahanan dan interogasi ini jauh melebihi kebutuhan wajar sebuah negara demokratik yang dikelola berdasarkan aturan hukum (lihat Lampiran dari Laporan ini).

360. Di seluruh Timor-Leste, militer Indonesia mengembangkan struktur teritorialnya disertai dengan pemindahan penduduk dan berbagai perubahan demografis, sebagai akibat dari perpindahan besar pada periode itu. Di setiap desa di Timor-Leste, ABRI menempatkan seorang petugas Babinsa (bintara pembina desa), dan khususnya di sejumlah wilayah rawan, ada tim orang-orang seperti ini yang disebut Tim Pembina Desa (TPD). Pos-pos militer ini bekerja erat dengan Pertahanan Sipil (Hansip) yang beranggotakan orang-orang Timor, dan membantu militer Indonesia untuk mengontrol ketat segala lapisan masyarakat Timor-Leste. Dengan demikian di banyak wilayah negeri ini, orang-orang tinggal di beberapa desa pemukiman yang baru di bawah pengawasan ketat militer.

361. Situasi kelaparan akut yang terkait dengan sejumlah kampanye militer 1977 - 1978 dan berbagai kamp tahanan militer telah distabilkan oleh sejumlah upaya dari lembaga bantuan internasional, CRS dan ICRC. Namun, pada 1980, komunitas-komunitas belum mendapat peluang untuk pulih dari tahun-tahun traumatis akibat konflik ini. Peninggalan yang menyengsarakan itu mencakup kerentanan terhadap kelaparan dan sakit akibat penganiayaan selama konflik serta hilangnya tahun-tahun masa tanam dan panen yang normal.

## Pemberontakan pertama: Dili, Juni 1980

362. Pada 10 Juni 1980, Falintil melancarkan serangan ke Dili, ke pemancar televisi baru di Marabia.<sup>479</sup> Serangan ini benar-benar mengejutkan ABRI. Ini adalah pemberontakan (*levantamento*) besar pertama setelah kekalahan telak Fretilin pada akhir 1978. Nama *levantamento* (kebangkitan) digunakan oleh Gerakan Resistansi untuk memberi suatu rasa tujuan bersama bagi sesuatu yang sebenarnya merupakan serangan militer terbatas yang dilakukan oleh berbagai kelompok kecil Falintil yang masih bertahan, yang telah menyusun kekuatan kembali pada bulan-bulan sebelumnya. Serangan ke Dili membuktikan daya tahan Gerakan Resistansi serta perlawanan bersenjata terhadap pemerintahan militer Indonesia. Serangan tersebut dilancarkan sampai Lahane dan Becora di pinggiran Dili. Salah seorang anggota pasukan penyerang mengatakan kepada Komisi bahwa tujuan dari serangan itu adalah “untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Fretilin masih ada.”<sup>480</sup>

363. Sebuah komunike kedutaan Amerika Serikat menyebutkan bahwa serangan itu mungkin akan menimbulkan tanggapan yang sangat keras:

Serangan pemberontak ke daerah pinggiran ibu kota provinsi ini telah mendatangkan kesulitan dan rasa malu bagi para pejabat keamanan, dan bisa diperkirakan bahwa mereka akan mengambil langkah-langkah untuk mencegah terulangnya serangan itu.<sup>481</sup>

364. Pihak Militer Indonesia terkejut sekaligus dipermalukan dengan keberanian serangan dari pihak Resistansi yang dianggap sudah dikalahkan. Ratusan orang ditahan dalam pembersihan militer di ibukota. Komisi menerima informasi bahwa lebih daripada 100 orang terbunuh, dan bahwa penyiksaan dan perlakuan kejam lainnya terhadap para tahanan umum terjadi (lihat Bab 7.2.: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa). Banyak tahanan diasingkan ke Ataúro.<sup>482</sup>

## “Pagar Betis”: Operasi Kikis

365. Hampir setahun kemudian, pada pertengahan 1981, ABRI melancarkan operasi besar-besaran yang menggabungkan personil militer dengan puluhan ribu penduduk sipil yang membentuk “pagar betis” manusia. “Pagar” ini berjalan kaki melintasi daerah-daerah yang luas di wilayah itu untuk mencari dan menangkap pasukan Falintil yang tersisa, dengan tujuan utama menangkap ataupun membunuh Xanana Gusmão. Taktik ini disebut operasi kikis, berhasil digunakan untuk

memerangi berbagai pemberontakan di Indonesia, di mana penduduk setempat mendukung tujuan militer untuk menghancurkan pemberontakan. Taktik ini juga telah digunakan beberapa kali di Timor-Leste pada tahun-tahun sebelumnya.<sup>483</sup> Namun di Timor-Leste, tidak seperti di Indonesia, militer kekurangan elemen yang sangat penting, yakni dukungan rakyat. Meski bisa menangkap banyak orang Timor, baik sipil maupun pejuang, pagar itu tidak berhasil secara substansial menghancurkan Falintil.

366. Sebelum operasi tersebut dijalankan, ICRC menghentikan kegiatannya di daratan utama Timor-Leste, dan CRS meninggalkan Timor-Leste pada November 1980 setelah menyelesaikan program daruratnya. Militer Indonesia pada dasarnya bebas menjalankan Kikis terlepas dari pengawasan internasional.

### **Mobilisasi massal penduduk sipil**

367. Operasi 1981, yakni Kikis terbesar yang pernah dilakukan di Timor-Leste, diberi nama sandi Operasi Keamanan.<sup>484</sup> Militer Indonesia melibatkan sekurangnya lima belas batalion teritorial, atau sekitar 12.000 prajurit, dari luar Timor-Leste dan pasukan tambahan yang tak diketahui jumlahnya untuk tugas tempur.<sup>485</sup> Orang-orang Timor menyatakan bahwa lebih daripada 15 batalion pasukan terlibat.<sup>486</sup> Operasi besar tampaknya terjadi di Sektor D,<sup>\*</sup> yakni wilayah Baucau, Lautém, dan Viqueque.<sup>487</sup> Penduduk sipil direkrut paksa sebagai Tenaga Bantuan Operasi (TBO). Secara resmi ABRI merekrut penduduk sipil lelaki berusia 12 - 35 tahun, namun kenyataannya, anak laki-laki yang jauh lebih muda dan pria dewasa yang jauh lebih tua, serta para perempuan, juga dilibatkan.<sup>488</sup> Kelompok-kelompok orang ini ditempatkan di kesatuan militer tertentu untuk operasi ini. Jumlah total penduduk sipil yang dilibatkan sangat besar. Sebuah dokumen militer 1982 menyebutkan bahwa operasi ini menyertakan “60.000 penduduk sipil selain Wanra dan Ratih.”<sup>†</sup>  
<sup>489</sup> Sumber-sumber Marinir menunjukkan lebih banyak lagi yang dilibatkan, dengan menyebutkan adanya delapan batalion dan 120.000 milisi binaan yang bergerak dari timur ke barat, dan tujuh batalion dengan 25.000 milisi binaan yang bergerak dari barat ke timur, yang dimaksudkan untuk “menundukkan musuh di Aitana.”<sup>490</sup>

368. Pagar manusia ini mulai berjalan pada pertengahan 1981 dari Tutuala di titik paling timur Timor-Leste. Dari sini, kesatuan militer dan para TBO sipil berjalan ke barat menuju garis yang menghubungkan Com-Raca-Lospalos-Iliomar. Mereka membentuk pagar manusia yang membentuk barisan utara-selatan, dan menyapu medan untuk mencari Falintil. Tampak bahwa pagar ini berfungsi dalam dua hal, sebagai garis depan yang bergerak maju di depan pasukan ABRI dan menyapu untuk mencari Falintil, maupun sebagai tembok penjepit di mana kesatuan-

\* Meski fokus dari operasi ini adalah di timur, namun di barat, militer Indonesia merekrut TBO untuk ikut serta dalam sebuah kampanye kecil kikis di kawasan antara Cassa dan Ainaro. Tidak ada catatan tentang penangkapan anggota Fretilin di sektor itu.

† Wanra (Perlawanan Rakyat) dan Ratih (Rakyat Terlatih) adalah dua dari empat tipe utama tenaga bantuan militer yang digunakan oleh ABRI. Dua lainnya adalah Hansip (Pertahanan Sipil) dan Kamra (Keamanan Rakyat). Lihat Bab 4: Rezim pendudukan.

kesatuan ABRI berusaha menggiring Falintil. Apapun tujuannya, taktik ini gagal menangkap kelompok Falintil dalam jumlah yang memadai untuk mengakhiri gerakan resistansi, dan banyak orang yang terlibat dalam pagar manusia itu tidak bertemu dengan Falintil samasekali. Namun, Komisi menerima kesaksian tentang para tawanan yang dieksekusi. Seorang TBO mengatakan kepada Komisi bahwa lima orang yang ditangkap oleh kesatuan militer tempat dia ditugaskan, dekat Cacavem di Iliomar, langsung dieksekusi.<sup>491</sup>

369. Pada Juli 1981, satu pagar lainnya mulai berjalan dari koridor Venilale-Ossu-Viqueque dan bergerak ke arah timurlaut.<sup>492</sup> Kedua pagar ini bertemu di barisan pegunungan Matebian dengan maksud untuk mengepung Falintil dan menggiring mereka ke tempat yang lebih rendah. Sejauh itu, operasi ini belum berhasil melakukan penangkapan yang berarti. Setelah pengepungan Gunung Matebian, tahap akhir Operasi Kikis pun dimulai. Pasukan dan TBO kembali menyisir dari wilayah tengah ke pantai selatan, dan terus bergerak maju ke barat. Pagar ini bergerak mendekati daerah Lacluta, Viqueque; sementara dari timur, barisan lainnya bergerak maju untuk menemui mereka.

## Pembantaian Lacluta

370. Ketika gerak maju itu mencapai daerah Lacluta pada September terjadi pembantaian yang, menurut sebagian besar kesaksian, membunuh ratusan orang. Tidak ada hitungan yang pasti. Monsignor Costa Lopes menyatakan bahwa 500 orang terbunuh.<sup>493</sup> Pihak penguasa Indonesia mengakui ada 70 orang yang terbunuh.<sup>494</sup> Sumber-sumber lain menyebutkan jumlah korban berada di antara dua angka itu.<sup>495</sup> Komisi menerima bukti mengenai pembantaian massal terhadap orang-orang sipil, termasuk perempuan dan anak-anak pada saat ini.\* Komisi juga mendengar mengenai pembantaian yang kedua terhadap paling sedikit 20 orang.† Indonesia mengklaim sebuah kemenangan militer di daerah itu sepanjang masa ini, dengan menyebutkan bahwa 450 anggota Fretilin telah ditangkap dan 150 pucuk senjata disita, namun tidak menyebutkan tentang korban.<sup>496</sup> Kebanyakan sumber lainnya mengatakan bahwa ini merupakan pembantaian penduduk sipil secara brutal.<sup>497</sup> Pembantaian itu diyakini telah terjadi di dekat Batu Santo Antonio di lereng Gunung Aitana. Seorang pejuang Falintil mengingat kembali pembunuhan penduduk sipil di daerah itu oleh militer Indonesia:

*Saya menyaksikan dengan mata saya sendiri bagaimana militer Indonesia, Batalion 744, membunuh penduduk sipil di hadapan saya. Mereka menangkap orang-orang yang tak bersenjata itu, mengikat*

\* Wawancara dengan José de Jesus dos Santos, Dili, 28 Juni 2004. Dia mengatakan bahwa kontak terjadi di antara 1 dan 10 September.

† Wawancara dengan Anacleto Ximenes, Cairui, Manatuto, 12 Maret 2004 dan dengan Sebastião de Cunha, Manatuto, 12 Mei 2004. Lihat juga Bab 7.2: Pembunuhan di Luar Hukum dan Penghilangan Paksa.

*mereka kemudian menikam mereka sampai mati. Ada seorang perempuan hamil yang ditangkap dan dibunuh begitu saja, saya melihat kejadian itu dari jarak dekat, sekurangnya 100 meter dari tempat kejadian.<sup>498</sup>*

## Konsekuensi operasi

### Hasil militer

371. “Pagar” ini jauh lebih berhasil dalam menangkap orang-orang yang masih bersembunyi di hutan dibandingkan menangkap pejuang Falintil, walaupun ada berbagai kesaksian tentang kesatuan Falintil yang dihancurkan.<sup>499</sup> Untuk menjelaskan kegagalannya untuk menangkap banyak anggota Falintil, tampak dalam banyak kasus, pagar ini mungkin membiarkan Falintil untuk melintasi barisan itu. Komisi diberitahu tentang satu kejadian orang meloloskan diri dari “pagar” itu.

*Saat kami lewat, banyak orang tahu, namun mereka melihat kami bukan seperti melihat manusia, tapi seperti melihat binatang yang melintasi pos mereka. Saya masih bisa mengingat dengan jelas bagaimana saya melangkah di depan seorang musuh [orang Timor yang merupakan anggota pagar itu], namun mereka memandangi saya seolah saya ini seekor anjing, kemudian menyuruh saya pergi.<sup>500</sup>*

372. Mungkin juga telah ada kerja sama antara Falintil dan para TBO asal Timor:

*...saat kami sampai di [lokasi] pemancar Telkom [sekarang], ada banyak [anggota] Fretilin di sana. Tetapi karena telah ada kontak [dengan para TBO], Fretilin melewati saja pasukan [ABRI] Komandan Peleton Falo Chai.<sup>501</sup>*

373. Ada juga kemungkinan bagi Falintil untuk lolos dari barisan-barisan itu:

*Kami berpecah menjadi kelompok-kelompok kecil, 3 sampai 4 orang, kemudian pada malam hari kami mencari cara untuk melintas di belakang mereka.<sup>502</sup>*

### Berbagai konsekuensi kemanusiaan

374. Operasi militer ini mengakibatkan berbagai konsekuensi kemanusiaan yang sangat berat di saat penduduk Timor belum pulih dari bencana kelaparan dan penderitaan yang traumatis akibat Operasi Seroja dan kondisi kamp tahanan. Sebelum militer memulai operasi ini, mereka mengharuskan kehadiran bantuan internasional, yang memang sudah terbatas, untuk meninggalkan wilayah ini.<sup>503</sup> Ini saja merupakan berita buruk bagi sebuah masyarakat yang sangat rapuh

dan terisolasi. Pemaksaan terhadap penduduk sipil perdesaan dengan jumlah sedemikian besar untuk ikut dalam berbagai operasi militer pada paruh kedua 1981 telah memasukkan mereka ke dalam kondisi yang luarbiasa keras. Para TBO, banyak di antaranya anak-anak, dibawa ke daerah-daerah pertempuran, dan akibatnya, mereka sering menjadi korban.<sup>504</sup> Penduduk sipil lainnya yang dipaksa ikut serta lebih banyak direkrut sebagai Ratih<sup>505</sup> daripada Wanra, yang berarti bahwa mereka tidak dibayar, melainkan hanya menerima “penghargaan” tertentu atas keikutsertaan mereka. Mereka juga tidak diberi cukup makan. Banyak orang mati selama berjalan kaki melintasi wilayah yang berat.<sup>506</sup>

375. Operasi ini berlangsung selama musim tanam 1981, dan karena sejumlah besar petani subsisten dipaksa ikut serta, mereka tidak bisa menanam tanaman pangan mereka. Pada November 1981, Monsignor Lopes menulis surat ke Australia tentang akan datangnya bencana kelaparan, yang menimbulkan keprihatinan internasional.<sup>507</sup> Pada Maret 1982, mantan Perdana Menteri Australia Gough Whitlam mengunjungi Timor-Leste, dan bertemu dengan Monsignor Costa Lopes. Whitlam kemudian secara terbuka membantah klaim Monsignor Costa Lopes.<sup>508</sup> Sebuah kunjungan oleh Dewan Gereja Dunia beberapa bulan berikutnya menemukan hal yang berbeda:

Jelas bahwa sejumlah besar orang telah dimukimkan kembali, dan masih ada banyak anak yang kurang makan. Ke mana pun kami pergi, orang-orang menyebutkan makanan dan tempat tinggal sebagai masalah utama mereka... kesan kami ialah bahwa banyak orang ingin kembali ke rumah tradisional dan tanah mereka di bukit-bukit.<sup>509</sup>

376. Indonesia mengklaim telah menangkap 4.500 “simpatisan Fretilin” selama operasi ini, dan telah mengirim 3.000 orang di antaranya ke Ataúro, dan 1.500 orang lainnya direlokasikan ke daerah-daerah lain.<sup>510</sup> Namun, Komisi menerima banyak kesaksian yang menyatakan bahwa mereka yang tertangkap adalah penduduk sipil dan bahwa sangat sedikit pejuang yang ditangkap dalam Operasi Kikis, dan bahwa sebagian besar dari mereka yang diasingkan ke Ataúro adalah perempuan, anak-anak, dan mereka yang lanjut usia.<sup>511</sup>

## Membangun kembali resistansi

### Tinjauan

377. Resistansi yang dipimpin oleh Fretilin nyaris dihancurkan oleh operasi pengepungan dan pembasmian 1978 - 1979. Sebagian besar pimpinan senior Fretilin dan Falintil terbunuh, tertangkap, atau menyerahkan diri dalam periode ini. Sisanya yang masih hidup, dalam kelompok terpisah, berupaya sekuat tenaga untuk menghimpun kekuatan kembali. Tiga anggota Komite Sentral yang masih bertahan dan melarikan diri ke wilayah timur, salah satunya adalah Xanana Gusmão. Sebagai pemimpin, Xanana Gusmão melaksanakan Konferensi Reorganisasi Nasional pada

Maret 1981 yang memulai proses perluasan Gerakan Resistansi menjadi front persatuan nasional yang lebih luas, dan mengubah arah taktis resistansi bersenjata menjadi perang gerilya. Pertemuan rahasia dengan pemimpin Gereja Katolik di Timor-Leste, Monsignor Costa Lopes, merupakan langkah penting ke arah tujuan persatuan nasional di antara para pihak yang bertentangan pada 1975, yakni UDT dan Fretilin.

378. Pada tahun-tahun awal perang dan pendudukan, Gereja merupakan penghubung satu-satunya dan vital ke dunia luar. Dalam tahun-tahun ini, Gereja telah mengalami transformasi dari benteng sistem kolonial Portugis menjadi suara bagi rakyat biasa Timor.

### Sejumlah anggota Fretilin yang bertahan setelah serangan 1978 - 1979

379. Serangan militer Indonesia pada 1978 - 1979 menghancurkan strategi “perlawanan rakyat” Fretilin, di mana penduduk sipil dalam jumlah besar hidup dalam perlindungan ataupun kontrol Fretilin, menyediakan dukungan logistik bagi Falintil, dan dimobilisasikan secara politik untuk mendukung Resistansi. Keunggulan teknologi dan jumlah pasukan militer Indonesia sangat menguntungkan dalam sebuah perang yang berbasis posisi konvensional. Apalagi, dengan adanya puluhan ribu penduduk sipil di basis-basisnya, Fretilin terpaksa lebih sering menempuh strategi perlindungan daripada penyerangan terhadap ABRI. Periode perlawanan gabungan sipil-militer ini berakhir dengan jatuhnya *zonas libertadas* Fretilin pada 1978.

380. Penduduk yang selamat menyerahkan diri dan turun dari pegunungan, sengsara akibat operasi pengeboman dan pengepungan, dan umumnya berada dalam kondisi yang sangat buruk.<sup>512</sup> Mereka berjumlah sampai 300.000 orang.<sup>513</sup> Militer Indonesia menyaring orang-orang yang menyerahkan diri dan memisahkan mereka yang diyakini sebagai kader Falintil atau Fretilin. Banyak yang hilang atau dieksekusi (lihat Bab 7.2.: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa). Penduduk sipil yang tersisa berada di bawah kontrol militer di sejumlah kamp sementara dan kemudian di berbagai kamp tahanan jangka panjang, sebagaimana diperinci di atas (lihat Bab 7.3.: Pemindahan paksa dan kelaparan).

381. Fretilin telah kehilangan sebagian besar pemimpin tingkat menengah dan seniornya. Falintil berada dalam situasi berantakan karena telah kehilangan sebagian besar personil, pemimpin, dan persenjataannya. Personil yang bertahan berada dalam situasi terisolasi dan tanpa sarana untuk berhubungan satu sama lain. Fase pertama Resistansi pun usai. Resistansi terorganisasi mampu bertahan karena dua sebab. Pertama, bertahannya beberapa pemimpin utama Fretilin yang mampu membangun kembali Resistansi. Kedua, bertahannya penduduk yang, meski secara fisik tidak lagi terpisah dari pasukan pendudukan Indonesia, pada akhirnya mampu membangun sebuah bentuk baru resistansi klandestin yang mendukung apa yang telah menjadi suatu perang gerilya klasik yang dijalankan oleh Falintil.



## Kembali menyusun kekuatan

382. Menjelang jatuhnya Matebian, pada 22 November 1978, beberapa pemimpin politik dan komandan militer\* berhasil menerobos kepungan dan melarikan diri ke wilayah timur. Yang memimpin kelompok ini adalah Xanana Gusmão. Pada saat yang sama, sejumlah kesatuan Falintil yang lain dikirim ke barat untuk bergabung dengan Falintil di Sektor Timur-Tengah (*Centro Leste*). Sebagian besar dari kesatuan ini tak pernah bisa melewati barisan penjagaan Baucau-Viqueque yang dikontrol militer Indonesia, dan hanya satu kompi yang tiba di sektor Timur-Tengah.<sup>514</sup>

383. Kelompok kecil yang melarikan diri dari Matebian menyusun kekuatan kembali di barisan pegunungan Legumau sebelah timur Baguia, yang berada di luar jangkauan ABRI. Mereka mencoba strategi baru perlawanan bawah tanah, menanggalkan tampilan militer mereka, berpakaian seperti penduduk sipil, dan menyembunyikan senjata mereka.<sup>515</sup> Tujuan mereka adalah mencari dan menghubungi para anggota Komite Sentral, Falintil, serta penduduk sipil yang selamat, dan untuk menilai perkembangan situasi. Xanana Gusmão mengenang tindakannya setelah meloloskan diri dari Matebian:

*Kami langsung pergi [ke timur]. Begitu tiba di sana, kami mulai menyusun strategi, dan masing-masing dari kami mempelajari apa itu [perang] gerilya. Karena saya sebelumnya telah menjalin kontak dengan kelompok bawahan [dari] saat [kami dulu berada di] basis perlawanan [bases de apoio], maka saya langsung pergi ke Mehara pada tanggal 7 Desember.... Kami mencari [anggota resistansi]. Dari Dili, mereka [anggota klandestin] mengatakan kepada kami bahwa ada sejumlah kecil pasukan [Falintil], tapi mereka tidak bisa menghubungi pasukan itu, banyak dari mereka telah menyerahkan diri. Saya mengirim dua kelompok ke Centro [kawasan tengah] untuk mencari, [tapi] mereka mengatakan bahwa mereka tidak menemukan pasukan, tidak bertemu dengan penduduk sipil seorang pun di sana.<sup>516</sup>*

384. Ketiga anggota Komite Sentral Fretilin yang selamat di timur, yakni Xanana Gusmão, Txay, dan Mauhunu, mendiskusikan kebutuhan untuk menyusun kekuatan kembali dan mengembangkan strategi perlawanan baru pada awal 1979. Beberapa regu pencarian berangkat menuju kawasan tengah dan barat untuk berupaya menghubungi para anggota lain yang selamat, khususnya para pemimpin senior dari Komite Sentral Fretilin.<sup>517</sup> Ini tugas yang sulit dan berbahaya. Sebagian regu pencarian diserang, sebagian lainnya lenyap samasekali. Kelompok yang dipimpin oleh Xanana Gusmão diserang oleh ABRI di dekat Remexio pada Maret, tetapi sebagian kecil anggotanya bisa lolos dan kembali ke Mehara di timur. Pada bulan yang sama, tiga kompi Falintil dihabisi oleh tentara Indonesia di dekat Lore, distrik Lautém.<sup>518</sup> Gusmão menceritakan pencarian ini:

.....  
\* Kelompok kecil ini mencakup José Alexandre Gusmão, Mau Hodu, Taur Matan Ruak, dan Nino Konis Santana.

*Kami tidak tahu siapa [dari Komite Sentral Fretilin] yang masih hidup. Kami mencari di tempat-tempat lain, [tapi] kami tidak bisa memutuskan, kami tahu bahwa beberapa orang sudah mati... Anggota kelompok Klandestina mencari anggota-anggota Komite Sentral yang selamat di hutan-hutan dari Centro sampai Fronteira.... Pada tahun 1980 kami menyeberangi jalan Baucau-Viqueque untuk mencari, mengumpulkan informasi, mendatangi desa-desa, bertanya kepada orang-orang di sepanjang jalan menuju perbatasan [Fronteira]... dari Henrique Belmiro dan kawan-kawan, kami mengetahui bahwa sudah tidak ada lagi [anggota Komite Sentral].<sup>519</sup>*

385. Kendati demikian, upaya pencarian itu mencapai keberhasilan. Mereka menemukan beberapa kantong kecil Resistansi dan pasukan Falintil yang selamat. Ada beberapa kelompok kecil di Laline dan Uaimori, kelompok David Alex di Matebian, beberapa lagi di Manatuto, serta yang lainnya.<sup>520</sup> Dalam upaya pencarian lainnya pada Mei 1980, Xanana Gusmão menghubungi para anggota Resistansi di kawasan tengah, yakni Same dan Ainaro, dan menemukan para anggota yang selamat di dekat Dili.<sup>521</sup> Di kawasan barat mereka hanya menemukan satu kelompok.<sup>522</sup> Selain mencari lokasi anggota Resistansi yang selamat, para gerilyawan juga menghubungi penduduk sipil untuk membentuk kelompok-kelompok klandestin di dalam wilayah yang dikontrol militer Indonesia.

386. Komisi mendengarkan kesaksian dari Francisco Guterres (Lu Olo), yang pada akhir dasawarsa 1970-an merupakan seorang kader Fretilin di pegunungan. Dia menceritakan tentang kelegaan yang dia rasakan ketika Xanana Gusmão tiba di kampnya:

*Ketika kami mendengar bahwa kakak kami, Xanana Gusmão, telah datang, hati kami merasa tenang... ketika dia kembali, kami semua berlari ke arahnya dan memeluknya... kemudian kami mendengar bahwa Mauhunu masih hidup, dan di Lospalos seorang ajudante anggota Komite Sentral juga masih hidup. Hanya tiga orang ini yang masih hidup.*

*Bagaimana kami bisa melanjutkan perang ini? Kakak kami, Xanana, seperti sang arsitek atau pembangun. Dia berkata "Kita bisa membuat sebuah perahu, dan kita semua bisa mengangkat perahu ini, lalu mendayunginya maju. Walau ini akan sulit, kita bisa melakukannya." Kami semua sepakat dengan kakak kami... kami sangat percaya padanya...<sup>523</sup>*

## Konferensi Reorganisasi Nasional pada Maret 1981

387. Gerakan Resistansi yang bertahan kehilangan kepemimpinan, koordinasi, dan struktur.\* Karena gagal menemukan para anggota Komite Sentral lainnya yang selamat, dan dengan tertangkapnya Txay, Sera Key, dan Solan oleh ABRI, maka pada 1980 Xanana Gusmão memutuskan untuk mengambil alih kepemimpinan dan mengorganisasi pertemuan nasional Fretilin:

*Maka saya memutuskan [ini] pada bulan September...karena saya tahu bahwa semua anggota Komite Sentral telah mati...tidak ada yang lebih senior dari saya, kecuali Mau Hunu. Tapi saya mengenalnya, jadi saya memutuskan untuk mengambil alih agar kami bisa melakukan reorganisasi.<sup>524</sup>*

388. Xanana Gusmão bermaksud mengonsolidasi dan merestrukturisasi Resistansi sebagai sebuah perang gerilya, yang didasarkan atas berbagai pelajaran dari pengalaman maupun teori:

*Sejak 1979 kami berusaha mempelajari perang gerilya dan bagaimana menerapkannya di Timor. Kami belajar di dalam hutan, [kami] belajar tentang perang di Vietnam, perang di Kuba, macam apapun dari [perang] gerilya, kami pikir perang-perang itu tidak akan cocok karena kondisi-kondisinya berbeda. Itulah sebabnya mengapa pada 1979, kami menghabiskan waktu satu tahun untuk mempelajari bagaimana perang gerilya [seharusnya dilakukan]. Dari sini kami melakukan reorganisasi, apa yang bisa kami lakukan dengan [kelompok-kelompok] gerilya kecil, merencanakan aktivitas politik, aktivitas militer, dan bagaimana keduanya saling berhubungan.<sup>525</sup>*

389. Berdasarkan berbagai kontak sepanjang 1979 - 1980, Gerakan Resistansi menyelenggarakan “Konferensi Reorganisasi Nasional” pada Maret 1981 di Maubai, Lacluta.<sup>526</sup> Struktur serta kepemimpinan politik dan militer Gerakan Resistansi direorganisasi, dan Dewan Revolusioner Resistansi Nasional (CRRN, Conselho Revolucionária da Resistência Nacional) pun dibentuk untuk mengendalikan keseluruhan Gerakan Resistansi ini.<sup>527</sup> CRRN dimaksudkan untuk menjadi sebuah forum payung bagi semua elemen prokemerdekaan, bukan hanya Fretilin, dan merupakan langkah signifikan untuk menjauh dari kebijakan garis keras 1977 ketika Fretilin dinyatakan sebagai partai Marxis-Leninis (*Partido Marxista-Leninista Fretilin*, PMLF), serta menuju persatuan nasional.<sup>528</sup>

390. Xanana Gusmão dipilih untuk menempati semua posisi pemimpin—Komisaris Politik Nasional PMLF, Panglima Besar Falintil, dan Presiden CRRN.<sup>529</sup> Sebuah

\* Sebagai contoh, serangan Falintil ke pemancar televisi Marabia pada Juni 1980, yang diuraikan di butir 362 di atas (paragraf 362), dilakukan oleh sebuah kelompok dari kawasan Utara-Tengah secara lepas dari kelompok yang selamat yang berbasis di timur.

Komite Sentral baru pun dibentuk,\* yang terdiri atas para pemimpin baik yang ada di Timor-Leste maupun yang di luar negeri.<sup>530</sup> Struktur Falintil dirumuskan kembali, dan para pemimpin baru diangkat.<sup>531</sup> Sebuah strategi perang gerilya pun diputuskan secara resmi, di mana beberapa ratus pasukan Falintil yang selamat akan menyebar ke seluruh pelosok negeri ini.<sup>532</sup> Karena telah dikalahkan sebagai sebuah kekuatan militer konvensional, Falintil akan bergerak dalam berbagai kelompok gerilyawan kecil yang berpindah-pindah dan tidak lagi berupaya untuk memusatkan kekuatannya dalam menghadapi militer Indonesia. Para gerilyawan akan didukung oleh sebuah struktur klandestin di daerah perkotaan. Idenya ialah bahwa sebuah struktur klandestin di bawah CRRN akan beroperasi melalui pusat-pusat Resistansi nasional di tingkat distrik (*cernak*) dan sel-sel kecil di tingkat desa yang terdiri atas empat sampai tujuh orang (*nurep*). Untuk mengatur Gerakan Resistansi baru tersebut negeri ini dibagi menjadi tiga kawasan—kawasan timur, Funu Sei Nafatin (“perjuangan masih berlanjut”); kawasan tengah, Nakroma (“cahaya”); dan kawasan perbatasan, Haksolok (“kesenangan”).<sup>533</sup>

## Pertumbuhan Resistansi

391. Setelah reorganisasi politik dan militer, kapasitas Gerakan Resistansi perlahan-lahan tumbuh. Struktur klandestin dimaksudkan untuk mendukung para gerilyawan dan membangun jaringan dengan berbagai kelompok lain, termasuk dengan mereka yang punya hubungan erat dengan pihak Indonesia. Sebuah jaringan klandestin yang berbasis sel mulai dikembangkan, termasuk di dalam Dili. Dalam upaya untuk mengontrol jaringan klandestin ini, militer Indonesia mengembangkan berbagai jaringan intelijennya sendiri yang luas sampai ke tingkat desa. Di semua desa ada kehadiran militer. Sebagian desa memiliki babinsa (bintara pembina desa), sedangkan sejumlah desa lainnya memiliki TPD, “tim pembina desa”, bergantung pada seberapa bergolaknya sebuah desa atau daerah.<sup>534</sup> Dokumen militer Indonesia dari 1983 menunjukkan adanya pengawasan luas terhadap penduduk dengan tujuan untuk “melindungi” masyarakat dari pengaruh propaganda “GPK” (gerilyawan):

Menunjuk orang-orang terpercaya seperti *katuas* (para tetua) untuk membantu para ketua RT... Setiap *katuas* harus bisa mengetahui secara pasti aktivitas keluarga-keluarga yang berada di bawah binaannya; misalnya, saat mereka pergi ke ladang, pergi untuk mengumpulkan kayu, meminta izin untuk pergi ke desa lain, mengembalikan ternak, pergi ke pasar, dan seterusnya.

Menunjuk seorang “informan” di masing-masing kelompok yang terdiri atas 10 - 15 keluarga ini, yang dipimpin oleh seorang *katuas*. Informan ini harus bisa mengikuti, secara diam-diam, semua aktivitas kesepuluh sampai lima belas keluarga ini.<sup>535</sup>

\* Anggota-anggota Komite Sentral yang diangkat di Timor-Leste adalah Xanana Gusmão (Comissario Política Nacional), Mauhunu, Mau - Hodu, Bere Malae Laka, Kilik Wae Gae (Reinaldo Correia), Nelo (Dinis Carvalho), Sakinere, Holy Natxa, Lere Anan Timor (Tito da Costa), Harin, dan Mauk Moruk (Paulino Gama). Anggota-anggota yang diangkat di luar negeri adalah Abílio Araújo (Sekretaris Umum), Mâri Alkatiri, Roque Rodrigues, José Luís Guterres, Guilhermina Araújo, José Ramos-Horta, dan Rogério Lobato.

392. Komisi mendengarkan kesaksian tentang berbagai konsekuensi bila dicurigai sebagai seorang anggota aktif Gerakan Klandestin Resistansi, yakni terus-menerus terancam penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penghilangan. Di Distrik Ainaro, sejumlah tebing karang di Builico dikenal oleh militer Indonesia sebagai Jakarta II. Bila penduduk Ainaro hilang setelah ditahan, pihak militer pun menjelaskan kepada para keluarga dan komunitasnya bahwa mereka telah dibawa ke Jakarta, padahal kenyataannya mereka telah dibawa ke tebing curam di Builico, dan dilemparkan dari tebing karang ini. Tidak diketahui berapa jumlah orang yang telah dilemparkan sampai mati antara 1981 - 1983.<sup>536</sup>

393. Kehadiran militer sampai ke tingkat desa ini, yang disertai dengan pengawasan yang ketat, sering mengakibatkan berbagai ketegangan yang mendorong terjadinya kekerasan. Pembelotan beberapa ratus anggota kesatuan pembantu ABRI asal Timor ke Falintil di Viqueque pada 1983 merupakan contoh yang mencolok.<sup>537</sup> Pembelotan ini merupakan bagian dari pola pemberontakan lebih besar oleh Gerakan Resistansi yang terjadi pada 1982 sampai 1983. Efektivitas mataramantai antara jaringan klandestin dan gerilyawan ditunjukkan oleh berbagai dokumen militer dari 1982 yang menunjukkan fokus militer untuk menghabisi bermacam struktur klandestin.<sup>538</sup> Tanda paling jelas tentang regenerasi Fretilin dan kegagalan ABRI untuk menghancurkan Falintil adalah adanya gencatan senjata yang disepakati dengan ABRI pada Mei 1983 (lihat bagian 3.16: Gencatan senjata 1983 dan masa sesudahnya, paragraf 411 – 413, di bawah).

## **Resistansi di bawah pimpinan Xanana Gusmão: Menuju persatuan nasional**

394. Sejak invasi 1975, Fretilin telah mendefinisikan diri sebagai pengejawantahan Resistansi. Ini mulai berubah beberapa tahun sesudah reorganisasi 1981. Pada September 1982, Xanana Gusmão dan Monsignor Martinho da Costa Lopes bertemu secara rahasia di Desa Mehara, Distrik Lautém.<sup>539</sup> Pada pertemuan ini, Monsignor Costa Lopes menyoroti perlunya persatuan nasional antara Fretilin dan UDT. Pertemuan ini, dan seruan untuk persatuan politik, penting terutama karena selama konflik internal 1975, UDT telah mengklaim bahwa mereka membela prinsip Gereja Katolik dalam menghadapi ancaman komunis.<sup>540</sup> Kenyataan bahwa pemimpin Gereja Katolik di Timor-Leste bertemu dengan pemimpin Fretilin sekaligus pemimpin Gerakan Resistansi adalah sinyal jelas bahwa Gereja tidak memandang Fretilin sebagai komunis, dan seruan Monsignor Costa Lopes untuk persatuan nasional menunjukkan pemahamannya tentang Gerakan Resistansi lebih sebagai perjuangan nasionalis ketimbang perjuangan kiri ideologis.

395. Pada 1983, Komite Sentral Fretilin mendeklarasikan persatuan nasional sebagai garis politik resminya.<sup>541</sup> Ini jelas mengacu kepada permusuhan antara UDT-Fretilin. Untuk bisa meningkatkan kemungkinan kerjasama multipartai, Fretilin mengubah beberapa kebijakannya terdahulu yang radikal. Sebagai contoh, pada 1983 Fretilin berpartisipasi dalam sebuah gencatan senjata dan beberapa negosiasi dengan militer Indonesia. Hal ini sebelumnya tidak dibenarkan berdasarkan kebijakannya yang

tegas: “negosiasi—tidak dan tak akan pernah.”<sup>542</sup> Pada 1984, Fretilin menanggalkan ideologi Marxis-Leninis yang telah dideklarasikan pada 1977 dan disertakan ke dalam nama partai itu pada 1981. Dengan tindakan ini, Fretilin mencabut basis sosial-revolusioner dari sikapnya terdahulu demi mendukung platform nasionalis yang lebih terbuka.

396. Proses perubahan yang ditempuh oleh Fretilin ini bukan tanpa tentangan. Orang-orang garis keras partai seperti Kilik Wae Gae (Kepala Staf Falintil) dan Mauk Moruk (Komandan Brigade Merah) memandang perubahan politik ke arah sikap yang lebih moderat ini sebagai kompromi yang tak bisa diterima.<sup>543</sup> Sebuah percobaan kudeta oleh faksi ini gagal, dan akhirnya oposisi terhadap berbagai kebijakan baru ini pun pudar.<sup>544</sup> Arah baru di bawah payung CRRN ini memperluas platform politik Resistansi dan akhirnya menciptakan oposisi dengan basis yang lebih luas terhadap pendudukan Indonesia.

## Gereja Katolik

397. Gereja Katolik, di bawah kepemimpinan berani Monsignor Martinho da Costa Lopes, telah memainkan peran sangat penting di dalam negeri Timor-Leste selama tahun-tahun awal pendudukan. Dari yang sebelumnya merupakan pembantu pemerintahan kolonial Portugis yang ultrakonservatif, komposisi Gereja kemudian berubah selama era Indonesia. Dengan perginya banyak pastor dan suster Portugis setelah invasi dan pendudukan Indonesia, komposisi Gereja menjadi lebih “ter-Timorisasi-kan”. Selain para pastor asal Timor, ada juga para pastor asal Indonesia maupun internasional. Ketiga kelompok ini memainkan peran yang berbeda. Banyak pastor asal Indonesia cenderung mendukung pemerintah Indonesia, sedangkan pastor internasional, yang harus memperoleh persetujuan visa dari pemerintah Indonesia, mengambil sikap tidak terlibat politik secara lebih terbuka.<sup>545</sup> Yang paling signifikan, banyak pastor asal Timor termobilisasi sebagai akibat dari penderitaan sangat besar yang mereka saksikan pada tahun-tahun awal ini.\*

398. Anggota-anggota Gereja di Timor-Leste sering kali bertentangan dengan Vatikan, yang tidak mendorong para pastornya untuk terlibat dalam persoalan-persoalan seperti hak-hak asasi manusia ataupun politik Resistansi. Sekalipun demikian, karena kebijakan resmi Vatikan tidak mengakui kedaulatan Indonesia atas Timor-Leste, Gereja Katolik di wilayah ini tetap langsung di bawah pengawasan Vatikan, bukan termasuk bagian dari gereja Indonesia. Jaringan Katolik internasional menyediakan satu-satunya penghubung antara Timor dan dunia luar pada tahun-tahun ketika wilayah ini benar-benar tertutup. Para suster dan pastor menulis surat ke luar negeri di masa ketika hampir tidak ada media internasional yang mengamati berbagai kejadian di dalam wilayah ini, dan ketika, lepas dari adanya kehadiran ICRC yang hanya kadang-kadang, tidak ada organisasi internasional lain yang

\* Beberapa jajaran kepastoran asal Timor mendukung—dan digunakan oleh—rezim Indonesia, ditugaskan untuk posisi-posisi kewenangan di pemerintahan provinsi. Lihat Smythe, *The Heaviest Blow*, hal. 37.

diperbolehkan masuk ke wilayah ini. José Ramos-Horta mengatakan kepada Komisi bahwa selama 1975 – 1979, sumber-sumber Gereja memainkan peran satu-satunya dan yang sangat penting dalam menyampaikan informasi tentang kondisi di Timor-Leste kepada dunia luar.<sup>546</sup>

399. Pada 1983, Gereja membuat keputusan yang terbukti vital bagi keberlangsungan budaya masyarakat Timor. Gereja di Timor-Leste memutuskan bahwa bahasa resmi peribadatan adalah bahasa Tetum. Akibatnya, Keuskupan Dili memohon izin Vatikan untuk menggunakan Tetum sebagai bahasa Misa. Vatikan setuju, dan ini dilaksanakan selama masa jabatan Uskup Belo.<sup>547</sup> Hal ini meningkatkan identitas Timor di Gereja Katolik, dan menambah rasa perlindungan yang ditawarkan bagi masyarakat biasa di masa-masa yang sangat sulit.

400. Rasa perlindungan yang ditawarkan oleh Gereja adalah faktor utama penduduk dalam jumlah besar beralih memeluk agama Katolik selama masa pendudukan. Pada 1973, sekitar 28% dari jumlah penduduk menyatakan diri Katolik.<sup>548</sup> Menjelang 1980, Biro Statistik Indonesia mencatat sebanyak 80% dari jumlah penduduk wilayah ini memeluk agama Katolik.<sup>549</sup> Ideologi negara Indonesia yang mengharuskan warga negaranya memeluk satu dari lima agama resmi kemungkinan memengaruhi penyebaran ajaran Katolik ini.

401. Sikap blak-blakan Monsignor Costa Lopes membawa pada pengunduran dirinya secara paksa pada 1983. Setahun kemudian, dia berpidato di depan Komite Keuskupan Amerika Serikat untuk Pembangunan Sosial dan Perdamaian Dunia, mengundang perhatian tentang peran Gereja yang sangat penting sebagai pelindung masyarakat Timor-Leste:

Di tengah genosida kultural dan psikologis yang ditimpakan oleh tentara Indonesia kepada kami, Gereja Katolik telah muncul sebagai satu-satunya organisasi yang dipercaya oleh masyarakat Timor-Leste... Apapun yang masyarakat ketahui, mereka beritahukan kepada para pastor. Gereja Timor-Leste telah mendengarkan dengan seksama selama hampir sembilan tahun sejak invasi Indonesia. Dengan kewenangan tertinggi, Gereja Timor-Leste bisa mengatakan bahwa ia mengetahui kesengsaraan maupun aspirasi terdalam rakyat Timor.<sup>550</sup>

## Gencatan senjata 1983 dan masa sesudahnya

### Tinjauan

402. Pada 1982, Indonesia melaksanakan pemilihan umum (pemilu) nasionalnya di Timor-Leste untuk pertama kalinya. Dengan selesainya Operasi Keamanan, sekali lagi militer Indonesia menilai bahwa wilayah ini sudah tenang. Di Timor-Leste, mayoritas besar, yakni 99% pemilih, dilaporkan telah memilih Golkar, alat politik Presiden Soeharto. Pemilu ini disusul dengan perubahan drastis dalam personil sipil dan militer di jajaran pemerintahan Indonesia.

Mantan anggota senior UDT, Mario Carrascalão, diangkat sebagai gubernur, dan Kolonel Purwanto mengambil alih sebagai pimpinan militer di wilayah ini. Menghadapi gerakan klandestin yang sedang bangkit mendukung Falintil yang baru berhimpun kembali, Militer Indonesia mencari jalur berbeda untuk mengatasi Resistansi: negosiasi. Panglima Falintil, Xanana Gusmão, mengadakan pembicaraan dengan Kolonel Purwanto, dan untuk sementara waktu yang singkat, sebuah gencatan senjata sementara pun berlaku.

403. Namun, begitu dilantik sebagai Presiden, Soeharto segera mengangkat Jenderal Benny Moerdani sebagai Panglima ABRI. Jenderal Moerdani adalah salah seorang arsitek pengambilalihan Timor-Leste oleh militer Indonesia, dan dia tidak punya banyak waktu untuk sebuah solusi damai bagi masalah-masalah di Timor-Leste. Dalam waktu cepat setelah pengangkatan Moerdani, Monsignor Costa Lopes ditekan untuk turun dari posisinya sebagai kepala Gereja Katolik, dan dia pun meninggalkan wilayah ini. Gencatan senjata itu pecah di kota kecil sebelah timur Kraras pada Agustus 1983 setelah para anggota sebuah kesatuan Hansip asal Timor, bersama beberapa pejuang Falintil, membunuh 12 tentara Indonesia. Militer Indonesia menanggapi kejadian ini dengan serangkaian pembantaian atas penduduk sipil setempat dan penumpasan di kawasan timur dengan berbagai operasi baru.

## Pemilu Indonesia di Timor-Leste: 1982

404. Dengan selesainya Operasi Keamanan, militer Indonesia tampaknya sekali lagi berkesimpulan bahwa mereka telah berhasil mengamankan wilayah ini.<sup>551</sup> Ketika pemilihan umum nasional Indonesia diselenggarakan pada 1982, ini juga diselenggarakan untuk pertama kalinya di Timor-Leste. Militer bertanggung jawab untuk menjaga keamanan bagi pelaksanaan pemilu di seluruh kepulauan Indonesia. Ini membutuhkan jumlah pasukan yang besar, dan ditambah dengan rasa percaya diri militer Indonesia yang meningkat, barangkali telah turut menyebabkan pengurangan secara tajam jumlah pasukan di Timor-Leste pada masa ini. Pers Indonesia melaporkan bahwa pemilu berlangsung di Timor-Leste tanpa insiden apapun;<sup>552</sup> namun para informan asal Timor menyebutkan bahwa telah terjadi gelombang penangkapan sebelum pemungutan suara.<sup>553</sup>

*Di Viqueque militer terus-menerus berpatroli selama menjelang pemilu dan saat berlangsungnya pemilu. Setiap malam [militer] keluar-masuk rumah-rumah untuk memeriksa apakah ada orang yang datang atau pergi. Juga pada 4 Mei, sehari sebelum pemilu, ada serangan-serangan Fretilin di beberapa desa. Semua tempat pemungutan suara di sekitar Viqueque pun dipindahkan ke kota Viqueque.<sup>554</sup>*

405. Hasil pemilu di Timor-Leste menunjukkan lebih daripada 99 persen suara memilih Golkar, partai Presiden Soeharto yang berkuasa. Hal ini, ditambah dengan penghitungan suara yang sangat cepat, menunjukkan dengan kuat adanya hasil yang dimanipulasi. Kemungkinan motif bagi manipulasi suara ditunjukkan setahun berikutnya ketika Gubernur Mario Carrascalão menyatakan bahwa:



Orang-orang telah diberitahu bahwa dengan memilih Golkar, mereka akan menunjukkan pandangan mereka tentang integrasi dengan Indonesia.<sup>555</sup>

406. Dalam peristiwa itu, Indonesia menggunakan suara sebagai bukti tentang adanya dukungan bagi Indonesia. Xanana Gusmão tidak menahan-nahan sarkasmenya dalam pesannya kepada PBB pada 1982:

...partainya Soeharto memenangi pemilu lagi. Di Timor-Leste, di bawah todongan senjata, semua penduduk memberikan suara yang mendukung Golkar. Sebuah paradoks yang mengherankan, Timor-Leste dan Irian Jaya merupakan “provinsi kesayangan” Soeharto dan pendukung kuat Golkar!<sup>556</sup>

## Perubahan personel sipil dan militer Indonesia, dan berbagai aksi Resistansi

407. Setelah pemilu, terjadi perubahan drastis di jajaran personil utama sipil dan militer Indonesia di Timor-Leste. Pada September 1982, Mario Viegas Carrascalão, seorang mantan anggota senior UDT yang bekerja di Kementerian Luar Negeri Indonesia di New York sejak 1977 sampai 1981, dilantik sebagai Gubernur. Pada waktu yang hampir bersamaan, Komandan Korem 164, Kolonel Adolf Sahala Radjagukguk, digantikan oleh Kolonel Purwanto.\*

408. Selama masa ini, Gerakan Resistansi melakukan dua langkah utama. Pertama, pada Agustus 1982, pasukan Falintil meluncurkan serangan besar ke pos militer Indonesia di Mau Chiga, Ainaro, yang sering disebut sebagai *levantamento* (pemberontakan) 1982. Komisi mendengar kesaksian tentang berbagai konsekuensi dari serangan ini terhadap penduduk sipil Mau Chiga. Banyak yang dikumpulkan dan diasingkan ke Ataúro,<sup>557</sup> sementara banyak perempuan dijadikan sasaran pelanggaran seksual yang berulang-kali dan terus-menerus (lihat Bab 7.7: Pemerkosaan, perbudakan seksual, dan bentuk-bentuk lain pelanggaran seksual). Kedua, pada September 1982, ada pertemuan rahasia antara Xanana Gusmão dan Monsignor Costa Lopes, sebagaimana diuraikan di atas butir 394. Ini merupakan tanda bagi militer Indonesia bahwa dukungan terhadap Fretilin sungguh sangat luas, dan yang mengancam pemberitaan tentang Fretilin sebagai kekuatan gerilya komunis yang terisolasi.

## Pendekatan baru militer Indonesia: Negosiasi

409. Pada 1983, ABRI mengupayakan taktik baru berupa negosiasi dengan Gerakan Resistansi. ABRI pernah mengatasi berbagai pemberontakan yang ingin memisahkan

\* Komisi tidak bisa memberikan keterangan tentang tanggal pasti pengangkatan Purwanto. Radjagukguk masih menjabat sebagai komandan pada 8 Juli 1982, dan Purwanto sudah menjadi komandan Korem 164 pada akhir 1982.

diri selama dasawarsa 1950-an dengan cara ini, dan pemain kunci dalam negosiasi-negosiasi di masa itu adalah Panglima ABRI, Jenderal M. Yusuf, yang turut dalam negosiasi di Sulawesi untuk menyelesaikan pemberontakan Permesta pada akhir dasawarsa 1950-an.<sup>558</sup> Agaknya Yusuf menyetujui inisiatif ini, yang mungkin datang dari Komandan Militer Timor-Timur yang baru, Kolonel Purwanto, yang memiliki kewenangan untuk memulai berbagai kontak di tingkat lokal yang akhirnya membawa pada terjadinya sebuah gencatan senjata resmi. Pada akhir 1982 dan awal 1983, militer Indonesia mulai membuat sejumlah kesepakatan di tingkat lokal. Berbagai kontak awal untuk gencatan senjata lokal di Lautém dilakukan di Pupuru dan Pasikenu, di luar Lospalos, dan pada Februari 1983 kontak-kontak terjadi setiap minggu.<sup>559</sup> Di antara pemimpin Fretilin yang terlibat dalam beberapa kontak awal ini serta perjalanan keliling Jakarta, yang dimaksudkan untuk meyakinkan mereka tentang kebaikan Indonesia, adalah Falo Chai<sup>560</sup> (Fernando Teles) dan Jose da Conceição, yang merupakan mediator kunci dalam proses ini.<sup>561</sup> Militer Indonesia mengupayakan kontak-kontak serupa dengan Fretilin/Falintil di daerah koridor Venilale-Ossu, di mana David Alex (Daitula) merupakan komandan utama Falintil yang terlibat.<sup>562</sup> Seorang mantan Hansip mengenang:

*Saya dan ipar laki-laki saya pergi ke Venilale, bertemu dengan Mayor Iswanto, [dan] melakukan kontak damai. Dia ingin bertemu dengan orang-orang dari hutan, ingin mengetahui politik mereka. Apakah mereka menginginkan kemerdekaan atau integrasi? Saya ditugaskan untuk mencari orang-orang di dalam hutan, melakukan kontak damai. Saya berhasil. Pertama-tama saya bertemu mereka di Ossulari. Di sana [saya] bertemu dengan komandan peleton, Makikit. Saya bertanya kepadanya: "Apakah Anda menginginkan kemerdekaan ataukah integrasi?" Saya menanyakan itu kepadanya. Dia menjawab: "[Rakyat] Timor-Leste lebih [menginginkan] kemerdekaan daripada integrasi."<sup>563</sup>*

410. Berbagai pertemuan lokal antara para pejabat Indonesia dan Falintil membuka jalan bagi beberapa kontak di tingkat yang lebih tinggi. Pada 20 Maret, dua orang mayor Indonesia dan beberapa pejabat militer berpangkat lebih rendah bertemu dengan Xanana Gusmão di Liaruca, Desa Buburaka, di Subdistrik Ossu. Pada pertemuan ini, Fretilin mengajukan empat tuntutan: (1) penarikan tanpa syarat pasukan Indonesia dari Timor-Leste; (2) sebuah misi penjaga perdamaian PBB; (3) sebuah referendum yang bebas dan adil; dan (4) kehadiran Fretilin/Falintil yang berkelanjutan untuk menjaga keamanan selama proses ini.<sup>564</sup> Kolonel Purwanto kemudian terbang ke Bali untuk mengadakan diskusi di tingkat Kodam. Tiga hari kemudian, pada 23 Maret, Kolonel Purwanto sendiri bertemu dengan Xanana Gusmão di dekat Larigutu, di subdistrik Venilale (Baucau).<sup>\*</sup> Gubernur Mario Carrascalão juga hadir. Pertemuan ini rupanya menghasilkan penandatanganan kesepakatan gencatan senjata antara militer Indonesia dan Fretilin/Falintil.<sup>565</sup> Yang lainnya mengikuti, dan gencatan senjata pun menyebar ke seluruh wilayah ini.

\* Pertemuan ini juga dihadiri oleh Aleixo Ximenes, Verissimo Quintão, Jose da Conceição, dan Okan.

## Gencatan Senjata

411. Militer Indonesia menolak mengakui bahwa mereka melakukan “negosiasi,” dan hanya menyebutnya sebagai “pembicaraan”. Indonesia tidak menginginkan publisitas internasional mengenai persoalan ini. Namun status konflik selama periode ini pada kenyataannya adalah sebuah gencatan senjata.<sup>566</sup> Pada akhir Juli 1983, gencatan senjata masih berlaku.<sup>567</sup> Penghentian permusuhan memungkinkan para pemimpin Resistansi bebas mengunjungi desa, kota kecil, dan bahkan berbagai pusat perkotaan. Ada beberapa pertemuan lokal antara ABRI dan Fretilin/Falintil, termasuk di Lore, Beaco, Waitame, Macadiqui, Ossu, Laissorolai, dan Hato Bulico. Pada pertemuan-pertemuan ini, dimainkan pertandingan-pertandingan yang bersifat rekreasi, seperti bola voli, bahkan pasokan-pasokan disediakan bagi Fretilin/Falintil.<sup>568</sup>

412. Bagi penduduk umum, penghentian-sementara ini signifikan. Menurut Monsignor Costa Lopes:

...pada bulan Juni, sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata, helikopter-helikopter Indonesia mengangkut makanan dan obat-obatan untuk para gerilyawan di pegunungan, dan membawa anggota gerilyawan yang sakit dan terluka ke rumah sakit Dili.... Masyarakat sangat senang dengan penghentian-sementara perang ini dan untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun, bisa menanam tanaman pangan yang layak.<sup>569</sup>

413. Fretilin dan Falintil menggunakan gencatan senjata ini untuk keuntungannya, baik untuk konsolidasi internal maupun membangun jaringan dengan orang-orang Timor yang bekerja pada Indonesia.<sup>570</sup> Falintil memasuki gencatan senjata ini dengan perspektif ketidakpercayaan. Pengalamannya adalah “amnesti” tipu-daya pada akhir dasawarsa 1970-an, di mana setelah itu banyak pemimpin Fretilin yang menyerahkan diri hilang. Dokumen CRRN yang dikeluarkan pada Juli 1983 menegaskan perspektif ini. Dokumen itu memerinci sejumlah pembunuhan dan kekejaman, dengan menyebutkan nama dan memberikan contoh-contoh kasus pembunuhan, serta keterangan tentang kenaikan pangkat kemiliteran bagi mereka yang bertanggung jawab atas kekejaman tersebut.<sup>571</sup>

## Pengangkatan Benny Moerdani sebagai Panglima ABRI: 1983

414. Selama Maret 1983, MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) Indonesia mengangkat Soeharto sebagai Presiden dalam masa jabatan yang keempat kalinya. Ini berakibat pada perubahan besar di dalam ABRI yang memengaruhi gencatan senjata yang rapuh di Timor-Leste. Pada 28 Maret, Presiden Soeharto melantik Jenderal Benny Moerdani sebagai Panglima ABRI.\* Moerdani, salah seorang arsitek invasi Timor-Leste, membawa pengaruh yang jauh dari sikap kompromi mengenai perdamaian di wilayah ini.

\* Juga pada Maret, Panglima Kodam XVI/Udayana, Brigadir Jenderal Dading Kalbuadi, digantikan oleh Brigadir Jenderal Damianus Soetarto.

## Monsignor Costa Lopes dicopot

415. Salah satu tindakan pertama Moerdani sebagai Panglima ABRI adalah menekan Utusan Paus untuk Indonesia, Monsignor Pablo Puente, untuk mencopot Monsignor Costa Lopes dari jabatan kepala Gereja Katolik di Timor-Leste. Moerdani, yang juga seorang Katolik, memandang pertemuan Monsignor Costa Lopes dengan Xanana Gusmão pada September 1982 sebagai pengkhianatan. Beberapa minggu kemudian Monsignor Costa Lopes mengajukan pengunduran dirinya, meskipun dia menyatakan bahwa dirinya telah dipaksa untuk mengundurkan diri.<sup>572</sup> Penggantinya, Carlos Felipe Ximenes Belo yang relatif masih muda, diangkat langsung oleh Vatikan, bukannya dipilih oleh pastor-pastor Timor lewat pemilihan.<sup>573</sup>

416. Pada 13 Mei, dalam satu penampilan terakhirnya di depan publik sebelum meninggalkan Timor-Leste selamanya, yakni pada acara hari raya Katolik Penampakan Bunda Maria, Monsignor Costa Lopes mengecam kekejian yang dilakukan pasukan pendudukan. Ini adalah pertama kalinya dia melakukan hal itu di depan publik.<sup>574</sup> Dia pergi secara diam-diam dengan membawa bukti terperinci bahwa sebuah gencatan senjata umum telah disepakati, dalam acara pertemuan yang tidak dipublikasikan oleh Indonesia.

## Gencatan senjata dirongrong

417. Sejak awal, Panglima ABRI yang baru, Jenderal Benny Moerdani, tidak yakin akan manfaat gencatan senjata. Pada 12 April Jenderal Moerdani mengunjungi Baucau untuk bertemu dengan stafnya yang bertanggung jawab untuk urusan Timor-Leste. Keesokan harinya dia memanggil Gubernur Mario Carrascalão ke Baucau. Dalam sebuah wawancara pada 2003, Mario Carrascalão mengenang pertemuan ini:

*Sebetulnya pertanyaan-pertanyaan semuanya berputar di sekitar jaminan. Moerdani bertanya:*

*“Jika diselesaikan secara damai, apakah ada jaminan bahwa Timor-Timur akan tetap merupakan bagian dari Indonesia? Bagaimana yang dirasakan rakyat? Itulah [yang] ingin kami ketahui.”*

*Saya [Carrascalão] berkata: “Bagaimana saya bisa tahu, Pak?”*

*Pertemuan itu berlangsung sekitar satu jam, pertanyaan-pertanyaan ini, kemudian Benny Moerdani mengakhiri pertemuan itu lebih cepat.... Benny Moerdani memberi waktu tiga bulan. Dia berkata:*

*“Saya akan memberi Soetarto [Panglima Kodam Udayana] dan Purwanto [waktu], dengan dibantu oleh Gubernur, untuk membantu Timor-Timur secara damai.”<sup>575</sup>*

418. Gubernur Mario Carrascalão memainkan peran menonjol dalam memajukan berbagai pembicaraan yang diselenggarakan selama gencatan senjata. Pada akhir Mei, Xanana Gusmão mengirim pesan yang meminta untuk bertemu dengan

Carrascalão, yang membawa pada sebuah pertemuan pribadi di Ariana, beberapa kilometer dari Venilale (Baucau). Namun, ruang manuver Carrascalão terbatas. Jakarta menyiarkan berita tentang gencatan senjata itu pada 10 Juni, namun tidak memublikasikan perinciannya, seperti tuntutan Falintil untuk sebuah referendum, sebagaimana yang telah disepakati. Tak lama setelah itu, Moerdani mengirim sepucuk surat kepada Xanana Gusmão:

Jangan kira bahwa kalian bisa mendapat bantuan dari negara-negara lain. Tidak ada negara di dunia ini yang bisa membantu kalian. Negara kami sendiri telah siap untuk menghancurkan kalian kalau kalian tidak mau bersikap kooperatif terhadap republik kami. Kami sedang mempersiapkan sebuah operasi—Operasi Persatuan—yang akan dilancarkan pada bulan Agustus.<sup>576</sup>

419. Batas waktu gencatan senjata selama tiga bulan yang ditentukan Moerdani ketika itu akan berakhir pada Juli. Dia merencanakan operasi baru itu untuk dilaksanakan pada Agustus guna memberi kesempatan kepada delegasi parlemen Australia yang akan berkunjung ke wilayah ini pada akhir Juli. Kemauan Moerdani untuk melancarkan serangan baru ini mengabaikan keprihatinan Menteri Luar Negeri Indonesia bahwa operasi baru ini akan berpengaruh negatif terhadap pembahasan tentang Timor-Leste yang dijadwalkan pada pertemuan Sidang Umum PBB di September.\*<sup>577</sup>

420. Ada kemungkinan bahwa gencatan senjata ini dirongrong dari dalam ABRI sendiri, dengan maksud untuk melanjutkan perang. Militer pernah menyatakan sebelumnya bahwa mereka menganggap operasi-operasi di Timor-Leste sebagai sarana latihan yang berharga bagi pasukan-pasukannya.<sup>578</sup> Seorang figur yang mungkin terlibat dalam melakukan perongrongan seperti itu adalah Kapten Prabowo Subianto, yang pada waktu itu merupakan wakil komandan Detasemen 81, Kopassandha.<sup>579</sup> Seminggu setelah Moerdani menyetujui gencatan senjata itu pada April, Kolonel Purwanto meminta untuk bertemu dengan Gubernur Mario Carrascalão di pantai, Dili. Menurut Carrascalão, Purwanto mengatakan kepadanya:

Apa yang pernah saya khawatirkan kini terjadi. Dia, Prabowo, kembali ke Timor-Leste. Dalam kondisi-kondisi seperti ini, tak seorang pun, baik sipil ataupun militer, bisa memasuki atau meninggalkan Timor-Leste tanpa sepengetahuan saya. Akhirnya dia datang dan pergi ke pelosok—ke Viqueque, sekitar Bibileo. Saya tidak tahu apa yang dia lakukan, saya tidak tahu lagi.<sup>580</sup>

421. Komisi menerima bukti bahwa Prabowo Subianto ditempatkan di sektor bagian timur Timor-Leste saat itu. Beberapa sumber menyatakan kepada Komisi bahwa Prabowo terlibat dalam operasi untuk membawa penduduk sipil turun dari Gunung

.....  
\* Pada 1983, untuk pertama kalinya sejak 1975, pembahasan di Majelis Umum PBB ditunda. Pembahasan ini ditunda sampai pertemuan Majelis Umum ke-39 setahun berikutnya.

Bibileo, di mana tidak lama kemudian beberapa ratus orang dibunuh ABRI. Komisi juga menerima bukti keterlibatan Kopassus dalam pembunuhan-pembunuhan ini (lihat Bab 7.2.: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa).

422. Baik militer Indonesia maupun Falintil menggunakan gencatan senjata ini untuk keuntungan militernya sendiri, sebagaimana dilaporkan oleh delegasi Kedutaan Amerika Serikat yang berkunjung ke Dili pada Mei 1983:

Fretilin punya peluang untuk mengorganisasi pasukannya dan mengembangkan kepemimpinannya. Pada saat yang sama, kesatuan-kesatuan keamanan Indonesia jadi mengetahui berapa anggota Fretilin, di mana mereka berada dan siapa saja mereka, karena nama-nama telah didaftar dan telah diambil foto-foto. Berkumpulnya anggota-anggota Fretilin juga memungkinkan pasukan Indonesia untuk menyerang, jika pembicaraan gagal...<sup>581</sup>

423. Pada 28 Juli, satu delegasi parlemen Australia tiba di Dili. Mereka menghabiskan waktu empat hari di Timor-Leste dari sepuluh hari kunjungannya ke Indonesia. Delegasi ini tidak mencoba untuk bertemu dengan Fretilin. Namun, di dekat Baucau delegasi ini dihentikan oleh empat anggota Falintil. Terjadi diskusi singkat, dan anggota Falintil tersebut memberikan sepucuk surat kepada delegasi parlemen itu.<sup>582</sup> Surat ini menyebutkan bahwa:

Bahkan selama pembicaraan-pembicaraan [perdamaian]...mereka [ABRI] terus membunuh gerilya FRETILIN (*sic*) yang ingin mendekati kamp-kamp agar bisa berhubungan dengan orang-orangnya.

424. Data Komisi mendukung pernyataan ini. Selama masa gencatan senjata, ABRI melakukan serangkaian pelanggaran, termasuk penyiksaan dan pembunuhan, khususnya penangkapan sewenang-wenang atas orang-orang yang dicurigai sebagai anggota klandestin.<sup>583</sup>

## Berakhirnya gencatan senjata

425. Setelah usaha-usaha yang muncul dari dalam tubuh militer Indonesia sendiri untuk merongrong gencatan senjata, pada 8 Agustus, orang-orang Timor di Kraras (Lacuta, Viqueque) menyerang dan membunuh sekelompok zipur ABRI. Mereka kemudian melarikan diri ke dalam hutan. Indonesia menjelaskan kejadian ini sebagai serangan yang tak beralasan terhadap “serdadu-serdadu yang tak bersenjata”.<sup>584</sup> Para anggota Falintil menguraikannya sebagai sebuah *levantamento* (pemberontakan), serangan gabungan Hansip-Falintil terhadap ABRI itu dimaksudkan untuk menggugurkan klaim Indonesia bahwa mereka telah mengalahkan Falintil.<sup>585</sup> Orang-orang Timor menjelaskan bahwa tentara Indonesia telah membunuh sejumlah penduduk sipil di daerah itu selama gencatan senjata.<sup>586</sup> Para anggota batalion zipur pada waktu itu melecehkan seorang perempuan Timor. Kejadian ini segera memicu serangan gabungan Falintil-Hansip yang membunuh sekurangnya 12 tentara.<sup>587</sup>

426. Tanggapan ABRI adalah tindak kekerasan yang dahsyat terhadap penduduk sipil. Anggota Hansip yang terlibat dalam pembunuhan tentara Indonesia itu telah membelot ke Falintil.<sup>\*</sup> Penduduk sipil dari desa telah melarikan diri—sebagian, yang kebanyakan adalah para lelaki yang cukup kuat, ke hutan, dan sebagian lainnya ke Viqueque. Pasukan dari Batalion 501 memburu mereka. Para lelaki dikumpulkan dan ditembak di daerah Tahuben. Kelompok lebih kecil yang kebanyakan terdiri atas para lelaki tua, perempuan, dan anak-anak ditangkap di Viqueque dan ditembak di sebuah lokasi dekat Buicaren. Laporan-laporan tentang korban mati pada waktu itu melebihi 200 orang.<sup>588</sup> Militer Indonesia sendiri mengakui 80 orang.<sup>589</sup> Pada 1985, Uskup Belo kemudian mendaftarkan nama 84 korban mati.<sup>590</sup> Orang-orang yang selamat dipaksa tinggal di Lalerek Mutin, di mana diperkirakan ada sebagian besar orang meninggal akibat kelaparan dan penyakit.<sup>591</sup> Sampai saat ini, Kraras dikenal sebagai ‘desa janda’.<sup>592</sup>

427. Gencatan senjata selesai. Karena “solusi damai”-nya telah gagal, Kolonel Purwanto pun digantikan oleh Kolonel Rudito.<sup>593</sup> Pada 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Indonesia, Jenderal Moerdani mengumumkan berbagai rencana barunya untuk menghancurkan Resistansi:

Kali ini kita akan memukul mereka tanpa ampun.<sup>594</sup>

428. Operasi Persatuan dimulai pada September 1983.<sup>†</sup> Operasi ini memfokuskan diri ke wilayah timur tempat Falintil masih kuat, dan menampilkan Kopassandha sebagai pasukan garis depan untuk pertama kalinya, dengan didukung kuat oleh kekuatan udara.<sup>595</sup> Mungkin salah satu alasan untuk ini adalah pembelotan massal Hansip ke Falintil setelah peristiwa Kraras.<sup>596</sup> Militer Indonesia kekurangan tenaga manusia dan sangat tidak memercayai para prajurit asal Timor. Operasi ini memicu terjadinya perpindahan besar-besaran orang-orang ke kota.

429. Operasi-operasi ICRC berhenti di wilayah daratan utama, dibatasi hanya di Pulau Ataúro. Orang-orang garis keras militer sekali lagi berkuasa.<sup>597</sup> Gereja Katolik merupakan satu-satunya lembaga independen yang tersisa di Timor-Leste. Tapi, Gereja di Timor-Leste sangat terisolasi dari Gereja di Indonesia dan Vatikan, yang umumnya bungkam tentang situasi hak asasi manusia di wilayah ini. Pada 1983, untuk pertama kalinya Konferensi Waligereja Indonesia mengungkapkan dukungan bagi rakyat Timor-Leste yang menderita dan menyerukan adanya pengertian dan kejujuran dari para pembuat kebijakan.<sup>598</sup> Meski ini bisa menjadi sebuah permulaan yang signifikan, Konferensi Waligereja itu kemudian menjaga jarak dari posisi dukungan ini.

---

<sup>\*</sup> Mungkin suatu pengaruh tambahan yang menyebabkan pembelotan Hansip tersebut adalah kebijakan militer pada waktu itu yang menurunkan pangkat Hansip/Wanra menjadi Ratih. Ratih memiliki status yang lebih rendah dan tidak dibayar. Lihat Korem 164 Insop/03/II/1982 tentang Perlawanan Rakyat Terlatih, hal. 16-18.

<sup>†</sup> Juga dikenal sebagai Operasi Sapu Bersih.

# Konsolidasi dan awal perubahan: 1984 - 1991

---

## Tinjauan

430. Sepanjang bagian besar dasawarsa 1980-an, Timor-Leste tetap tertutup bagi dunia luar. Falintil meneruskan resistansi gerilya bersenjata dan kehadiran ABRI/TNI di wilayah tersebut tetap tinggi. Tapi, operasi militer besar berkurang pada paruh kedua dasawarsa tersebut, dan Pemerintah Indonesia berupaya untuk “menormalisasikan” wilayah ini dengan menjalankan sejumlah kebijakan dan program nasional penting, termasuk kebijakan transmigrasi dan pendidikan.

431. Proses restrukturisasi Resistansi yang dimulai pada 1981 terus berlanjut sepanjang dasawarsa ini. Pada 1983, persatuan nasional diumumkan sebagai kebijakan Resistansi, dan pada 1988, Dewan Nasional Resistansi Maubere (Conselho Nacional da Resistência Maubere, CNRM) menjadi badan tertinggi Resistansi, dengan tujuan untuk membangun basis nasionalis. Falintil dipisahkan dari Fretilin, dan panglimanya, Xanana Gusmão mengundurkan diri dari partai, sebagai upaya lebih jauh untuk menunjukkan pendekatan yang inklusif ini.

432. Dom Carlos Felipe Ximenes Belo menggantikan Monsignor Martinho da Costa Lopes sebagai Administrator Apostolik dari Dioses Dili, dan pada 1988 dinobatkan sebagai Uskup. Selama dasawarsa tersebut, ia menjadi semakin lantang dalam membela rakyat Timor-Leste, dan suratnya pada akhir 1988 kepada Sekretaris Jenderal PBB yang menyerukan PBB untuk memenuhi tugas dekolonisasinya di Timor-Leste, berdampak besar secara internasional.

433. Gerakan pemuda Resistansi mulai tumbuh sejak pertengahan dasawarsa 1980-an, khususnya di sejumlah sekolah di Dili. Karena banyak mahasiswa Timor-Leste yang kuliah di Indonesia, gerakan ini meluas ke organisasi mahasiswa pada akhir dasawarsa tersebut. Aktivisme pemuda sangat menonjol selama kunjungan Paus Yohanes Paulus II di akhir 1989. Baik Pemerintah Indonesia maupun Resistansi berupaya untuk memanfaatkan kunjungan Paus di Timor-Leste ini untuk meraih keuntungan politis bagi setiap pihak, karena kunjungan tersebut memiliki arti rohani yang penting bagi masyarakat yang sebagian besar beragama Katolik. Para mahasiswa dari gerakan klandestin yang tengah berkembang mengambil kesempatan ini untuk memberitahukan kepada Paus dan media internasional yang menyertainya mengenai hasrat mereka untuk penentuan nasib sendiri, dengan mengadakan demonstrasi publik besar-besaran pertama sejak invasi Indonesia 1975. Ini menjadi awal dari sebuah siklus demonstrasi dan penumpasan pada dasawarsa 1990-an.

434. Secara umum, PBB tidaklah begitu efektif selama periode ini dalam upaya mencari solusi politik yang langgeng mengenai masalah Timor-Leste. Warga Timor-Leste dalam diaspora dan masyarakat sipil internasional mengandalkan Komite Khusus PBB untuk Dekolonisasi dan Komisi Hak Asasi Manusia PBB untuk tetap mempertahankan persoalan ini dalam agenda PBB. Ketika Tembok Berlin runtuh



pada 9 November 1989, dan menandai akhir dari konteks Perang Dingin yang telah mewarnai konflik ini sejak invasi dan pendudukan Timor-Leste, peristiwa ini membawa harapan baru bagi penyelesaian damai dan pasti mengenai konflik ini.

## Perkembangan Resistansi

435. Pada awal 1980-an, sebagian besar penduduk sipil melakukan urbanisasi dan bermukim di berbagai kota dan desa, ketimbang ikut Falintil di gunung-gunung. Menjelang pertengahan dasawarsa 1980-an, masa penahanan massal telah lewat. Indonesia memulai proses normalisasi di Timor-Leste. Berbagai lembaga negara seperti pemerintah provinsi, parlemen daerah, dan berbagai departemen pelayanan masyarakat telah didirikan, dengan pegawai dan mulai berfungsi. Hal ini membuat Indonesia mulai dapat menjalankan sejumlah program pembangunan nasionalnya di Timor-Leste, sehingga ada benarnya bahwa Indonesia melaksanakan program yang membawa pembangunan di wilayah ini pada periode ini. Tapi, penilaian yang lebih seksama mengenai berbagai program ini menunjukkan adanya penekanan pada infrastruktur pendudukan, khususnya pembangunan jalan dan gedung pemerintahan. Bidang lain yang mendapat anggaran pembiayaan pemerintah yang cukup penting adalah pembangunan sekolah. (Lihat Bab 7.9.: Hak ekonomi dan sosial, dan Bagian 4: Rezim pendudukan). Indonesia mempunyai harapan tinggi bisa menarik simpati pemuda Timor.

436. Perubahan-perubahan visi dan struktur Resistansi pada 1981 dan 1983 memerlukan waktu untuk menjadi matang. Sementara itu Xanana Gusmão berupaya mengambil serangkaian langkah praktis bagi masa depan jangka panjang Resistansi. Pada 7 September 1985, pemuda Katolik menulis secara rahasia kepada Xanana Gusmão, untuk meminta klarifikasi tentang posisi Resistansi mengenai masa depan perjuangan dan segala tantangan yang dihadapinya. Xanana Gusmão menulis tanggapan yang terperinci dalam pesannya tertanggal 20 Mei 1986 kepada Pemuda Katolik di Timor-Leste dan Mahasiswa di Indonesia.<sup>599</sup> Ia menyerukan para pemuda untuk tetap teguh memegang identitas Timornya dan perjuangan akan hak-haknya. Pesan ini menunjukkan betapa Gusmão menganggap penting generasi muda dalam reposisi Resistansi.

437. Pada Desember 1988, Xanana Gusmão membuat berbagai perubahan fundamental dalam Resistansi, dalam apa yang dikenal sebagai Penyesuaian Kembali Struktur Resistansi atau RER. Berbagai perubahan ini dimaksudkan untuk memperkuat upaya membangun basis Resistansi nasional seluas-luasnya. CRRN dibubarkan, dan digantikan oleh Dewan Nasional Resistansi Maubere (Concelho Nacional da Resistência Maubere, CNRM), yang dimaksudkan untuk menjadi organisasi yang memayungi semua partai politik yang mendukung kemerdekaan. Falintil dideklarasikan sebagai tentara nasionalis yang netral, dan tidak lagi sebagai bagian dari Fretilin. Xanana Gusmão sendiri mengundurkan diri dari Fretilin, untuk menjadi Presiden CNRM, sementara terus menjadi Panglima Falintil.<sup>600</sup> Pembentukan CNRM merupakan langkah besar menuju konsolidasi dan memberi mekanisme politik praktis pada gagasan persatuan nasional. Selama dasawarsa

1980-an, berbagai kelompok klandestin mulai menjamur, khususnya di kota-kota. Jumlah kelompok ini meningkat selama akhir dasawarsa 1980-an, namun karena faktor bahayanya kegiatan klandestin ini sebagian besar berupa kelompok kecil dan terisolasi, dengan hanya sedikit jaringan yang berbasis luas. Sadar akan hal ini, CNRM lalu membentuk *Comité Executivo da CNRM na Frente Clandestina* (Komite Eksekutif CNRM bagi Front Klandestin, atau yang lebih dikenal sebagai *Comité Executivo*, CE) pada tahun 1990.<sup>601</sup> Tugas CE adalah untuk mengoordinasikan, mengarahkan, dan memantau segala kegiatan bawahtanah. Komite ini membangun hubungan dengan kelompok-kelompok bawahtanah di seluruh Timor-Leste atau di luar negeri, termasuk di Indonesia.<sup>602</sup>

438. Berbagai perubahan pada gerakan Resistansi ini juga memperkuat front diplomatik eksternal, diaspora internasional orang Timor-Leste, dan masyarakat sipil internasional. Pada 1983, setelah ada larangan Pemerintah Australia sejak masa invasi Indonesia, sebuah delegasi Fretilin berhasil melakukan kunjungan ke Australia dan berbicara di hadapan 1.500 hadirin dari berbagai kalangan di Melbourne. Hal ini memberi banyak semangat kepada warga Timor-Leste di Australia, yang sampai saat itu kesulitan untuk memengaruhi publik Australia tanpa dukungan langsung dari para pemimpin kunci.<sup>603</sup> Pada 1980-an, warga Timor-Leste yang lari dari Timor-Leste pada 1970-an sudah dapat menyesuaikan diri di negeri baru seperti Portugal dan Australia, dan menjadi lebih efektif dalam perjuangan bagi pengakuan internasional. (Lihat Bab 7.1.: Hak penentuan nasib sendiri.)

439. José Ramos-Horta terus melakukan kunjungan ke mana-mana, untuk memupuk dukungan di setiap negara yang ia kunjungi. Ia bekerja keras menggalang dukungan masyarakat sipil internasional serta melalui jalur-jalur diplomatik resmi. Misalnya, kunjungannya ke Jepang pada Maret 1985 adalah atas undangan beberapa kelompok warga masyarakat Jepang, dan dia dapat memperkenalkan masalah Timor-Leste langsung ke publik Jepang.<sup>604</sup> Dengan dukungan dan terkadang bimbingan berbagai kelompok masyarakat sipil, warga Timor-Leste lainnya juga meningkatkan upaya lobi internasional yang lebih luas selama 1980-an.\*

## Represi dan pemenjaraan

440. Tanggapan Indonesia atas semakin menguatnya perlawanan klandestin selama dasawarsa 1980-an adalah dengan meningkatkan fokus pada Resistansi dan mencari cara untuk melenyapkannya. Salah satu caranya adalah dengan membawa tahanan politik Timor-Leste keluar wilayah ini. Pada 1983, 69 orang tahanan yang diduga terlibat dalam pemberontakan Kraras dibawa dari penjara Balide ke Kupang di Timor Barat, Indonesia. Hanya empat belas dari tahanan ini kembali ke Timor-Leste.<sup>605</sup> Para tahanan, yang biasanya adalah tersangka anggota resistansi klandestin, sering dipindahtangankan dari satu aparat keamanan ke aparat lain, dan

\* Beberapa contoh adalah kunjungan ke Konferensi Pasifik yang Bebas Nuklir dan Merdeka di Vanuatu pada 1983 oleh Abilio Araújo dan Roque Rodrigues, dan ke Konferensi Perempuan Dunia di Nairobi oleh Emilia Pires dan Ines de Almeida pada 1985.

siksaan dan penganiayaan merupakan hal biasa. Selama periode ini, para tahanan terkadang dibawa ke berbagai tempat seperti Bali untuk diinterogasi.<sup>606</sup> Sebagai konsesi bagi normalisasi prosedur administrasi selama 1980-an, para tahanan politik kadang dibawa ke pengadilan untuk diadili. Namun, pengadilan-pengadilan seperti ini sering hanya merupakan bayang-bayang dari keadilan dan tidak terlalu memedulikan hak-hak para tersangka.

441. Penjara Cipinang di Jakarta yang dijaga ketat digunakan untuk menahan para tahanan Timor-Leste selama periode ini. Komisi mendengarkan kesaksian dari aktivis hak asasi manusia Indonesia Ade Rostina Sitompul, yang menjadi pengunjung reguler tahanan Timor-Leste di penjara Cipinang mulai 1987. Dia mengatakan kepada Komisi bahwa pada 1987, terdapat 47 tahanan politik Timor-Leste di Cipinang, dan kondisi pengamanan terhadap mereka jauh lebih ketat dibandingkan para tahanan yang lain.<sup>607</sup> Jauh dari keluarga menjadi penderitaan terberat bagi para tahanan Timor-Leste yang dibawa ke penjara-penjara di Jawa atau daerah lain di Indonesia. (Lihat Bab 7.6: Pengadilan politik.)

## Kebangkitan gerakan pemuda klandestin

442. Pada pertengahan dasawarsa 1980-an, sejumlah sel klandestin pelajar dibentuk di berbagai sekolah menengah di Dili. Sekitar 1986, OJECTIL (*Organização de Juventude Católica de Timor-Leste*, Organisasi Pemuda Katolik Timor-Leste)<sup>\*</sup> dibentuk oleh para aktivis pelajar yang berbasis di Externato de São José,<sup>608</sup> yang kemudian menjadi organisasi berbasis nasional. Banyak di antara para siswa ini menjalani masa kanak-kanaknya di hutan selama masa invasi dan perang besar-besaran. Banyak yang memiliki hubungan keluarga dengan anggota Resistansi di hutan.<sup>609</sup> Mereka membentuk apa yang akan menjadi dasar bagi generasi baru resistansi yang akan terus berlanjut pada dasawarsa 1990-an.

443. Pada 1986, Universitas Timor-Timur (Untim), perguruan tinggi pertama di Timor-Leste, dibuka di Dili. Sebelumnya, pada 1985, Gubernur Mário Viegas Carrascalão menjalankan kebijakan pendidikan yang memperluas kesempatan mahasiswa Timor-Leste melanjutkan pendidikannya di berbagai universitas di Indonesia. Ini merupakan perkembangan penting dalam kesempatan pendidikan bagi anak-anak muda Timor-Leste, dan berdampak penting pada hubungan antara kalangan nasionalis dan aktivis hak asasi manusia Timor-Leste dan rekan-rekan mereka dari Indonesia. (Lihat Bab 7.1: Hak penentuan nasib sendiri, bagian tentang masyarakat sipil.)

444. Kelompok mahasiswa klandestin Renetil (*Resistência Nacional dos Estudantes de Timor-Leste*, Resistansi Nasional Pelajar Timor-Leste) berdiri pada 1988 di Bali, dan beroperasi di Bali dan Jawa.<sup>610</sup> Dalam suasana kontrol yang ketat atas kegiatan politik mahasiswa pada zaman rezim Orde Baru, mahasiswa Timor-Leste juga mendirikan organisasi yang lebih moderat, yakni Impettu (Ikatan Mahasiswa,

\* Setelah 1991, OJECTIL berganti nama menjadi OJETIL (*Organização de Juventude de Timor-Leste*), yang menghapus kata Católica, untuk mengedepankan ciri nasionalisnya.

Pemuda, dan Pelajar Timor-Leste) untuk beroperasi sebagai wadah mahasiswa Timor-Leste di Indonesia yang lebih dapat diterima oleh penguasa. Ini menjadi alat penting bagi aktivisme mahasiswa selama 1990-an.<sup>611</sup>

## Gereja Katolik

445. Pada 1983, Carlos Filipe Ximenes Belo menjadi Administrator Apostolik Diosis Dili, menggantikan Monsignor Martinho da Costa Lopes sebagai kepala Gereja di Timor-Leste. Walau mendapat tekanan dari Indonesia, Vatikan tetap menolak untuk mengakui Timor-Leste sebagai bagian dari Indonesia. Pada 19 Juni 1988, Belo diberi gelar Uskup Lorum, sebuah dioses di Italia yang sudah tidak berjalan lagi.<sup>612</sup>

446. Monsignor Belo tidak banyak dikenal di Timor-Leste ketika ia mulai menjalankan posisinya sebagai kepala Gereja. Dia berada di luar negeri belajar di Portugal dari 1968 sampai 1974, dan sekali lagi dari Agustus 1975 sampai 1981, ketika ia kembali ke Kolese Fatumaca di Baucau. Seperti pendahulunya Martinho da Costa Lopes, Belo segera membuktikan diri sebagai pemimpin yang independen, dan tidak akan tinggal diam menyaksikan kekerasan yang terjadi di sekitarnya. Baru berusia empat puluh tahun ketika diangkat menjadi uskup, Belo memusatkan perhatian keuskupannya pada pemuda Timor-Leste. Mulai akhir 1980-an sampai akhir 1990-an, tugas sehari-harinya sebagai uskup membuat dia selalu sadar tentang memanasnya ketegangan antara para pemuda Timor-Leste yang ingin mendapat kebebasan lebih banyak dan aparat militer Indonesia yang berupaya menumpas segala tanda resistansi pemuda. Di tahun-tahun berikutnya, kediaman Uskup Belo menjadi tempat berlindung bagi banyak pemuda yang mencari perlindungan dari militer dan agen-agenya.

447. Pada Februari 1984, karena sangat tersentuh dengan dampak operasi 'Pagar Betis' militer Indonesia, ia menulis kepada Martinho da Costa Lopes, menceritakan buruknya kondisi orang-orang yang terkepung oleh kampanye ini, dan orang-orang lain yang dipenjarakan, serta pihak militer yang menjadikan berbagai sekolah Katolik sebagai sasaran penggeledahan dan interogasi para siswanya.<sup>613</sup> Pada 1985, ia dengan lantang berbicara menentang program Keluarga Berencana Pemerintah Indonesia, yang ia pandang dipaksakan terhadap rakyat Timor-Leste.<sup>614</sup>

448. Pada 1988, ketika pasukan keamanan meluncurkan pembersihan yang represif sebelum kunjungan singkat Presiden Soeharto ke wilayah ini, Uskup Belo merespons dengan menyiapkan sebuah pernyataan yang akan dibacakan di seluruh gereja di wilayah ini pada 5 Desember:

Kami tidak setuju dengan sistem yang biadab ini dan mengutuk kebohongan propaganda yang mengatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia tidak ada di Timor-Leste.<sup>615</sup>

449. Surat ini sampai ke kalangan pers internasional, dan dikutip di *New York Times* pada 22 Januari 1989.

450. Pada 6 Februari 1989, Uskup Belo menulis sebuah surat yang lebih mengesankan lagi, kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Javier Perez de Cuellar. Dalam surat itu, ia meminta Sekretaris Jenderal “untuk memulai proses dekolonisasi yang demokratis dan sesungguhnya di Timor-Leste untuk diwujudkan melalui referendum.”<sup>616</sup> Ia menyangkal klaim Indonesia bahwa rakyat Timor-Leste telah memilih untuk berintegrasi, menganggap bahwa Portugal melihat berjalannya waktu sebagai solusi, dan menyatakan bahwa “sementara itu kami perlahan mati sebagai suatu bangsa dan negara.” Surat ini dikirimkan dari luar Timor-Leste karena alasan keamanan. Walaupun tidak mendapat tanggapan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa selama bertahun-tahun, surat ini memberi dampak yang berarti. Bagi Uskup Belo, ini mendatangkan tekanan yang besar baik dari penguasa Indonesia maupun dari Vatikan.<sup>617</sup>

## Situasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa

451. Pada 1982, keadaan politik di Portugal mengalami perkembangan penting yang pada waktunya memberi dampak bagi perjuangan penentuan nasib sendiri di Timor-Leste. Partai Sosialis Mario Soares mengambil alih pemerintahan dan secara efektif mengakhiri masa ketidakstabilan dan kelumpuhan yang telah menjangkiti politik Portugis sejak Revolusi Anyelir 1974. Tidak lama kemudian, pemerintahan Mario Soares mengaktifkan kembali dukungan bagi perjuangan penentuan nasib sendiri bagi rakyat Timor-Leste, dan penerusnya menggunakan sebaik-baiknya posisi baru Portugal di Uni Eropa untuk mendukung perjuangan ini. (Lihat Bab 7.1.: Hak penentuan nasib sendiri.)

452. Pada 1982, apa yang sebelumnya telah menjadi peristiwa tahunan Sidang Umum, yakni resolusi yang menyerukan penentuan nasib sendiri bagi Timor-Leste, hampir saja dikalahkan; resolusi ini didukung oleh 50 negara, ditentang oleh 46, dengan 50 lainnya tidak memberi suara. Mosi ini juga mengimbau Sekretaris Jenderal untuk memulai pembicaraan dengan semua pihak terkait untuk “mencapai penyelesaian yang menyeluruh mengenai masalah Timor-Leste.”<sup>618</sup>

453. Hal ini tampaknya menjadi kemenangan diplomatik yang berarti bagi Indonesia. Komisi mendengarkan kesaksian dari Mantan Pejabat Senior PBB Francesc Vendrell bahwa ini merupakan masa ketika dalam komunitas internasional:

*Tidak ada yang percaya bahwa orang Timor... benar-benar dapat melawan dan... semuanya percaya bahwa hanyalah soal waktu sebelum Timor-Leste diakui oleh semuanya sebagai bagian dari Indonesia.*<sup>619</sup>

454. Sejumlah warga Timor-Leste di pengasingan di luar negeri memberi kesaksian kepada PBB selama masa ini. Upaya diplomatik ini dipimpin oleh José Ramos-Horta. Ian Martin, Sekretaris Jenderal Amnesty International dari 1986 sampai 1992, mengenang José Ramos-Horta di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada masa itu:

*Saya ingat bagaimana José Ramos-Horta terlihat sendiri tanpa teman di Aula Delegasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, ketika hampir semua diplomat yakin bahwa hanyalah soal waktu sebelum penggabungan oleh Indonesia atas Timor-Leste diterima oleh komunitas internasional seutuhnya...*<sup>620</sup>

455. Pada 1983, perdebatan mengenai Timor-Leste ditangguhkan untuk memberi waktu bagi Sekretaris Jenderal memperoleh kemajuan dalam konsultasinya untuk mencapai solusi yang tuntas. Namun sebenarnya, Portugal takut untuk membawanya ke Sidang Umum setelah hampir kalah pada 1982. Sekretaris Jenderal pada waktu itu Javier Perez de Cuellar menafsirkan para pihak yang terlibat dengan sempit, yakni hanya Portugal dan Indonesia. Para pemimpin Timor-Leste samasekali tidak dilibatkan. Apa yang disebut perundingan tripartit pertama antara Portugal, Indonesia, dan perwakilan PBB diadakan pada 1983. Mereka tidak mencapai banyak kemajuan dalam berbagai pembicaraan ini, karena tidak ada pihak yang mau mengalah.

456. Walaupun persoalan Timor-Leste disahkan dalam agenda Sidang Umum PBB setelah 1983, selama dasawarsa 1980-an terdapat dua mekanisme penting bagi pembahasan internasional mengenai persoalan Timor-Leste, yakni Komisi Hak Asasi Manusia dan Komite Khusus PBB untuk Dekolonisasi. Pada 1985, persoalan ini dihapuskan dari agenda Komisi Hak Asasi Manusia. Komisi mendengar kesaksian dari Francesc Vendrell mengenai inisiatifnya untuk memperbolehkan Komite Khusus PBB untuk Dekolonisasi untuk menampung berbagai submisi baik dari sejumlah lembaga nonpemerintah maupun pemerintah.<sup>621</sup> Ini memungkinkan antara 20 sampai 25 LSM internasional melakukan perjalanan tahunan ke New York untuk mengajukan petisi kepada Komite Khusus PBB untuk Dekolonisasi untuk mendukung penentuan nasib sendiri bagi Timor-Leste. Sejumlah LSM internasional besar sering menyerahkan waktu bicara mereka bagi para utusan asal Timor-Leste (Lihat Bab 7.1.: Hak penentuan nasib sendiri, bagian Masyarakat Sipil). Hal ini mungkin menjadikan Timor-Leste sebagai topik yang paling diperdebatkan oleh Komite Khusus PBB untuk Dekolonisasi. Pada 14 September 1989, Sekretaris Jenderal PBB Javier Perez de Cuellar menerbitkan laporan mengenai kemajuan yang sudah dicapai, dan menyimpulkan bahwa usulan kunjungan ke Timor-Leste oleh Misi Parlemen Portugal akan dapat membantu dalam upaya mencari solusi yang bisa diterima secara internasional.

## Kunjungan Paus Yohanes Paulus II

457. Kunjungan Paus Yohanes Paulus II ke Timor-Leste pada 12 Oktober 1989 merupakan peristiwa yang menggembirakan dan melegakan bagi banyak orang di wilayah yang tertindas ini. Ini juga merupakan peristiwa bersejarah, karena baru kali ini Timor-Leste mendapat kunjungan seorang kepala negara sepanjang masa pendudukan Indonesia. Kontingen besar media internasional yang menyertai kunjungan Sri Paus memberi kesempatan publisitas yang belum pernah ada

sebelumnya selama empat belas tahun pendudukan. Harapan orang sangat tinggi. Para pendukung kemerdekaan menantikan kecaman atas pendudukan Indonesia. Indonesia menantikan pengakuan integrasi dan penggabungan Gereja Timor-Leste ke dalam Konferensi Waligereja Indonesia. Simpati Paus terhadap tekanan yang dihadapi oleh para rohaniwan Gereja Timor ditunjukkan dalam sebuah pertemuan antara mereka yang juga dihadiri oleh pihak berwenang Indonesia; muncul sebuah pertanyaan mengenai bahasa apa yang akan digunakan dalam pertemuan tersebut, dan agar terdapat kerahasiaan antara Sri Paus dan para pastor Timor-Leste, bahasa Italia dipilih. Sebagian besar rohaniwan Timor pernah belajar di Roma.<sup>622</sup>

458. Sri Paus meniti garis diplomatik yang rumit selama di Timor-Leste, dengan tidak menunjukkan posisi yang jelas mengenai status politik wilayah ini. Dia secara terbuka mengakui penderitaan orang Timor, dan mendatangkan kenyamanan spiritual dan moral bagi banyak orang. Dalam khotbahnya Paus Yohanes Paulus II mengatakan:

Apakah makna dari menjadi garam di Bumi dan cahaya dunia di Timor hari ini? Sudah selama bertahun-tahun hingga saat ini, Anda telah mengalami kehancuran dan kematian sebagai akibat konflik; Anda sudah tahu apa artinya menjadi korban kebencian dan perjuangan. Banyak orang yang tidak berdosa meninggal, sementara yang lainnya terus menjadi mangsa pembalasan dan dendam... Penghormatan bagi hak-hak yang menjadikan hidup lebih manusiawi harus dengan tegas dijamin; hak-hak perorangan dan hak bagi keluarga-keluarga.<sup>623</sup>

459. Sebelum kunjungan tersebut, pihak berwenang Indonesia telah menahan sejumlah aktivis pemuda untuk mencegah kemungkinan terjadinya demonstrasi selama kunjungan Sri Paus.<sup>624</sup> Berbagai upaya ini terbukti tidak berhasil, dan demonstrasi yang kemudian terjadi menjadi peristiwa penting dalam kegiatan gerakan klandestin pemuda.

460. Ketika Paus Yohanes Paulus II merampungkan misanya yang diperkirakan dihadiri sekitar 100.000 orang di Tasitolu di barat Dili, sekelompok kecil pemuda merentangkan sejumlah spanduk dan meneriakkan slogan yang menyerukan kemerdekaan dan hak asasi manusia. Terjadi beberapa bentrokan dengan aparat keamanan dan polisi Indonesia, yang menjadi peristiwa memalukan bagi Indonesia.

461. Ini merupakan demonstrasi terbuka pertama dalam sebuah kunjungan internasional sejak masa invasi Indonesia. Hal ini semakin memberanikan para pemuda dan mengakibatkan tumbuhnya sejumlah kelompok baru dan mendorong kerja sama di antara mereka. Pemimpin pemuda klandestin Constancio Pinto belakangan menulis:

Tahun 1989 menandakan awal aksi non-kekerasan di kota-kota dan perdesaan. Sebelumnya, walaupun orang-orang terorganisasi dalam kelompok-kelompok kecil, wawasan mereka hanya terbatas pada sel-sel mereka sendiri. Terkadang mereka merasa, "Apakah

hanya kita yang berjuang untuk ini?” Bagaimana dengan yang lain?” Ketika gerakan-gerakan protes mulai terjadi, orang-orang tiba-tiba membuka pikiran dan persepsi mereka: “Bukan hanya kita yang berjuang untuk penentuan nasib sendiri! Yang lain juga!” Selanjutnya semakin mudah bagi kita. Ketika kita mulai mendekati mereka, kita bisa mengatakan bahwa kita sudah melakukan ini, jadi mari kita lakukan ini bersama.<sup>625</sup>

462. Pihak penguasa Indonesia menahan banyak orang pada hari-hari sesudah demonstrasi ini dalam upaya untuk menumpas munculnya tanda resistansi baru ini. Komisi mendengar banyak kesaksian mengenai interogasi dan penyiksaan.<sup>626</sup>

463. Ketika Duta Besar Amerika Serikat John Monjo datang ke Timor-Leste pada Januari 1991 dalam misi pencarian fakta mengenai dugaan penahanan dan penyiksaan yang terjadi setelah demonstrasi pada saat kunjungan Sri Paus, terjadi demonstrasi di luar Hotel Turismo tempat ia menginap. Lusinan anak muda meneriakkan slogan menentang pendudukan Indonesia dan menyerahkan pernyataan tertulis kepada PBB untuk menjalankan referendum mengenai status politik Timor-Leste. Pemimpin pemuda Gregorio Saldanha menceritakan kepada Komisi:

*Demonstrasi [pada saat kunjungan] Duta Besar AS berlangsung selama tiga hari. Hari pertama hanya ada beberapa orang, pada hari kedua semakin banyak yang ikut, dan pada hari ketiga bukan hanya yang muda-muda, tetapi yang tua juga ikut, termasuk ibu-ibu, yang berdoa dengan rosario di jalanan.*<sup>627</sup>

464. Lebih banyak penangkapan dan penyiksaan terjadi setelah serangkaian demonstrasi ini, dan pihak intelijen Indonesia menggandakan upaya mereka untuk mengendalikan gerakan klandestin pemuda.<sup>628</sup>

## Jakarta membuka Timor-Leste

465. Ketika Presiden Soeharto menandatangani keputusan pada Desember 1988 yang memberi Timor-Leste “status yang setara” dengan ke-26 provinsi lainnya di Indonesia, wilayah ini yang sebelumnya benar-benar tertutup bagi pengunjung internasional, kini dibuka.<sup>629</sup> Hal ini memberi kesempatan baru bagi rakyat Timor untuk berhubungan dengan dunia luar. Walaupun berada jauh dari jalur pariwisata Asia, antara 1989 dan 1991, lebih daripada 3.000 pengunjung internasional datang ke Timor-Leste. Ini termasuk wartawan, pekerja LSM, dan aktivis yang berkunjung dengan visa turis, yang membawa informasi masuk dan keluar dan banyak di antaranya menjadi pendukung lantang setelah melihat situasi di Timor-Leste (lihat Bab 7.1.: Hak penentuan nasib sendiri).

466. Pada September 1990, pengacara dan aktivis buruh Australia Robert Domm berkunjung ke Timor-Leste dan dengan bantuan jaringan klandestin berhasil mewawancarai Xanana Gusmão di persembunyiannya di gunung. Wawancara ini



merupakan wawancara langsung pertama dengan pemimpin gerilya. Wawancara ini disiarkan oleh Australian Broadcasting Commission (ABC) dan semakin meningkatkan pamor dan status internasional Xanana Gusmão.<sup>630</sup> Pembalasan militer Indonesia terhadap orang-orang yang turut membantu mengadakan wawancara ini sungguh kejam.

467. Jumlah orang Timor-Leste yang belajar dan bekerja di Indonesia juga meningkat sebagai konsekuensi pembukaan Timor-Leste ini. Hal ini memungkinkan kalangan nasionalis Timor di antara mereka untuk membangun hubungan dengan masyarakat sipil Indonesia dan mancanegara yang bekerja atau tengah berkunjung ke Jakarta, termasuk para wakil media. Hal ini memberi dampak mendalam kepada gerakan hak asasi manusia dan prodemokrasi baik di Indonesia dan Timor-Leste pada 1990-an.<sup>631</sup>

## **Perkembangan internasional menjelang akhir dasawarsa 1980-an**

### **Perjanjian Celah Timor**

468. Pada 11 Desember 1989, Pemerintah Australia dan Indonesia menandatangani perjanjian tentang eksploitasi sumberdaya alam Celah Timor. Hal ini tidak mengejutkan Xanana Gusmão, yang sebelumnya sudah mengkritik Pemerintah Australia dalam berbagai pesannya sejak 1986, ketika ia mengatakan bahwa Australia berupaya mencari solusi mengenai persoalan Timor-Leste untuk mendapatkan akses ke sumberdaya alam di Laut Timor.<sup>632</sup> Organisasi-organisasi hak asasi manusia, para wartawan, dan aktivis di seluruh dunia mengkritik perjanjian tersebut, dan hal ini menjadi sumber pertentangan yang terus-menerus. Upacara penandatanganan dilakukan di atas pesawat yang terbang melintas di atas Laut Timor, dan foto Menteri Luar Negeri Gareth Evans dan Ali Alatas menjadi alat paling disukai gerakan solidaritas internasional dalam upayanya untuk menyorot segala ketidakadilan dalam persoalan Timor-Leste.\*

### **Akhir Perang Dingin**

469. Runtuhnya Tembok Berlin pada 9 November 1989 secara dramatis menandai akhir Perang Dingin. Ini juga mengakhiri konteks geopolitik yang mewarnai konflik sejak masa invasi 1975. Gerakan sosial untuk kebebasan di seluruh dunia juga mendorong semangat banyak warga Timor-Leste. Dogma yang diusung oleh banyak kalangan komunitas internasional bahwa pendudukan dan integrasi Indonesia atas Timor-Leste tidak dapat dicegah, walaupun tidak sah secara hukum, tampak semakin sulit untuk dipertahankan. Dunia sedang mengalami perubahan.

.....  
\* Pada 20 Mei 2002, perjanjian ini digantikan dengan Kesepakatan Laut Timor antara Australia dan Timor-Leste yang baru merdeka.

# Titik-balik

## Tinjauan

470. Gerakan kemerdekaan Timor-Leste berubah pada 1990-an. Fokus bergeser dari kampanye gerilya ke kampanye diplomatik, dengan dukungan kuat dari berbagai kelompok mahasiswa di Timor-Leste dan Indonesia, dan dukungan internasional yang semakin meningkat. Pergeseran ini didukung oleh tiga kejadian penting: Pembantaian Santa Cruz, penangkapan Xanana Gusmão, dan penganugerahan Hadiah Nobel Perdamaian kepada Uskup Belo dan José Ramos-Horta.

471. Pembantaian Santa Cruz pada 12 November 1991 mengubah secara permanen cara dunia memandang pendudukan Timor-Leste oleh Indonesia. Difilmkan oleh media asing yang hadir untuk kunjungan delegasi Parlemen Portugis, serangkaian gambar pembunuhan massal berdarah dingin terhadap anak-anak muda memobilisasi sebuah era baru gerakan solidaritas internasional sehingga tidak mungkin lagi bagi berbagai pemerintah untuk mengabaikan penindasan di Timor-Leste. Film ini juga menunjukkan ketidaksenangan generasi muda Timor-Leste terhadap rezim Indonesia, yang mengklaim telah berhasil merebut hati dan pikiran mereka.

472. Xanana Gusmão tertangkap pada November 1992. Setelah diadili dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, dia tetap memimpin Resistansi dari Penjara Cipinang di Jakarta. Resistansi memperlebar langkah-langkah diplomatik berdasarkan pada keinginan tanpa syarat untuk berdialog dengan Indonesia. Rencana Damai CNRM dilancarkan pada 1993 untuk mendorong usaha ini. Xanana Gusmão semakin diterima oleh masyarakat internasional sebagai figur penting dalam pencarian solusi damai. Setelah Santa Cruz, dialog tripartit yang disponsori PBB antara Portugal dan Indonesia dihidupkan kembali.

473. Selama 1990-an, gerakan mahasiswa di Timor-Leste dan Indonesia menguat dan menjadi amat penting bagi perjuangan kemerdekaan. Di Timor-Leste, para aktivis masih mengalami penindasan, namun berjuang agar suara mereka didengar. Di Indonesia, para mahasiswa Timor-Leste membangun hubungan baik dengan para aktivis hak asasi manusia dan prodemokrasi Indonesia dan melakukan sejumlah kampanye yang efektif untuk meningkatkan kesadaran internasional tentang perjuangan penentuan nasib sendiri yang sedang berlanjut.

474. Pada Oktober 1996, Komite Nobel mengumumkan penganugerahan Hadiah Perdamaian bagi Uskup Belo dan José Ramos-Horta, yang terbukti menjadi suntikan semangat bagi perjuangan penentuan nasib sendiri. Kofi Annan mulai menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PBB pada Januari 1997, dan membawa pendekatan baru untuk menyelesaikan masalah Timor-Leste.

## Pembantaian Santa Cruz, 12 November 1991

475. Pembantaian pemuda Timor-Leste di pemakaman Santa Cruz oleh para serdadu Indonesia pada 12 November 1991 merupakan titik balik dalam perjuangan rakyat

Timor untuk diakui secara internasional. Untuk pertama kali sejak invasi 1975, kebrutalan militer Indonesia terhadap warga sipil terekam dalam film oleh media internasional. Film yang diselundupkan keluar dari wilayah tersebut beberapa hari setelah pembantaian awal, ditayangkan oleh berbagai televisi di seluruh dunia dan menyingkap keadaan sebenarnya tentang pendudukan Indonesia yang selama itu dicoba disembunyikan oleh Jakarta. Penindasan yang keras oleh militer Indonesia terhadap rakyat Timor-Leste biasa ini tidak lagi bisa disangkal.

476. Komisi mendengarkan dari mantan pejabat senior PBB Francesc Vendrell tentang dampak kejadian ini di PBB:

*Insiden Santa Cruz adalah kejadian bersejarah yang penting bagi Timor-Leste dan mengangkat kembali seluruh masalah Timor-Leste ke kancah politik di PBB. Untuk itu kita sebaiknya menganggap mereka yang meninggal di Pemakaman Santa Cruz sebagai pahlawan dalam perjuangan kemerdekaan Timor-Leste.*<sup>633</sup>

477. Kejadian di pemakaman Santa Cruz pada 12 November 1991, dan hari-hari sesudahnya dicakup dalam bab-bab khusus dalam laporan ini. (Lihat Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa; Bab 7.4: Penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penganiayaan ; dan Bab 7.7: Pemerkosaan, perbudakan seksual, dan bentuk-bentuk lain kekerasan seksual). José Ramos-Horta menceritakan kepada Komisi bahwa film yang diambil oleh Max Stahl tentang kejadian ini adalah bukti kunci, dan setelah itu orang tidak dapat lagi menuduhnya mengarang-ngarang cerita mengenai penindasan terhadap rakyat Timor-Leste yang berusaha mengekspresikan harapan mereka untuk penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan.<sup>634</sup>

478. Beberapa minggu sebelum terjadinya pembantaian, para aktivis di Timor-Leste tengah mempersiapkan diri untuk kunjungan delegasi parlemen Portugis.<sup>635</sup> Terdapat desas-desus tentang rencana pertemuan antara delegasi tersebut dengan Xanana Gusmão, dan harapan sangat tinggi. Gerakan klandestin mempersiapkan demonstrasi. Satu kelompok pemuda menulis berbagai spanduk di halaman Gereja Motael di Pantai Dili. Kelompok ini dipantau oleh intelijen Indonesia dan keributan dengan militer Indonesia terjadi pada 28 Oktober dan salah seorang anggotanya, Sebastião Gomes, ditembak mati. Walaupun kunjungan delegasi Portugis dibatalkan, pada 11 November Pelapor Khusus PBB tentang Penyiksaan, Pieter Kooijmans berada di Dili. Gerakan klandestin memutuskan untuk tetap mengadakan demonstrasi untuk mengenang pembunuhan Sebastião Gomes setelah misa pemakaman di Gereja Motael pada pagi hari 12 November 1991. Ada upaya sungguh-sungguh untuk memastikan agar demonstrasi tersebut berlangsung damai dan tertib.<sup>636</sup>

479. Tentara, polisi, dan agen intelijen Indonesia berjaga di sepanjang jalan-jalan kota Dili selama demonstrasi dari Gereja Motael tersebut, sepanjang pantai, dan terus ke selatan ke pemakaman Santa Cruz. Sebagian demonstran berjalan dari Motael, sementara sebagian bergabung di tengah perjalanan dan lebih banyak lagi yang bergabung di pemakaman. Kemudian spanduk dikibarkan yang mengimbau

keterlibatan PBB di Timor-Leste, mendukung Xanana Gusmão dan penentuan nasib sendiri. Keadaan sangat menegangkan, karena keterbukaan seperti ini tidak diperkirakan sebelumnya. Ada berbagai kesaksian, namun yang jelas dalam perjalanan seorang tentara Indonesia ditusuk dan dibawa dalam keadaan cedera. Pernyataan resmi Indonesia tentang kejadian tersebut menjelaskan bahwa hal tersebut memprovokasi kemarahan militer dan berlanjut dengan pembantaian. Tapi, bukti tidak mendukung kesimpulan tersebut. Penembakan dimulai ketika para demonstran tiba di pemakaman Santa Cruz. Tentara menembaki dengan senjata-senjata otomatis ke arah para peserta demonstrasi damai dan tidak bersenjata, yang banyak di antaranya lari ke kompleks pemakaman tersebut. Komisi mendengar kesaksian bahwa para tentara kemudian mengepung pemakaman Santa Cruz, lalu masuk dan membunuh orang-orang, yang tadinya tidak terluka atau hanya terluka ringan, dengan menusuk mereka dengan pisau bayonet.<sup>637</sup> Simplicio Celestino de Deus, seorang yang berhasil selamat dari pembantaian tersebut, mengatakan kepada Komisi:

*Banyak yang terbunuh di dalam pemakaman tapi lebih banyak lagi yang terbunuh di luar pemakaman ketika mereka sedang berlari atau diambil dari tempat persembunyiannya di rumah-rumah dan tempat lain, lalu dibunuh.*<sup>638</sup>

480. Banyak pemuda yang diangkut menggunakan truk, ke rumah sakit militer Wira Husada di Lahane, Dili, ke pusat-pusat interogasi, atau dibunuh begitu saja. Ratusan pemuda lari ke kediaman Uskup Belo mencari perlindungan. Uskup Belo menghubungi Gubernur Mario Carrascalão, dan pergi ke Santa Cruz, tempat dia melihat sejumlah tubuh orang yang terbunuh dan terluka, dan kemudian mengunjungi rumah sakit Wira Husada tempat dia melihat hasil pemukulan yang parah.<sup>639</sup> Komisi mendengarkan kesaksian yang menyebut tentang serangkaian pembunuhan dalam hari-hari sesudahnya, ketika pasukan keamanan Indonesia memburu orang-orang yang mereka curigai terlibat dalam unjuk rasa tersebut.<sup>640</sup> Komisi juga mendengar tentang orang-orang hilang yang belum ditemukan, dan tentang kekerasan seksual terhadap para perempuan muda di Santa Cruz.<sup>641</sup>

481. Setelah pembantaian Santa Cruz, Renetil (*Resistência Nacional dos Estudantes de Timor-Leste*) dan Felectil (*Frente Estudantil Clandestina de Timor-Leste*) melakukan demonstrasi di depan kantor perwakilan PBB di Jakarta.<sup>642</sup>

482. Dalam beberapa hari dan bulan berikutnya, ratusan orang ditahan. Yang saat ini menjadi Kantor Nasional Komisi di Balide ketika itu digunakan untuk menahan banyak orang, dan ruangan yang digunakan sekarang telah diberi nama 'ruangan Santa Cruz' untuk mengenang kejadian tersebut. Sebagian orang diadili dan dijatuhi hukuman penjara untuk waktu yang lama.<sup>643</sup> Komisi mendengarkan kesaksian dari pengacara Indonesia Luhut Pangaribuan dan aktivis Ade Rostina Sitompul, yang berkunjung ke Dili setelah pembantaian tersebut, tentang berbagai usaha dari para pengacara hak asasi manusia Indonesia untuk membela para tahanan dan tentang ketidakadilan proses tersebut.<sup>644</sup>

483. Perkiraan independen menyebut jumlah orang yang terbunuh mencapai 271 orang, dan 250 orang dinyatakan hilang.<sup>645</sup> Ratusan orang ditangkap dan ditahan sehubungan dengan kejadian tersebut. Penyelidikan oleh pihak Indonesia (Komisi Penyelidikan Nasional, KPN) yang ditugaskan untuk menyelidiki pembantaian tersebut gagal memenuhi harapan. Pada awalnya mereka menyebut bahwa 19 orang terbunuh di Santa Cruz, namun dihadapkan dengan kecaman internasional terhadap upaya menutup-nutupi tersebut, angkanya naik menjadi 50. Bukti lebih jauh bahwa kepemimpinan senior ABRI memaklumi pembantaian tersebut terjadi pada 14 November ketika Panglima ABRI Try Sutrisno dikutip mengatakan kepada para lulusan AKABRI bahwa:

Penjahat-penjahat seperti ini harus ditembak, dan kita akan menembak mereka.<sup>646</sup>

484. Komisi melakukan survei di lingkungan di Dili dan secara umum mencatat informasi mengenai pembantaian Santa Cruz melalui proses pengambilan pernyataan. Melalui proses ini, Komisi juga menerima kesaksian tentang pembunuhan dan penghilangan lebih lanjut oleh militer Indonesia terhadap mereka yang dicurigai terlibat demonstrasi, termasuk di distrik-distrik. Misalnya, di Sorolau (Ainaro, Ainaro) empat aktivis klandestin dibunuh oleh tentara yang diidentifikasi sebagai anggota Kopassus dan Milsas Timor.<sup>647</sup> Atas dasar penelitian ini, meski Komisi tidak bisa menentukan secara tepat berapa orang yang masih hilang, Komisi yakin bahwa angka 200 bukan perkiraan yang mengada-ada. Komisi mencatat dalam audiensinya serta kegiatan lainnya bahwa pembantaian Santa Cruz masih merupakan persoalan yang tidak terpecahkan yang sangat penting bagi banyak orang dan keluarga, dan bagi negara ini secara keseluruhan, dan yakin bahwa penyelidikan yang lebih menyeluruh perlu dilakukan (lihat Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa).

## Dampak internasional Santa Cruz

485. Berita pembantaian Santa Cruz menyebar ke seluruh dunia dengan cepat, dan berakibat pada meningkatnya aksi solidaritas secara dramatis. Banyak wartawan asing dan pekerja LSM berkunjung ke Timor-Leste mengharapkan kedatangan misi Portugis. Sejumlah orang tersebut telah menyaksikan pembantaian itu dan berperan penting memberitahu dunia pada beberapa bulan dan tahun berikutnya, termasuk memberi kesaksian pada Komisi Hak Asasi Manusia PBB. José Ramos-Horta mengatakan kepada Komisi bahwa pembantaian tersebut telah memicu Portugal, tempat terjadi serangkaian protes massal dan seruan untuk tindakan PBB. (Lihat Bab 7.1: Hak penentuan nasib sendiri, bagian ‘masyarakat sipil’.)

486. Beberapa negara, khususnya Australia, berusaha mendukung penjelasan pihak Indonesia bahwa ini adalah tindakan yang tidak biasa oleh “oknum” dalam militer Indonesia. Meskipun begitu, pembantaian tersebut dan fokus pada masalah lebih luas tentang pendudukan Indonesia atas Timor-Leste yang dihasilkannya menjadi bencana relasi publik bagi Indonesia. 12 November menjadi tema perjuangan bagi

diaspora Timor dan para aktivis hak asasi manusia di berbagai negara di seluruh dunia hingga 1999, dengan peringatan tahunan yang ditandai dengan berbagai demonstrasi dan hening cipta.<sup>\*</sup>

## Penangkapan Xanana Gusmão

487. Xanana Gusmão ditangkap oleh militer Indonesia pada 20 November 1992 di sebuah rumah di Lahane, Dili.<sup>†</sup> Berita tersebut menyebar dengan cepat ke seluruh Timor-Leste dan dunia. Pada awalnya ia dibawa ke Bali, dan kekhawatiran pertama para pendukung adalah keselamatan fisiknya. Di Dili, orang-orang yang diduga melindungi Xanana Gusmão ditahan dan disiksa dengan kejam.<sup>648</sup> Sebuah kampanye internasional untuk menekan Indonesia agar menjamin keselamatannya mulai dijalankan. Xanana Gusmão ditampilkan dalam sebuah wawancara televisi Indonesia pada 25 November, di mana ia sepertinya menyatakan menolak perjuangan Resistansi. Ia dibawa kembali ke Dili untuk diadili pada Mei 1993, dan pada 17 Mei, dia berdiri untuk membacakan pembelaannya. Hakim pengadilan menghentikannya hanya selang beberapa menit setelah ia mulai membacakan pembelaannya, dengan menyatakan bahwa pembelaannya “tidak relevan”. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan dibawa ke penjara Cipinang di Jakarta yang dijaga ketat (lihat Bab 7.6.: Pengadilan politik). Namun, pembelaan Xanana Gusmão sepanjang dua puluh tujuh halaman diselundupkan ke luar negeri dan disebarluaskan ke dunia internasional. Ia menolak klaim Indonesia atas Timor-Leste dan mengulangi seruan perjuangan penentuan nasib sendiri rakyat Timor-Leste.

488. Penangkapan Xanana Gusmão merupakan pukulan telak bagi pihak Resistansi, dan penguasa Indonesia yakin bahwa itu akan menjadi akhir dari perjuangan kemerdekaan. Tapi, hal tersebut justru menciptakan kondisi bagi dia untuk tampil sebagai seorang pemimpin terhormat dunia, setelah 17 tahun di pegunungan dan hutan-hutan Timor-Leste, sementara ia terus memimpin Resistansi dari sel penjaranya. Xanana Gusmão mengatakan kepada Komisi bahwa ia banyak belajar selama di penjara Cipinang, tempat ia ditahan bersama dengan para tahanan politik Indonesia dari seluruh pelosok Indonesia. Dia memberitahu Komisi bahwa pengalaman tersebut memberinya:

*Kesempatan untuk meraih pengetahuan lebih baik tentang perjuangan rakyat Indonesia untuk demokrasi dan kebebasan. Ini membantu saya untuk mengurangi dan kemudian menghilangkan rasa benci yang terakumulasi di hutan selama 17 tahun. Saya menjadi mengerti persamaan objektif yang menyatukan kita dengan rakyat Indonesia... Pengertian ini memungkinkan saya bahkan untuk berbicara dengan bekas-bekas musuh dan jenderal-jenderal Indonesia.<sup>649</sup>*

<sup>\*</sup> Pada 9 April 2005, Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Kepala Negara pertama yang mengunjungi Perkuburan Santa Cruz, dalam rangka penghargaan dan rekonsiliasi.

<sup>†</sup> Xanana Gusmão ditangkap di rumah Aliança Araújo. Selama bertahun-tahun secara sembunyi-sembunyi ia pergi ke Dili untuk melakukan berbagai pertemuan dalam banyak kesempatan.

## Jaringan klandestin pelajar

### Klandestin di Timor-Leste dan kebangkitan kekuatan paramiliter

489. Selama 1990-an, gerakan klandestin pemuda perkotaan berkembang, dan mengambil risiko besar untuk menyampaikan informasi dan melakukan berbagai demonstrasi ketika para tamu luar negeri datang ke Timor-Leste. Aparat keamanan Indonesia melanjutkan pendekatan tangan-besinya terhadap resistansi pemuda, dan pada 1990-an mengubah strateginya dalam usaha memerangi gerakan yang terus tumbuh ini. Mulai pertengahan dasawarsa 1990-an, perhatian baru diarahkan kepada operasi paramiliter dan intelijen di wilayah ini. Kelompok-kelompok bersenjata yang kemudian dikenal sebagai pasukan “Ninja” merajalela di jalanan Dili pada malam hari, menciptakan suasana ketakutan di kalangan penduduk karena banyak orang yang hilang dalam operasi-operasi rahasia ini.<sup>650</sup> Polisi anti huru-hara, Brimob, tampak hadir di mana-mana dan sangat mengancam, khususnya di Dili tempat demonstrasi mahasiswa sering terjadi.

490. Selama tahun-tahun tersebut terdapat banyak titik-titik rawan yang dapat menimbulkan konfrontasi antara pemuda Timor-Leste dengan pasukan keamanan Indonesia. Agama kadang digunakan untuk memprovokasi kekerasan. Di Remexio (Aileu) pada Juni 1994, seorang serdadu Indonesia datang ke sebuah misa dan menghina Ekaristi. Dua minggu kemudian di Universitas Timor-Timur (UNTIM), ratusan mahasiswa berunjuk rasa, menuntut kemerdekaan.<sup>651</sup> Persaingan antara warga asli Timor-Leste dan pendatang dari Indonesia dapat menyebabkan bentrokan penuh kekerasan. Di Baucau pada Januari 1995, ketegangan antara pendatang dari Sulawesi dengan orang-orang lokal meledak di pasar pusat. Dalam usaha menghentikan kerusuhan tersebut, militer Indonesia menembaki beberapa orang, dan belakangan mengakui bahwa tiga orang tewas.<sup>652</sup> Beberapa hari kemudian, pada 9 Januari 1995, para mahasiswa di UNTIM menandai hari dialog tripartit di Jenewa dengan sebuah unjuk rasa yang menuntut dibebaskannya Xanana Gusmão dan agar PBB menerapkan resolusi-resolusinya tentang Timor-Leste. Orang-orang asing yang berkunjung menyaksikan demonstrasi ini dan penumpasan yang menyusul kemudian, di mana enam belas orang demonstran ditahan dan disiksa.<sup>653</sup>

### Gerakan mahasiswa di Indonesia

491. Hubungan antara kaum nasionalis Timor-Leste dengan para aktivis hak asasi manusia Indonesia mulai terjalin pada dasawarsa 1980-an ketika para tahanan politik Timor ditahan di berbagai penjara di Jawa.<sup>654</sup> Organisasi-organisasi mahasiswa Renetil dan Impettu (Ikatan Mahasiswa, Pemuda, dan Pelajar Timor-Leste), memainkan peran yang semakin penting pada dasawarsa 1990-an dalam mengembangkan dan memperluas hubungan-hubungan ini. Awalnya, para aktivis mahasiswa Timor-Leste menjadi terlibat di gerakan-gerakan protes Indonesia tentang sejumlah masalah seperti Waduk Kedungombo dan persengketaan tanah di

Jawa Tengah pada 1990. Aktivis hak asasi manusia Indonesia Nugroho Katjasungkana menceritakan kepada Komisi mengenai kesibukan para aktivis Indonesia untuk menjatuhkan rezim Soeharto yang korup dan tidak adil pada dasawarsa 1980-an. Dia mengingat keterlibatan orang Timor-Leste dalam tindakan-tindakan ini, dengan mencatat bahwa:

*Keterlibatan orang Timor dalam perjuangan demokrasi di Indonesia mendahului keterlibatan orang Indonesia dalam perjuangan penentuan nasib sendiri Timor-Leste.*<sup>655</sup>

492. Renetil mengembangkan strategi yang disebutnya ‘Indonesianisasi’ konflik tersebut.<sup>656</sup> Para mahasiswa Timor-Leste menjadi aktif dalam gerakan prodemokrasi Indonesia yang mulai tumbuh,<sup>657</sup> dan bendera Timor sering terlihat dalam berbagai demonstrasi yang menyuarakan perubahan di Indonesia pada 1990-an.<sup>658</sup> Sejumlah kelompok Indonesia, yang sebelumnya sibuk dengan agenda prodemokrasinya sendiri dan tidak sadar akan situasi di Timor-Leste, perlahan mulai mengidentifikasi masalah Timor-Leste dengan akar permasalahan mereka sendiri, yakni rezim Orde Baru Soeharto.<sup>659</sup>

493. Kelompok-kelompok Indonesia yang mendukung penentuan nasib sendiri bagi Timor-Leste dibentuk di sejumlah kota di seluruh Jawa, khususnya setelah pembantaian Santa Cruz.<sup>660</sup> Di Jakarta pada 1991, beberapa LSM membentuk Komisi Gabungan Pembela Timor-Leste, yang pada 1998 digantikan oleh Fortilos (Forum Solidaritas Rakyat Timor Lorosae). Pada 1995 di Jakarta, SPRIM (Solidaritas Perjuangan Rakyat Indonesia untuk Maubere) dibentuk dan kemudian pada 1997 Solidamor (Solidaritas untuk Penyelesaian Damai Timor-Leste) dibentuk. Di Kupang pada 1998, para aktivis mahasiswa dan LSM membentuk Forsolidareste (Forum Solidaritas Timor-Leste). Para aktivis Indonesia dan banyak aktivis Timor menghubungkan demokratisasi Indonesia sebagai prakondisi bagi penentuan nasib sendiri Timor-Leste. Wilson B. Nurtias dari kelompok solidaritas Indonesia SPRIM mengatakan bahwa rakyat Indonesia dan Timor-Leste adalah “penumpang dari sebuah kapal, yang sedang menghadapi bajaklaut yang sama.”<sup>661</sup>

494. Pada pertengahan dasawarsa 1990-an para mahasiswa Timor-Leste menggunakan taktik yang menjadikan sejumlah kedutaan asing di Indonesia sebagai benteng. Sudah sejak 1989, para pemuda Timor mencari suaka politik di berbagai kedutaan di Jakarta karena takut terhadap kekerasan oleh pasukan keamanan Indonesia.<sup>662</sup> Pada 1990-an, taktik tersebut digunakan sebagai bagian dari strategi untuk mendapatkan perhatian media tentang perjuangan yang tengah berlangsung untuk menginternasionalkan masalah penentuan nasib sendiri. Yang paling spektakuler yang kemudian dikenal sebagai ‘aksi lompat pagar’ terjadi pada 1994, pada saat KTT para pemimpin regional Asia Pacific Economic Cooperation (APEC). Saat pertemuan APEC dilangsungkan di Bogor, dekat Jakarta, dan media

\* Berbagai universitas terkemuka menjadi basis gerakan kelompok prodemokrasi termasuk FKMJ, (Forum Komunikasi Mahasiswa Jember), SMID (Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi), dan KPRP (Komite Perjuangan Rakyat untuk Perubahan).



dunia sedang berkumpul untuk meliput peristiwa tersebut, 29 orang Timor-Leste melompati pagar Kedutaan AS di Jakarta pada 12 November dan menuntut untuk bertemu dengan Presiden Bill Clinton yang tengah berkunjung. Selama sehari-hari para mahasiswa Timor-Leste yang terkepung tampil di berbagai halaman depan media masa, di Jakarta dan seluruh dunia, dengan tuntutan pembebasan Xanana Gusmão dan penentuan nasib sendiri bagi Timor-Leste. Meskipun mereka tidak bertemu dengan Presiden Clinton, negosiasi berhasil dilakukan dan mereka diberi suaka politik ke Portugal. Ini adalah sebuah prestasi hubungan publik hebat yang diatur oleh Renetil.<sup>663</sup>

495. Aksi lompat pagar di kedutaan lain terjadi di tahun-tahun berikutnya, hingga sejumlah kedutaan di Jakarta mengambil berbagai langkah pengamanan untuk mencegah para mahasiswa Timor-Leste memasuki tempat mereka. Pada November 1995, lima orang memasuki Kedutaan Prancis dan diberi suaka di Portugal.<sup>664</sup> Dan pada 7 Desember 1995, sejumlah pemuda melompat pagar kedutaan Belanda dan Rusia untuk menarik perhatian kepada hari peringatan invasi Indonesia ke Timor-Leste.<sup>665</sup> Sejumlah wawancara yang dilakukan oleh Komisi menunjukkan bahwa ini adalah bagian dari strategi yang dikoordinasikan dengan baik oleh Renetil, yang beroperasi dengan hubungan langsung dengan kepemimpinan Xanana Gusmão di penjara Cipinang.<sup>666</sup>

496. Selama dasawarsa 1990-an, para anggota Renetil bergerak untuk menguasai posisi strategis di organisasi mahasiswa yang diakui Negara, Impettu, yang keanggotaannya adalah wajib bagi semua mahasiswa Timor-Leste. Hal ini memungkinkan para anggota Renetil untuk berorganisasi secara terbuka sebagai anggota Impettu dan pada pertengahan 1990-an para anggota Renetil secara efektif telah menguasai Impettu.<sup>667</sup> Seiring makin besarnya suara yang mengimbau perubahan rezim menjelang akhir dasawarsa 1990-an, cabang-cabang Impettu bersatu dalam sebuah kepemimpinan tunggal, yakni DPP Impettu (Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa, Pemuda, dan Pelajar Timor-Leste), yang dikepalai oleh Wakil Sekretaris Jenderal Renetil.<sup>668</sup>

## Rencana Damai CNRM dan inisiatif diplomatik

497. Pada awal 1990-an CNRM secara aktif berusaha berdialog dengan Indonesia. Dengan dukungan LSM internasional dan berbagai kelompok masyarakat sipil, Kampanye Dialog Timor dilancarkan (lihat Bab 7.1.: Hak penentuan nasib sendiri). Pada 1993, CNRM menawarkan rencana tiga-tahap untuk perdamaian, yang pada dasarnya adalah demiliterisasi Timor-Leste, sebuah periode otonomi transisional, dan pada akhirnya sebuah tindakan penentuan nasib sendiri untuk menentukan status politik permanen wilayah tersebut. Mereka mengajukan Rencana Damai tersebut pertama ke Uni Eropa dan kemudian ke PBB, dan menunjukkan peningkatan signifikan dukungan aktif oleh Portugal. Pemerintah Indonesia menolak rencana tersebut. Meskipun demikian rencana tersebut tetap ditawarkan selama dasawarsa 1990-an sebagai fokus upaya diplomatik CNRM dan tanda keinginan mereka untuk mencari solusi melalui dialog.<sup>669</sup> Sementara itu Portugal memulai lagi pembicaraan

dengan Indonesia pada 1992, setelah menghentikan hubungan pascapembantaian Santa Cruz pada 1991.

498. José Ramos-Horta melanjutkan kampanye diplomatiknya berdasarkan rencana perdamaian ini. Saat Indonesia berada di bawah tekanan yang meningkat menyusul terungkapnya Pembantaian Santa Cruz, dan sebagian kalangan internasional merasa berkepentingan untuk mencapai solusi bagi Timor-Leste, Indonesia tetap berada dalam posisi yang relatif kuat pada awal 1990-an. Portugal dan Indonesia melanjutkan kembali pembicaraan tripartit di bawah dukungan Sekjen PBB. Tapi, Komisi mendengar dari mantan Pejabat Senior PBB Francesc Vendrell bahwa tahun-tahun awal dan pertengahan dasawarsa 1990-an ini adalah masa saat Ramos-Horta harus berjuang keras untuk menghindari solusi diplomatik yang buruk bagi Timor-Leste.<sup>670</sup> Dengan dukungan orang-orang Timor-Leste di luar negeri dan gerakan solidaritas internasional yang makin luas, ia bekerja keras untuk meningkatkan profil internasional pemimpin CNRM, Xanana Gusmão, dan untuk meyakinkan para pemimpin dunia bahwa solusi politik itu mungkin.

### **Kasus pengadilan internasional: Portugal vs Australia, 1991 - 1995**

499. Pada 1991, Portugal mengajukan Australia ke Mahkamah Internasional sehubungan dengan perjanjian Celah Timor yang ditandatangani dengan Indonesia pada 1989. Portugal tidak bisa mengajukan Indonesia ke pengadilan ini, karena Indonesia belum mengakui yurisdiksi Mahkamah tersebut. Keputusannya diumumkan pada 1995, dan meskipun perjanjian tersebut tidak berhasil dibatalkan, kasus tersebut memberikan pernyataan penting dalam mendukung hak Timor-Leste atas penentuan nasib sendiri yang tengah diperjuangkan.<sup>671</sup>

500. Portugal berargumen bahwa Australia telah melanggar hukum internasional dengan membuat perjanjian bersama Indonesia untuk membagi kekayaan alam milik rakyat Timor-Leste. Portugal berkata bahwa hal tersebut melanggar haknya sebagai penguasa pemerintahan dari wilayah yang tak berpemerintahan sendiri tersebut, dan juga hak rakyat Timor-Leste.

501. Karena masalah teknis hukum, sebagian besar hakim mengatakan bahwa mereka tidak bisa mempertimbangkan kasus tersebut. Semua pemasalahan dalam kasus tersebut berkisar seputar legalitas tindakan yang telah dan terus dilakukan Indonesia di Timor-Leste, sehingga mereka berkata bahwa mereka tidak dapat mempertimbangkan kasus tersebut jika Indonesia bukan merupakan salah satu pihak. Tapi, dua orang hakim tidak setuju dengan pandangan ini dan mereka secara tegas memberi pendapat berbeda. Mereka mempertimbangkan pentingnya kasus tersebut dan memberikan berbagai temuan penting tentang kewajiban Negara-negara dalam hubungannya dengan hak penentuan nasib sendiri dalam konteks Timor-Leste. Hakim Weeramantry dan Hakim Skubiszewski keduanya mengakui hak atas penentuan nasib sendiri rakyat Timor. Mereka juga memperingatkan bahwa Negara-negara yang ikut dalam perjanjian seperti itu memiliki kewajiban untuk

berkonsultasi dengan rakyat Timor-Leste dan kekuasaan pemerintahan yang sah (Hakim Skubiszewski), dan bahwa perjanjian seperti itu mungkin telah melanggar berbagai kewajiban yang dilimpahkan kepada mereka oleh prinsip-prinsip umum hukum internasional (Hakim Weeramantry).<sup>672</sup>

## Hadiah Nobel Perdamaian, 1996

502. Penganugerahan Hadiah Nobel Perdamaian 1996 bagi Uskup Belo dan José Ramos-Horta adalah momen pendorong baru bagi perjuangan rakyat Timor-Leste untuk diakui secara internasional. Penghargaan tersebut memberi pengakuan bagi perjuangan kedua orang tersebut, yang pengalamannya selama masa pendudukan Indonesia sangat berbeda tetapi visi tentang identitas rakyat Timor dan harga diri manusia tetap sama. Penghargaan tersebut juga menandingi usaha bertahun-tahun yang dilakukan penguasa Indonesia untuk mengecilkan kredibilitas kedua orang tersebut, dan membuka pintu para pemimpin dunia kepada mereka dan perjuangan Timor-Leste.

503. Pidato penganugerahan 1996 membicarakan tentang konflik tersebut:

Konflik di Timor-Leste telah disebut sebagai “konflik yang terlupakan”. ... Jarang sekali sinisme politik dunia didemonstrasikan lebih jelas dari ini. ... Dua orang penerima Hadiah Perdamaian tahun ini, Carlos Felipe Ximenes Belo dan José Ramos-Horta, telah bekerja tanpa lelah, dan dengan pengorbanan pribadi yang besar, bagi rakyat mereka yang tertindas. Dalam kondisi-kondisi yang sangat sulit, mereka telah mempertahankan rasa kemanusiaan dan kepercayaan mereka akan masa depan.<sup>673</sup>

504. Dalam pidato penerimaannya, Uskup Belo membicarakan mengenai harapannya bahwa hadiah tersebut dapat memajukan perjuangan Timor-Leste:

Saya sangat percaya bahwa saya berada di sini dasarnya sebagai suara dari rakyat Timor-Leste yang tidak bersuara, yang spiritnya bersama saya hari ini, jika tidak secara langsung. Dan apa yang diinginkan rakyat adalah perdamaian, diakhirinya kekerasan, dan dihormatinya hak asasi mereka. Adalah harapan saya yang paling besar bahwa Hadiah Nobel untuk perdamaian tahun 1996 ini dapat membantu mencapai tujuan-tujuan tersebut.<sup>674</sup>

505. Dengan Anugerah Nobel Perdamaian yang diterimanya, José Ramos-Horta memulai kampanye diplomatik yang ambisius. Pada awal 1997, ia berkunjung ke Afrika Selatan. Pada Juli tahun itu, ketika Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela bertemu dengan Presiden Soeharto di Jakarta, ia meminta bertemu dengan Xanana Gusmão yang sedang dipenjara. Presiden Soeharto awalnya menolak permintaan tersebut, dengan mengatakan bahwa Xanana Gusmão hanyalah seorang kriminal. Ketika Presiden Afrika Selatan mengingatkan Soeharto bahwa orang lain pun dulu

berkata begitu tentangnya, Soeharto kemudian memperbolehkan. Berita tentang pertemuan pribadi tersebut sampai ke tangan pers dunia, dan meningkatkan profil Xanana Gusmão sebagai seorang negarawan untuk perdamaian.

506. Di Timor-Leste, Anugerah Nobel Perdamaian tersebut menunjukkan kepada rakyat Timor bahwa mereka tidak dilupakan oleh masyarakat internasional, dan meningkatkan harapan untuk bantuan internasional dalam pencarian solusi bagi konflik tersebut.

## Perserikatan Bangsa-Bangsa

507. Di pertengahan dasawarsa 1990-an terjadi perubahan personalia yang bertanggung jawab atas masalah Timor-Leste di markas PBB New York. Francesc Vendrell pertama-tama menjadi Direktur untuk Asia Tenggara dan Pasifik dan kemudian Asia dan Pasifik. Pejabat yang bertanggung jawab atas urusan Timor-Leste adalah Tamrat Samuel. Vendrell dan Samuel terus menjadi Pejabat Sekretariat Utama yang menangani Timor-Leste sampai Jajak Pendapat 1999. Francesc Vendrell mengatakan kepada Komisi tentang dilanjutkannya dialog tripartit dan tentang usaha-usaha dia dan Samuel untuk melibatkan Timor-Leste dalam diskusi tentang masa depan kawasan tersebut.<sup>675</sup> Pada Januari 1994, Samuel bertemu dengan Xanana Gusmão di penjara Cipinang, begitupun Vendrell pada Desember tahun itu. Pada 1994, mereka juga berkunjung ke Timor-Leste untuk bertemu langsung dengan orang-orang Timor dari semua latar belakang politik, juga dengan para pendeta dan biarawati Katolik. Dia mengenang:

*Salah satu hal yang sangat menggugah saya adalah besarnya kepercayaan semua orang pada PBB. ... perasaan tanggung jawab yang menurut saya dirasakan oleh saya dan Tamrat, bahwa kami harus melakukan yang terbaik atas nama rakyat yang hanya dapat mengandalkan dukungan PBB.*<sup>676</sup>

508. Vendrell mengatakan kepada Komisi tentang kesulitan PBB ketika rakyat Timor-Leste sendiri berada di luar proses diskusi dialog tripartit itu. Kendala ini memicu inisiatif bagi pembentukan Dialog Menyeluruh Antar-Timor (All-Inclusive intra-East Timorese Dialogue, AIETD). Gagasannya, seperti yang dijelaskan Vendrell pada Komisi, adalah:

*[Jika] mereka [rakyat Timor-Leste] bersatu dan mereka dibiarkan sendiri, mereka mungkin saja menyadari bahwa mereka memiliki banyak persamaan dan mungkin mencapai sebuah usulan bersama tentang Timor-Leste.*<sup>677</sup>

509. Indonesia menyetujui mekanisme ini, meskipun Indonesia bersikeras bahwa AIETD tidak diperbolehkan untuk membahas status politik Timor-Leste. AIETD yang pertama diadakan di Austria pada Juni 1995, dengan peserta dari semua latar belakang politik. Uskup Belo juga menghadiri pertemuan tersebut, meskipun

Xanana Gusmão tetap berada di penjara di Jakarta. Tiga pertemuan AIETD setelah itu diadakan, pada Maret 1996, Oktober 1997, dan Oktober 1998. Meskipun berbagai pertemuan tersebut tidak menghasilkan rencana praktis ataupun hasil-hasil resmi, tapi untuk pertama kalinya sejak 1975, PBB terlibat dalam menyatukan rakyat Timor-Leste dari semua latar belakang untuk bersama-sama membahas berbagai perbedaan mereka dan mencari landasan yang sama.

510. Kofi Annan mulai menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PBB pada Januari 1997, dan membawa serta fokus baru bagi masalah Timor-Leste. Pada Februari 1997, dia mengangkat diplomat Pakistan Duta Besar Jamsheed Marker sebagai Utusan Pribadinya untuk Timor (PRSG). Ini sangat memperkuat kerja Francesc Vendrell dan Tamrat Samuel di Sekretariat PBB, dan tim ini mengunjungi Portugal, Indonesia, dan Timor-Leste pada masa yang makin bergolak antara 1997 sampai 1998.

## Dari Reformasi ke pengumuman tentang Jajak Pendapat

### Tinjauan

511. Berbagai peristiwa 1997 bergerak dengan cepat. Krisis finansial Asia melanda Indonesia pada akhir 1997. Krisis ini menguak korupsi dan kebobrokan yang mewabah dalam rezim Soeharto. Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia diguncang oleh berbagai demonstrasi rakyat yang menuntut turunnya Soeharto dan reformasi besar-besaran yang dikenal sebagai Reformasi. Para mahasiswa Timor memainkan peran aktif dalam berbagai demonstrasi ini. Pada 21 Mei 1998 Soeharto mengundurkan diri, dan Wakil Presiden B.J. Habibie mengambil alih tugas sebagai Presiden.

512. Sementara itu, aktivitas diplomatik sangat sibuk sejak Hadiah Nobel 1996, dan Xanana Gusmão menerima kunjungan para tamu yang mewakili para pemimpin dunia dan sejumlah organisasi penting secara reguler di sel penjaranya di Jakarta. Pihak Resistansi melakukan reorganisasi dan menyelenggarakan konferensi penting di Peniche pada April 1998 di mana CNRM diubah menjadi *Conselho Nacional da Resistência Timorense* (Dewan Nasional Resistensi Rakyat Timor, CNRT). Ini dimaksud untuk memperluas basis gerakan kemerdekaan.

513. Di Timor-Leste, suasana Reformasi, dan melonggarnya kontrol militer membuka jalan untuk diskusi terbuka tentang status politik wilayah tersebut untuk pertama kalinya dalam masa pendudukan Indonesia. Tuntutan referendum untuk membiarkan rakyat Timor-Leste menentukan nasib mereka meraih momentum di paruh kedua 1998. Tapi, pada akhir tahun tersebut militer Indonesia telah melakukan reposisi. Penarikan pasukan ternyata hanya tipuan, dan pada akhir 1998 semakin banyak bukti yang menunjukkan strategi TNI untuk membentuk, mempersenjatai, dan mendanai para milisi prointegrasi di seluruh negeri untuk mencegah segala upaya benar-benar untuk penentuan nasib sendiri.

514. Dengan penggantian Soeharto, PBB dan masyarakat internasional meningkatkan tekanannya pada Indonesia untuk mencapai solusi untuk masalah Timor-Leste. Diskusi antara Portugal dan Indonesia awalnya berkisar seputar paket otonomi khusus bagi Timor-Leste, dengan pandangan berbeda-beda apakah ini merupakan sebuah solusi atau hanya satu tahap dalam sebuah proses penentuan nasib sendiri. Pada Januari 1999, Presiden B.J. Habibie mengejutkan banyak orang dalam pemerintahannya sendiri ketika dia menyatakan bahwa Indonesia akan memperbolehkan rakyat Timor-Leste untuk menentukan sendiri masa depan mereka, termasuk kemerdekaan jika itu memang adalah kehendak mereka. Negosiasi antara Portugal dan Indonesia diarahkan untuk merampungkan mekanisme untuk melaksanakan pilihan ini.

515. Pada bulan-bulan awal 1999, ketika negosiasi-negosiasi tengah berlangsung, strategi TNI mengembangkan milisi bersenjata dipercepat. Situasi politik yang relatif terbuka pada pertengahan 1998 telah hilang, dan kekerasan selalu menjadi ancaman terhadap para pendukung prokemerdekaan. Pembantaian di Dili dan Liquiçá oleh milisi yang didukung TNI mengejutkan masyarakat internasional, seiring dengan makin banyaknya rakyat Timor-Leste yang mengungsi karena takut akan kekerasan.

516. Negosiasi antara Portugal dan Indonesia mencapai puncaknya dengan apa yang dikenal sebagai Kesepakatan 5 Mei, yang menetapkan modalitas untuk suatu Jajak Pendapat yang memungkinkan rakyat Timor-Leste untuk menerima atau menolak paket otonomi khusus; penolakan akan mengarah pada kemerdekaan. Indonesia menolak untuk menyerahkan tanggung jawab keamanan selama pemungutan suara dan tanggung jawab ini diberikan pada polisi Indonesia. Masyarakat internasional merasa bahwa mereka tidak mampu mendesak Indonesia lebih jauh lagi tentang masalah ini, meskipun terdapat makin banyak bukti tentang keterlibatan militer dan polisi Indonesia dalam kekerasan terhadap para pendukung prokemerdekaan.

517. Pemungutan suara ditetapkan dilakukan pada Agustus 1999, untuk memungkinkan parlemen Indonesia mengesahkan hasilnya pada September.

## Jatuhnya Soeharto

518. Pada Mei 1997, alat politik pemerintahan Orde Baru, Golkar, terpilih kembali dalam pemilihan parlemen nasional, dengan memenangi 74% jumlah suara.<sup>678</sup> Tidak lama setelah itu krisis keuangan Asia muncul di Thailand pada Juli 1997 dan segera menjangkiti Indonesia. Bersamaan dengan jatuhnya Rupiah ke tingkat 18.000 terhadap dollar AS pada Januari 1998 dan bantuan IMF, Soeharto dipilih kembali sebagai Presiden oleh MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) pada Maret 1998. Ketika Soeharto membentuk kabinet yang dianggap banyak orang didominasi oleh para kroni rezim tersebut, protes rakyat semakin berkobar. Tuntutan penggantian rezim oleh berbagai gerakan prodemokrasi mendapat dukungan dari kalangan elite Indonesia. Pada Mei, Ketua MPR Harmoko menanggapi secara positif tuntutan kaum reformis, sementara Panglima ABRI Jenderal Wiranto memberikan

dukungan militer untuk reformasi. Dua orang pemimpin oposisi yang muncul, Megawati Sukarnoputri dan Amien Rais, memberi indikasi kesiapan mereka untuk mengambilalih kekuasaan.

519. Tekanan rakyat meledak selama Mei, yang menyebabkan jatuhnya Soeharto. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia kemudian menemukan bahwa kekerasan dalam periode ini telah didalangi, dengan mengidentifikasi 20 orang anggota militer dan sipil di belakang berbagai kerusakan tersebut.<sup>679</sup> Pada 18 Mei, dengan dikuasainya DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) oleh para mahasiswa, Soeharto kehilangan sebagian besar dukungannya. DPR meminta pengunduran dirinya. Pada malam hari 20 Mei, Jenderal Wiranto juga mengimbau pengunduran diri Soeharto, dan pada 21 Mei, Soeharto turun dari kursi kepresidenan.

520. Peristiwa ini memberikan seorang kepala negara baru bagi Indonesia, Presiden B.J. Habibie, yang segera menerapkan sejumlah reformasi yang luarbiasa. Slogan utama pada periode tersebut adalah "Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme", yang sering disebut KKN, dan yang mampu merangkum apa yang dianggap penyakit yang paling mewabah dari rezim Soeharto. Masyarakat sipil juga mengemukakan berbagai masalah lain seperti kebutuhan untuk menentang militerisme dan diakhirinya impunitas pihak militer. Agenda reformasi memengaruhi Indonesia dalam banyak cara. Komposisi elite politik Indonesia berubah, dan meskipun banyak politikus yang terkait rezim Soeharto selamat dari kejatuhan Soeharto, sejumlah politikus baru meningkat pamornya. Hal ini mendatangkan pluralisme ke perdebatan politik yang sudah lama ditekan selama kekuasaan Soeharto. Selain itu, kebebasan media dan debat publik yang kuat memastikan sejumlah besar masalah dapat dibahas secara terbuka dan banyak dari permasalahan tersebut mendapat perhatian politik yang berujung pada perubahan.

521. Presiden B.J. Habibie dianggap oleh banyak pihak hanya sebagai presiden sementara. Sebagai wakil presiden di masa Soeharto, dia dianggap sangat dekat dengan rezim Orde Baru, meskipun dia tidak memiliki pengikut yang besar atau basis kekuatan di dalam rezim tersebut. Sebagai presiden, dia harus hati-hati melangkah di antara militer yang kuat dan beberapa kelompok agama utama seperti sejumlah organisasi Islam sambil merundingkan langkah reformasi. Di kabinetnya, dia mempertahankan Wiranto sebagai panglima militer maupun menteri pertahanan.

522. Banyak pihak di kalangan masyarakat internasional menganggap ide status politik Timor-Leste sebagai masalah yang tertutup selagi Presiden Soeharto masih berkuasa. Dengan kepergiannya, dan dalam iklim Reformasi di Indonesia, tiba-tiba tercipta ruang untuk diskusi.

523. Gagasan tentang status otonomi khusus bagi Timor-Leste bukanlah hal yang baru, tapi pada zaman Soeharto tidak pernah dipertimbangkan secara serius. Barangkali tidak ada yang lebih tahu tentang hal ini daripada Menteri Luar Negeri yang sudah lama menjabat, Ali Alatas, tentang berbagai masalah bagi negaranya di arena internasional yang ditimbulkan oleh posisi Indonesia dan berbagai tindakannya di Timor-Leste. Dia sebelumnya telah mengusulkan

perubahan status Timor-Leste dalam Indonesia, dengan menawarkan otonomi khusus bagi Timor-Leste sebagai satu kemungkinan solusi. Soeharto menolak ide-idenya.<sup>680</sup> Pada 6 Juni 1998, Komite Politik dan Keamanan dalam kabinet ini mendukung sebuah usulan untuk “otonomi luas” bagi Timor-Leste, dengan syarat masyarakat internasional mengakui kedaulatan Indonesia. Menteri Luar Negeri Alatas membawa usulan ini kepada Presiden B.J. Habibie pada 8 Juni dan kepada Kabinet pada 9 Juni. Presiden Habibie secara tak terduga mengumumkannya kepada media internasional pada 9 Juni.

524. Dalam waktu sembilan bulan, ide ini untuk menawarkan paket otonomi khusus pada Timor-Leste akan berubah menjadi penerimaan resmi Indonesia untuk melakukan tindakan penentuan nasib sendiri oleh rakyat Timor-Leste.

## CNRT dan kampanye diplomatik

525. Pintu menjadi terbuka bagi José Ramos-Horta di seluruh dunia setelah dia dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian, dan dia bekerja keras memanfaatkan hal ini untuk menggalang dukungan bagi kampanye diplomatik bagi kemerdekaan. Hal tersebut juga memberikan dimensi internasional pada pembelaan lantang Uskup Belo terhadap hak asasi rakyat Timor-Leste, dan sangat meningkatkan perhatian internasional kepada Timor-Leste.

526. Setelah pertemuan pada 1997 dengan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela, status Xanana Gusmão di mata dunia menguat dan ini diikuti prosesi para tamu penting ke sel penjara Cipinangnya selama 1998 dan 1999.

527. Pada April 1998, pihak Resistansi meraih tonggak sejarah dalam perkembangannya, ketika para pemimpin partai politik besar Timor-Leste dan juga berbagai organisasi nonpolitik, termasuk Gereja Katolik, bertemu di Peniche di Portugal dan membentuk CNRT. Xanana Gusmão terpilih sebagai Presiden, dengan Ramos-Horta sebagai Wakil Presiden dan utusan pribadinya. Pembentukan CNRT melengkapi perkembangan bertahap Resistansi dari sebuah partai tunggal dengan dasar Fretilin menjadi organisasi dengan basis luas termasuk para mahasiswa, organisasi nonpemerintah, dan kalangan Gereja Katolik.

528. Pembentukan CNRT memosisikan Resistansi dengan baik untuk menghadapi kejadian-kejadian yang berkembang cepat di kawasan Asia Tenggara dan Indonesia khususnya. [Lihat Bab 7.1.: Hak penentuan nasib sendiri.]

## Dampak Reformasi di Timor-Leste

529. Pengumuman Presiden Habibie tentang usulan status baru bagi Timor-Leste, ditambah optimisme tuntutan untuk reformasi, menciptakan dukungan kuat publik untuk kemerdekaan di wilayah tersebut.

530. Pada 9 Juni di Dili, pertemuan publik untuk membahas masa depan wilayah tersebut dihadiri oleh banyak perwakilan aspirasi Timor-Leste, termasuk para



komandan gerilya dan prointegrasi yang setia, para pemimpin CNRT, dan anggota masyarakat sipil dan gerakan klandestin. Juga hadir pada kesempatan itu gubernur prointegrasi, Abilio Soares, yang pidatonya tentang usulan status khusus bagi Timor-Leste tidak diterima dengan baik. Banyak menganggap ini sebagai tindakan setengah hati, dan pertemuan tersebut sepakat untuk menuntut diadakannya referendum supaya rakyat dapat menentukan masa depan mereka.

531. Pada 23 Juni, demonstrasi besar di Dili secara terbuka menyerukan kemerdekaan. Khawatir akan kemungkinan konsekuensi yang terjadi karena sikap sangat gamblang tersebut, Uskup Belo dan jajaran kepemimpinan CNRT segera mengimbau sikap yang lebih lunak, dan mengulang kembali keinginan mereka untuk sebuah periode transisi sebelum membahas kemerdekaan.

532. Sejak Juni, berbagai kelompok mahasiswa<sup>\*</sup> secara berani memimpin debat publik yang mulai menggeliat, dan memimpin serangkaian demonstrasi besar baik di Timor-Leste maupun di Indonesia. Pada Juli, Dewan Solidaritas Mahasiswa Timor-Leste (ETSSC) yang baru saja dibentuk mengerahkan para mahasiswa untuk melakukan perjalanan ke seluruh Timor-Leste untuk melakukan sejumlah dialog tingkat desa, menjelaskan perkembangan terakhir, dan mendengarkan masukan dari masyarakat. Tanpa memedulikan penentangan militer di beberapa daerah, mereka mendengar beragam tuntutan kuat untuk penarikan mundur TNI dan untuk sebuah referendum.<sup>681</sup>

533. Pada September, dua uskup Timor-Leste mengadakan pertemuan di Dare untuk mendorong rekonsiliasi antara para tokoh Timor yang mendukung integrasi dengan Indonesia dan yang mengupayakan kemerdekaan. CNRT secara terbuka menyatakan diri sebagai lembaga publik yang sah pada September, dan menempati sebuah kantor di Dili Selatan. Demonstrasi mahasiswa yang memprotes kehadiran militer dan menuntut referendum terjadi secara rutin selama periode ini. Keterbukaan ini tidak pernah terjadi sebelumnya selama masa pendudukan Indonesia. TNI di Timor-Leste tetap waspada, tetapi menahan diri dan tidak bertindak langsung melawan demonstrasi ini.

## Munculnya para milisi

534. Menjelang akhir 1998, ketegangan mulai meningkat dan keterbukaan dari beberapa bulan sebelumnya mulai mendapat tekanan. Pada awal Oktober, sebuah kelompok pro-otonomi Timor menekan gubernur untuk memaksa pengunduran diri para pegawai negeri yang bergabung dalam Forsarepetil (Forum Sarjana Pro-Referendum dan Pembangunan Timor-Leste), sebuah kelompok proreferendum kalangan akademisi dan pegawai negeri. Hal ini memicu demonstrasi besar selama dua hari di Dili menentang tindakan gubernur. Basilio Araújo, seorang juru bicara prointegrasi, kemudian menggambarkan pada Komisi latar belakang keputusan ini:

<sup>\*</sup> Renetil dan Impettu di Indonesia; ETSSC di Timor-Leste.

*Kami sekitar 20 orang, kami yang berasal dari grup itu, dan kami menyebut diri kami prointegrasi ... Kami bertemu dengan Pak Abilio [Soares, Gubernur] dan mendesaknya untuk membuat sebuah dekrit mengenai orang-orang yang telah memihak pada kemerdekaan: "Cukup, tanggalkan pakaian sebagai seorang pejuang kemerdekaan, dan jangan bekerja pada pemerintah, jangan bermuka dua." Tn. Abilio membuat dekrit tersebut, tapi ditekan oleh pemerintah pusat dan kemudian menariknya kembali.<sup>682</sup>*

535. Pada 8 Agustus, penarikan mundur pasukan yang sangat dipublikasikan menyumbang pada persepsi bahwa situasi di Timor-Leste telah membaik. Indonesia mengklaim bahwa mereka hanya memiliki kurang dari 6.000 serdadu di wilayah tersebut, dan konon telah menarik mundur pasukan khususnya (Kopassus), yang kerap dituduh bertanggung jawab atas berbagai pelanggaran berat hak asasi manusia.<sup>683</sup> Tapi, dokumen militer yang dibocorkan pada bulan itu membuktikan sebaliknya. Jumlah pasukan masih 21.540 orang, termasuk Kopassus, dan bukannya melakukan pengurangan pasukan besar-besaran seperti yang dilaporkan ke media, kekuatan militer TNI justru perlahan meningkat.<sup>684</sup> Dokumen-dokumen tersebut menunjukkan bahwa TNI mengembangkan jaringan kelompok paramiliter di sebagian besar distrik. Dua belas tim ditempatkan di sebelas distrik, yang sebagian besar di antaranya terkait dengan unit Kopassus. Kelompok-kelompok ini membentuk basis milisi yang dengan cepat direkrut dalam bulan-bulan berikutnya.<sup>685</sup> Pihak militer kemudian menyangkal bahwa para milisi tersebut adalah bagian integral struktur formalnya.

536. Tanda pertama perilaku yang akan datang dari para anggota paramiliter ini, yang belakangan akan dikenal sebagai milisi, terjadi pada November ketika ABRI dan anggota milisi Ablai, yang banyak di antaranya adalah pegawai negeri pemerintah daerah setempat, membalas serangan Falintil atas Koramil di Alas, Distrik Manufahi. Pada 9 November, Falintil membunuh tiga serdadu, menculik 13 prajurit, dan mencuri 36 senapan. Masyarakat mencari perlindungan ke Gereja Alas sesudah serangan tersebut. Pada 13 November ABRI membalas serangan Falintil dan wilayah tersebut diliputi kekerasan.<sup>686</sup> Pihak militer Indonesia dan milisi memasuki gereja tersebut, dan memukuli mereka yang berada di dalam. Militer menahan penduduk sipil di seluruh wilayah itu untuk mencari Falintil. Komisi menerima kesaksian tentang penyiksaan dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh ABRI terhadap mereka yang ditahan.<sup>687</sup> Paling tidak, delapan orang terbunuh oleh ABRI atau milisi. Suatu penyelidikan ICRC menemukan sembilan orang yang tewas dalam serangan balasan tersebut, termasuk dua orang prajurit yang dibunuh oleh Falintil.<sup>688</sup> Pembunuhan tersebut, yang terjadi setelah berbulan-bulan keterbukaan yang agak canggung, menimbulkan sejumlah protes keras di Dili. Setelah para mahasiswa menduduki gedung parlemen, tim pencari fakta segera dibentuk dari berbagai kelompok masyarakat sipil, tetapi tidak diperbolehkan masuk ke wilayah tersebut oleh pihak militer.<sup>689</sup> Wartawan internasional melakukan perjalanan ke Alas dan mengamati anggota nonmiliter bersenjata menguasai daerah tersebut, yang mengindikasikan permulaan peran milisi sebagai garis terdepan kampanye militer melawan kemerdekaan.<sup>690</sup>

537. Kelompok milisi telah lama hadir di Timor-Leste. Tetapi, milisi yang muncul pada akhir 1998 dan awal 1999 sebagian besar terkait langsung dengan TNI bukan karena kesetiaan mereka pada *liurai* seperti kebiasaan sebelumnya.<sup>691</sup> Sebagian dari para milisi baru ini memiliki akar dalam pasukan bantuan militer<sup>†</sup> yang dibina TNI sejak akhir 1970-an. Sebagian besar pemimpin milisi memiliki hubungan luas dengan Kopassus melalui beragam kelompok paramiliter lama di Timor-Leste.<sup>692</sup> Contohnya adalah Joanico Césario Belo, yang menjadi komandan milisi di wilayah Timur, Sektor A,<sup>‡</sup> yang sudah menjadi tenaga bantuan operasi (TBO) sejak masa kecilnya.<sup>693</sup> Komandan Sektor B yang terkenal kejam, Eurico Guterres, memiliki latar belakang dalam paramiliter Gadapaksi pada dasawarsa 1990-an. Yang lainnya, Joni Marques dari Tim Alfa di Lautém, memiliki hubungan lama dengan Kopassus. TNI merekrut secara luas pada 1998 dan 1999 untuk membangun kepemimpinan inti ini.<sup>694</sup> Anggota milisi lainnya termasuk anggota TNI dari Timor Barat dan Timor-Leste.<sup>695</sup> Sebagian bergabung karena terpaksa. Yang lainnya ikut karena motivasi uang dan prestise (lihat Bagian 9: Rekonsiliasi komunitas).

538. Peran militer dalam membentuk milisi-milisi ini segera menjadi jelas. Indikator penting adalah bahwa pejabat penting militer di Timor-Leste menghadiri acara pelantikan kelompok milisi.<sup>696</sup> Para pemimpin milisi sendiri menyatakan bahwa TNI telah mempersenjatai mereka.<sup>697</sup> Dan yang lebih meyakinkan lagi, para pejabat senior TNI<sup>§</sup> sendiri menyatakan bahwa mereka mempersenjatai berbagai kelompok tersebut.<sup>698</sup> Jenderal Wiranto, Panglima ABRI mengakui keterlibatan TNI dalam milisi.<sup>699</sup> Hubungan ini mulai terlihat jelas sejak akhir 1998 ketika berbagai kelompok milisi mulai muncul. Dokumen militer belakangan memberikan bukti meyakinkan tentang pasokan senjata oleh TNI kepada milisi,<sup>700</sup> dan Tomas Gonçalves yang belakangan membelot dari milisi membenarkan keterlibatan unit intelijen Kopassus dan pejabat militer penting seperti Tono Suratman, Sudrajat, dan Damiri dalam perekrutan.<sup>701</sup>

539. Cepatnya para milisi tersebut muncul dan konsistennya perilaku mereka menunjukkan adanya kekuatan organisasi besar di belakang mereka.<sup>702</sup> Ini adalah TNI, yang dalam iklim keterbukaan Reformasi membutuhkan pasukan yang dapat menyerang gerakan prokemerdekaan Timor-Leste yang terorganisasi dengan rapi. Salah satu alasan milisi lebih banyak dipersenjatai dengan senjata buatan sendiri adalah untuk menciptakan kesan bahwa milisi adalah gerakan spontan berbasis rakyat. Ini adalah muslihat besar, karena TNI memberikan senjata otomatis setidaknya bagi sebagian kelompok milisi serta berbagai dukungan logistik dan keamanan.<sup>703</sup>

\* Milisi di beberapa wilayah dibentuk dengan pengaruh keluarga *liurai*, contohnya keluarga Carvalho di Cassa.

† Ini termasuk Hansip, Ratih, Wanra, Kamra (Polisi), serta TBO – Tenaga Bantuan Operasi.

‡ Pembagian sektor (A, B, dan C) mengikuti komando sektor tempur di bawah Kopassus yang membagi Timor-Leste menjadi tiga wilayah.

§ Komandan Kodim Supardi pada 28 Januari, dan Komandan Kodam IX Adam Damiri pada 7 Februari. Mereka berdua diketahui mempersenjatai para milisi.

## Xanana Gusmão mengimbau toleransi

540. Pada akhir 1998, meskipun meningkatnya ketegangan akibat kekerasan di Alas, penduduk Dili terus menyatakan secara terbuka hasrat mereka akan perubahan. Pada 12 November, warga melakukan demonstrasi publik pertama untuk mengenang pembantaian Santa Cruz. Malam itu, rakyat diam di rumah, dan menghiasi semua jalan kota Dili dengan ribuan lilin untuk mengenang orang yang meninggal. Pesan Tahun Baru Xanana Gusmão terfokus pada ide CNRT tentang otonomi transisional, dan mengusulkan menahan diri bagi suara-suara yang menginginkan referendum langsung. Dan yang paling penting, dia mengimbau toleransi menghadapi berbagai tekanan yang meningkat:

Mari kita berkonsentrasi untuk ... meraih: diakhirinya kekerasan militer; sebuah iklim toleransi politik yang lebih besar. Pendirian ini bertujuan untuk mencegah lebih banyak korban Timor-Leste yang jatuh. Para penjajah mempersenjatai rakyat Timor-Leste dan menyuruh mereka untuk membunuh saudara-saudari mereka sendiri. Daripada membiarkan diri kita terhanyut dalam rasa marah, mari kita berusaha berpikir dalam sikap politik yang seimbang. Jika tidak, kita akan terjebak dalam permainan para penjajah; kita akan memperkuat argumen Indonesia bahwa Timor-Leste terancam sebuah perang saudara baru.<sup>704</sup>

## Negosiasi tentang paket otonomi

541. Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas berkunjung ke New York untuk menyampaikan gagasan otonomi kepada Sekjen PBB Kofi Annan pada 18 Juni. Pada Agustus, Indonesia menyetujui pembicaraan tiga pihak bersama PBB dan Portugal tentang otonomi khusus. Utusan Pribadi Sekjen PBB untuk Timor-Leste, Duta Besar Jamsheed Marker, mengelola proses negosiasi, yang bertujuan mencapai kesepakatan tentang isi dari paket otonomi khusus sebelum akhir tahun. Hambatan utama tampaknya adalah pertanyaan apakah otonomi yang diusulkan merupakan tahap menuju penentuan nasib sendiri atau sebuah tujuan akhir. Portugal memandang otonomi sebagai sebuah transisi menuju tindakan penentuan nasib sendiri, yang sesuai dengan rencana yang dibentuk sejak lama oleh CNRM/CNRT. Indonesia memiliki perspektif berbeda, dan memandang otonomi sebagai konsesi akhir, yang akan menutup persoalan tentang Timor-Leste di arena internasional. Pembicaraan awal mengkhususkan pada isi dari paket otonomi tersebut bukan pada pertanyaan politik tersebut.

542. Dubes Jamsheed Marker juga berusaha melibatkan para pemimpin Timor-Leste ke dalam proses tersebut. Sejak penunjukannya pada 1997, Marker telah berusaha memperluas cakupan keterlibatan PBB lebih dari pembicaraan tiga arah dengan Portugal dan Indonesia. AIETD adalah hasil dari maksud ini, dan Marker telah mengembangkan hubungan kerja dengan para pemimpin utama Timor. PBB melakukan konsultasi antara lain dengan Xanana Gusmão, José Ramos-Horta,

Uskup Belo, dan Uskup Nascimento tentang perincian cetak-biru untuk otonomi yang dibuat untuk PBB.

543. Ketegangan di dalam Timor-Leste meningkat pada akhir 1998. Di satu sisi ada dorongan rakyat untuk membuka dialog politik dan sebuah referendum; di sisi lain ada strategi militer untuk mengembangkan milisi prointegrasi bersenjata untuk menghancurkan gerakan referendum. Hal tersebut menjadi semakin jelas bagi pemerintah utama internasional yang terlibat dalam masalah ini bahwa paket otonomi saja tidak akan menyelesaikan masalah.

544. Pada 19 Desember 1998, Perdana Menteri Australia John Howard menulis surat kepada Presiden B.J. Habibie, sebuah dokumen yang dianggap sangat memengaruhi pemikiran Presiden Habibie. Sementara Perdana Menteri Howard menegaskan kembali bahwa Australia lebih suka Timor-Leste menjadi bagian dari Indonesia, dia memberi contoh Kesepakatan Matignon mengenai Kaledonia Baru Prancis dan menganjurkan bahwa sebaiknya Indonesia mempertimbangkan untuk menerapkan otonomi khusus dengan “mekanisme kajian” yang akan secara efektif menjadi referendum beberapa tahun ke depan:

Untuk itu, layak dipertimbangkan, sebuah cara menanggapi keinginan rakyat Timor untuk sebuah tindakan penentuan nasib sendiri dengan cara yang menghindari sebuah keputusan awal dan akhir mengenai tentang masa depan provinsi tersebut.<sup>705</sup>

545. Saran untuk menghindari solusi yang cepat dan final bagi Timor-Leste ini sejalan dengan PBB, yang menganjurkan periode otonomi lima sampai tujuh tahun. Tapi, ini dipandang oleh Indonesia sebagai perubahan kebijakan yang besar oleh pendukung internasionalnya yang paling setia, sebuah perubahan yang mengakui hak rakyat Timor untuk penentuan nasib sendiri. Ketika cerita tentang surat Australia tersebut sampai ke publik, Menteri Luar Negeri Australia Alexander Downer menjelaskan pada 12 Januari bahwa “kami lebih suka sebuah susunan di mana Timor-Leste memiliki tingkat otonomi yang tinggi tapi tetap menjadi bagian Indonesia secara hukum.”<sup>706</sup>

546. Presiden Habibie dan Menteri Luar Negeri Ali Alatas sangat menginginkan resolusi mengenai negosiasi dengan Portugal sebelum pemilihan parlemen Indonesia yang akan dilakukan pada 7 Juni 1999, yang dapat menghasilkan pengangkatan Presiden baru.\* Surat PM Howard yang asli dikirim ke Presiden Habibie pada 21 Januari. Presiden Habibie menulis sebuah catatan di pinggir yang berisi:

Jika, setelah 22 tahun, rakyat Timor-Leste tidak dapat merasakan persatuan dengan rakyat Indonesia ... akan layak dan bijaksana, jika dengan sebuah keputusan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Provinsi ke 27 Timor-Leste dapat dengan terhormat dipisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>707</sup>

.....  
\* Pada saat itu, Presiden Republik Indonesia tidak langsung dipilih oleh rakyat, tetapi diangkat oleh Majelis Perwakilan Rakyat (MPR).

547. Terdapat banyak spekulasi tentang penyebab perubahan Habibie, dan mungkin terlalu dibesar-besarkan surat Perdana Menteri dan perubahan kebijakan Australia. Tapi, jelas bahwa Presiden Habibie menyadari sempitnya kesempatan untuk memberi dampak terhadap masalah yang tak berkesudahan ini, dan bahwa dia lebih terbuka pada pengaruh pandangan liberal internasional dibanding para pendahulunya dan banyak orang yang masih memegang posisi kuat di Indonesia.

548. Pada 27 Januari 1999, sebelum kerangka otonomi khusus dirampungkan, Indonesia mengumumkan perubahan kebijakannya: Indonesia akan memberi Timor-Leste kesempatan untuk menolak tawaran otonomi khusus tersebut. Jika rakyat Timor-Leste menolak paket otonomi tersebut, Indonesia akan mencabut undang-undangnya pada Juni 1976 yang memasukkan wilayah tersebut ke dalam Republik Indonesia. Empat orang jenderal TNI yang kuat masuk dalam keanggotaan Kabinet Presiden Habibie. Adalah sesuatu yang luarbiasa bahwa mereka menerima kebijakan ini, dan penjelasan yang mungkin adalah bahwa mereka yakin mayoritas pemilih Timor-Leste dapat diyakinkan untuk memilih melanjutkan integrasi dengan Indonesia.<sup>708</sup>

549. Sebuah pemungutan suara yang jelas akan memberi penyelesaian yang pasti pada permasalahan Timor-Leste, sebuah masalah yang telah mengganggu Indonesia sejak lama. Jenderal Wiranto mengusulkan tidak perlu ada periode transisi, pendapat yang juga dimiliki oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas, yang mengatakan:

Kenapa Indonesia harus membayar, jika Timor-Leste tidak menghendaknya? Jika tawaran kami tidak bisa diterima, saya tidak akan memberi alternatif di mana mereka meminta 5 - 10 tahun dan kemudian referendum.<sup>709</sup>

550. Xanana Gusmão dipindahkan dari penjara Cipinang yang dijaga ketat ke tahanan rumah pada 10 Februari 1999. Sementara masih ditahan dan dibatasi ruang geraknya untuk memainkan peran penuh untuk mencari solusi bagi Timor-Leste, dia menerima banyak pengunjung Timor-Leste, Indonesia, dan tamu terkemuka internasional di rumah yang menjadi tempat tahanan di Salemba, Jakarta, dan semakin diakui sebagai seorang negarawan internasional. Sementara itu masih terdapat tahanan dan narapidana politik Timor-Leste lainnya yang mendekam di berbagai penjara di Indonesia.

## Peningkatan teror milisi

551. Beberapa minggu sebelum pengumuman 27 Januari oleh Presiden Habibie di Jakarta, lebih daripada 4.000 orang mengungsi di Katedral Suai yang belum selesai dibangun.<sup>710</sup> Mereka berusaha menghindari dari kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok milisi yang berbasis di Cassa (Ainaro), yang kemudian dikenal sebagai milisi Mahidi (Mati Hidup dengan Indonesia). Kelompok yang dipimpin oleh Cancio Carvalho, anak dari keluarga *liurai* lokal, melaksanakan sejumlah besar pembunuhan kejam yang diarahkan pada para pemimpin CNRT lokal. Salah satu

yang paling kejam, pada 23 Januari 1999, di kota kecil Galitas, seorang perempuan hamil dibunuh, dan bayinya digorok keluar dari perutnya.<sup>711</sup> Tiga hari kemudian, CNRT menulis kepada Sekjen PBB:

Memang benar bahwa banyak dari “pasukan-pasukan” ini adalah warga Timor-Leste. Yang tragis bagi kami adalah bahwa ini digambarkan sebagai perang saudara oleh pihak otoritas—rakyat Timor melawan rakyat Timor. Kami menyadari adanya perbedaan pendapat dalam masyarakat kami. Kami juga menyadari mengapa perbedaan ini ada. Kami tidak memiliki sumberdaya ataupun kekuatan untuk mengendalikan apa yang sedang terjadi.<sup>712</sup>

552. Menyusul pembunuhan di Mauboke (Maubara, Liquicá) dan menjelang pembunuhan di Gereja Liquicá, pada 5 April Xanana Gusmão mengeluarkan pernyataan kemarahan yang merestui ‘perlawanan rakyat’ melawan kekerasan milisi yang terus berlanjut.<sup>713</sup> Hari berikutnya milisi membunuh sebanyak enam puluh orang pengungsi di Gereja Liquicá, dengan kehadiran dan keterlibatan militer dan Brimob. (Lihat Bab 7.2: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa, bagian tahun 1999) Pejabat senior TNI terlihat di gereja tersebut persis sebelum kejadian tersebut.<sup>714</sup> Milisi kemudian membunuh tujuh orang di Cailaco (Bobonaro) pada 12 April. Setelah demonstrasi massal di depan kantor Gubernur di Dili tempat pemimpin Aitarak Eurico Guterres memerintahkan milisi untuk “menangkap dan membunuh (para pendukung kemerdekaan) bila perlu,”<sup>715</sup> milisi mengamuk di Dili. Di rumah Manuel Carrascalão mereka membunuh 12 orang.<sup>716</sup> Menteri Luar Negeri Irlandia David Andrews sedang melakukan pertemuan di Dili dengan Komandan Militer Timor Timur Kolonel Tono Suratman pada waktu itu, dan melihat dia menerima laporan tentang pembantaian itu dan tidak melakukan apa-apa. Milisi juga menyerang dan membakar sejumlah kantor satu-satunya surat kabar di wilayah tersebut, *Suara Timor Timur* (STT). Meskipun secara tradisional STT menjadi juru bicara kebijakan Indonesia, pada akhir 1998 dan awal 1999, STT memberikan liputan yang relatif netral tentang kekerasan yang meningkat dan dukungan terhadap referendum, yang membuat marah para pendukung setia integrasi. Di tengah-tengah meningkatnya kekerasan pada April, para pastor dan suster Gereja Katolik mengadakan parade perdamaian dengan membawa lilin menyalakan sepanjang jalan-jalan di Dili dalam upaya menenangkan situasi.

553. Dalam tiap kasus ini pembunuhan-pembunuhan tersebut mempunyai unsur yang sama yaitu dukungan langsung dan keterlibatan militer, pelakunya adalah milisi, sasarannya adalah para pendukung kemerdekaan, dan pembuangan mayat secara sistematis oleh militer yang menyulitkan penghitungan jumlah kematian yang pasti. Pola-pola ini sangat menunjukkan keterlibatan TNI dalam melaksanakan operasi.<sup>717</sup> Kekerasan ini dirancang untuk menciptakan ilusi sebuah konflik antara rakyat Timor-Leste bersenjata. Pembantaian Liquicá dan Dili kemudian dijelaskan oleh Kolonel Tono Suratman terjadi karena diprovokasi oleh serangkaian tembakan dari kalangan pendukung kemerdekaan.<sup>718</sup> Tapi, penyelidikan menunjukkan bahwa tidak ada kejadian di mana para korban memiliki senjata.<sup>719</sup>

554. Pada 20 April, Jenderal Wiranto terbang ke Dili untuk mengawasi para pemimpin kemerdekaan dan otonomi Timor-Leste menandatangani perjanjian perdamaian untuk menghentikan kekerasan. Ini menutupi fakta bahwa kekerasan tersebut adalah pembunuhan orang-orang sipil tidak bersenjata yang sedang mencari perlindungan, dan samasekali bukan konflik antara dua kelompok bersenjata. Komisi Perdamaian dan Stabilitas (KPS) dibentuk, di mana di dalamnya juga terdapat pihak militer, polisi, dan pemerintahan sipil.<sup>720</sup> Wakil CNRT dan Falintil juga dilibatkan.

## Kesepakatan 5 Mei

555. PBB menyerahkan proposal berisi rencana otonomi pada Februari 1999, yang disebut SARET (Special Autonomous Region of East Timor). Indonesia akan tetap mengendalikan masalah luar negeri, matauang, pertahanan, dan keuangan, sementara East Timorese Regional Council akan memiliki wewenang luas dalam membuat undang-undang dan mengendalikan polisi dan pengadilan. TNI hanya akan digunakan untuk pertahanan eksternal, selain itu akan ditempatkan di barak-barak.

556. Pada Maret, Indonesia memutuskan pemungutan suara langsung. Indonesia menginginkan keputusan tersebut tidak dapat disangkal dan final. Pemungutan suara akan disebut 'Jajak Pendapat', menghindari penggunaan kata referendum yang menyatakan secara tidak langsung penentuan nasib sendiri dan pilihan berdaulat bagi rakyat Timor-Leste, yang menurut Indonesia telah terjadi melalui petisi Pemerintahan Sementara Timor Timur (PSTT) pada 1976, tentang integrasi dan Undang-Undang No. 7/1976, tentang integrasi Timor-Leste ke Indonesia sebagai provinsi ke-27.

557. Dengan makin memburuknya situasi keamanan, dialog yang disponsori PBB antara Portugal dan Indonesia pada 22 April membahas sejumlah masalah keamanan untuk melucuti senjata milisi, mengurangi jumlah anggota TNI, membatasi Falintil di barak-barak, dan penetapan polisi sipil. Tetapi Menteri Luar Negeri Ali Alatas menolak untuk menyetujui hal-hal spesifik.<sup>721</sup> Baik Amerika Serikat maupun Australia memberitahu Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal, Jamsheed Marker, untuk tidak membahayakan negosiasi dengan penekanan yang terlalu besar pada keamanan.<sup>722</sup>

558. Pada 5 Mei Indonesia dan Portugal menandatangani sejumlah persetujuan tentang implementasi pemungutan suara. Indonesia menginginkan hasil sebelum Rapat MPR pada September agar dapat disahkan dalam undang-undang Indonesia. Tanggal yang disetujui adalah 8 Agustus. Hal ini memberikan jadwal ketat dan kesempatan yang terbatas. Kata-kata yang disetujui tentang pemungutan suara meminta rakyat Timor apakah mereka menerima atau menolak otonomi khusus yang ditawarkan bagi Timor-Leste dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perjanjian tersebut menekankan "sebuah pemungutan suara yang langsung, rahasia, dan umum" (pasal 1), dan bahwa "tanggung jawab Pemerintah Indonesia untuk menjaga perdamaian dan keamanan ... sehingga sebuah referendum dapat berjalan dalam suasana yang bebas intimidasi, kekerasan atau campur tangan dari



kedua belah pihak” (pasal 3). Persetujuan ini mendefinisikan suatu periode interim sesudah pemungutan suara, dengan kehadiran PBB yang mencukupi di Timor-Leste. Pedoman SARET merupakan bagian dari perjanjian tersebut, di mana PBB bertanggung jawab untuk menjalankan kampanye informasi tentang pedoman-pedoman perjanjian tersebut. Baik Indonesia maupun Portugal dilarang untuk berkampanye untuk opsi apapun.

## Pengaturan keamanan dalam Kesepakatan 5 Mei

559. Kesepakatan 5 Mei gagal mendefinisikan tanggung jawab keamanan secara memadai. Polisi Indonesia secara formal diberi tanggung jawab untuk keamanan. Polisi baru saja dipisahkan dari militer, dan masih berada di bawah komando Jenderal Wiranto, Menteri Pertahanan. Perjanjian tersebut mengalokasikan 300 orang polisi sipil internasional tak bersenjata untuk mendukung sejumlah tim elektoral PBB, dan kemudian ditambah dengan 50 orang perwira penghubung, yang dianggap lebih layak untuk berhubungan dengan TNI.

560. Kesepakatan tersebut menuntut “kenetralan absolut TNI,” tetapi gagal memaksa TNI mengurangi jumlahnya atau melucuti senjatanya. Mereka menyatakan, secara samar, bahwa KPS yang baru dibentuk bertanggung jawab untuk “peletakan senjata.”<sup>723</sup> José Ramos-Horta, menyadari kekurangan pengaturan keamanannya, tidak menghadiri penandatanganan kesepakatan tersebut. Dia sebelumnya telah memperingatkan PBB, dalam sebuah surat pada Kofi Annan, bahwa Timor-Leste tidak bisa merasa aman “dengan ‘pengamanan’ yang disediakan oleh tentara dan kelompok kriminal yang sama yang telah mengubah negara ini menjadi neraka.”<sup>724</sup> PBB bukannya tidak menyadari bahaya dari pengaturan keamanan ini, dan Sekretaris Jenderal menulis ke Indonesia menyampaikan sejumlah kekhawatiran. Dia menunjukkan kesiapannya untuk membatalkan pemungutan suara jika keamanan tak dapat memadai. Tapi, surat ini tidak resmi dan syarat-syaratnya tidak disetujui oleh Indonesia. Hal ini melemahkan PBB selama proses tersebut. Ian Martin, Wakil Khusus Sekretaris Jenderal, kemudian menulis bahwa meski dengan susunan keamanan yang lebih ketat pun “PBB masih akan menghadapi dilema yang akan muncul: apakah melanjutkan atau tidak dalam kondisi-kondisi keamanan yang jelas-jelas melanggar perjanjian Indonesia.”<sup>725</sup>

561. Pada 5 Mei, Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letnan Jenderal Johny Lumintang mengirim telegram ke komando Daerah Militer Bali (Kodam IX Udayana) meminta dilakukannya persiapan rencana evakuasi bagi Timor-Leste. Ini menghasilkan rencana pasca-pemungutan-suara pihak polisi dan militer untuk, antara lain, mengevakuasi hampir seperempat juta orang dari Timor-Leste.\* Rencana tersebut menunjukkan antipati TNI terhadap beragam aktor masyarakat sipil, termasuk para pemimpin kemerdekaan dan para mahasiswa, Gereja, pengamat internasional, dan

\* Rencana-rencana operasional mencakup Operasi Cabut [yang gagal mencapai tujuannya]; Operasi Wira Dharma 99 yang dilaksanakan oleh Korem, dan Operasi Hanoin Lorosae II yang dilaksanakan oleh Polisi. [Koleksi dokumen Yayasan HAK].

PBB, yang jelas bertentangan dengan netralitas yang diwajibkan oleh Kesepakatan 5 Mei. Baik polisi maupun TNI tidak memberi tahu PBB tentang adanya rencana ini sampai beberapa saat menjelang pemungutan suara.<sup>726</sup>

## Jajak Pendapat

### Tinjauan

562. Staf PBB mulai mendarat di Timor-Leste pada akhir Mei 1999, untuk membentuk Misi Perserikatan Bangsa di Timor-Leste (UNAMET). Selama Juni, staf elektoral internasional UNAMET, polisi sipil, dan pejabat penghubung militer ditempatkan di ketigabelas kabupaten di wilayah tersebut. Hanya ada waktu kurang dari empat bulan untuk menghadapi Jajak Pendapat.

563. Tingkat tindak kekerasan yang meningkat pada April, menjadi agak mereda dengan kedatangan staf PBB dan semakin banyaknya kehadiran rombongan media massa luar negeri dan pengamat Jajak Pendapat. Meski demikian, mereka yang bertanggung jawab terhadap pembantaian pada April masih berkeliaran dan ketegangan masih tinggi. Kelompok militan di seluruh wilayah masih didukung oleh militer dan polisi Indonesia dan ada upaya untuk mengesahkan keberadaan mereka dalam sistem pemerintahan militer Indonesia.

564. Upaya nyata untuk mendamaikan perwakilan yang prokemerdekaan dan pro-otonomi oleh tokoh-tokoh Timor-Leste, gagal membuahkan hasil, sebagian penyebabnya karena upaya tersebut tidak menyinggung peran TNI dalam tindak kekerasan yang terjadi. Pasukan Falintil sendiri masuk ke barak-barak mereka. Sebaliknya, pasukan TNI dan milisi pro-otonomi tidak dikembalikan ke barak. Pelucutan senjata para milisi sebelum Jajak Pendapat lebih bersifat seremonial ketimbang sungguh-sungguh.

565. UNAMET menunda dimulainya pendaftaran pemilih atas alasan keamanan dalam Juni, dan Ian Martin terbang ke Jakarta untuk membicarakan masalah ini dengan Panglima Besar TNI, Jenderal Wiranto. Pendaftaran pemilih pun dilaksanakan, dan dalam waktu 22 hari sudah terdaftar sebanyak 451.792 pemilih.<sup>727</sup>

566. Hampir 40.000 orang mengungsi akibat tindak kekerasan yang terjadi sebelum kedatangan UNAMET, dan karena intimidasi milisi, pengungsian terus berlanjut hingga beberapa minggu menjelang pemilihan. Kebanyakan para pengungsi berasal dari barat Kabupaten Bobonaro, Covalima, dan Liquiçá. Sebagian pengungsi lari ke Timor Barat sebelum Jajak Pendapat. Dalam situasi yang tegang dan kadang-kadang diwarnai kekerasan tersebut kampanye umumnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kelompok pro-otonomi menggelar sejumlah rapat akbar. Sedang pendukung prokemerdekaan hanya sekali mengadakan rapat akbar, di ibukota pada hari terakhir masa kampanye.

567. Pada awalnya dijadwalkan pada 8 Agustus, Jajak Pendapat diundurkan ke 30 Agustus. Pada hari Jajak Pendapat itu, para pemilih telah memadati semua tempat

pemungutan suara di seluruh wilayah jauh sebelum jam dimulainya pemungutan suara. Hal yang luarbiasa, sebanyak 98,6 persen pemilih terdaftar mendatangi tempat pemungutan suara. Setelah memberikan suara, para pemilih bergegas kembali ke rumah, mencerminkan betapa tegangnya situasi saat itu.

568. Suara dibawa ke Dili untuk dihitung. Di sejumlah tempat, kekerasan terhadap staf PBB dan pendukung prokemerdekaan terjadi menjelang berakhirnya hari pemilihan. Selama hari-hari setelah Jajak Pendapat, serangan yang dilakukan oleh milisi pro-otonomi semakin meningkat. Di tengah ancaman tindak kekerasan, UNAMET mengumumkan hasil Jajak Pendapat pada pagi hari 4 September. Sebanyak 78,5 persen pemilih secara tegas menolak usulan otonomi khusus dalam wadah Republik Indonesia, dan hanya 21,5 persen yang memilih otonomi khusus.

## Penempatan UNAMET

569. Petugas PBB mendarat di Timor-Leste beberapa saat setelah penandatanganan Kesepakatan 5 Mei untuk menilai situasi dan bantuan yang dibutuhkan misi pemilihan. Staf UNAMET mulai bekerja pada akhir Mei, dan pada 4 Juni bendera PBB dikibarkan di kantor PBB di Dili. Staf UNAMET berdatangan selama Juni, terdiri atas petugas pemilihan sipil, polisi sipil tak bersenjata, dan perwira-penghubung militer dari negara-negara di seluruh dunia.\* Petugas warga Timor yang berjumlah sekitar 4.000 pada hari pemungutan memainkan peran penting sebagai petugas penerjemah, administrasi, dan logistik, serta staf pendukung dalam kegiatan pendaftaran dan pemungutan suara. Mereka bekerja di bawah pimpinan Ian Martin yang merangkap jabatan sebagai Wakil Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk Jajak Pendapat di Timor dan Ketua Misi PBB untuk Timor (UNAMET).† Jajak Pendapat pada awalnya ditetapkan pada 8 Agustus, sehingga jadwal pelaksanaannya menjadi sangat ketat.

## Komisi Pemilihan

570. Kesepakatan 5 Mei menetapkan adanya Komisi Pemilihan yang independen. Sekretaris Jenderal PBB menunjuk tiga ahli internasional terkemuka untuk Komisi

.....  
\* Personel internasional UNAMET terdiri atas tim pemilihan yang bermarkas di Dili dan delapan petugas regional yang dijabat oleh 28 staf profesional dan sekitar 500 sukarelawan PBB, 275 orang polisi, 15 pejabat politik, 9 petugas informasi umum, 271 staf administrasi dan staf pendukung, dan 16 petugas keamanan, semuanya berasal dari lebih daripada 70 negara. Sebelumnya yang tidak termasuk dalam misi adalah sebanyak 50 perwira penghubung-militer yang diikutkan pada Juni, setelah pengakuan internasional terhadap peran utama TNI dan pentingnya upaya untuk memengaruhi mereka. [Lihat Martin, *Self Determination In East Timor*, hal. 38 - 39 dan hal. 41- 42.]

† Ian Martin telah bekerja untuk PBB dan organisasi internasional lainnya pada sejumlah jabatan senior dari 1985 sampai 1999. Ia adalah Sekretaris Jenderal Amnesty International 1986 - 1992, dan sebelumnya menjabat sebagai Ketua Departemen Peneliti Kawasan Asia Pasifik di organisasi tersebut. Ian Martin memberi kesaksian kepada Komisi mengenai periode UNAMET pada acara dengar pendapat nasional mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional, tanggal 15 -17 Maret 2003.

tersebut.\* Komisi tersebut benar-benar independen dari UNAMET dan PBB di New York, dan bertanggung jawab untuk memastikan setiap tahap Jajak Pendapat tersebut. Komisi juga merupakan wasit terakhir atas semua keluhan atau tentangan terhadap proses tersebut.

571. Anggota komisi tiba di Dili sesaat setelah dimulainya masa pendaftaran dan terus mengamati setiap fase proses Jajak Pendapat.

## Pilihan

572. Pertanyaan yang diajukan kepada orang Timor dalam kertas suara dibagi menjadi dua bagian, di mana pemilih diminta untuk memilih satu opsi. Pilihan didasarkan pada penerimaan atau penolakan terhadap tawaran paket otonomi khusus, yang didasarkan pada Wilayah Otonomi Khusus yang diusulkan atau dikenal dengan nama SARET. Kertas suara berbunyi:

“Apakah Anda menerima tawaran otonomi khusus untuk Timor-Leste dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia?” atau  
“Apakah Anda menolak tawaran otonomi khusus untuk Timor-Leste, yang akan mengakibatkan Timor-Leste berpisah dari Indonesia?”

573. Indonesia dan Portugal dilarang keras oleh Kesepakatan 5 Mei untuk mendukung salah satu opsi tersebut. Mandat UNAMET meliputi kewajiban untuk memberikan penjelasan umum kepada rakyat Timor-Leste tentang perincian tawaran otonomi khusus tersebut. Hal ini dilakukan melalui televisi, radio, dan selebaran.<sup>728</sup>

## Koordinasi pemerintah Indonesia untuk Jajak Pendapat

574. Indonesia membentuk Satuan Tugas Pelaksanaan Penentuan Pendapat di Timor Timur (Satgas P3TT), yang bertanggung jawab terhadap Menteri Koordinasi Bidang Politik dan Keamanan di Jakarta. Pihak militer dalam Satuan Tugas ini diwakili oleh Jenderal Zacky Anwar Makarim, pejabat TNI paling senior di Timor-Leste selama Jajak Pendapat. Satuan Tugas ini adalah penghubung pertama bagi UNAMET, yang stafnya mengadakan rapat hampir tiap hari dengan anggota Satuan Tugas.<sup>729</sup>

## Kehadiran masyarakat internasional di Timor-Leste

575. Dengan kehadiran PBB di Timor-Leste, masyarakat internasional mengalir deras ke wilayah yang selama ini merupakan kawasan tertutup bagi mereka. Rombongan media massa internasional meliput persiapan Jajak Pendapat, dan wakil surat kabar dan jurnal internasional terkemuka juga berada di sana. UNAMET memberikan izin kepada sekitar 600 wartawan dalam Jajak Pendapat tersebut.<sup>730</sup>

.....  
\* Hakim Johann Kriegler (Ketua Komisi Pemilihan Afrika Selatan) yang memimpin Komisi, Pat Bradley (Pejabat Pemilihan untuk Irlandia Utara), dan Bong-Suk Sohn (Ketua Komisi Pemilihan Nasional Republik Korea Selatan).

576. Sejumlah pemerintah negara-negara asing kunci melakukan pemantauan diplomatik ketat atas situasi di Timor-Leste selama periode UNAMET tersebut. Amerika Serikat membentuk cabang konsulat dari Kedutaan Besarnya di Jakarta dan delegasi Kongres Amerika mengunjungi Timor-Leste bulan Agustus. Australia khususnya menempatkan staf konsulatnya dalam jumlah yang besar di Dili.

577. Portugal dan Indonesia mengirim tim pemantau yang masing-masing berjumlah sekitar 50 anggota, yang berkeliling di seluruh kawasan selama pendaftaran, kampanye, dan persiapan terakhir menjelang pemilihan.<sup>731</sup> Mereka mengawasi pada hari Jajak Pendapat di sejumlah tempat pemungutan suara di seluruh wilayah termasuk penghitungan suara yang dilakukan di Dili. Selain pemantau resmi dari Portugal dan Indonesia tersebut, UNAMET menyiapkan sekitar 2.300 pemantau resmi, yang mengharuskan mereka untuk mematuhi peraturan tata tertib yang memastikan kenetralan mereka. Hampir 500 pemantau internasional datang bersama delegasi pemerintah mereka, seperti dari Australia, Brasil, Kanada, Cile, Irlandia, Selandia Baru, Spanyol, dan Uni Eropa. Selain itu, hadir dalam jumlah besar wakil organisasi masyarakat sipil dan organisasi nonpemerintah baik dari dunia internasional, Indonesia, maupun Timor. Dua LSM, yakni Carter Center dan IFET (Federasi Internasional untuk Timor), membentuk berbagai tim pemantau di tingkat kabupaten.<sup>732</sup>

578. Kehadiran masyarakat internasional ini belum pernah terjadi dalam sejarah Timor-Leste. Selama masa 25 tahun kehadiran Indonesia di sana, tidak dapat dibayangkan bahwa kawasan tersebut akan begitu terbuka bagi masyarakat internasional. Setelah berbulan-bulan terjadi tindak kekerasan berdarah terhadap masyarakat sipil hingga menjelang Kesepakatan 5 Mei, ketika nyaris tidak ada masyarakat internasional di Timor-Leste, keberadaan masyarakat internasional di seluruh kawasan tersebut memastikan tingkat pemantauan yang mungkin berperan besar terhadap berkurangnya serangan yang dilakukan oleh milisi atau TNI.

## Pemantau dari Timor-Leste dan Indonesia

579. UNAMET memberikan izin bagi sekitar 1.700 pemantau dari LSM Timor-Leste dan Indonesia untuk mengawasi Jajak Pendapat. Banyak di antara mereka berasal dari organisasi mahasiswa dan aktivis, tapi mereka semua harus mematuhi tata tertib UNAMET untuk pemantau resmi untuk menjamin kenetralan mereka.<sup>733</sup> UNAMET mengizinkan CNRT dan UNIF (Front Bersama untuk Otonomi Timor-Timur) untuk menunjuk pemantau, yang dikenal sebagai wakil partai, untuk mengawasi Jajak Pendapat dan penghitungan suara.

## Pengamanan untuk Jajak Pendapat

580. Situasi keamanan yang rawan di seluruh wilayah tetap menjadi ancaman yang paling besar bagi proses Jajak Pendapat. Meski operasi militer besar oleh militer Indonesia dan milisi tidak mungkin terjadi tanpa diketahui masyarakat internasional, militer Indonesia tidak melucuti senjata milisi ataupun melarang kehadiran mereka

yang menakutkan di tengah masyarakat. Setelah pembantaian massal pada April di Gereja Liquiçá dan di rumah Manuel Carrascalão di Dili, tidak ada upaya untuk menyelidiki dan menahan mereka yang bertanggung jawab. Tiadanya sanksi hukum atas tindak kejahatan yang terjadi di akhir 1998 dan awal 1999 masih tetap berlangsung, meskipun PBB dan masyarakat internasional hadir di sana.

581. Kesepakatan 5 Mei memberikan tanggung jawab formal kepada polisi Indonesia untuk memastikan keamanan selama Jajak Pendapat. Pengaturan ini ternyata sangat tidak memadai. Masalah kelembagaan utamanya adalah status subordinasi Polri terhadap TNI. Meski terdapat pemisahan kelembagaan antara komando TNI dan Polri sejak April 1999, keduanya masih di bawah kendali Menteri Pertahanan, Jenderal Wiranto. Ada budaya yang berakar kuat perihal dominasi TNI terhadap Polri dalam berbagai masalah operasional. Keberadaan TNI dalam jumlah besar di seluruh wilayah Timor-Leste hingga ke tingkat masyarakat, memberikan tekanan yang luarbiasa kepada polisi dalam kapasitasnya untuk bertindak secara mandiri sebagai penjaga hukum dan ketertiban.

582. Polisi secara konsisten terbukti tidak mampu atau tidak berminat mengendalikan kekerasan yang terjadi selama Jajak Pendapat. Alasan lain atas hal ini adalah kehadiran sejumlah besar polisi anti huru-hara, yakni Brimob, yang terkenal dengan kekejaman dan pelanggaran hak asasi manusia yang mereka lakukan di Timor-Leste selama dasawarsa 1990-an. Jumlah polisi, khususnya jumlah Brimob, selama periode Jajak Pendapat bertambah hingga menjadi 8.000 personel.<sup>734</sup> Polisi secara umum gagal merespons secara cepat kekerasan yang dilaporkan atau menahan para pelaku kejahatan. Hal ini memberi keleluasaan kepada mereka yang melakukan tindak kekerasan dan intimidasi di seluruh wilayah. Contoh nyata hal ini adalah ketika polisi gagal bertindak terhadap serangan yang dilakukan oleh milisi Besi Merah Putih (BMP) terhadap konvoi kemanusiaan pada 4 Juli, meski secara khusus polisi telah ditugaskan untuk memberikan perlindungan.<sup>735</sup> Lebih celaka lagi, polisi secara langsung dan berulang-ulang terlibat mendukung kekerasan yang dilakukan oleh milisi. Contoh paling nyata adalah pembunuhan Bernardino Augusto Guterres pada 26 Agustus 1999 yang ditembak mati oleh Brimob di Becora, Dili, sementara para milisi mengamuk tidak jauh dari sana.<sup>736</sup>

583. Perwira-Penghubung Militer UNAMET (MLO) tidak dapat memperoleh informasi yang akurat dari TNI mengenai jumlah tentara dan penempatan mereka, meskipun diyakini bahwa jumlah TNI di Timor-Leste lebih daripada 15.000 personel.<sup>737</sup> Meski Xanana Gusmão terus berupaya bernegosiasi agar TNI mengurangi jumlah tentara dan menarik sisa pasukan ke barak kabupaten, militer Indonesia masih terus ditempatkan hingga di tingkat desa di seluruh kawasan Timor-Leste.<sup>738</sup>

584. Kesepakatan 5 Mei tidak memuat ketentuan langsung mengenai masuknya TNI, milisi, atau Falintil ke barak, ataupun pelucutan senjata mereka. Tapi hal ini diserahkan kepada Komisi Perdamaian dan Stabilitas (KPS) yang dibentuk oleh Jenderal Wiranto pada 21 April setelah terjadinya pembunuhan massal di Liquiça

dan Dili pada bulan itu.’ KPS bertanggung jawab “dengan bekerja sama dengan PBB, (untuk) menyusun peraturan tata-tertib yang harus ditaati oleh semua pihak, selama periode sebelum dan sesudah Jajak Pendapat, untuk peletakan senjata dan mengambil langkah-langkah untuk melakukan pelucutan senjata”. KPS terbukti tidak efektif dalam melaksanakan tanggungjawabnya, meski anggota Komisi telah menandatangani kesepakatan pada 18 Juni bahwa kedua belah pihak akan menghentikan semua tindak kekerasan dan menyerahkan semua senjata kepada pihak yang berwenang.<sup>739</sup>

## Kekerasan oleh TNI-Milisi: Juni - Juli

585. Banyak sekali terdapat bukti yang menggambarkan pengarahannya TNI untuk kampanye pro-otonomi dan kekerasan milisi.<sup>740</sup>

586. Setelah Kesepakatan 5 Mei, TNI menggambarkan milisi sebagai kelompok pertahanan sipil. Bupati Dili mendirikan Pam Swakarsa (Pengamanan Swakarsa) pada 17 Mei 1999. Keputusan ini menyebutkan Gubernur, Komandan Korem (Danrem), dan Kepala Kepolisian Wilayah sebagai penasihat utama Pam Swakarsa, dan Eurico Guterres sebagai ‘Komandan Operasional’. Di antara 2.650 anggota Pam Swakarsa yang terdaftar di Dili, 1.521 orang di antaranya adalah anggota Aitarak.<sup>741</sup> Ini memberikan tingkat keabsahan tertentu bagi milisi, yang sebelumnya tidak pernah mereka miliki.<sup>742</sup> Gambaran yang secara luas dibentuk oleh mereka adalah Timor-Leste akan menjadi “lautan api” jika orang Timor-Leste memilih merdeka. Sebagai petunjuk atas hal ini, jauh-jauh hari sebelum referendum, pimpinan TNI di Timor-Leste, Kolonel Tono Suratman, dalam wawancara dengan TV Australia dalam program tayang *Sunday* mengenai peristiwa terkini, pada Juni mengatakan:

Saya ingin menyampaikan pesan ini kepada Anda. Apabila pihak prokemerdakaan menang, tidak hanya pemerintah Indonesia yang harus menghadapi hal-hal yang mengikutinya. PBB dan Australia juga harus menyelesaikan persoalan ini dan yah, jika ini terjadi, maka tidak akan ada pemenang. Semuanya akan dihancurkan. Timor-Leste akan musnah. Akan lebih buruk daripada 23 tahun yang lalu.<sup>743</sup>

587. Komisi mendengarkan kesaksian dari Ian Martin atas bukti yang dikumpulkan oleh staf UNAMET mengenai keterkaitan antara TNI dengan pemerintah daerah dan kelompok milisi. Ia menulis:

*Dari staf kami yang masuk ke sejumlah kabupaten dan kecamatan, kami menjadi lebih paham tentang kegiatan milisi. Kami jadi makin*

.....  
\* KPS terdiri atas dua anggota CNRT/Falintil dan dua prointegrasi, yang digambarkan sebagai pihak yang berkonflik, bersama dengan anggota militer Indonesia, polisi, dan pemerintah setempat. Tidak ada wakil masyarakat sipil dan PBB tidak disertakan. Komisi Hak Asasi Manusia Indonesia, Komnas HAM, juga termasuk KPS. [Lihat Martin, *Self Determination*, hal. 30 dan 70.]

*mengerti bahwa para milisi telah dibentuk, dipersenjatai, dan diperintah oleh TNI, dan memiliki hubungan dengan pemerintah setempat. Kami secara langsung mendapati milisi dilatih dan diperintah oleh TNI dan kami mengatakan hal tersebut secara terbuka.*<sup>744</sup>

## Dare II

588. Pada 25 - 30 Juni, Uskup Belo dan Uskup Nascimento melakukan upaya lebih lanjut untuk mempertemukan warga Timor prointegrasi dan prokemerdekaan. Pertemuan Perdamaian dan Rekonsiliasi Dare II ini diadakan di Jakarta, yang memungkinkan Xanana Gusmão ikut serta dalam pertemuan ini. Ini pertama kali sejak 1975 ia dapat bertemu dengan José Ramos-Horta yang diizinkan datang bersama-sama dengan wakil warga Timor prokemerdekaan di pengasingan. Sementara diskusi diadakan dalam suasana yang hangat, pertemuan tidak menetapkan rencana mengenai tindakan untuk melanjutkan dialog yang berkelanjutan antara berbagai pihak dalam upaya mengurangi permusuhan dan penggunaan kekerasan.

589. Serangkaian serangan milisi di Timor-Leste terjadi setelah pertemuan Dare II tersebut. Pada 29 Juni, Milisi Dadarus Merah Putih menyerang kantor UNAMET di Maliana, dan pada 4 Juli milisi Besi Merah Putih menyerang konvoi kemanusiaan antara Liquiçá dan Dili.<sup>745</sup> Ian Martin mengatakan kepada Komisi mengenai pertemuan rutin UNAMET dengan anggota sipil dan militer Satuan Tugas Indonesia, di mana ia bersama rekan kerjanya secara terus-menerus mengungkapkan keprihatinannya. Ia mengatakan kepada CAVR bahwa pada 7 Juli, setelah serangan tersebut, ia terbang ke Jakarta untuk bertemu dengan Jenderal Wiranto untuk memberikan bukti secara langsung yang didapat PBB mengenai kaitan antara TNI dan milisi.<sup>746</sup>

590. Kekerasan dan keterlambatan yang disebabkan oleh milisi menyebabkan adanya kegiatan diplomatik yang tinggi, yang pada akhirnya berhasil memaksa pihak Indonesia untuk meningkatkan situasi keamanan di sana. Pada 12 Juli, Satuan Tugas Indonesia berkunjung ke Timor-Leste, dengan ditemani Jenderal Wiranto. Dalam beberapa hari kekerasan berkurang dan, sambil menekankan bahwa pemilihan dapat ditunda sewaktu-waktu, Sekretaris Jenderal PBB memberikan persetujuannya bahwa pemilihan dapat dilangsungkan.<sup>747</sup>

## Pendaftaran pemilih

591. Kesepakatan 5 Mei menetapkan 16 Juli sebagai hari terakhir saat pendaftaran pemilih harus dimulai. Hal ini didorong oleh kenyataan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan mengadakan sidang pada September dan hanya MPR saja yang memiliki wewenang untuk mengesahkan undang-undang tentang hasil Jajak Pendapat tersebut. Agar hal ini dapat terwujud, pemilihan harus dilaksanakan akhir Agustus. Di bawah tekanan internasional yang semakin kuat, pendaftaran pemilih dapat dimulai 16 Juli.



592. Pada 20 Juli, Sekretaris Jenderal Kofi Annan melaporkan kepada Dewan Keamanan:

Aktivitas milisi, yang telah menyebabkan banyak warga Timor mengungsi sehingga mereka tidak mendapatkan kebebasan dan keamanan, yang nyata-nyata bermaksud untuk memengaruhi pilihan politik, merupakan tantangan yang paling mendasar terhadap proses Jajak Pendapat yang bisa diterima.<sup>748</sup>

593. Sekretaris Jenderal juga mengatakan bahwa kegiatan CNRT telah dibatasi, akses bagi media independen terbatas, dan kampanye pro-otonomi telah dimulai sebelum waktu yang telah ditentukan, dan pegawai pemerintah menggunakan jabatan dan dana untuk melakukan kampanye pro-otonomi, dan pegawai negeri sipil ditekan untuk memilih pro-otonomi.<sup>749</sup>

594. Iklim ketakutan yang diciptakan oleh kelompok milisi dan kelompok pro-otonomi menyebabkan 40.000 orang mengungsi pada Juni.<sup>750</sup> Karena terus berlangsungnya tindak kekerasan, jumlah pengungsi bertambah menjadi 60.000 pada pertengahan Juli (Lihat Bab 7.3: Pemindahan paksa dan kelaparan, seksi tahun 1999). Beberapa di antara mereka adalah pemimpin prokemerdekaan yang rumah dan desanya menjadi sasaran. Banyak pengungsi yang semata-mata menghindari tindak kekerasan dan intimidasi. Beberapa orang mencari perlindungan di kota yang agak besar di Timor-Leste, sementara yang lain mencari perlindungan ke Timor Barat. Dalam situasi keamanan yang rawan, kampanye pendidikan pemilih oleh UNAMET menekankan pada kerahasiaan pemungutan suara dan janji PBB yang akan tetap berada di Timor-Leste setelah Jajak Pendapat.

595. Meski terdapat permasalahan dan keterlambatan tersebut, pendaftaran pemilih oleh UNAMET tidak dapat mendapat hambatan, dan 451.792 pemilih bisa didaftar, baik di Timor-Leste maupun di luar negeri.\* Hal ini jauh melampaui perkiraan, dan menunjukkan tekad rakyat Timor-Leste untuk menentukan nasib politik mereka meski harus menghadapi intimidasi dan kekerasan. Komisi pemilihan menentukan bahwa proses pendaftaran sah, yang menjadi dasar yang kuat untuk menyelenggarakan Jajak Pendapat.<sup>751</sup>

## Kampanye

### Kelompok prokemerdekaan

596. Dalam situasi ketakutan yang secara terus-menerus diciptakan oleh milisi selama awal 1999, pimpinan CNRT memilih melakukan kampanye secara diam-diam. Mereka yakin bahwa rasa nasionalisme warga Timor yang telah dibangun selama 24 tahun masa resistansi terhadap pendudukan Indonesia membuat kampanye prokemerdekaan menjadi tidak perlu. Sebaliknya, tindakan mereka lebih

\* Tempat pemungutan suara luar didirikan di lima lokasi di Indonesia, Australia, dan Eropa.

berpusat pada rekonsiliasi yang dapat menciptakan situasi yang stabil dan damai di mana UNAMET dapat menyelenggarakan pemungutan suara.

597. Pada Maret 1999, Xanana Gusmão meminta mahasiswa untuk ikut berperan sebagai motor “penggerak” kampanye, karena jika CNRT sendiri yang melakukannya akan sangat berbahaya. Pada April, kantor CNRT di Dili dihancurkan oleh milisi dan sebagian pemimpinnya bergerak secara sembunyi-sembunyi. Selama masa ini, sebanyak 800 mahasiswa kembali ke Timor-Leste dari universitas di seluruh Indonesia. Banyak kelompok mahasiswa tergabung dalam *Presidium Juventude Loriku Ass’wain Timor Lorosa’e*.<sup>\*</sup> Banyak yang kembali ke kampung halaman mereka ataupun tinggal di Dili. Di Dili, para pelajar memfokuskan diri pada upaya mengoordinasikan kampanye informasi dan memublikasikan lambang CNRT pada kertas suara. Kegiatan mereka mencakup mendiskusikan rekonsiliasi, menyampaikan informasi terkini mengenai persiapan Jajak Pendapat, dan meneruskan perintah CNRT. Sebagai medianya adalah fotokopi buletin, karena pada awalnya pemilik percetakan tidak mau menanggung risiko untuk mencetak bahan seperti ini. Presidium juga mendirikan radio Matebian Lian (Suara Matebian), yang meskipun dicekal, masih terus mengudara.

598. Peran mahasiswa ini menanggung risiko, dan mereka menjadi sasaran selama kampanye.<sup>752</sup> Pada 20 Mei, Milisi Aitarak membunuh dua anggota ETSSC di Hera, yang diduga melibatkan TNI.<sup>753</sup> Milisi Laksaur membunuh dua mahasiswa lagi di Covalima.<sup>754</sup> Berdasarkan perintah CNRT, para mahasiswa tidak merespons tindak kekerasan yang dilakukan para milisi. Hal ini dilakukan dalam rangka menghindari meluasnya konflik di antara kelompok warga Timor yang dapat diklaim oleh TNI sebagai perang saudara.

599. Pada 1 sampai 4 Juli, Xanana Gusmão bertemu dengan delegasi CNRT di rumah tahanannya di Salemba, yang menghadiri Pertemuan Dare II di Jakarta, bersama anggota CNRT lainnya, dan membentuk tim kampanye CNRT yang bernama Komisi untuk Perencanaan dan Koordinasi Kampanye (*Comissão de Planeamento e Coordinacao de Capanha*, CPCC). CPCC bertemu di Dili 9 Juli dan merumuskan rencana kampanyenya. Kampanye ini menekankan pada kampanye diam-diam dari rumah ke rumah, khususnya dimaksudkan untuk mengenalkan lambang CNRT dan untuk membangun rasa persatuan nasional serta stabilitas. Bendera CNRT baru saja dikibarkan secara umum di Timor-Leste dan banyak warga yang belum begitu kenal dengan bendera tersebut. CPCC juga menerbitkan surat kabar *Vox Populi*, dengan oplah harian 1.300 dan membuat program radio dengan nama yang sama.<sup>755</sup>

## Kelompok aktif pro-otonomi

600. Pada awal 1999 sejumlah organisasi terbentuk yang kemudian menjadi sayap politik kampanye pro-otonomi. Pada 27 Januari, Forum Persatuan, Demokrasi, dan

\* Dewan Solidaritas Mahasiswa Timor-Leste (ETSSC) merupakan pengecualian utama. Organisasi ini memilih tidak beraliansi dengan CNRT, yang dianggapnya terlumuri dengan politik partisan 1975.

Keadilan (FPDK) resmi berdiri, yang dipimpin Walikota Dili, Domingos Soares. Pada April, Barisan Rakyat Timor-Timur (BRTT) berdiri dan dipimpin oleh bekas Presiden UDT Fransisco Lopes da Cruz. Organisasi lainnya, Front Bersama untuk Otonomi Timor-Timur (UNIF) berdiri pada 23 Juni.

601. FPDK dan berbagai organisasi kembarannya yang semuanya pro-otonomi memiliki kaitan erat dan didanai oleh pemerintahan sipil.<sup>756</sup> Mereka secara teratur mengikuti pertemuan tripartit militer-polisi-pemerintah (Muspida), meskipun mereka tidak punya jabatan resmi. Saat kedatangan UNAMET, kampanye gabungan kelompok pro-otonomi dan milisi telah berlangsung selama beberapa waktu. Orang-orang ditekan untuk secara terang-terangan menyatakan kesetiaannya terhadap Indonesia, dengan mengikuti unjuk rasa maupun menaikkan bendera merah-putih di depan rumah masing-masing. Satu sasaran pemaksaan ini adalah para pegawai negeri sipil. FPDK melakukan kampanye untuk mendiskreditkan UNAMET, dan kampanye tersebut dipublikasikan secara luas di Indonesia dan melalui bermacam saluran diplomatik Indonesia.<sup>757</sup>

602. Pembentukan UNIF pada 23 Juni bertujuan untuk menggabungkan berbagai kelompok pro-otonomi di bawah suatu badan, yang dipimpin oleh sejumlah pemimpin senior Timor-Timur prointegrasi. Basilio Araújo mengatakan pada Komisi:

*UNIF... mencakup kami semua, dan memiliki kepemimpinan [presidium] kolektif termasuk Lopes [da Cruz, Duta Besar Khusus Indonesia dan ketua BRTT], Armindo [Soares, Ketua DPRD Timor Timur], Domingos [Soares, Walikota Dili dan Ketua FPDK], dan João Tavares ['Kepala Komandan' semua kelompok milisi] dari PPI,\* sehingga kepemimpinan kolektif merupakan kelompok tunggal, dan saya melanjutkan sebagai juru bicara kelompok ini, sementara masih menjadi juru bicara FPDK.<sup>758</sup>*

## Pemerintahan sipil Indonesia di Timor-Leste

603. Pemerintahan Sipil di Timor-Leste melakukan kampanye untuk “menyosialisasikan” paket otonomi khusus, bertentangan dengan Kesepakatan Mei yang telah melimpahkan tanggung jawab tersebut hanya kepada UNAMET. Pendekatannya merupakan perpaduan antara pemaksaan dan insentif, mengambil keuntungan dari pengaruh pemerintah terhadap pegawai negeri sipil. Dalam surat edaran kepada Kepala Instansi Vertikal dan Otonomi tertanggal 28 Mei 1999, gubernur menginstruksikan bahwa pegawai negeri sipil yang terlibat aktivitas melawan pemerintah Indonesia harus dipecat.<sup>759</sup> Pemerintah juga mendanai demonstrasi pro-otonomi di seluruh wilayah, di mana milisi bersenjata aktif bergerak dan melakukan pemaksaan pada masyarakat setempat.<sup>760</sup>

.....  
\* PPI Pasukan Perjuangan Integrasi yang dipimpin oleh João Tavares; kelompok yang menjadi payung bagi disatukannya kelompok-kelompok milisi bersenjata yang lama dan yang baru muncul pada 1999.

604. Selain kegiatan kampanye, pemerintah sipil juga terlibat sangat jauh dalam mendanai dan mengorganisasikan milisi. Pada Mei Gubernur José Abilio Osorio Soares menulis kepada para bupati meminta proposal anggaran untuk Pam Swakarsa dan untuk “pengeluaran yang berkaitan...dengan rencana otonomi”.<sup>761</sup> Tiap distrik menerima bagian dari dana Program Jaringan Pengamanan Sosial (JPS), yang mungkin mencakup dana dari Bank Dunia. Penyaluran dana ini disetujui oleh gubernur, dan mencakup penyaluran dana untuk polisi, yang digunakan untuk sosialisasi paket otonomi.<sup>762</sup>

## Periode kampanye resmi

605. Kampanye secara resmi dimulai pada 14 Agustus, dan hanya berlangsung singkat. Jadwal kegiatan di seluruh negeri telah disusun melalui kerjasama dengan staf UNAMET, dalam upaya untuk mengatur berbagai rapat dan kampanye keliling guna menghindari bentrokan antara para pendukung prointegrasi dan pro-otonomi. CNRT tak dapat membuka kantornya di tiga kabupaten karena ancaman kekerasan,<sup>\*</sup> sedang sejumlah kantor CNRT lainnya dengan cepat menjadi sasaran dan dipaksa untuk tutup. Di antara kantor yang harus ditutup termasuk Dili pada 17 Agustus; Manatuto, 19 Agustus; dan Ainaro, 21 Agustus.<sup>763</sup> Pelajar dan kelompok masyarakat sipil memainkan peran kunci dalam kampanye prokemerdekaan. Belakangan sejumlah bukti dokumenter menunjukkan bahwa TNI memasukkan CNRT, DSMPTT (Dewan Solidaritas Mahasiswa dan Pelajar Timor-Timur/ETSSC), dan OJECTIL dalam daftar ‘kekuatan musuh’-nya dalam rencana operasinya untuk referendum.<sup>† 764</sup>

606. Pembunuhan terus berlanjut selama masa kampanye, terutama antara 14 dan 16 Agustus, yang membuat CNRT terpaksa mengakhiri kegiatan kampanyenya di distrik-distrik pada 19 Agustus. CNRT melakukan kampanye keliling di Dili pada 25 Agustus. Ribuan orang datang dan memberi dukungan, dan suasana di Dili ketika itu aman dan damai. Akan tetapi, keributan terjadi di Dili keesokan harinya, setelah kampanye terakhir oleh kelompok pro-otonomi. Delapan orang terbunuh, termasuk Augusto Guterres, pelajar yang ditembak Brimob di Becora. Malam itu, kantor Renetil dan CNRT dibakar. Gelombang kekerasan oleh para pendukung pro-otonomi menandai berakhirnya kegiatan kampanye di Dili.

## Situasi keamanan memburuk: Agustus

607. Penjelasan yang dikemukakan Komandan Militer Timor-Leste Tono Suratman tentang masa kampanye menunjukkan dua hal, yaitu Indonesia bersikeras bahwa TNI telah memikul tanggung jawab keamanan meskipun ketentuan dalam Kesepakatan 5 Mei secara spesifik menugaskan polisi memikul tanggung jawab ini, dan tetap dipertahankannya gambaran bahwa apa yang terjadi di Timor-Leste adalah perang saudara dan bukannya konflik yang direkayasa:

\* Bobonaro, Ermera, Liquica.

† Operasi Wira Dharma 1999.

Keamanan harus dibuat kondusif sebelum referendum... Indonesia, dalam hal ini polisi dan TNI, menerapkan hal ini dan bertanggung jawab atas persoalan-persoalan dan turunannya, masalah penegakan hukum... Secara pribadi saya merasa tanggung jawab keamanan TNI sangat berat. Waktu untuk menenangkan situasi sangat singkat... sementara sejarah kekerasan antarorang Timor-Leste berumur 23 tahun, atau lebih...<sup>765</sup>

608. Selama masa kampanye, TNI bersikukuh dengan argumentasi bahwa kelompok milisi bersenjata adalah reaksi warga Timor terhadap Falintil, dengan sepenuhnya mengabaikan peran TNI dalam membentuk dan mendukung kelompok milisi bersenjata atau bahkan konflik antara TNI dan Falintil yang berlangsung selama 24 tahun.

609. Penggambaran TNI yang keliru tentang konflik yang terjadi dan penolakan atas status tentaranya membuat negosiasi untuk perdamaian dan stabilitas menjadi sulit. TNI tidak pernah sekali pun mengungkapkan kepada MLO UNAMET tentang jumlah pasukannya di wilayah tersebut.<sup>766</sup> Menghadapi situasi ini, Xanana Gusmão sebagai Panglima Falintil menuntut pengurangan minimum pasukan TNI dan penempatan mereka di barak-barak. Sementara itu, komandan TNI, Wiranto, menuntut agar Falintil dilucuti. Meskipun TNI tidak mengurangi jumlah pasukannya, Falintil secara sepihak menarik pasukannya ke barak-barak untuk membuktikan bahwa Falintil bukanlah sumber kekerasan yang terjadi dan mendesak TNI untuk menanggapi dengan mundur ke barak dan melucuti para milisi. Pada 12 Agustus, ke-670 prajurit Falintil telah berada di barak-barak mereka.\*

610. Meski demikian, TNI tidak menarik mundur pasukannya ke berbagai barak di tingkat kabupaten, dan anggota milisi tetap menebar ancaman dengan bebas di tengah-tengah masyarakat di seluruh wilayah Timor. Berhari-hari setelah kelompok Falintil mengurung diri di barak-barak mereka, para pemimpin milisi mengumumkan bahwa mereka akan meletakkan senjata. UNAMET menyaksikan upacara penyerahan senjata oleh milisi kepada polisi di empat kabupaten antara 16 dan 19 Agustus. Tapi, UNAMET menyaksikan bahwa jumlah senjata yang diserahkan itu “hanyalah sebagian kecil dari yang sebenarnya dimiliki oleh milisi.”<sup>767</sup>

611. Meskipun para pemimpin prointegrasi menuduh Falintil sering bertindak melampaui batas selama periode tersebut, investigasi UNAMET jarang menemukan bukti atas tuduhan-tuduhan tersebut. Hanya dua kejadian kekerasan yang dilakukan oleh prokemerdekaan dapat dibuktikan. Dalam satu insiden, seorang pendukung kemerdekaan membunuh seorang pendukung prointegrasi pada 12 Juli, dan seorang anggota milisi Aitarak dibunuh di Becora pada 29 Agustus.<sup>768</sup>

.....  
\* Keempat lokasi pengurangan diri Falintil adalah Uaimori (260 prajurit), Atalari, Baucau (70 prajurit), Poetete, Ermera (153 prajurit), dan Aiasa, Bobonaro (187 prajurit). Petugas Perantara Militer UNAMET menyaksikan keempat lokasi tersebut dan bertemu dengan para prajurit Falintil. [Lihat Martin, *Self-Determination*, hal. 73.]

612. Selain berperan dalam Satuan Tugas Pelaksanaan Musyawarah Umum di Timor-Leste, Mayor Jenderal Zacky Anwar Makarim tampaknya dipercaya dengan tugas menjalankan kampanye milisi.<sup>769</sup> Pada 18 Agustus Delegasi Kongres Amerika Serikat menyaksikan terjadinya tindak kekerasan di Suai dan kesaksian mereka kemudian berakibat pada dicopotnya Makarim dari jabatannya, termasuk Komandan Kodim di Bobonaro dan Covalima. Balibó Alasan di balik pencopotan ini adalah, beberapa prajurit secara terpisah bertanggung jawab atas tindak kekerasan yang terjadi, suatu pendekatan yang samasekali tidak membantu mengendalikan tindakan melebihi batas yang dilakukan oleh TNI sebagai lembaga. Pada 13 Agustus, Kolonel Tono Suratman diganti oleh Komandan Korem yang baru yang berlatarbelakang Kopassus, Kolonel Noer Muis.<sup>770</sup>

613. Pada 24 Agustus, Sekretaris Jenderal PBB memberikan sambutannya di hadapan Dewan Keamanan, dengan mengutip pernyataan Komisi Elektoral independen, bahwa masa pemilihan “tak pernah lepas dari intimidasi, kekerasan, atau gangguan (sebagaimana yang disyaratkan dalam Kesepakatan 5 Mei)”.<sup>771</sup>

## Persiapan terakhir Jajak Pendapat

614. Masa kampanye formal berakhir pada 26 Agustus. UNAMET mempekerjakan 4.000 warga Timor untuk membantu pelaksanaan Jajak Pendapat di 200 TPS di seluruh negeri.<sup>772</sup> Semua staf diminta untuk bersikap netral secara politis dan diatur oleh staf pemilihan internasional. Kelompok-kelompok pengamat dan media massa internasional tiba dalam jumlah besar beberapa hari menjelang 30 Agustus, guna memastikan bahwa pemungutan suara berjalan di bawah pengawasan masyarakat internasional.

## Jajak Pendapat

615. Tanggal 30 Agustus 1999 menandai dimulainya hari bersejarah di Timor-Leste. Meski mengalami intimidasi dan kekerasan selama berbulan-bulan, pada hari itu rakyat di seluruh negeri keluar rumah dengan penuh semangat untuk memberikan suara mereka. Banyak yang berdandan dengan memakai pakaian terbaik mereka. Dan di desa-desa, orang berjalan kaki selama berjam-jam untuk memberikan suara. Menjelang fajar, 50% rakyat yang telah mendaftar untuk memilih, telah menunggu di luar TPS-TPS yang tersedia, untuk memberikan suara.<sup>773</sup> Orang-orang menunggu dengan sabar dalam antrean panjang di sebagian besar TPS, dan segera pulang setelah selesai memilih. Sejumlah TPS dibuka sejak pukul 06.30 hingga pukul 16.00, meskipun di beberapa tempat Jajak Pendapat telah selesai dilakukan menjelang sore.

616. Pengamat dan media internasional mengomentari semangat dan martabat rakyat Timor, yang setelah mengalami kekerasan selama 24 tahun tidak membiarkan intimidasi dalam beberapa bulan terakhir mencegah mereka menggunakan hak mereka untuk menentukan masa depan mereka. Rakyat Timor memberikan suara dalam jumlah besar, yaitu 98,6% dari jumlah keseluruhan yang mendaftar. Berbeda dengan suasana pada 26 Agustus yang penuh kekerasan, hari itu suasana tenang di

sebagian wilayah. Meski begitu, milisi membunuh dua staf lokal UNAMET di Atsabe. Seorang saksi dari Civpol (Polisi sipil PBB) melihat TNI di tempat kejadian<sup>774</sup>

617. Segera setelah pemungutan suara selesai, sebelum penghitungan dan pengumuman hasil, Menteri Luar Negeri Indonesia, Ali Alatas, menegaskan pandangan Pemerintah Indonesia bahwa pemungutan suara tersebut sah:

Saya sangat berbesar hati dan senang hati mengatakan bahwa [pemungutan suara tersebut] sungguh berjalan bebas dan damai, dan karenanya keputusan yang adil dari Jajak Pendapat.<sup>775</sup>

618. Namun Juru Bicara prointegrasi Basilio Araújo mengeluarkan daftar 37 pelanggaran yang diduga dilakukan oleh staf UNAMET dan mengklaim bahwa pemungutan suara tersebut tidak adil. Komisi Pemilihan menanggapi protes para pendukung prointegrasi dengan mengadakan musyawarah selama satu setengah hari pada 2 - 3 September. Komisi Pemilihan akhirnya menyimpulkan:

Apapun kebenaran yang mungkin ada dalam pengaduan oleh orang per orang tentang dugaan pelanggaran dan/atau keberpihakan yang dilakukan oleh staf pemilihan, tak satu pun dari pengaduan tersebut, baik secara perorangan maupun kelompok, menggagalkan proses tersebut.<sup>776</sup>

## Penghitungan dan hasil

619. Untuk memastikan kerahasiaan pemungutan suara, kertas suara dihitung di Dili. Sore hari, pada 30 Agustus, staf UNAMET dari berbagai tempat pemungutan suara membawa kertas suara ke markas kabupaten di bawah pengawasan polisi PBB. Semua kertas suara tersebut disimpan di bawah penjagaan ketat polisi PBB, dan dibawa ke pusat penghitungan di Dili dengan helikopter atau konvoi darat oleh staf UNAMET dan polisi PBB pada 31 Agustus. Di Maliana, helikopter yang mengangkut kertas suara ditembak, dan di Gleno dan Atsabe di Distrik Ermera, tim UNAMET yang membawa kotak suara mendapat intimidasi dari kelompok milisi.<sup>777</sup> Penghitungan dilakukan secara terpusat di Dili. Tidak ada laporan hasil tersendiri dari kabupaten dan daerah, yang ada hanya hasil tunggal untuk seluruh wilayah pemilihan. Ini dilakukan untuk menjamin keamanan di berbagai daerah yang mungkin menjadi sasaran kekerasan karena afiliasi politik mereka dan juga untuk membantah saran gerakan pro-otonomi agar wilayah bisa saja dibagi agar mencerminkan hasil regional.

620. Di pusat penghitungan, yaitu di Museum Dili di Comoro, petugas pemilihan UNAMET di seluruh Timor berkumpul untuk melakukan penghitungan. Para pengamat internasional termasuk delegasi resmi dari Indonesia dan Portugis, memiliki akses masuk ke pusat penghitungan dan turut menyaksikan seluruh tahapan proses penghitungan. Banyak kontingen media internasional meninggalkan Timor-Leste segera setelah pemilihan yang berjalan damai itu selesai. Begitu juga para pengamat internasional.

621. Kerusuhan yang didalangi oleh kelompok milisi pecah beberapa hari setelah Jajak Pendapat. Pada 1 September, kelompok milisi tiba di Dili dan melancarkan serangan terhadap para pendukung prokemerdekaan yang lokasinya berdekatan dengan gedung UNAMET di Balide. Media internasional berhasil mengambil gambar seorang pria yang sedang berlari menyelamatkan diri namun tertangkap dan dicincang hingga tewas oleh milisi. Ratusan warga mengungsi di sekolah yang terletak di sebelah gedung UNAMET. Di Ermera, kerusuhan pecah, dan UNAMET mengevakuasi stafnya ke Dili. Pada 2 September di Maliana, milisi mengepung kantor UNAMET dan melancarkan tembakan dan membakari rumah-rumah. Dua orang staf UNAMET dari Timor tewas.

622. Penghitungan suara terus berlanjut tanpa henti, di tengah-tengah situasi keamanan yang kian memburuk. PBB bertekad untuk mengumumkan hasil pemungutan suara secara bersamaan, masing-masing oleh Sekretaris Jenderal PBB di New York pada tengah malam 3 September dan oleh Perwakilan Khusus PBB di Dili, Ian Martin, pada pagi hari 4 September. Setelah berkonsultasi dengan Satuan Tugas Indonesia, pengumuman pada pagi hari di Dili dianggap dapat memberikan kontrol yang lebih baik bagi situasi keamanan pada jam-jam berikutnya.<sup>778</sup>

623. Pada pukul 9 pagi, Sabtu 4 September, Ian Martin membacakan hasil pemungutan suara di Hotel Mahkota di Dili: 21,5% memilih paket otonomi khusus dan 78,5% menentangnya. Komisi Pemilihan telah pula menyiapkan pertimbangan akhir mengenai pemungutan suara:

Komisi dapat menyimpulkan bahwa Jajak Pendapat telah terlaksana dengan adil menurut prosedur dan sesuai dengan Perjanjian New York, dan telah secara akurat mencerminkan keinginan rakyat Timor. Tidak diragukan lagi bahwa mayoritas rakyat di daerah konflik ini ingin memisahkan diri dari Republik Indonesia.<sup>779</sup>

## Indonesia meninggalkan Timor-Leste: Bumi Hangus

### Tinjauan

624. Dengan diumumkannya hasil pemungutan suara, PBB meminta Indonesia untuk memastikan situasi keamanan di wilayah Timor.<sup>780</sup> Tekanan diplomatik pun digunakan untuk memastikan tercapainya tujuan akhir ini, namun ketentuan untuk memberi perlindungan kepada rakyat Timor-Leste tetap tak mencukupi. Kejadian pada September dan Oktober 1999 menjadi pembahasan dua proses hukum dan sejumlah laporan investigasi, baik oleh warga Timor-Leste dan Indonesia, serta organisasi dan lembaga internasional, termasuk PBB.\*

\* Komisi Para Ahli PBB 1999 - 2000, Unit Kejahatan Berat dan panel hakim di Timor-Leste, Pengadilan Ad Hoc HAM di Jakarta, laporan KPP-HAM Indonesia dan laporan Profesor Geoffrey Robinson untuk Komisi



625. Militer Indonesia dan milisi diketahui telah membunuh antara 1.200 hingga 1.500 warga Timor-Leste pada 1999; 900 orang di antaranya dibunuh setelah Jajak Pendapat. Masing-masing, mereka\* membunuh 400 orang lewat pembunuhan massal, dan sisanya dibunuh secara terpisah.<sup>781</sup> Para korban tersebut tewas dengan cara yang mengenaskan, banyak yang ditebas dengan golok, dan di antara mereka yang sempat menyelamatkan diri, banyak yang kehilangan anggota tubuhnya dan menderita gangguan kesehatan yang berkepanjangan. Secara khusus, para pembunuh itu mengincar dan mengeksekusi para pemimpin CNRT dan keluarga mereka.<sup>782</sup> Penganiayaan, kekerasan seksual, dan pemindahan warga secara paksa terjadi di seluruh wilayah Timor-Leste.<sup>783</sup> Lebih daripada separuh penduduk, yaitu 550.000 orang, melarikan diri dari rumah mereka, termasuk 250.000 orang yang dipaksa atau diintimidasi untuk pindah ke Timor Barat.<sup>784</sup> [Lihat Bab 7.3.: Pemindahan paksa dan kelaparan]. Milisi juga membunuh warga yang mencari perlindungan di gereja. Para pastor dan para biarawati juga menjadi sasaran pembunuhan. TNI dan milisi bekerja sama untuk menerapkan strategi kekerasan massal di seluruh wilayah Timor-Leste.

626. Perhatian dunia terpusat pada markas UNAMET di Dili, tempat mengungsi beberapa staf UNAMET dan wartawan internasional yang masih tersisa di wilayah tersebut. Kegiatan diplomasi yang sangat gencar terjadi di belakang layar dan kadang-kadang di depan umum untuk menekan Indonesia agar memenuhi kewajibannya menjaga keamanan atau menyetujui kedatangan pasukan internasional untuk memulihkan situasi keamanan di Timor-Leste. Tidak satu negarapun mau bertindak melindungi rakyat Timor-Leste tanpa persetujuan dari Indonesia. Para pemimpin Timor-Leste berupaya meyakinkan negara-negara kuat di dunia dan di wilayah ini agar mau melakukan intervensi demi menyelamatkan rakyat Timor-Leste. Di PBB, di KTT APEC yang diadakan di Selandia Baru, di Portugal dan Roma, di Jakarta dan Australia, para pemimpin itu tidak berhenti bekerja.

627. Karena TNI menunjukkan sikap enggan mengendalikan kerusakan yang terjadi, sementara tim Dewan Keamanan telah berada di Dili dan Jakarta, pada 12 September Presiden Indonesia Habibie, akhirnya menyetujui hadirnya pasukan internasional. Seminggu kemudian, komandan Pasukan Internasional untuk Timor-Leste atau Interfet asal Australia, Mayor Jenderal Peter Cosgrove, tiba di Dili, yang diikuti oleh pasukannya sehari kemudian. Saat TNI meninggalkan Timor-Leste, mereka menghancurkan 70% infrastruktur utama, rumah-rumah, dan bangunan, mereka juga menghancurkan seluruh desa dan menjarah harta benda rakyat Timor-Leste.<sup>785</sup>

628. Xanana Gusmão kembali ke Timor-Leste pada 22 Oktober, dan pada 25 Oktober Dewan Keamanan PBB membentuk Pemerintahan Transisi PBB atau UNTAET (United Nations Transitional Administration in East Timor), yang dipimpin oleh Sérgio Vieira de Mello. Tugas menangani krisis kemanusiaan dan membangun kembali negara Timor-Leste yang terciak-cabik, telah menunggu.

---

Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mungkin merupakan laporan terbaru yang terpenting sampai saat ini.

\* Dokumen yang terakhir ini dikirimkan sebagai submisi untuk CAVR oleh Komisi Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia.

## Tindak kekerasan sesudah pengumuman hasil pemungutan suara

629. Tindak kekerasan pasca-Jajak Pendapat yang mulai terjadi pada 30 Agustus sore hari dan terus berkembang selama hari-hari penghitungan suara semakin meningkat setelah pengumuman hasil Jajak Pendapat pada 4 September. Di Dili, karena takut akan ancaman adanya pembalasan terhadap mereka yang memilih prokemerdekaan, rakyat berduyun-duyun pergi ke Dare di kaki bukit di belakang kota untuk mengungsi di berbagai tempat seperti markas ICRC, rumah Uskup Belo, dan kompleks keuskupan Dili, dan sekolah yang terletak di sebelah markas UNAMET. Sementara staf UNAMET pindah ke markas Balide setelah hasil Jajak Pendapat diumumkan.

630. Pada 5 September, Milisi Aitarak, TNI, dan polisi, menyerbu kantor keuskupan Dili, memisahkan dengan paksa staf UNAMET orang Timor dan anggota CNRT, dan membunuh antara 15 dan 20 dari 300 orang yang mengungsi di tempat tersebut.<sup>786</sup> Militer memindahkan wartawan yang tersisa dan menyelamatkan para pengungsi lokal ke markas Balide, tempat orang-orang internasional berkumpul hingga evakuasi mereka. Pada 6 September kelompok milisi dengan sangat kejam memaksa keluar 7.000 orang yang sedang mengungsi di dalam markas ICRC dan di rumah Uskup Belo yang terletak di tepi pantai Dili, yang kemudian mereka hancurkan. Belakangan, orang-orang tersebut dibawa ke Timor Barat sebagai bagian dari rencana darurat yang disebut Hanoin Lorosae II (Operasi Mengenang Lorosae II) yang disusun oleh polisi beberapa bulan sebelumnya, sebagaimana disebutkan di atas. (Lihat paragraf 561.)

631. Pada hari yang sama di pantai selatan Suai, milisi Laksaur, dengan disaksikan pemerintah daerah dan polisi daerah serta pemimpin militer, membunuh antara 27 dan 200 orang dari 2.000 pengungsi yang tersisa di dalam gereja.<sup>787</sup> Di antara mereka yang pertama kali dibunuh adalah tiga Pastor Katolik, yang ditebas dengan golok oleh anggota milisi. Penggalan tubuh korban yang dilakukan kemudian menunjukkan di antara yang terbunuh itu terdapat wanita dan anak-anak.<sup>788</sup> Penyelidikan dan kesaksian dari para saksi menunjukkan adanya keterlibatan pasukan teritorial TNI.<sup>789</sup>

632. Pembunuhan Pastor Katolik menandakan bahwa Gereja Katolik menjadi sasaran. Gereja telah lama mempunyai hubungan yang tegang dengan otoritas Indonesia yang berkuasa, tetapi hingga kerusuhan pasca-Jajak Pendapat, anggota gereja belum pernah menjadi sasaran pembunuhan. Hari-hari setelah penyerangan di Suai, tindakan menjadikan Pastor Katolik sebagai sasaran tampaknya menjadi pola yang juga terlihat di distrik-distrik lain. Komisi mendengar kesaksian oleh saksi mata tentang para pastor yang sengaja dijadikan sasaran ketika mereka mencoba mencegah terjadinya kekerasan:

*Saya melihat Padre Francisco mengangkat tangan dan berkata kepada Milisi Laksaur/Mahidi, "Cukup. Berhenti menembak. Kita semua orang Timor. Hentikan ini semua." Dia berteriak karena melihat begitu*

*banyak korban yang jatuh, tetapi milisi Laksaur/Mahidi mengabaikan permintaan beliau. Kemudian salah satu anggota milisi... mendekati Padre. Dia pura-pura memeluk Padre, kemudian membawa beliau dari tempat tinggalnya ke Gua Maria dan kembali lagi. Kemudian dia menembak Padre Francisco, tetapi beliau tidak langsung meninggal, jadi dia mengambil pedangnya dan menikam beliau satu kali di dada. Padre Francisco meninggal saat itu juga.<sup>790</sup>*

633. Ketika ketegangan dan kekerasan meningkat di seluruh negeri, orang-orang melarikan diri dari rumah-rumah mereka mencari keselamatan di sejumlah hutan dan gunung. Ribuan orang berjejal mencari perlindungan di berbagai barak pertahanan Falintil.

634. Secara umum, tindak kekerasan yang dilakukan oleh TNI dan milisi paling parah terjadi di beberapa distrik di bagian barat. Di distrik-distrik tersebut, dekat dengan perbatasan Timor Barat di mana jumlah Falintil lebih sedikit, hubungan TNI dan milisi justru paling kuat. Pada 7 September, Wakil Komandan Falintil Taur Matan Ruak merasa sangat putus asa, dan mengancam akan melancarkan pembalasan dari markasnya di Uaimori. Berbicara dengan Taur Matan Ruak melalui telepon satelit, Xanana Gusmão melarangnya melakukan tindakan balas dendam tanpa memedulikan jumlah nyawa dan penderitaan, dengan alasan bahwa setiap tindakan balas dendam akan menciptakan perang saudara yang memang telah lama dicoba direkayasa oleh TNI, apalagi jika harus kehilangan dukungan internasional yang merupakan satu-satunya harapan untuk selamat.<sup>791</sup> Sikap disiplin Falintil secara umum tetap utuh meskipun ada begitu banyak provokasi. Sejumlah pembunuhan yang dilakukan oleh para pendukung kemerdekaan atau anggota Falintil yang dilaporkan terjadi pasca-Jajak Pendapat, kebanyakan terjadi di distrik-distrik di bagian barat.<sup>792</sup>

## TNI resmi mengambil kendali

635. Pada 4 September TNI melakukan reorganisasi kepemimpinan di Timor di bawah komando Mayor Jenderal Adam Damiri dari Kodam IX Udayana, yang mengambil kendali secara resmi dari pihak polisi. Pada 5 September, Jenderal Wiranto bertemu dengan para milisi dan pimpinan TNI di Timor-Leste, dan kemudian dengan Uskup Belo, yang meminta agar Wiranto mengendalikan para milisi.<sup>793</sup> Pada 6 September, Utusan Pribadi Sekretaris Jenderal Jamsheed Marker mendesak agar pihak Indonesia mengundang pasukan internasional, namun permintaan ini ditolak dengan keras. Presiden Habibie mengumumkan pemberlakuan darurat militer pada hari berikutnya, dengan menunjuk Mayor Jenderal Kiki Syahnakri sebagai Komandan. Ia kemudian menggantikan satuan teritorial dengan pasukan Kostrad, teori yang ada adalah tentara teritorial ini telah bertindak karena hubungan emosi dengan wilayah tersebut dan tentara baru diharapkan dapat bertindak dengan cara yang lebih profesional.

636. Kejahatan terhadap kemanusiaan terus terjadi setelah TNI mengambil alih kendali secara resmi. Berbagai serangan ini mengikuti pola pembunuhan yang sama oleh milisi yang melibatkan TNI, sering disaksikan langsung oleh personel senior TNI. Banyak pembunuhan memiliki pola yang sama: sejumlah pembunuhan itu terjadi setelah meningkatnya kekerasan, dengan sasaran para individu yang telah dipilih, dan mereka mempunyai kesamaan prosedur yang berlanjut dengan pembuangan mayat secara sistematis dengan menggunakan truk sehingga semua bukti menunjukkan adanya dukungan oleh pihak militer.<sup>794</sup> Pola yang lain termasuk persenjataan, yang mengandalkan senjata rakitan, pisau, pedang, dan beberapa senjata otomatis.<sup>795</sup> Ancaman, pemukulan, perkosaan, dan pembakaran rumah yang dilakukan pada bulan-bulan sebelumnya kini dilakukan secara sistematis dalam skala besar. Milisi membakar Timor-Leste dengan bensin yang disediakan oleh militer, yang sering dibawa dengan mobil pemadam kebakaran tetapi tangki kendaraan diisi dengan bensin. Mereka mengangkut barang-barang hasiljarah ke atas truk-truk militer. Tidak mungkin pemenuhan kebutuhan logistik yang luarbiasa banyaknya ini terjadi tanpa keterlibatan TNI.<sup>796</sup>

637. Komisi juga menerima submisi yang berisi kesaksian tentang artefak budaya Timor-Leste yang tak bernilai yang telah dibawa oleh pejabat Indonesia dari gedung yang dikenal sebagai Museum Dili di Comoro selama kekerasan pada September 1999.<sup>797</sup> Museum tersebut telah dibuka oleh pejabat Indonesia pada 1995 dan menyimpan lebih daripada 3.000 objek, termasuk tais kuno, keramik tradisional, keranjang tradisional, serta pahatan di batu dan kayu yang dikeramatkan. Submisi ini mengutip hasil wawancara dengan Virgilio Simith, anggota senior CNRT pada 1999 yang bertanggung jawab untuk Urusan Kebudayaan. Pada susunan Kabinet pertama RDTL setelah 20 Mei 2002, Virgilio Simith adalah Sekretaris Negara untuk Budaya, Pemuda, dan Olahraga. Virgilio mengatakan bahwa kebanyakan objek-objek tersebut telah dibawa ke museum di Kupang, dan terdapat sekitar 68 kain tais Timor. Dia menuturkan bahwa selama perundingan untuk isu-isu tidak terbahas antara Indonesia dan Timor-Leste selama masa Administrasi UNTAET, perwakilan Indonesia telah menjelaskan bahwa dipindahkannya artefak-artefak tersebut “karena tidak menentukannya suasana politik di Timor-Leste, sehingga objek-objek tersebut ‘diamankan.’” Namun, Virgilio mengatakan bahwa dia mengerti bahwa para pejabat di Kupang tetap menjaga objek-objek tersebut yang “dibeli dengan dana dari Indonesia dan oleh sebab itu menjadi bagian dari hak milik Indonesia”. Virgilio Simith mengatakan bahwa dia percaya banyak objek, khususnya tais telah dijual di beberapa kota Indonesia, seperti Ubud, di Bali sejak 1999.<sup>798</sup>

638. Kekerasan dan perbudakan seksual meluas pada masa ini. Komisi mendengar khususnya dari banyak perempuan di Suai yang menceritakan pengalaman mereka setelah terjadinya pembantaian massal di gereja pada 6 September, ketika mereka dibawa ke dekat sekolah dan diperkosa berulang kali sebelum dipaksa melewati perbatasan. Banyak juga yang ditahan sebagai budak pemuas nafsu seksual.<sup>799</sup>

639. Pembunuhan yang terjadi pada 8 September di Maliana menggambarkan pola tersebut dengan baik. Setelah kekerasan meningkat, truk TNI membawa milisi

ke kantor Polres, yang menjadi tempat mengungsi ratusan orang. Di hadapan petugas TNI dan polisi, milisi memilih dan mengeksekusi 13 pimpinan CNRT di antara mereka yang mencari perlindungan itu.<sup>800</sup> Tiga belas orang yang lolos dari pembunuhan massal diburu dan dibunuh dengan golok pada hari berikutnya. Beberapa hari kemudian insiden yang serupa terjadi jauh dari pengetahuan orang lain, di daerah terisolasi yakni Distrik Oecussi. Milisi Sakunar memisahkan dan membunuh pimpinan CNRT di Passabe. Setelah itu, diperkirakan sebanyak 170 orang terbunuh pada bulan setelahnya, korban terakhir dibunuh hanya dua hari sebelum tibanya pasukan Interfet yang terlambat di distrik tersebut.<sup>801</sup>

## Markas UNAMET

640. Sementara kekerasan terus terjadi di daerah tersebut, personel UNAMET yang tidak bersenjata mengungsi ke markas regional mereka. Ian Martin bersaksi di hadapan Komisi mengenai situasi di markas selama periode ini, dan mengenai usaha-usaha PBB untuk mengupayakan campur tangan internasional. Ia menceritakan tentang serangan langsung terhadap personel dan kantor UNAMET di distrik, serta keputusan untuk menarik tim regional UNAMET ke markas Dili. Seorang polisi PBB ditembak oleh milisi dengan menggunakan senjata berdaya ledak tinggi di Liquiçá dan hanya diselamatkan oleh jaket anti peluru yang dikenakannya; di Baucau polisi menembakkan senjata api otomatis selama lebih daripada dua puluh menit setinggi dada ke kantor UNAMET, tempat lebih dari 70 staf mengungsi. Ketika staf kantor regional Baucau dievakuasi ke lapangan udara, TNI dan milisi berusaha mencegah dilakukannya evakuasi staf UNAMET yang asal Timor ke Dili. Pada 5 September, sebagian besar tim regional UNAMET telah menarik diri dari distrik ke Markas Dili. Ia mengingat bahwa staf UNAMET asal Timor menjadi sasaran khusus, dan menceritakan hal itu kepada Komisi:

*Staf lokal UNAMET termasuk orang-orang pertama yang dibunuh setelah TPS ditutup dan di hari-hari sesudahnya. Lima belas staf UNAMET orang Timor diketahui atau dipercaya kehilangan nyawa mereka... Saya memohon pada Komisi untuk mencatat keberanian yang ditunjukkan oleh staf lokal UNAMET; tanpa jasa mereka PBB tidak akan bisa memenuhi mandatnya untuk menjalankan pemilihan.<sup>802</sup>*

641. Staf UNAMET terperangkap di markasnya di Balide. Tim yang meninggalkan markas di Dili untuk mencari makanan dan minuman di gudang UNAMET, ditembaki. Segelintir orang asing yang masih di Dili melarikan diri ke markas ini, bersama sejumlah orang Timor yang mencari tempat perlindungan. Pada 5 September, tembakan senjata otomatis yang terjadi secara terus-menerus terdengar dari dekat markas dan setelah dua puluh menit serangan, orang-orang dalam jumlah besar yang mencari perlindungan di sekolah mulai melompati tembok berkawat menuju markas UNAMET. Ada sekitar 1.500 orang dalam kelompok ini. Ini berarti terdapat lebih daripada 3.000 orang yang berada di markas UNAMET, dengan sedikit makanan dan air, serta kondisi kebersihan yang sangat kurang.

642. Pada 6 September, selain staf Gereja, tidak ada lagi orang asing di Timor-Leste di luar markas UNAMET. TNI mengepung markas tersebut, sehingga mereka berhasil melakukan langkah pertama untuk menutup Timor-Leste dari dunia luar. Di antara yang terperangkap di markas adalah beberapa wartawan internasional. Dengan menggunakan telepon genggam dan sambungan satelit, mereka menceritakan keadaan ke seluruh dunia. Namun, sementara media dunia terfokus pada masalah pengepungan markas UNAMET di Dili, media tidak mempunyai foto tentang kekerasan dan perusakan sistematis yang terjadi di seluruh daratan Timor-Leste.

## Meningkatnya tekanan internasional

643. Para tokoh Timor-Leste yang berada di luar sangat sibuk melakukan aktivitas diplomasi untuk meminta campur tangan internasional. Xanana Gusmão akhirnya dibebaskan dari penjara oleh pemerintah Indonesia pada 7 September, dan diserahkan kepada UNAMET di Jakarta. Untuk menghindari adanya upaya pembunuhan, ia dibawa ke Kedutaan Besar Inggris di Jakarta, kemudian dari sini diterbangkan ke Darwin, Australia. Uskup Belo dievakuasi ke Baucau setelah tempat tinggalnya diserang, dan dari sana ia kemudian diterbangkan ke Darwin pada 7 September dengan menggunakan pesawat udara milik PBB. Ia terbang ke Roma dan Lisabon untuk mencari dukungan. José Ramos-Horta dan yang lainnya pergi ke Auckland, Selandia Baru, di mana para pemimpin regional dan dunia berkumpul untuk mengikuti pertemuan tahunan APEC. Di seluruh dunia, khususnya di Australia dan Portugal, demonstrasi massa, yang digerakkan oleh gerakan solidaritas nonpemerintah dan orang-orang Timor yang berada di pengasingan, mengusahakan campur tangan internasional. Lewat foto-foto yang kuat kesannya walau terbatas jumlahnya dari markas UNAMET di Dili, dan pesan dari wartawan serta orang-orang lain di markas tersebut, informasi mereka mendominasi berita internasional dan terus menekan Indonesia dan meminta pemimpin dunia untuk melakukan campur tangan.<sup>803</sup>

644. Sekjen PBB, Kofi Annan, melakukan diplomasi pribadi yang sifatnya mendesak. Upaya pertamanya bertujuan meminta Indonesia untuk memenuhi kewajiban keamanan. Melalui sambungan telepon langsung Presiden Habibie pada 5 September menentang gagasan Sekjen PBB untuk melibatkan pasukan pemelihara perdamaian internasional, dan sebagai pengganti mengeluarkan Keppres pemberlakuan darurat militer di wilayah ini. Sekjen PBB meningkatkan tekanan pada Indonesia dengan mengumumkan kepada publik bahwa tindakan lebih lanjut harus dipertimbangkan jika keadaan tidak membaik di Timor-Leste dalam jangka waktu 48 jam.<sup>804</sup>

645. Sebelum diadakan Jajak Pendapat, dan sekali lagi pada 1 September, Portugal meminta pengerahan pasukan perdamaian internasional. Australia telah melakukan persiapan secara diam-diam seandainya diperlukan intervensi militer, dengan menyiapkan pasukan sejak akhir 1998. Selandia Baru juga mempersiapkan diri. Namun, tidak ada satu negarapun yang siap melakukan intervensi militer tanpa seizin Indonesia.<sup>805</sup> Pada 4 September, Menteri Luar Negeri Australia Alexander Downer mengumumkan secara terbuka keinginannya untuk memimpin pasukan internasional

ke Timor-Leste, jika Indonesia setuju dan jika Australia menerima mandat dari Dewan Keamanan PBB. Sekjen PBB Kofi Annan dan Perdana Menteri Australia John Howard mengadakan kontak secara terus-menerus untuk mengupayakan hal ini, mencari persetujuan Indonesia atas pengiriman pasukan internasional dan pengumpulan koalisi untuk membentuk pasukan yang dapat ditempatkan segera.

646. Pada 5 September, Dewan Keamanan PBB mengirim misi ke Jakarta dan Timor-Leste.<sup>806</sup> Utusan ini meninggalkan New York pada 6 September, diiringi oleh Francesc Vendrell, Utusan Pribadi Sekjen PBB. Utusan ini mulai mengadakan pertemuan pada 8 September. Mereka bertemu dengan Presiden Habibie, Megawati Sukarnoputri, yang mungkin menjadi calon pengganti Habibie; seorang staf delegasi UNAMET yang telah meninggalkan markas Dili dan langsung terbang ke Jakarta; serta Jenderal Wiranto. Mereka juga bertemu dengan Xanana Gusmão, yang baru saja dibebaskan. Utusan ini mendesak agar mereka dapat terbang menuju Timor-Leste.

647. Pada 10 September, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Mary Robinson, terbang ke Darwin untuk menemui staf UNAMET asal Timor dan pengungsi yang telah dievakuasi. Ia berbicara kepada publik tentang perlunya pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk dibawa ke pengadilan.<sup>806</sup>

648. Sementara itu, berkumpulnya para pemimpin politik dan ekonomi dunia dalam pertemuan puncak APEC secara tidak sengaja menjadi ajang yang baik untuk membicarakan situasi Timor-Leste. Pernyataan yang berpengaruh datang dari Bank Dunia dan IMF. Presiden Bank Dunia James Wolfensohn menulis langsung kepada Presiden Habibie pada 8 September yang menekankan perlunya Indonesia memulihkan keamanan dan ketertiban serta menghormati hasil Jajak Pendapat. Indonesia, masih rentan dari segi ekonomi setelah terjadinya krisis ekonomi yang melanda Asia pada 1997, semakin mendapatkan banyak tekanan. Ketika Presiden Amerika Serikat tiba di pertemuan puncak APEC pada 11 September, ia mengumumkan penangguhan penjualan senjata ke Indonesia. Inggris dan Uni Eropa juga mengumumkan hal yang sama.

649. Pada 11 September Misi Dewan Keamanan PBB terbang ke Dili. Jenderal Wiranto terbang ke Timor-Leste mendahului Misi PBB tersebut. Ketika utusan tiba, situasi Dili relatif tenang, yang menunjukkan kemampuan TNI untuk menjaga keamanan apabila ia memilih untuk melakukannya.<sup>807</sup> Misi Dewan Keamanan ini mendapat penjelasan singkat di markas TNI, dan bertemu dengan staf UNAMET serta orang-orang Timor-Leste yang terusir yang berada di markas tersebut. Misi ini kembali ke Jakarta pada hari itu juga, karena Dewan Keamanan sedang mengadakan rapat di New York untuk membahas situasi di Timor-Leste. Rapat Dewan Keamanan berakhir hampir enam jam, dengan lima puluh delegasi yang turut berbicara.<sup>808</sup> Dukungan bagi intervensi internasional di Timor-Leste menjadi tinggi, dengan banyak negara yang meminta persetujuan Indonesia atas tindakan ini.

\* Kelima anggota utusan adalah Martin Andjabal dari Namibia, Duta Besar Jeremy Greenstock dari Inggris, Dubes Danilo Türk dari Slovenia, Dubes Hasmy Agam dari Malaysia, dan Menteri Alphons Hamer, Wakil Presiden Dewan Keamanan dari Belanda.

650. Pengasingan Indonesia karena kejadian di Timor-Leste benar-benar mencapai puncaknya. Pada 12 September, dengan Misi Dewan Keamanan masih berada di Jakarta, Presiden Habibie mengadakan rapat Kabinet. Setelah itu, ia menelepon Sekretaris Jenderal PBB untuk meminta bantuan guna memulihkan perdamaian dan keamanan di Timor-Leste, dan segera setelah itu mengumumkan hal ini melalui saluran TV dan radio nasional Indonesia.

651. Dengan mendapat izin dari Indonesia, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 1264 (1999) pada tanggal 15 September, yang memberikan mandat kepada pasukan multinasional dengan kekuasaan Bab VII penuh untuk memulihkan perdamaian dan keamanan di Timor-Leste. Ian Martin memberikan kesaksian kepada Komisi bahwa hanya setelah adanya komitmen internasional inilah ia kemudian membuat keputusan untuk menutup markas UNAMET Dili. Ia menjelaskan kepada Komisi bahwa sebelumnya, pada 8 September, ia menyarankan agar UNAMET menarik diri tetapi pertemuan dengan staf senior menunjukkan bahwa mereka bersedia tinggal selama orang Timor-Leste bersama mereka di markas.<sup>809</sup> Pada 10 September, evakuasi pertama memindahkan sebagian besar staf UNAMET, termasuk beberapa staf asal Timor, meninggalkan 80 sukarelawan untuk tinggal bersama orang Timor-Leste yang mencari perlindungan di markas. Banyak di antara mereka adalah staf Jajak Pendapat UNAMET lokal, dan pasti akan dijadikan sasaran jika ditinggal.

652. Ketika Indonesia mengumumkan pada 12 September bahwa Indonesia akan menerima intervensi internasional, ada kekhawatiran bahwa TNI dan milisi akan melakukan balas dendam terhadap staf UNAMET dan orang-orang yang bersama dengan mereka di markas UNAMET sebelum pasukan mendarat di Dili.<sup>810</sup> Aktivitas diplomatik yang intensif meminta izin Presiden Habibie dan Perdana Menteri Howard untuk melakukan evakuasi terhadap 1.500 orang Timor yang mengungsi di markas UNAMET, dan pada 14 September mereka dievakuasi ke Darwin. Ian Martin ikut terbang bersama mereka. Markas UNAMET ditutup, dan tim kecil yang terdiri atas 12 staf UNAMET dipindah ke konsulat Australia yang dijaga untuk menunggu kedatangan Interfet, dan dikepung oleh tentara Kostrad.

## Evakuasi penduduk secara paksa

653. Di balik upaya diplomatik yang gencar dan foto-foto yang terbatas mengenai Timor-Leste yang dikirim oleh orang-orang yang masih berada di markas UNAMET, perusakan dan pemindahan paksa yang telah mulai pada hari-hari setelah pengumuman hasil Jajak Pendapat semakin meningkat. Meskipun pada umumnya lebih buruk dan dengan waktu lebih lama di wilayah barat di mana TNI-milisi lebih kuat, kekerasan terjadi di seluruh wilayah.<sup>811</sup>

654. Sebelum Jajak Pendapat, TNI dan polisi telah merencanakan evakuasi massal penduduk. Mereka mempunyai rencana darurat terperinci untuk menyelamatkan penduduk dari perang saudara yang diperkirakan Indonesia akan terjadi setelah Jajak Pendapat. Ini merupakan bagian dari kebijakan yang direncanakan sebelumnya,



seperti disebutkan di atas (lihat butir 561).<sup>812</sup> Ada perbedaan pendapat mengenai apakah ini merupakan evakuasi untuk melindungi orang Timor-Leste, atau pemindahan paksa di bawah intimidasi dan kekerasan. Sementara sebagian orang benar-benar ingin meninggalkan wilayah tersebut, kondisi kekerasan diciptakan oleh TNI dan milisi, pelaku yang sama yang melakukan evakuasi. Setelah Jajak Pendapat, 250.000 orang, atau lebih daripada seperempat penduduk, dipindahkan dari Timor-Leste, paling banyak ke Timor Barat (lihat Bab 7.3: Pemindahan paksa dan kelaparan). Baik militer maupun polisi terlibat dalam upaya pemindahan ini, dan polisi serta Kodim digunakan sebagai tempat transit untuk evakuasi.<sup>813</sup> Karena takut terhadap milisi yang menyerang, banyak orang mencari perlindungan kepada militer atau polisi dan setelah itu mereka dibawa ke Timor Barat. Saksi mata mengatakan bahwa orang-orang diusir dari rumah mereka oleh TNI dan milisi, kemudian rumah mereka dirusak.<sup>814</sup> Pengusiran paksa terus terjadi hingga kedatangan Interfet pada 20 September.<sup>815</sup> Banyak orang Timor-Leste terbang dengan pesawat menuju Jawa beberapa hari setelah Jajak Pendapat, karena takut pecahnya kekerasan.

655. Sekitar 400.000 orang diperkirakan melarikan diri untuk menghindari kekerasan di kota dan desa menuju bukit di pedalaman Timor-Leste yang keadaannya relatif aman (lihat Bab 7.3.: Pemindahan paksa dan kelaparan). Karena mereka tidak memercayai militer atau Polisi Indonesia, banyak yang lari mencari perlindungan di markas Falintil di gunung-gunung. Puluhan ribu orang meninggalkan kota-kota besar. Sekitar 10.000 meninggalkan Ermera, dan antara 30.000 dan 40.000 orang meninggalkan Dili menuju wilayah di sekitar kompleks gereja di kaki bukit sekitar Dare. Di Dare, orang-orang yang memiliki telepon seluler mengadakan kontak ke seluruh dunia dan menjelaskan langsung apa yang mereka lihat dari atas bukit dengan mata-kepala mereka mengenai perusakan kota Dili. Makanan, air, dan obat-obatan tidak mencukupi, dan ada ketakutan besar akan adanya serangan TNI dan milisi.

## Interfet datang: TNI ditarik

656. Pada 19 September, Komandan Interfet dari Australia Mayor Jenderal Peter Cosgrove, wakilnya dari Thailand, dan kepala dari kontingen negara lain terbang dari Darwin menuju Dili, yang ditemani oleh kepala UNAMET, Ian Martin. Pada 20 September, tentara Interfet tiba di Timor-Leste.\*

657. Militer Indonesia dalam proses penarikan. Pada 20 - 21 September, Batalion 745 ditarik dari Lautém ke Dili, dan diketahui membunuh hingga 17 orang saat mengundurkan diri (lihat Bab 7.2.: Pembunuhan di luar hukum dan penghilangan paksa). Selain pembunuhan oleh TNI pada periode pasca-Jajak Pendapat, kelompok-kelompok milisi tertentu masih terus aktif. Pada 23 September, milisi membunuh 12 orang di Ainaro. Pada 25 September, lima hari setelah Interfet tiba di Timor-Leste, milisi Tim Alfa, yang telah lama menjalin hubungan dengan

.....  
\* Dengan kekuatan penuh, Interfet terdiri atas kurang-lebih 11.000 pasukan dari dua puluh negara yang berbeda. Australia bertindak sebagai pemimpin pasukan, dan memiliki 5.000 pasukan. Diperlukan waktu beberapa lama untuk mencapai kekuatan maksimum, dan pada awalnya, jumlah pasukan TNI masih melebihi jumlah pasukan Interfet [Dunn, *East Timor*, hal. 361].

Kopassus, menghadang dan mengeksekusi, dengan menggunakan parang, anggota iring-iringan kemanusiaan yang dipimpin oleh Biarawati Katolik, di tikungan di dekat Sungai Sika di Kabupaten Lautém. Sembilan orang, termasuk lima biarawati, seorang wartawan Indonesia, dan dua orang lainnya terbunuh.<sup>816</sup>

658. Sadar akan kemarahan TNI atas intervensinya, serta adanya potensi bahaya dari kelompok milisi, Interfet menempatkan pasukan dengan hati-hati. Interfet butuh waktu satu bulan untuk mencapai daerah terisolasi seperti Oecussi. Setelah keamanan dapat dipulihkan, orang-orang yang tadinya bersembunyi di gunung-gunung atau mencari perlindungan pada Falintil kembali ke puing-puing kota dan desa mereka. Banyak di antara orang-orang yang kembali dari gunung dan tempat lainnya karena pengungsi berada dalam keadaan lapar dan sakit, dan umumnya dalam kondisi sangat jelek. Pada 30 Oktober, militer Indonesia yang terakhir telah ditarik.<sup>817</sup> Komandan Falintil Xanana Gusmão hadir di lapangan terbang Dili untuk menyaksikan pemberangkatan tentara terakhir yang ditarik.

659. Pengalaman 250.000 pengungsi di Timor Barat benar-benar berbeda dengan para pengungsi yang masih berada di wilayah Timor-Leste. Sebagian besar dari mereka tinggal di kamp sepanjang perbatasan dan di dekat Kupang. Komisi mendengarkan kesaksian langsung dari koalisi LSM Indonesia dari Timor Barat, yang bekerja dengan pengungsi Timor-Leste.<sup>818</sup> Koalisi menceritakan tentang kamp-kamp yang dikontrol oleh TNI dan kelompok milisi, di mana orang-orang sipil hidup di bawah ketakutan dan intimidasi. Perempuan dewasa dan anak-anak perempuan khususnya tidak berdaya dan rentan. Kesaksian pada Komisi dari perempuan yang menjadi korban bercerita tentang perbudakan seksual oleh para anggota milisi.

660. Fasilitas di Timor Barat tidak layak dan tidak dapat menampung jumlah pengungsi yang besar tersebut. Saat tiba, banyak pengungsi menandatangani formulir yang menyatakan keinginan mereka untuk menjadi WNI dan bersedia dimukimkan di wilayah mana pun di Indonesia. Beberapa orang kemudian mengatakan bahwa mereka menandatangani karena dipaksa.<sup>819</sup> Kelompok milisi berkuasa di kamp pengungsi, dan terus mencari tokoh-tokoh CNRT. Mau Hodo, yang telah mencoba berdialog dengan KPS setelah Jajak Pendapat, hilang di Atambua.<sup>820</sup> Lama setelah referendum, milisi terus melakukan pelecehan dan mengintimidasi pengungsi, dan menyebarkan informasi bohong mengenai situasi di Timor-Leste. Mereka juga turut campur dengan orang-orang Timor yang ingin kembali.<sup>821</sup>

## **Pembentukan UNTAET:**

### **Resolusi Dewan Keamanan 1272, 25 Oktober 1999**

661. Sejumlah kecil staf UNAMET kembali ke Timor-Leste bersama Interfet. Petugas penghubung militer merupakan orang-orang yang pertama kembali, kemudian disusul oleh polisi dan petugas urusan sipil. Perhatian utama mereka adalah keamanan dan stabilitas, dan menangani krisis kemanusiaan yang dianggap mendesak. Dengan penempatan pasukan Interfet dan pengamanan wilayah Timor-Leste, intervensi kemanusiaan internasional dalam jumlah besar

mulai berdatangan. Konferensi donor diadakan pada November di Tokyo di mana janji sebesar \$ 522 juta diterima.<sup>822</sup> Badan-badan PBB, IMF, dan Bank Dunia, serta LSM internasional melakukan mobilisasi bantuan keadaan darurat. CNRT menyiapkan jaringannya untuk membantu operasi ini. LSM Timor aktif dalam bantuan kemanusiaan dan koordinasi, meskipun mereka menghadapi tantangan besar mengurus lembaga mereka sendiri sementara operasi internasional yang besar berlangsung. Gereja Katolik memainkan peranan penting dalam melakukan koordinasi di banyak tempat.

662. Indonesia bersikeras bahwa secara *de jure* ia mengontrol Timor-Leste sampai MPR membuat keputusan resmi mengenai hasil Jajak Pendapat. Namun, Indonesia setuju bahwa PBB dapat memegang kekuasaan secara *de facto*.<sup>823</sup> Pada 19 Oktober, MPR mencabut Undang-Undang tahun 1976 tentang penggabungan Timor-Leste sebagai sebuah provinsi Timor-Timur, dan pada 25 Oktober Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi 1272 (1999) yang membentuk Pemerintahan Transisi PBB untuk Timor-Leste (UNTAET), yang menjadikan PBB sebagai pemegang otoritas pemerintahan resmi untuk Timor-Leste.

## Pulang

663. Bagi orang Timor yang berada di Timor Barat, di daerah lain di Indonesia, di Portugal, Australia, dan belahan dunia yang lain; orang-orang yang terusir baru-baru ini; mereka yang dibebaskan dari berbagai penjara Indonesia; dan mereka yang lama berada dalam pengasingan, pertanyaannya ialah kapan dan bagaimana mereka dapat kembali ke Timor-Leste. Uskup Belo adalah tokoh yang pertama kembali pada 5 Oktober setelah sebulan berada di luar wilayah Timor-Leste. Xanana Gusmão kembali di tengah-tengah sambutan yang meriah pada 22 Oktober. Setelah 24 tahun berada di luar negeri, José Ramos-Horta tiba dengan Pemerintahan Transisi PBB yang baru diangkat dan Utusan Khusus Sekjen PBB, Sérgio Vieira de Mello, pada 1 Desember. Pengungsi Timor-Leste mulai kembali dari Timor Barat pada bulan-bulan akhir 1999, dibantu oleh UNHCR, IOM, dan LSM internasional. Yang lain, sebagian berada di pengasingan sejak 1975, kembali dan menemukan kampung halaman mereka menjadi abu.

664. Hak untuk menentukan nasib sendiri akhirnya dihormati dan ditegakkan oleh masyarakat internasional, namun hanya setelah orang-orang Timor-Leste menunjukkan keberanian besar untuk menghadapi intimidasi dan kekerasan massal dan setelah mereka memberikan suara mereka. Tugas membangun negara didasarkan atas penghormatan hak asasi manusia, penegakan hukum, serta prinsip demokrasi, termasuk pengadilan bagi kejahatan masa lalu terhadap kemanusiaan, adalah pekerjaan dan harapan generasi saat ini dan masa mendatang.

## Catatan akhir

1. Asvi Warman Adam, dalam sebuah makalah berjudul "Sejarah Timor-Timur dalam Sejarah Indonesia" disampaikan dalam Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional, 15 - 17 Maret 2004.
2. Luís Filipe F. R. Thomaz, *De Ceuta A Timor*, DIFEL, Lisabon, 1994, hal. 598.
3. James Dunn, *East Timor: A Rough Passage to Independence*, Longueville Media, Edisi ketiga 2003, Australia, hal.17
4. René Pélissier (ed), *Timor en Guerre, Le Crocodile et Les Portugais (1847-1913)*, Pelissier: Orgaral, 2000.
5. Soebandrio, yang kemudian menjabat Menteri Luar Negeri, pada Komite Pertama Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 1957, kutipan dalam Dunn hal. 85 - 86
6. Geoffrey Robinson, "People's War: Militias in East Timor and Indonesia", dalam *South East Asia Research* 9, 3, hal. 271 - 318.
7. Hélio Felgas, *Timor Português*, Agência Geral do Ultramar, 1956, hal. 227, seperti dikutip dalam Abílio Araújo, *Timor-Leste: Os Loricos Vontaram a Cantar*, Lisabon, 1977, hal. 75.
8. Lihat Geoffrey C. Gunn, *Timor Loro Sae: 500 Years*, Livros do Oriente, Makau, 1999, hal. 95 - 103.
9. Dunn, *East Timor: A Rough Passage to Independence*, 2003, hal.17
10. René Pélessier (eds), *Timor en Guerre, Lê Crocodile et Les Portugais (1847-1913)*, Pelissier: Orgaral, 2000.
11. Peter Hastings, "The Timor Problem", *Australian Outlook*, Vol. 29, No. 1.
12. David Scott Kesaksian yang disampaikan pada audiensi nasional CAVR tentang Penentuan Nasib Abendiri dan Komunitas Internasional, Dili, 15 - 17 Maret 2004.
13. Dunn, *East Timor: A Rough Passage to Independence*, 2003, hal. 19 - 22.
14. Lihat Tomás Gonçalves testimony to CAVR to National Public Hearing on the International Political Conflict of 1974-1976, 15-18 Desember 2003.
15. Gunn, *Timor Loro Sa'e* hal. 235 - 236.
16. Rowena Lennox, *Fighting Spirit of East Timor: The life of Martinho da Costa Lopes*, Pluto Press, 2000, hal. 62.
17. Xanana Gusmão, *Timor-Leste: Um Povo Uma Pátria*, Edições Colibri, 1994, hal. 3.
18. Arnold Kohen, *From the Place of the Dead: Bishop Belo and the Struggle for East Timor*, Lion Books, 1999, hal. 88.
19. Lennox, *Fighting Spirit*, hal. 63.
20. Gusmão, *Um Povo Uma Pátria*, hal. 3.
21. Lihat Bill Nicol, *Timor: The Stillborn Nation*, Visa Books, Melbourne dan Connecticut, 1978, hal. 21
22. João César das Neves, *The Portuguese Economy: A Picture in Figures XIX and XX Centuries*, Universidade Católica Editora, 1994, hal. 79-84.
23. ACFOA (Australian Council for Overseas Aid), *Report on Visit to East Timor*, Oktober 1975, hal. 7.
24. Dokumen resmi Sidang Umum PBB, Sesi ke-30, Suplemen No. 23 (A/10023/Rv.1), bab VIII, lampiran, bagian B, paragraf 56.
25. Thomaz, hal. 686 - 687; Helen Hill, *Stirrings of Nationalism in East Timor: Fretilin 1974 - 1978, The Origins, Ideologies and Strategies of a Nationalist Movement*, Otford Press, 2002, hal. 39.
26. João Mariano de Sousa Saldanha, *Ekonomi Politik Pembangunan Timor-Timur*, Pustaka Sinar Harapan, 1994, hal. 57; lihat juga: Lembar Kerja tentang Timor dipersiapkan oleh Sekretariat PBB untuk Komite Khusus tentang Dekolonisasi, 20 November 1975, dalam Heike Krieger (ed.), *East Timor and the International Community: Basic Document*, Cambridge University Press, 1997, hal. 18-26.
27. *Timor: pequena monografia*, Agência-Geral do Ultramar, 1965, hal. 47-48.
28. Resolusi Sidang Umum PBB 1807 (XVII), 1962, para. 4 (c). Lihat Heike Krieger (ed.), *East Timor and the International Community: Basic Documents*, Cambridge University Press, 1997, hal. 31.

29. Bill Nicol, *Timor: The Stillborn Nation*, Visa Books, Melbourne dan Connecticut, 1978, hal.21
30. *Relatório da Comissão de Análise e Esclarecimento do Processo de Descolonização de Timor (Relatório CAEPDT)*, Presidência do Conselho de Ministros, Lisabon, 1981, hal. 25.
31. Norrie MacQueen, *The Decolonization of Portuguese Africa: Metropolitan Revolution and the Dissolution of Empire*, Longman, London, 1997 hal. 79.
32. *Relatório da Comissão de Análise e Esclarecimento do Processo de Descolonização de Timor (Relatório CAEPDT)*, Presidência do Conselho de Ministros, Lisabon, 1981, hal. 5.
33. Undang-undang No. 7/1974. Lihat Heike Krieger (ed.), *East Timor and the International Community: Basic Documents*, Cambridge University Press, 1997, hal. 34.
34. Lihat Mario Lemos Pires, 2003, testimoni video kepada Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Internal 1974 - 1976, 15 - 18 Desember 2003
35. Mário Carrascalão, Xanana Gusmão, Francisco Xavier do Amaral, Domingos de Oliveira, João Carrascalão menjelaskan masalah ini dalam kesaksian masing-masing pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Internal pada 1974 - 1976, Dili, 15 - 18 Desember 2003.
36. Kreiger, hal. 25-29.
37. Ibid, hal. 30-31.
38. Mário Lemos Pires, *Descolonização de Timor*, Publicações Dom Quixote, 1994, . 46-47.
39. *Relatório CAEPDT*, hal. 44.
40. Domingos Oliveira, mantan Sekretaris Jenderal partai politik UDT berbicara pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Internal pada 1974 - 1976, Dili, 18 Desember 2003
41. Lihat Mario Lemos Pires, *Relatório do Governo de Timor*, hal. 28 - 30. Lihat juga kesaksian dari Mário Carrascalão dan Domingos de Oliveira tentang UDT, dan Mâri Alkatiri, José Ramos-Horta, dan Francisco Xavier do Amaral tentang ASDT dan Fretilin pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Internal pada 1974 - 1976, 15 - 18 Desember 2003
42. Domingos de Oliveira, kesaksian pada Publik Nasional CAVR tentang Konflik Politik Internal 1974 - 1976, 18 Desember 2003.
43. Mário Lemos Pires, *Descolonização de Timor*, Publicações Dom Quixote, 1994, hal. 191-121.
44. Lihat Lemos Pires, *Relatório*, hal. 23; lihat juga Jill Jolliffe, *East Timor: Nationalism and Colonialism*, The University of Queensland Press, 1978, hal. 67.
45. Wawancara CAVR dengan Paulo Freitas da Silva, Dili 9 Juli 2003; lihat juga Pires, *Relatório*, hal. 20.
46. James Dunn, *East Timor: A Rough Passage to Independence*, Longueville, 2003, hal. 62.
47. Lihat José Ramos-Horta, Jusuf Wanandi, dan James Dunn, kesaksian lisan pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Internal 1974 - 1976, 15-18 Desember 2003. Testimoni Jusuf Wanandi disampaikan sebagai sebuah makalah dan dibacakan secara terbuka oleh Komisioner Nasional Pdt. Agostinho Vasconselos
48. Gary Gray, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Komunitas Internasional, 15 - 17 Maret 2004.
49. Lihat é Ramos-Horta, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Internal 1974 - 1976, 17 Desember 2003.
50. Francesc Vendrell, kesaksian kepada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15 - Maret 2004.
51. Harold Crouch, *The Army and Politics in Indonesia*, Cornell University Press, Ithaca, dan London, hal. 155; Adam Schwarz, *A Nation in Waiting: Indonesia in the 1990s*, Allen & Unwin, NSW, 1994, hal. 20
52. James Dunn, kesaksian lisan pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Internal 1974 - 1976, 17 Desember 2003; Lihat juga Xanana Gusmão, kesaksian lisan kepada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
53. J.R. Walsh dan G.J. Munster, *Documents on Australian Defence and Foreign Policy 1968-1975*, Hong Kong, 1980, . 192-193.
54. Catatan Resmi Majelis Umum, dikutip di Decolonisation, *UN Department of Political Affairs*, No.7, Agustus 1976, hal.41

55. Dikutip dalam Jill Jolliffe, *East Timor: National and Colonialism*, The University of Queensland Press, 1978, hal.66 Faksimil dari surat tersebut ada di Arsip CAVR.
56. Department of Foreign Affairs and Trade [DFAT], Wendy Way (ed.), *Australia and the Indonesian Incorporation of Portuguese Timor, 1974 - 1976*, University of Melbourne Press, 2000, hal.18.
57. Lihat UN document A/AC 108/L. 13.3, tertanggal 3 Desember 1962, dikutip dalam John Taylor, *East Timor: The Price of Freedom*, hal. 21. Lihat juga Ken Conboy, *Intel: Inside Indonesia's Intelligence Service*, Equinox Publishing, Singapore, 2004, hal. 39.
58. Mâri Alkatiri, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974 -1976, 15 - 18 Desember 2003.
59. Wawancara dengan Aloysius Sugianto, mantan perwira Opsus, Jakarta, 24 Juli 2003.
60. Pernyataan Duta Besar Sani kepada Majelis Umum, 13 Desember 1975, dicetak ulang dalam Machmuddin Noor, *Lahirnya Propinsi Timor-Timur*, Badan Penerbit Almanak Republik Indonesia, 1977, hal. 271.
61. James Dunn, *East Timor: A Rough Passage to Independence*, hal. 90. Lihat juga kesaksian James Dunn ke Audiensi Publik Nasional CAVR Mengenai Konflik Politik Internal 1974 - 1976, 15 - 18 Desember 2003.
62. Soekanto dkk., *Integrasi: Kebulatan Tekad Rakyat Timor-Timur*, Yayasan Parikesit, November 1977, hal. 97.
63. Lihat Dokumen 7 Kabel ke Canberra, Jakarta 22 Mei 1974 di DFAT Wendy Way (Ed), *Australia and the Indonesian Incorporation of East Timor*, hal. 56.
64. Lihat Dokumen 26 Catatan Pertemuan antara Whitlam dan Soeharto, Wisma Negara, Yogyakarta, 6 September 1974, pukul 10.00 di DFAT, *Australia and the Indonesian Incorporation of East Timor*, hal. 97.
65. Bilveer Singh, *Timor-Timur, Indonesia dan Dunia: Mitos dan Kenyataan*, Institute for Policy Studies, 1998, hal. 52.
66. Wawancara dengan Jusuf Wanandi, CSIS, Jakarta, 24 Juli 2003.
67. Lihat Mario Carrascalão, Kesaksian Audiensi Publik Nasional CAVR Mengenai Konflik Politik Internal 1974 - 1976, 15-18 Desember 2003.
68. José Ramos-Horta, *Timor-Leste: Amanhã em Dili*, Publicações Dom Quixote, 1994, hal. 58-59. Lihat juga *Funu: The unfinished saga of East Timor*, The Red Sea Press, 1987, hal. 6-7.
69. Ramos-Horta, op. cit., hal. 75-76. Dia juga mengatakan bagaimana dia diklaim "memprovokasi" para pemuda di Bidau untuk melemparkan batu kepada prajurit Portugis, klaim yang menurutnya jelas-jelas salah.
70. Domingos Oliveira, Kesaksian Lisan Audiensi Publik Nasional CAVR Mengenai Konflik Politik Internal 1974 - 1976, 15-18 Desember 2003.
71. Domingos Oliveira, Kesaksian Audiensi Publik Nasional CAVR Mengenai Konflik Politik Internal 1974 - 1976, 15-18 Desember 2003.
72. Francisco Xavier Do Amaral, Kesaksian pada Audiensi Publik Nasional mengenai Konflik Internal, 15 -18 Desember 2003
73. Lemos Pires, Kesaksian Video Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974 - 1976, 15-18 Desember 2003.
74. Mário Carrascalão, kesaksian pada Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974 - 1976, 15-18 Desember 2003.
75. João Carrascalão, Mâri Alkatiri, Francisco Xavier Amaral dan Domingos de Oliveira, Kesaksian Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974 - 1976, 15-18 Desember 2003.
76. José Ramos-Horta, *Timor-Leste: Amanhã em Dili*, Publicações Dom Quixote, 1994, hal. 96-97.
77. Lihat Domingos Oliveira, Kesaksian Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974 - 1976, 15 - 18 Desember 2003.
78. Xanana Gusmão, Kesaksian Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal -76, 15-18 Desember 2003.
79. Wawancara CAVR dengan Tomás Gonçalves, Dili, 23 Oktober 2003.

80. Rogério Lobato, kesaksian Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974 - 1976, 15-18 Desember 2003.
81. Rogerio Lobato, *ibid*
82. Pires, *Decolonização*, hal. 112 - 113.
83. Rogerio Lobato, kesaksian Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974 - 1976, 15 - 18 Desember 2003.
84. Mâri Alkatiri, kesaksian Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974 - 1976, 15-18 Desember 2003; Lihat juga wawancara dengan Nicolau Marito Reis, Dili
85. Mario Carrascalão dan Domingos Oliveira, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974 - 1976, 15-18 Desember 2003.
86. Mâri Alkatiri, kesaksian Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974 - 1976, 15-18 Desember 2003.
87. Mâri Alkatiri, *ibid*
88. Manuel Carrascalão, kesaksian Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974 - 1976, 15 Desember 2003.
89. Domingos Oliveira, kesaksian Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974 - 1976, 15-18 Desember 2003.
90. Fretilin, *Manual e Programa Políticos*, hal. 9
91. Lihat Mari Alkatiri, kesaksian Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974 - 1976, 15-18 Desember 2003.
92. Lihat Mario Carrascalão, Kesaksian pada Audiensi Publik Nasional Mengenai Konflik Politik Internal 1974 - 1976, 15-18 Desember 2003.
93. Lihat Mario Carrascalão, kesaksian Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974 - 1976, 15-18 Desember 2003.
94. José Ramos-Horta, kesaksian Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
95. João Carrascalão, kesaksian Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
96. José Ramos-Horta, kesaksian Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
97. Mario Carrascalão, kesaksian Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
98. Mario Carrascalão, kesaksian Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
99. Mario Carrascalão, kesaksian Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
100. João Carrascalão dan Mâri Alkatiri, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
101. Mâri Alkatiri, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
102. José Ramos-Horta, kesaksian Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
103. Tomãs Gonçalves, kesaksian Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
104. Lihat, misalnya, Manuel Duarte, kesaksian Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003; lihat juga Alexandre da Costa dan Antônio Amado, Kesaksian pada Audiensi Publik Nasional mengenai Pembantaian, 19-21 November 2003; lihat juga Domingos Maria Alves, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional mengenai Penahanan Politik, 17-18 Februari 2003.
105. Isabel dos Santos Neves, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional mengenai Anak-anak dan Konflik, 29-30 Maret 2004.

106. Xanana Gusmão, kesaksian Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
107. Mário Lemos Pires, *Decolonização de Timor*, Publicações Dom Quixote, 1994, h. 58.
108. *Relatório da Comissão de Análise e Esclarecimento do Process de Descolonização de Timor II*, [Analisa dan Penjelasan mengenai proses dekolonisasi di Timor II], presidência do conselho de ministros, Lisabon, 1981
109. Mario Lemos Pires, kesaksian video Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 16 Desember 2003.
110. *Relatório da Comissão de Análise e Esclarecimento do Process de Descolonização de Timor II*, h. 38.
111. A. Barbedo de Magalhães, *Descolonização do Ensino em Timor: Um Projecto a Intervenção Indonésia Matou a Nascimento*, Porto, Februari 1997.
112. Rogério Lobato, kesaksian Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
113. Mario Lemos Pires, kesaksian video Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 17 Desember 2003.
114. Mario Carrascalão, kesaksian Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
115. Domingos Oliveira, kesaksian Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
116. Mario Carrascalão dan Mari Alkatiri, kesaksian lisan Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
117. Domingos Oliveira, kesaksian Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
118. Mario Lemos Pires, kesaksian video Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
119. Lihat, "Setelah Townsville," *Tempo*, 5 Mei 1975; Conboy, *Kopassus*, h. 208; lihat juga Ramos-Horta, *Funu*, hal. 66.
120. Ramos-Horta, *Funu*, h. 64.
121. Mario Carrascalão, kesaksian Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
122. Domingos Oliveira, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
123. Lihat kesaksian dari Xanana Gusmão dan Mario Carrascalão Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
124. Domingos de Oliveira, mantan Sekretaris Jenderal UDT, kesaksian Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
125. Lihat: "Indonesia Plans Armed Takeover in Timor," *The Age*, 22 Februari 1975, Melbourne, Australia, dikutip dalam Taylor, *East Timor*, h. 40 dan catatan kaki 44; lihat juga Conboy, *Kopassus*, h. 238.
126. Jiwa Atmaja, *TNI Kembali ke Jatidiri: Profesionalisme Kodam IX/Udayana*, h. 74.
127. Conboy, *Intel*, h. 90.
128. Wawancara CAVR dengan Tomàs Gonçalves, anggota Apodeti awal, Dili, 23 Oktober 2003.
129. Tomàs Gonçalves, kesaksian Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
130. Tomàs Gonçalves, kesaksian Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
131. Conboy, *Kopassus*, hal. 207.
132. Soekanto (ed.), *Integrasi*, Yayasan Parikesit, 1976, hal. 116-134.
133. Lemos, *Decolonização*, hal. 49.
134. *Relatorio II*, hal. 54.
135. *Relatorio II*, hal. 44-46.



136. Mário Lemos Pires, kesaksian video pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
137. Lihat Dokumen 123 di , *Australia and the Indonesian Incorporation of Portuguese Timor 1974-1976*, . 247.
138. Lihat Dokumen 26, Record of Meeting between Whitlam and Soeharto, State Guest House, Yogyakarta, 6 September 1974, 10 am, dalam DFAT, Wendy Way (Ed) *Australia and the Indonesian Incorporation of Portuguese Timor*, hal. 96.
139. Ibid. hal. 97.
140. Lihat Dokumen 123, Record of Conversation between Whitlam and Soeharto, Townsville, 4 April 1975, dalam Wendy Way (Ed), *Australia and the Indonesian Incorporation of Portuguese Timor, 1974-76*, hal. 245
141. Ibid
142. Lihat Dokumen 14, Memorandum to Jakarta, Canberra 5 July 1974, dalam DFAT, Wendy Way (Ed) *Australia and the Indonesian Incorporation of Portuguese Timor, 1974-76*, hal. 119.
143. Lihat Dokumen 37, Minute from Woolcott to Renouf, Canberra, 24 September 1974, dalam DFAT, Wendy Way (Ed) *Australia and the Indonesian Incorporation of Portuguese Timor, 1974-76*, hal.111.
144. Lihat Document 127, Letter from Woolcott to Willesee, Jakarta, 17 April 1975, dalam DFAT, Wendy Way (Ed) *Australia and the Indonesian Incorporation of Portuguese Timor, 1974-76*, hal.253.
145. Richard Woolcott, *The Hot Seat, Reflection on Diplomacy from Stalin's Death to the Bali Bombings*, Harpers Collins Publishers, Sydney, 2003, hal. 306.
146. Lemos , *Decolonização*, Publicações Dom Quixote, 1994, hal. 167-168.
147. Francisco Xavier do Amaral, mantan Presiden Fretilin, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
148. Francisco Xavier do Amaral, ibid.
149. Wawancara CAVR dengan Mari Alkatiri, Perdana Menteri RDTL, di kantor Perdana Menteri, Juni 2004. Lihat juga kesaksian oleh Mari Alkatiri pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
150. Mário Carrascalão, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
151. National Security Archive collection, Memorandum of Conversation between Presidents Ford and Suharto, 5 July 1975, Camp David.
152. Woolcott, *The Hot Seat*, hal.148.
153. Lihat Domingos de Oliveira dan João Carrascalão, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Politik Internal 1974-76, 18 Desember 2003.
154. Mário Lemos Pires, kesaksian video pada Audiensi Publik Nasional tentang Konflik Politik Internal 1974-76, 16 Desember 2003.
155. Tomàs Gonçalves, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional tentang Konflik Politik Internal 1974-76, 18 Desember 2003.
156. Wawancara CAVR dengan João Carrascalão, Dili, 30 Juli 2004.
157. Lihat dokumen 169, Cablegram to Canberra, Jakarta, 17 Agustus 1975, dalam DFAT, Wendy Way (ed), *Documents on Australian Foreign Policy: Australia and the Incorporation of Portuguese Timor, 1974-76*, hal.313
158. João Carrascalão, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional tentang Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
159. Mário Carrascalão dan Domingos de Oliveira, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003 secara berurutan.
160. Submisi Domingos de Oliveira pada CAVR, hal. 26
161. Lemos Pires, *Decolonização*, Publicações Dom Quixote, 1994, hal. 181-231
162. Ibid, hal. 204.
163. Rogério , kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Politik Internal 1974-76, 17 Desember 2003.

164. Mário Carrascalão dan Domingos de Oliveira, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional tentang Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
165. Mário Lemos Pires, kesaksian video pada Audiensi Publik Nasional tentang Konflik Politik Internal 1974-76, 16 Desember 2003.
166. Lihat *Relatório da CAEPDT*, Presidencia do Conselho de Ministros, Lisabon, 1981, hal. 186-191; lihat juga Lemos Pires, *Decolonização*, hal. 228.
167. Lemos Pires, *Decolonização*, hal. 213.
168. Ibid, hal. 225.
169. Jolliffe, *East Timor: Nationalism and Colonialism*, The University of Queensland Press, 1978, hal. 121-122; lihat juga Pires, *Decolonização*, hal. 205
170. *Relatório do Governo de Timor*, hal. 118.
171. Wawancara CAVR dengan Rogério Lobato, Dili, 26 Agustus 2003.
172. Wawancara CAVR dengan Lucas da Costa, anggota komite regional ASDT, Dili, 21 Juni 2004.
173. Wawancara CAVR dengan Rogério Lobato, Dili, 26 Agustus 2003.
174. Mario Carrascalão, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional tentang Konflik Politik Internal 1974-76, 15 Desember 2003; Mário Lemos Pires, kesaksian video pada Audiensi Publik Nasional tentang Konflik Politik Internal 1974-76, 15 Desember 2003; dan Profil Komunitas , Suco Asucaí Lorosae, Sub-distrik Nain Feto, Dili, 29 Agustus 2003.
175. Mario Carrascalão, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional tentang Konflik Politik Internal 1974-76, 18 Desember 2003.
176. Francisco Xavier do Amaral, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional tentang Konflik Politik Internal 1974-76, 18 Desember 2003.
177. Dunn, *East Timor: A Rough Passage to Independence*, 2003, hal. 176
178. Wawancara CAVR dengan Elidio Maria de Jesus, 24 Juni 2003; lihat juga Pernyataan HRVD # 03426-01 dan 03427-01.
179. Lihat Adelino Soares, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional tentang Pemencaraan Politik, 17-18 Desember 2003; lihat juga Manuel Duarte, kesaksian lisan pada Audiensi Publik Nasional tentang Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003; lihat juga wawancara dengan Florentino de Jesus Martins, Ermera, [wawancara tanpa tanggal].
180. Xanana Gusmão, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional tentang Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
181. Rogério Lobato, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional tentang Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
182. João Carrascalão dan Mári Alkatiri, kesaksian lisan pada Audiensi Publik Nasional tentang Konflik Politik Internal Bersenjata 1974-76, 15-18 Desember 2003
183. Tentang keterlibatan tokoh-tokoh senior dalam pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Fretilin, lihat wawancara CAVR dengan Humberto Martins da Cruz, Dili, dan wawancara CAVR dengan Francisco Gonçalves; tentang pelanggaran-pelanggaran UDT, lihat wawancara CAVR dengan João Carrascalão, Dili, 30 Juli 2004.
184. Mário Carrascalão dan Rogério Lobato, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional tentang Konflik Politik Internal 1974-76, 15 dan 17 Desember 2003 secara berurutan.
185. Mário Carrascalão, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional tentang Konflik Politik Internal 1974-76, 15 Desember 2003.
186. Tomãs Gonçalves, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional tentang Konflik Politik Internal 1974-76, 18 Desember 2003; lihat juga wawancara dengan Aloysius Sugiyanto, Jakarta, 23 Juli 2003.
187. Tomãs Gonçalves, kesaksian oral pada Audiensi Publik Nasional tentang Konflik Politik Internal 1974-76, 18 Desember 2003, João Carrascalão, ibid; dan Bapa Francisco Fernandes dan Bapa Apolinario Guterres, Pernyataan Dikirim ke Komite Empat Sidang Umum PBB atas nama Comissão dos Refugiados de Timor Oriental, 26 Oktober 1979.
188. Lemos Pires, *Decolonização*, hal. 247-248.

189. Jolliffe, *East Timor*, hal. 139; lihat juga Dunn, *East Timor*, 2003 hal. 179.
190. *Relatório da CAEPDT*, hal. 230.
191. Lihat *Relatorio da CAEPDT I*, hal. 308-311; *Relatorio da CAEPDT*, hal. 231; Dunn, op.cit., hal. 184; dan Jolliffe, op.cit., hal. 184.
192. Lihat Akihisa Matsuno, "The Balibó Declaration: Between Text and Fact," dalam Pedro Pinto Leite [editor], *The East Timor Problem and the Role of Europe*, International Platform of Jurists for East Timor, 1996.
193. Heike Krieger [editor], *East Timor and the International Community: Basic Documents*, Cambridge University Press, Cambridge, 1997, hal. 70-71.
194. Mario Carrascalão, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional tentang Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003; lihat juga Jolliffe, hal. 150.
195. Conboy, *Kopassus*, hal. 211 dan 233; lihat juga Julius Pour, *Benny Moerdani: Portrait of a Soldier Statesman*, Yayasan Kejuangan Panglima Besar Sudirman, Jakarta, 1993, hal. 390.
196. Conboy, *Kopassus*, hal. 218-221; lihat juga wawancara dengan Rui Lopes, Camenassa, Covalima, 31 Oktober 2003.
197. Conboy, *Kopassus*, hal. 212.
198. Wawancara CAVR dengan Rui Lopes, Camenassa, Covalima, 31 Oktober 2003.
199. "International Committee of the Red Cross, East Timor Relief Operation," *Report to the ICRC Geneva*, 16 September 1976, hal. 1.
200. Jolliffe, *East Timor*, hal. 146.
201. Jolliffe, *East Timor*, hal. 164; lihat juga Helen Hill, *Stirrings of Nationalism in East Timor*, Otford Press, Sydney, 2001, h. 154.
202. Wawancara CAVR dengan Francisco Xavier do Amaral, Dili, 18 Juni 2004.
203. Jolliffe, *East Timor*, hal. 155; Hill, *Stirrings of Nationalism*; Dunn, *East Timor*, 2003, hal. 271.
204. Komite Sentral Fretilin, siaran pers, 13 September 1975, ditandatangani oleh Francisco Xavier do Amaral. arsip CAVR.
205. *Relatório da CAEPDT*, hal. 230.
206. Pernyataan Komite Sentral Fretilin, 16 September 1975, dokumen ditulis tapi tidak ditandatangani oleh Francisco Xavier do Amaral. [Arsip CAVR].
207. Dunn, *Timor: A People Betrayed*, hal. 229.
208. Jolliffe, *East Timor*, hal. 180.
209. Wawancara CAVR dengan Francisco Xavier do Amaral, Dili, 18 Juni 2004.
210. Lihat, contohnya, Pernyataan HRVD 02226; 09081; 08432.
211. Lihat contohnya João Baptista, 19/08/2003, Alleu, Pernyataan 05806-01, basis data PRK CAVR; dan João Soares, 15/05/2003, Ainaro, Pernyataan 04969-01, CAVR basis data PRK.
212. Francisco Xavier do Amaral, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
213. Pernyataan HRVD 01688.
214. Lihat Mâri Alkatiri, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, sebagai Sekretaris Jenderal Fretilin, 15-18 Desember 2003.
215. *Report on Visit to Portuguese Timor by Senator Gietzelt dan K.L. Fry*, h. 4 [Arsip CAVR]; lihat juga Dunn, *East Timor: Rough Passage to Independence*, 2003, hal. 220.
216. Mâri Alkatiri, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Internal 1974-76, sebagai Sekretaris Jenderal Fretilin, 15-18 Desember 2003.
217. Lihat Senator Gietzelt dan KL Fry, *Report on visit to Portuguese Timor*, September 1975; lihat juga James Dunn, *A People Betrayed*, hal. 187; lihat juga wawancara CAVR dengan Mari Alkatiri, Dili, 25 Juni 2004.
218. Monis da Maia, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-8 Desember 2003.

219. Wawancara CAVR dengan Mari Alkatiri, mantan Sekretaris Jenderal Fretilin, Dili, 25 Juni 2004.
220. Wawancara CAVR dengan Monis da Maia, Manlewana-Dili, 5 Desember 2004.
221. Wawancara CAVR dengan João da Costa, Letefoho-Same, 24 Juni 2003.
222. José Ramos-Horta, "Timor-Leste Amanah Ed Dili", dari De regresso de Jacarta, a cupula da UDT hal. 107-113.
223. Wawancara CAVR dengan João da Costa, Letefoho-Same, 24 Juni 2003.
224. *Report on Visit to Portuguese East Timor*, Senator Gietzelt dan K.L. Fry, h. 4.
225. Rogerio Lobato, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
226. Mâri Alkatiri, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
227. Wawancara CAVR dengan Filomeno Pedro Cabral Ferndanes, Dili, 5 Mei 2004.
228. Pernyataan HRVD 03361-01.
229. Xanana Gusmão, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003; lihat juga Rogério Lobato, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
230. Wawancara CAVR dengan Francisco Xavier do Amaral, mantan Presiden Fretilin, Dili, 18 Juni 2004.
231. Lihat Dunn, *A Rough Passage to Independence*, 2003 p 211; Lihat juga *Report on Visit to Portuguese East Timor*, Senator Goetzelt dan K.L. Fry, h. 3, Arsip CAVR.
232. *Report on Visit to Portuguese East Timor*, Senator Gietzelt dan K.L. Fry, hal. 8.
233. Helen Hill, *Stirrings of Nationalism in East Timor*, Otford Press, Sydney, 2001, hal. 155.
234. Wawancara CAVR dengan Francisco Xavier do Amaral, mantan Presiden Fretilin, Dili, 18 Juni 2004.
235. Hill, *Stirrings of Nationalism*, 2001, hal. 155.
236. Hill, *ibid.* 185.
237. *ICRC Relief Programme in Eastern Timor*, 24 November 1975, hal. 2; lihat juga Geoffrey Gunn, *Timor Loro Sae: 500 Years*, Livros do Oriente, 2000, bab 13 "Colonial Capitalism dan Underdevelopment in Post-war Timor."
238. Lihat John G. Taylor, *Perang Tersembunyi: Sejarah Timor-Leste yang Dilupakan*, Fortilos, Jakarta, 1998, hal. 1-28. [Diterjemahkan dari John G. Taylor, *Indonesia's Forgotten War: The Hidden History of East Timor*, Zed Books, London, 1991.]
239. Andre Pasquier kepada ICRC Geneva, *Concerning the Situation in East Timor, Report on the activities of the delegation from 1-15 September*, Darwin, 16 September 1975.
240. Wawancara CAVR dengan Francisco Xavier do Amaral, mantan Presiden Fretilin, Lecidere, 28 Agustus 2003.
241. Wawancara CAVR dengan Monis da Maia, Mantewana-Dili 5 Desember 2003; lihat juga wawancara dengan Rafael Nascimento, Aileu, Juni 2003.
242. Wawancara CAVR dengan Francisco do Amaral, mantan presiden Fretilin, Dili, 18 Juni 2004.
243. *Report on Visit to Portuguese East Timor*, Senator Gietzelt dan K.L. Fry, hal. 6.
244. ACFOA, *Report on a Visit to East Timor for the ACFOA Timor Task Force*, hal. 8.
245. Hill, *Stirrings of Nationalism*, 2000, hal. 192.
246. Wawancara CAVR dengan Lucas da Costa, anggota komite regional ASDT, Dili, 21 Juni 2004.
247. *Report on Visit to East Timor for the ACFOA Timor Task Force*, hal. 4 dan hal. 7.
248. Shirley Shackleton, "Planting a Tree in Balibó", dalam Peter Carey, Ed, *East Timor at the Crossroads*, Cassell, New York, 1995, hal. 116.
249. Jolliffe, *East Timor*, hal. 201.
250. Adelino Gomes (Wartawan Portugis), rekaman film ada pada Arsip CAVR.
251. Wawancara dengan João Viegas Carrascalão, 13 Maret 1996, transkripsi, hal. 131, "Report on the Deaths of the Australian-Based Journalists in East Timor in 1975", Juni 1996.

252. Van Atta dan Toohey, "The Timor Papers, part II" *The National Times*, hal. 16.
253. Wawancara CAVR dengan Albino do Carmo, Suai, 31 Oktober 2003.
254. Budiardjo dan Liem, *The War Against East Timor*, Zed Books, London, h. 21; Conboy, *Kopassus*, hal. 231-232; *Korps Marinir TNI AL, 1970-2000*, Jakarta, Dinas Penerangan Korps Marinir, 2000, hal. 188-189.
255. Wawancara CAVR dengan Francisco Xavier do Amaral, mantan pemimpin Fretilin, Dili, 18 Juni 2004.
256. Jolliffe, *East Timor*, h. 201; lihat juga Mâri Alkatiri, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
257. Francisco Xavier do Amaral, Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
258. Jolliffe, AAP's Delivery, 11 Oktober 1975, dikutip oleh Hill, *Stirrings of Nationalism*, 2001, hal. 157.
259. Hill, *Stirrings of Nationalism*, hal. 197.
260. Jolliffe, *East Timor*, hal. 215-16.
261. Dunn, *East Timor: A Rough Passage to Independence*, 2003, hal. 232.
262. Wawancara CAVR dengan Adriano João, bekas anggota Falintil selama 1975, Dili, September 2004.
263. Jolliffe, *East Timor*, hal. 217; wawancara CAVR dengan Mari Alkatiri, mantan Sekretaris Jenderal Fretilin, Dili, 25 Juni 2004.
264. Wawancara CAVR dengan Mari Alkatiri, mantan Sekretaris Jenderal Fretilin, Dili, 25 Juni 2004; lihat juga Jolliffe, *East Timor*, hal. 217; lihat juga José Ramos-Horta, *Funu: Perjuangan Timor Lorosae Belum Selesai*, Solidamor, Jakarta, 1998, hal. 145-146 [terjemahan dari Jose Ramos-Horta, *Funu: Unfinished Saga of East Timor*, The Red Sea Press, Trenton NJ, 1987].
265. Wawancara CAVR dengan Mari Alkatiri, Dili, 25 Juni 2004; lihat juga Jolliffe, *East Timor*, hal. 216; lihat juga Ramos-Horta, *Funu*, hal. 146.
266. Hill, *Stirrings of Nationalism*, 2001, hal. 201.
267. Wawancara CAVR dengan Manuel Gaspar da Silva, mantan anggota milisi Fretilin, Uatolari, Viqueque 19 September 2003.
268. Hill, *Stirrings of Nationalism*, 2001, hal. 200.
269. Wawancara CAVR dengan Francisco Xavier do Amaral, mantan Presiden Fretilin, Dili, 18 Juni 2004.
270. Wawancara CAVR dengan Mari Alkatiri, Dili, 25 Juni 2004.
271. Jolliffe, *East Timor*, hal. 217.
272. Jolliffe, *East Timor*, hal. 217; Ramos Horta, *Funu*, hal. 146.
273. Francisco Xavier do Amaral, "Comrades! Independence or death! We will win," terjemahan bahasa Inggris dari pidato yang disampaikan ketika pelantikan anggota menteri kabinet RDTL, Dili, 29 November 1975, hal. 8 [salinan ada pada arsip CAVR].
274. Wawancara CAVR dengan Mari Alkatiri, Dili, 25 Juni 2004; lihat juga wawancara CAVR dengan Lucas da Costa, Anggota Majelis Daerah ASDT, Dili, 21 Juni 2004; lihat juga wawancara CAVR dengan Francisco Xavier do Amaral, Dili, 18 Juni 2004.
275. Wawancara CAVR dengan Francisco Xavier do Amaral, Dili, 18 Juni 2004.
276. Soekanto (ed.), *Integrasi*, hal. 283-284.
277. Lihat Akihisa Matsuno, "The Balibó Declaration: Between Text and Fact," dalam Pedro Pinto Leite [editor], *The East Timor Problem and the Role of Europe*, International Platform of Jurists for East Timor, 1996.
278. Mario Carrascalão, João Carrascalão, dan Domingos de Oliveira; Clementino Amaral; dan Paul Freitas; kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003; lihat juga José Martins dari KOTA dalam suatu wawancara dengan Aboeprijadi Santoso yang diterbitkan dalam *Jejak-jejak Darah: Tragedi & Pengkhianatan di Timor-Timur*, Amsterdam dan Yogyakarta: Stichting Inham & Pijar, 1996, hal. 85-86.
279. Mario Carrascalão, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.

280. *East Timor and the International Community: Basic Documents*, Cambridge, Cambridge University Press, 1997, hal. 39-40.
281. United Nations Department of Political Affairs, *Trusteeship and Decolonisation*, No. 7, Agustus 1976, hal. 44.
282. Wawancara CAVR dengan Jusuf Wanandi, bekas peneliti CSIS, , 24 Juli 2003.
283. Soekanto, *Integrasi*, hal. 276.
284. Soekanto, *Integrasi*, hal. 289-291.
285. "Malik Warns," *The Canberra Times*, 3 Desember 1975, dikutip dalam Jolliffe, *East Timor*, hal. 225-226.
286. Lihat, misalnya, dalam DFAT, Wendy Way (Ed), *Australia and the Indonesian Incorporation of Portuguese East Timor*, hal. 468-470 Dokumen 206, Cablegram to Canberra, Kuala Lumpur, 2 September 1975
287. Lihat Dunn, *East Timor: A Rough Passage to Independence*, 2003, hal.152, 155, 157; lihat juga telegram Kedutaan Besar AS di Surabaya ke Kedutaan Besar AS di Jakarta, 20 Februari 1975; memorandum 6362-x kepada Henry Kissinger dari National Security Council, 30 Desember 1974; Telegram US Department of State, Kedutaan Besar AS Jakarta kepada Menteri Luar Negeri, Washington, 21 Agustus 1975.
288. *Decolonization*, hal.30; lihat juga Jolliffe, *East Timor*, hal. 217.
289. Dunn, *East Timor: A Rough Passage to Independence*, 1983, hal. 276.
290. Dunn, *ibid*, 1983, hal. 236.
291. Telegram dari Kedutaan Besar AS di Jakarta kepada Menteri Luar Negeri di Washington, Pertemuan, 6 Desember 1975.
292. Wawancara CAVR dengan Francisco Xavier do Amaral, Dili, 18 Juni 2004; diulang kembali dalam Mari Alkatiri dan Francisco Xavier do Amaral, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
293. Jolliffe, *East Timor*, hal. 226.
294. Jolliffe, *ibid*, hal. 227.
295. David Scott, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional, Maret 2004.
296. Wawancara CAVR dengan Mari Alkatiri, Dili, 25 Juni 2004.
297. Jolliffe, *East Timor*, hal. 232.
298. Kenneth Chan, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib sendiri dan Masyarakat Internasional, 15-17 Maret 2004.
299. Telegram dari Francisco Xavier do Amaral kepada Presiden AS Ford, Dili, 5 Desember 1975.
300. Telegram dari Kedutaan Besar Amerika Jakarta kepada Menteri Luar Negeri di Washington, 'Pertemuan Ford-Suharto', 6 Desember 1975.
301. Machmuddin Noor et. al, *Lahirnya Propinsi Timor-Timur*, Badan Penerbit Almanak Republik Indonesia, Jakarta, 1977, hal. 83.
302. Machmuddin Noor et. al, *Lahirnya*, hal. 82.
303. Dunn, *East Timor: A Rough Passage to Independence*, 2003, hal. 251.
304. Telegram dari Mari Alkatiri kepada Presiden UNSC, diserahkan kepada UNSC 8 Oktober, dikutip dalam telegram, Misi AS di PBB New York kepada Menteri Luar Negeri di Washington, *Cables to Security Council about Portuguese Timor from Fretilin*, 11 Oktober 1975.
305. Dunn, *East Timor: A Rough Passage to Independence*, 2003,, hal. 196.
306. Lihat Van Atta dan Toohey, hal. 15; juga lihat Ken Conboy, *Kopassus*, Equinox Publishing, Jakarta, 2003, hal. 231.
307. Hendro Subroto, *Eyewitness to the Integration of East Timor*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hal. 147.
308. Asvi Warman Adam, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional, 15 - 17 Maret 2004.

309. Lihat Subroto, *Eyewitness*, hal. 137-138 dan *Korps Marinir*, hal. 190.
310. Subroto, *Eyewitness*, hal. 142.
311. *Korps Marinir* hal. 190; juga lihat Subroto, *Eyewitness*, hal. 137.
312. Subroto, *Eyewitness*, hal. 137, 150; lihat juga M. Saleh Kamah, *Seroja*, hal. 106; juga lihat *Korps Marinir*, hal. 191.
313. Pour, *Murdani*, hal. 398; juga lihat James Dunn, *Timor: A People Betrayed*, 1996, hal. 282.
314. Subroto, *Eyewitness*, hal. 154.
315. Conboy, *Kopassus*, hal. 243.
316. John G. Taylor, *East Timor: Indonesia's Forgotten War*, Zed Books, London, 1991, hal. 70.
317. Subroto, *Eyewitness*, hal. 170.
318. Subroto, *ibid*, hal. 174.
319. Wawancara CAVR dengan Carlos Maria Soares, Dili, 27 Desember 2003.
320. George Aditjondro, *In the Shadow of Mt Ramelau: The Impact of the Occupation of East Timor*, Leiden, INDOC Belanda, 1994, hal. 87.
321. Pour, *Murdani*, hal. 325.
322. Memorandum Dewan Keamanan Nasional untuk Brent Scowcroft, dari Clinton E Granger, *Indonesian Use of MAP Equipment in East Timor*, 12 Desember 1975.
323. José Ramos-Horta, "Timor-Leste Amanha Em Dili", dari *De regresso de Jacarta, a cupula da UDT*, hal. 113.
324. *Pernyataan Pemerintah tentang Timor Portugis*, Antara, 9 Desember 1975.
325. *Pernyataan Pemerintah Indonesia tentang Timor Portugis*, Antara, 15 Desember 1975.
326. Lihat, sebagai contoh, M. S. Kamah, *Catatan dari Dili*, Antara, 19 Desember 1975.
327. Asvi Warman Adam, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional, 15 - 17 Maret 2004.
328. Wawancara CAVR dengan Francisco Calsonha, 13 Agustus 2004, Dili; Wawancara CAVR dengan Kuo Nhen (Konneng) Lay (alias Mali Sera), 23 Februari 2004, Dili. Lihat juga Bab 7.2: Pembunuhan Di Luar Hukum dan Penghilangan Paksa.
329. Wawancara CAVR dengan Alexandrino do Rego, mantan pekerja rumah sakit, Dili, 4 Februari 2004.
330. Wawancara CAVR dengan Frederico dos Santos Almeida, Dili, 29 Agustus 2003.
331. Wawancara CAVR dengan Kuon Nhen (Konneng) Lay, alias Mali Sera, Dili, 23 Februari 2004.
332. Subroto, *Eyewitness*, hal. 182.
333. Felismina dos Santos Conceição, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR Nasional mengenai Pembantaian, Dili, November 2003.
334. Lihat Wawancara CAVR dengan Francisco Soriano, Dili, 3 Juli 2004; juga lihat pernyataan HRVD 25666; juga lihat Wawancara CAVR dengan Francisco da Cunha, Dili, 3 Februari 2004.
335. Pernyataan HRVD 9471-02; juga lihat Wawancara CAVR dengan Domingos Freitas, Dili, 29 Juni 2004.
336. Lihat, misalnya, kesaksian Xanana Gusmão dan Francisco Xavier do Amaral pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
337. Kesaksian Xanana Gusmão di Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Internal Politik 1974-76, 15-18 Desember 2003.
338. Tomas Goncalves dan Clementino Amaral (sebagai wakil Partai KOTA) kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 18 Desember 2003.
339. Telegram, Misi di PBB, New York kepada Menteri Luar Negeri di Washington, *Portuguese Timor: Further Messages to United Nations from Fretilin*, 18 Desember 1975.
340. Pour, *Murdani*, hal. 398-399.
341. David Scott, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional, 15 - 17 Maret 2004.

342. Telegram, Misi AS di PBB New York kepada Menteri Luar Negeri di Washington, *Portuguese Timor—Letter to President of UNSC from Fretilin*, 4 Februari 1976; juga lihat Telegram, selebaran US Department of State, *Timor*, 29 Januari 1976; juga lihat David Scott, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional, 15 - 17 Maret 2004.
343. Telegram, Misi AS di PBB New York kepada Menteri Luar Negeri di Washington, *Text of letter to President of UNSC from Fretilin*, 4 Februari 1976.
344. Lihat Francisc Vendrell, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional, 15 - 17 Maret 2004.
345. Machmuddin Noor et. al, *Lahirnya Propinsi Timor-Timur*, Badan Penerbit Almanak Republik Indonesia, 1977, hal. 26.
346. Noor, *ibid*, hal. 29.
347. Noor, *ibid*, hal. 52.
348. Telegram dari Pemerintahan Sementara Timor-Leste (PGET) kepada Presiden Dewan Keamanan PBB, dikutip dalam telegram dari Misi AS di PBB New York kepada Menteri Luar Negeri di Washington, 23 Desember 1975; juga lihat Machmuddin Noor et. al, *Lahirnya*, hal. 56.
349. Wawancara CAVR dengan Mario Viegas Carrascalão, Dili, 30 Juni 2004.
350. Machmuddin Noor et. al, *Lahirnya*, hal. 59.
351. Lihat David Scott, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional. 15-17 Maret 2003; juga lihat Carmel Budiardjo dan Liem Soei Liong, *The War Against East Timor*, Zed Books, London, 1984, hal 15, 23; Dunn 2004, hal 244.
352. Lihat Conboy, *Kopassus*, hal. 256.
353. Antonio Serpa dan Monis da Maia, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15 - 18 Desember 2003.
354. Wawancara CAVR dengan Humberto Martins da Cruz, mantan kepala penjara Aileu, Dili, tidak bertanggal.
355. *Ibid*
356. *Ibid*; juga lihat Alexandre da Costa Araújo, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pembantaian, 19-21 November 2003.
357. Francisco Xavier do Amaral, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
358. Wawancara CAVR dengan Tomas Gonçalves, mantan pemimpin Partisan dan Apodeti, Farol, Dili, 23 Oktober 2003.
359. Wawancara CAVR dengan João da Costa, mantan tahanan UDT, Same, 24 Juni 2003.
360. Monis da Maia, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
361. Angelo Araújo Fernandes, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pembantaian, 19-21 November 2003.
362. ABRI/ TNI, *25 Tahun Kodam XIV Hasanudin, 1957-1982* (tidak ada informasi bibliografi).
363. Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara, *50 Tahun Emas Pengabdian TNI Angkatan Udara*, Jakarta, (tidak bertanggal), hal. 134.
364. Data dalam paragraf ini diambil dari *35 Tahun Darma Bakti Kostrad* (tidak tersedia informasi bibliografi), hal. 82.
365. Lihat, misalnya, Manuel Carceres da Costa (mengenai Kota Lacleo di Distrik Manatuto) dan Fransisco Soares Pinto (mengenai Kota Iliomar di Distrik Lautém), kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli 2003.
366. Laporan yang diterbitkan dalam *The Canberra Times*, 27 November 1979, dikutip dalam Dunn, *East Timor: A Rough Passage to Independence*, 2003, hal. 259.
367. Lihat, misalnya, Julio Alfaro dan Maria José Franco Pereira, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pemenjaraan Politik, 17-18 Februari 2003.



368. Lihat kesaksian Mari Alkatiri sebagai tokoh sejarah pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003, dan kesaksian Marito Reis pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli 2003.
369. Lihat Xanana Gusmão, *To Resist Is To Win*, Aurora Books, Victoria, 2000, hal. 41-43.
370. Ibid, hal. 42.
371. Bapa Leoneto do Rego, petikan dari wawancara tahun 1980, disampaikan dalam Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli 2003.
372. Manuel Carceres da Costa, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli 2003.
373. Lihat Pernyataan HRVD 5028, 3160, 0160, 2056.
374. Clementino Amaral, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
375. Wawancara CAVR dengan Mario Viegas Carrascalão, Dili, 30 Juni 2004.
376. Machmuddin Noor et. al, *Lahirnya*, hal. 18.
377. Lihat Mario Carrascalão, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15 – 18 Desember 2003.
378. *Tempo*, 36 Juni 1976, dikutip dalam Carmel Budiardjo dan Liem Soei Liong, *The War Against East Timor*, hal. 97.
379. Laporan Delegasi Pemerintah Republik Indonesia ke Timor-Leste, No. Pem.1/8/26, 26 Juni 1976, dimuat dalam Machmuddin Noor et. al, *Lahirnya*, hal. 111.
380. Kesaksian US Rear Admiral Gene R. La Roque, Audiensi Kongres AS, 10 Juni 1980; juga lihat Budiardjo, hal. 27; John Taylor, *East Timor: The Price of Freedom*, Zed Books, London dan New York, 1999, hal. 84.
381. Wawancara CAVR dengan Albino do Carmo, mantan komandan Falintil Suai, Covalima, 31 Oktober 2003.
382. Wawancara CAVR dengan José Pereira, Lolotoe, Bobonaro, 29 Oktober 2003.
383. Telegram, Kedutaan Besar Amerika Jakarta kepada Menteri Luar Negeri di Washington, *GOI request for help in Timor*, 29 April 1976.
384. Wawancara dengan Taur Matan Ruak, mantan komandan Falintil, Bagian II, Dili, 14 Juni 2004.
385. Dunn, *Timor: A People Betrayed*, 1983, hal. 280; Conboy, *Kopassus*, hal. 274.
386. Wawancara CAVR dengan Xanana Gusmão, Dili, 7 Juli 2004; lihat Bab 5: Resistensi Struktur dan Strategi.
387. Gilman dos Santos, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli 2003.
388. Departemen Pertahanan-Kemampuan, *Petunjuk Pelaksanaan Nomor JUKLAK/06/V/1976 tentang Kegiatan di bidang Operasi Tempur Tahun 1976/1977*
389. Dinas Penerangan Korps Marinir, *Korps Marinir TNI AL 1970-2000*, Jakarta, 2000, hal. 233.
390. Indonesian Withdrawal Way to Peace," *East Timor News*, 2 Juni, 1977, hal. 1.
391. "Fretilin Ready for Offensive," *East Timor News*, 16 Juni, 1977, hal. 1.
392. *East Timor News*, 19 Mei, 1977, hal. 4.
393. Telegram, Menteri Luar Negeri di Washington kepada Kedutaan Besar Amerika Jakarta, *Report of Wolff Sub Committee on visit to Indonesia*, 28 Juni 1977.
394. Memorandum, Mike Armacost kepada Zbigniew Brzezinski, *Initiatives to Deepen Relations with Indonesia*, 14 Juni 1977.
395. Lihat Menteri Luar Negeri di Washington kepada semua Pos Diplomati Asia Timur dan Pasifik, weekly status report—*Thailand, Indonesia, Malaysia, Burma and Singapore*, 23 Maret 1978; juga lihat telegram, Kedutaan Besar AS Jakarta kepada Sekretaris Negara Washington, *Preparation of Congressional Presentation Document (CPD) FOY 1979 Security Assistance Program*, 16 Desember 1977; juga lihat telegram, Kedutaan Besar Amerika Jakarta kepada Menteri Luar Negeri di Washington, *A4 sales to Indonesia*, 12 Mei 1978.

396. Taylor, *Indonesia's Forgotten War*, hal. 78.
397. Budiardjo and Liem, *The War in East Timor*, hal. 30.
398. Komunike, Douglas J Bennet Jr, Assistant Secretary for Congress Relations to the Hon. Frank Church, Chairman, Committee on Foreign Relations, US Senate, 6 April 1979.
399. Taylor, *Indonesia's Forgotten War*, hal. 95.
400. Lihat Chamberlain, *The Struggle in Iliomar: Resistance in Rural East Timor*, Point Lonsdale, Australia; 2003, hal. 11.
401. Lihat wawancara dengan CAVR Xanana Gusmão, Dili, 7 Juli 2004; juga lihat wawancara CAVR dengan José da Conceição, Kupang, 24 Agustus 2004; juga lihat wawancara CAVR dengan Sera Malik, Soe, Timor Barat, 28 Agustus 2004.
402. Francisco Xavier do Amaral, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
403. Wawancara CAVR dengan Xanana Gusmão, Dili, 7 July 2004; lihat juga Gusmão, *To Resist*, hal. 130-131.
404. Budiardjo and Liem, *War Against East Timor*, hal. 61.
405. Francisco Xavier do Amaral, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
406. Nossa Vitoria e Apenas Questao de Tempo, Comunicado Comite Permanente do C.C. da FRETILIN, tertanggal 14 September 1997, mengenai pengkhianatan Xavier do Amaral, Lisabon, 1977, hal. 7-27
407. Lihat Domingos Maria Alves, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pembantaian, 19-21 November 2003, dan Francisco Xavier do Amaral, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
408. Wawancara CAVR dengan Xanana Gusmão, Dili, 10 Agustus 2004; juga lihat Gusmão, *To Resist*, hal. 47.
409. Kedutaan Amerika Lisabon kepada Menteri Luar Negeri di Washington, "Fretilin coup may postpone UNGA East Timor debate", 20 September 1977.
410. Domingos Maria Alves, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pembantaian, 19-21 November 2003.
411. Antônio Amado J.R. Guterres Kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pembantaian, 19-21 November 2003.
412. Carmel Budiardjo and Liem Soei Liong, *The War Against East Timor*, Zed Books, 1984, hal. 27.
413. "'Victory is ours!' Offensive Defeated," East Timor News, 8 September 1977, hal. 1, mengutip siaran Radio Maubere, The Age, 31 Agustus 1977, dan Melbourne Australia dan The Australian, 5 Agustus, 1977.
414. "Foreign Affairs gag on Timor build-up," The Australian, 1 September 1977; juga lihat James Dunn, *Timor: A People Betrayed*, 1983, hal. 312.
415. Lihat "Border Zone Offensive Meets Big Defeat," East Timor News, 20 Oktober 1977, hal. 1.
416. Wawancara CAVR dengan Carlos Tilman, Suai, 31 Oktober 2003.
417. Dinas Penerangan Korps Marinir, Korps Marinir TNI AL 1970-2000, Jakarta, 2000, hal. 236-237.
418. Manuel Carceres da Costa, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli 2003.
419. Lihat Kesaksian Manuel Carceres da Costa dari Distrik Manatuto, João Serano dari Distrik Covalima, Maria José da Costa dari Distrik Manatuto dan Manufahi, pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli 2003.
420. "Suharto Gambles on Wet Season Offensive," East Timor News, 15 Desember 1977, hal. 1.
421. Ibid.
422. Wawancara CAVR dengan Duarte Gaspar Corte Real, Ainaro, 22 Oktober 2003; Wawancara CAVR dengan Francisco Piedoso Martins, Ainaro, 22 Oktober 2003.
423. Wawancara CAVR dengan Francisco Barros, Ainaro, 22 Oktober 2003.

424. Maria José da Costa, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli 2003.
425. Budiardjo dan Liem, *War Against East Timor*, hal. 30.
426. Ibid, hal. 30.
427. CAVR, Wawancara dengan Xanana Gusmão, Dili 7 Juli 2004.
428. CAVR, Dokumen penelitian tentang ABRI/TNI. Arsip CAVR. Lihat juga Bagian 6: Profil Pelanggaran Hak Asasi Manusia mengenai pola-pola statistik dari pelanggaran-pelanggaran yang dilaporkan sekitar periode ini.
429. Douglas Kammen, Submisi kepada CAVR, wawancara dengan mantan perwira Kostrad yang bertugas di Timor-Leste pada 1977-1978, nama dirahasiakan, Indonesia [tidak bertanggal].
430. Lihat, misalnya, Wawancara CAVR dengan Abilio Quintão Pinto, Iliomar, Lautém, 7 Oktober 2003; juga lihat Wawancara CAVR dengan Teotonio [tidak ada nama belakang], Ossu, Viqueque 2 Oktober 2003.
431. Pernyataan HRVD 3889.
432. Wawancara CAVR dengan Tomas Soares da Silva, Uatolari, Viqueque, 4 Oktober 2003.
433. Xanana Gusmão, *To Resist is to Win: The Autobiography of Xanana Gusmão*, ed. Sarah Niner, Aurora Books, Victoria, 2000, hal. 56.
434. Dunn, *A People Betrayed*, hal. 280; Conboy, *Kopassus*, hal. 274.
435. Lihat kesaksian Pat Walsh dalam Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli 2003.
436. Lihat Abilio dos Santos Belo, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli 2003.
437. Dinas Penerangan Korps Marinir, *Korps Marinir TNI AL 1970-2000*, Jakarta, 2000, hal. 276-279.
438. Lihat Edmundo da Cruz, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli 2003.
439. Taylor, *Indonesia's Forgotten War*, hal. 96.
440. Wawancara CAVR dengan Taur Matan Ruak, mantan komandan Falintil, Bagian II, Dili 14 Juni 2004.
441. Xanana Gusmão, *To Resist is to Win*, ed. Sarah Niner, hal. 59.
442. Association of Ex-Political Prisoners (Assepol), submisi kepada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pemenceraan Politik, 17-18 Februari 2003.
443. Lihat Lennox, *Fighting Spirit of East Timor* hal. 133 dan 155-157; lihat juga Taylor, *Indonesia's Forgotten War*, hal. 84.
444. Gilman dos Santos, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli 2003.
445. Lihat Petunjuk Teknis ABRI/ TNI No. Juknis/05/1/1982 Sistem keamanan kota dan wilayah pemukiman, dikutip dalam Budiardjo dan Liem, *The War in East Timor*, hal. 183; Juga lihat Bab 7.3: Pemindahan Paksa dan Kelaparan.
446. USAID, *East Timor-Indonesia, Displaced Persons, Situation Report No 1*, 9 Oktober 1979, dikutip dalam Taylor, *Indonesia's Forgotten War*, hal. 88; juga lihat CRS Final report, hal. 3.
447. Taylor, *Indonesia's Forgotten War*, hal. 89, 90.
448. ABRI/ TNI Juknis/04-B/IV/1982 Tentang Cara Mengamankan Masyarakat dari Pengaruh Propaganda GPK; dikutip dalam Budiardjo dan Liem, *The War in East Timor*, hal. 216-17.
449. Lihat, misalnya, Francisco Soares Pinto dari subdistrik Iliomar di Lautém, Manuel Carceres da Costa dalam hubungannya dengan kamp di Metinaro, dan Abilio dos Santos Belo dalam kaitannya dengan kamp di Ainaro dan situasi di Desa Mau Chiga, Kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli, 2003.
450. Lihat Xanana Gusmão, *To Resist is to Win*, ed. Sarah Niner, hal. 59; Lihat juga Pernyataan HRVD 9188-02, 0187-01, 7800-02, 8088-05.
451. Pernyataan HRVD 8274-04.

452. Bekas pejabat CRS Gilman dos Santos, Kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli 2003.
453. Pat Walsh, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli 2003.
454. Ibid.
455. Gilman dos Santos, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli 2003.
456. Pat Walsh, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli 2003.
457. Gilman dos Santos, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli 2003.
458. Catholic Relief Services-USCC East Timor Emergency Program, Laporan Akhir, Juni 1979-Desember 1980, hal. 11 dan 19.
459. Pat Walsh, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli 2003.
460. Gilman dos Santos, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli 2003.
461. Lihat, misalnya, Joana Pereira dari Sub distrik Quelicai, Baucau, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli 2003.
462. Bernado Villanova, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Pemenjaraan Politik, 17-18 Februari 2003.
463. Rosalina da Costa dari Manufahi, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli 2003.
464. Abilio dos Santos Belo, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli 2003.
465. Maria de Ceu Lopes Federer Kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Pemenjaraan Politik, 17-18 Februari 2003.
466. Ibid
467. Berita Reuters dan AP, 4 Maret 1982, dikutip dalam Timor Information Service, No. 35, Maret/April 1982, hal 6.
468. Lihat, misalnya, Abilio dos Santos Belo dan Marito Reis, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli 2003.
469. Departemen Penerangan Republik Indonesia, East Timor After Integration, 1983, hal 88.
470. Maria de Ceu Lopes Federer, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Pemenjaraan Politik, 17-18 Februari 2003.
471. Ibid.
472. "Berita Buana", 14 Juli 1982, dalam Pengungkapan Kebenaran Timor-Leste; juga lihat kesaksian Mario Carrascalão pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Perempuan dan Konflik, 28-29 April 2003.
473. Taylor, *Indonesia's Forgotten War*, hal. 195.
474. Timor-Leste Dalam Angka, Biro Pusat Statistik Provinsi Timor-Timur, 1981.
475. Costa Alves dan Moreira Reis, wawancara dengan pastor Katolik asal Portugal, Fr Leoneto do Rego, diterbitkan di majalah *Funu* di Portugal pada Juli 1980.
476. Ibid.
477. Lihat submisi Assepol pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Pemenjaraan Politik, 17-18 Februari 2003.
478. Lihat, misalnya, Julio Alfaro, Maria da Silva, dan Maria José Franco Pereira, kesaksian-kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Pemenjaraan Politik, 17-18 Februari 2003.
479. Telegram, Kedutaan Amerika Serikat di Jakarta kepada Menteri Luar Negeri AS di Washington, Reports of Fretilin attacks in East Timor capital, 18 Juni 1980.

480. Wawancara CAVR dengan Bernardino Vilaova, Ataúro, Dili, 7 Maret 2002.
481. Telegram, Kedutaan Amerika di Jakarta kepada Menteri Luar Negeri AS di Washington, [disensor] Impressions after Juni 10 attack in East Timor, 25 Juni 1980.
482. Lihat, misalnya, Bernadino Villanova, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Pememajaan Politis, 17-18 Februari 2003.
483. Pernyataan HRVD 2399 dan 0663; wawancara CAVR dengan João Rui, Dili, 20 Juni 2003, wawancara CAVR dengan Francisco Soares, Dili, 5 Agustus 2003.
484. Lihat Angkatan Bersenjata, 26 Februari 1982; Juga lihat Conboy, *Kopassus*, hal. 297.
485. Komando Daerah Militer XVI/Udayana, Komando Resor Militer 164/Wira Dharma, Instruksi - Operasi No: INSOP/03/II/1982
486. Lihat Xanana Gusmão, surat tertanggal 10 Mei 1983, hal. 3.
487. Lihat "Petunjuk Tehnis [sic] Nomor Juknis/05/I/1982, Sistem Keamanan Kota dan Daerah Pemukiman, hal. 3, yang menyebutkan "Perintah Operasi Korem 164/WD: 08/Kikis-D." Disalin ulang dalam Budiardjo dan Liem, War In East Timor, hal. 183.
488. Petunjuk Teknis ABRI/ TNI No. JUKNIS/06/IV/1982, Babinsa/TPD Activity in Developing and Phasing out Trained People's Resistance Forces, disalin dalam Budiardjo dan Liem, hal. 238.
489. "Instruksi – Operasi No: INSOP/03/II/1982," hal. 8.
490. Lihat Korps Marinir TNI AL, 1970-2000, Dinas Penerangan Korps Marinir, Jakarta, 2000, hal. 274.
491. Wawancara CAVR dengan Anselmo Fernandes Xavier, Lospalos, Lautém, 10 Oktober 2003.
492. Informação sobre a situação socio-humana nas zonas de Ossu, Viqueque, Uato-Lari e Uato-Carabau Abril 1982, hal. 4, Dokumen resistensi tertanggal 5 Mei 1982, Dili.[Informasi mengenai situasi sosial di wilayah ossu, Viqueque, Uatolari, dan Uato Carbau pada April 1982] tidak diterbitkan, Arsip CAVR
493. "Timor:Tales of Torture", The Age, Melbourne, 14 Mei 1982, disebutkan dalam Taylor, hal. 111; juga lihat Lennox, *Fighting Spirit*, hal. 172; juga lihat telegram, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta kepada Menteri Luar Negeri AS di Washington, Briefing on the Military Situation in East Timor, 17 November 1981.
494. "Is There Enough to Eat in East Timor?", Asian Wall Street Journal, 21 Juni 1982.
495. Xanana Gusmão, "Message to the 37<sup>th</sup> United Nations General Assembly", dalam Sarah Niner (Ed), *To Resist*, hal. 81.
496. Telegram, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta kepada Menteri Luar Negeri AS di Washington, Briefing on the Military Situation in East Timor, 17 November 1981.
497. Budiardjo dan Liem, *The War in East Timor*, hal. 174; Taylor, *Indonesia's Forgotten War*, hal. 101.
498. Wawancara CAVR dengan Albino da Costa, Dili, Juni 2003.
499. Pernyataan HRVD 2092.
500. Wawancara CAVR dengan Albino da Costa, Dili, Juni 2003.
501. Wawancara CAVR dengan Antonio dos Santos, Mehara, Tutuala, Lautém, 10 Oktober, 2003.
502. Wawancara CAVR dengan João Fuas de Carvalho, Tutuala, Lautém, 10 Oktober, 2003.
503. Lennox, *Fighting Spirit of East Timor*, hal. 175.
504. Alfredo Alves, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Anak-anak dan Konflik, 28-29 Maret 2003.
505. Budiardjo dan Liem, *The War in East Timor*, hal. 174.
506. Taylor, *Indonesia's Forgotten War*, hal. 117.
507. Lennox, *Fighting Spirit of East Timor*, hal. 180. juga lihat Taylor, *Indonesia's Forgotten War*, hal. 152.
508. Ibid, hal. 181.
509. Timor Information Service, No. 38, Sept/Okt 1982, hal. 7: World Council of Churches Visit, 3-6 Juni 1982.
510. Telegram, 17 November 1981, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta kepada Menteri Luar Negeri AS di Washington, Briefing on the Military Situation in East Timor.

511. Lihat, misalnya, kesaksian dari Maria Ceu Federer Lopes pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Tahanan Politik 17 – 18 Februari 2003.
512. Lihat Joana Pereira dari Quelicai, Manuel Carceres da Costa dari Laclo, dan Edmundo da Cruz dari Lautém, kesaksian lisan pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli 2003.
513. Catholic Relief Services-USCC, East Timor Emergency Program, Laporan Akhir, Juni 1979-Desember 1980, hal. 3.
514. Wawancara CAVR dengan Xanana Gusmão, Dili, 7 Juli 2004.
515. Xanana Gusmão, *To Resist is To Win!*, ed. Sarah Niner, hal. 58.
516. Wawancara CAVR dengan Xanana Gusmão, Dili, 10 Agustus 2004.
517. Xanana Gusmão, *To Resist is To Win!*, ed. Sarah Niner, hal 61.
518. *Ibid*, hal. 63.
519. Wawancara CAVR dengan Xanana Gusmão, Dili, 10 Agustus 2004; juga lihat Paulino Gama, "Fretilin Commander Remembers", dalam Peter Carey (Ed), *East Timor at the Crossroads*, Cassell, New York, 1995, hal. 101.
520. Lihat Xanana Gusmão, *To Resist is to Win!*, ed. Sarah Niner, hal. 64; juga lihat wawancara dengan Lere Anan Timor, Arsip Proyek Sejarah Lisan Tuba Rai Metin [radio], Taibessi, Maret 2002 [CD No.18].
521. Wawancara CAVR dengan Xanana Gusmão, Dili, 10 Agustus 2004.
522. *Ibid*
523. Francisco Guterres, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Politik 1974-76, 15-18 Desember 2003.
524. Wawancara CAVR dengan Xanana Gusmão, Dili, 10 Agustus 2004.
525. *Ibid*
526. Chamberlain, *The Struggle in Illiomar*, hal. 18.
527. Xanana Gusmão, *To Resist is to Win*, ed. Sarah Niner, hal. 68.
528. Wawancara CAVR dengan Justo Talenta, yang ketika itu merupakan sekretaris informasi Brigada Vermelha, Dili, 3 November 2003; juga lihat kesaksian Francisco (Lu Olo), pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
529. Lihat wawancara CAVR dengan Cornelio Gama (L-7), Baucau, 9 April 2004; wawancara CAVR dengan Justo Talenta, Dili, November 2004; wawancara CAVR dengan Xanana Gusmão, Dili, 10 Juni 2004; juga lihat; wawancara CAVR dengan Francisco Guterres (Lu Olo), Dili, 26 Maret 2003; wawancara CAVR dengan Lere Anan Timor, Arsip Proyek Sejarah Lisan Tuba Rai Metin [radio], Taibessi, Maret 2002 [arsip CD no. 18].
530. "Rejustamento Estrutural da Resistência e Proposta de Paz" [Penyesuaian Struktural Resistensi dan Usulan Perdamaian, terjemahan bahasa Tetum CAVR, tidak ada keterangan penerbitan]; juga lihat wawancara dengan Lere Anan Timor, Arsip Proyek Sejarah Lisan Tuba Rai Metin [radio], Taibessi, Maret 2002 [arsip CD. No.18]; juga lihat Agio Pereira, "The National Council of Maubere Resistance (CNRM), overview of the history of the struggle of East Timor", kertas kerja, disampaikan pada konferensi di Sydney, 1994, tanpa tanggal.
531. Lihat wawancara CAVR dengan Cornelio Gama, Baucau, 9 April 2003; juga lihat wawancara CAVR dengan Francisco Guterres (Lû Olo), Dili, 26 Maret 2003.
532. Pesan kepada Bangsa oleh Yang Terhormat Presiden Republik Demokratik Timor Leste, Kay Rala Xanana Gusmão, pada Peringatan Hari Jadi di Uaimori, 20 Agustus 2003, di <http://www.etan.org/et2003/august/17-23/20fal.htm>. Arsip CAVR
533. Wawancara CAVR dengan Julio Maria de Jesus, mantan Falintil, Lospalos, Lautém 29 Mei 2003; juga lihat Budiardjo dan Liem, *The War Against East Timor*, hal. 70. Lihat juga bab 5: Resistensi: Struktur dan Strategi.
534. Budiardjo dan Liem, *The War Against East Timor*, hal. 170.
535. Juknis/04-B/IV/1982 ABRI/ TNI tentang Cara Mengamankan Masyarakat dari Pengaruh Propaganda GPK; terjemahan dikutip dalam Budiardjo dan Liem, *The War Against East Timor*, hal. 216-17.

536. Pernyataan HRVD 7816-01, 3315-01, 7250-01; juga lihat Aditjondro, In the Shadow of Mt Ramelau, hal. 83; juga lihat kesaksian Olga da Silva Amaral pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Perempuan dan Konflik, 28-29 April, 2003.
537. Lihat wawancara CAVR dengan Horacio La Hakiduk, Dili, 2 Juni 2003; dengan Albino da Costa, Dili Juni 2003; serta dengan Antônio Amaral da Costa Aitahan Matak, 28 April 2004.
538. Lihat Juknis ABRI/ TNI tentang Cara Babinsa/TPD dalam membongkar Jaring Pendukung GPK, Korem 164, Seksi Intel, [tanggal tidak jelas, di antara setumpuk dokumen yang diperoleh Falintil pada 1982; arsip CAVR].
539. Lihat Rowena Lennox, *Fighting Spirit of East Timor: The Life of Martinho da Costa Lopes*, Zed Books, London and New York, 2000, hal. 189-191.
540. Lihat kesaksian Domingos de Oliveira pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Internal 1974-76, 18 Desember 2003.
541. Agio Pereira, "The National Council of Maubere Resistance (CNRM), overview of the history of the struggle of East Timor" kertas kerja.
542. "Fretilin Explains Why No Negotiations" East Timor News, Australia, No. 36, 29 Juni 1978; juga lihat Francisco Guterres (Lu Olo), kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Internal 1974-76, 18 Desember 2003.
543. Lihat wawancara CAVR dengan Francisco Guterres (Lu Olo), 26 Maret 2004; wawancara dengan Cornelio Gama, 9 April 2003; wawancara dengan Lere Anan Timor, Arsip Proyek Sejarah Lisan Tuba Rai Metin [radio], Taibessi, Maret 2002 [arsip CD No. 18 ].
544. Lihat wawancara CAVR dengan Cornelio Gama, Baucau, 9 April 2003; juga lihat wawancara CAVR dengan Taur Matan Ruak, Dili, 14 Juni 2004; wawancara CAVR dengan Francisco Guterres (Lu Olo), Dili, 26 Maret 2003; dan wawancara dengan Lere Anan Timor, Arsip Proyek Sejarah Lisan Tuba Rai Metin [radio], Taibessi, Maret 2002 [arsip CD No.18].
545. Patrick A. Smythe, *The Heaviest Blow—The Catholic Church and the East Timor Issue*, LIT, Jerman, 2004, hal. 45.
546. Lihat Dr Jose Ramos-Horta, pidato penutupan dalam acara CAVR, Audiensi Publik tentang Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli 2003.
547. Kohen, *The Place of the Dead*, hal. 150.
548. Dunn, *East Timor: A Rough Passage to Independence*, h. 40.
549. Biro Statistik Timor-Timur, *Timor-Timur Dalam Angka 1981*, Dili, 1981, hal. 71.
550. Pusat Dokumentasi Internasional (International Documentation Centre-IDOC), Roma, Pendahuluan, hal.1-2, *Pro Mundo Vita Dossier 'East Timor'*, 1984, Brussel, hal.36-7, dikutip dalam Smythe, *The Heaviest Blow*, hal. 39.
551. Lihat Ken Conboy, *Kopassus: Inside Indonesia's Special Forces*, Equinox Publishing, Jakarta dan Singapura, 2002, hal. 298; juga lihat "Record of Meeting with Governor of Timor Timur (East Timor) on 28 July 1983, to Government Office, Dili", dalam Official Report of the Australian Parliamentary Delegation to Indonesia, yang dipimpin oleh Yang Mulia W. L. Morrison, Anggota Parlemen, Juli-Agustus 1983," hal. 152.
552. Peter A. Rohi, "Hanya Dengan 1 Pistol di Pinggang Kotak Suara Dikawal Ke Los Palos [sic]," *Sinar Harapan*, 1 Juni 1982.
553. Wawancara CAVR dengan Tomas Soares da Silva, Dili, 4 Oktober 2003.
554. A. Goldstone, wawancara dengan Jacobs, Lisabon, 4 Agustus 1982 [Arsip CAVR].
555. Telegram, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta kepada Menteri Luar Negeri Amerika di Washington, East Timor Governor address to Jakarta political officers luncheon, 29 April 1983.
556. Xanana Gusmão, "Message to the 37<sup>th</sup> UN General Assembly, 14 Oktober 1982" disalin dalam Xanana Gusmao To Resist is to Win, ed. Sarah Niner, hal. 82
557. Lihat Abilio dos Santos Belo, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli 2003.
558. Lihat Budiardjo dan Liem, *The War in East Timor*, hal. 146-7.
559. Wawancara CAVR dengan João Fuas de Carvalho, mantan pegawai Fretilin, Tutuala Lautém, 10 Oktober 2003.

560. Ernest Chamberlain, *The Struggle in Iliomar*, 2003, catatan kaki hal. 22.
561. Lihat Chamberlain; juga lihat wawancara CAVR dengan João Fuas de Carvalho, Tutuala, Lautém, 10 Oktober 2003; juga lihat Wawancara CAVR dengan Aleixo Ximenes, Venilale, Baucau, 2 Februari 2003.
562. Wawancara CAVR dengan Aleixo Ximenes, seorang mantan anggota UDT, Venilale, 2 Februari 2004.
563. Wawancara CAVR dengan Daniel Amaral, mantan anggota Hansip, Venilale, 3 Oktober 2003.
564. Lihat Jill Jolliffe, *Timor: Terra Sangrenta*, O Jornal, Lisabon, 1989, hal. 163-170.
565. Lihat wawancara CAVR dengan Cornelio Gama (L-7), 9 April 2004; juga lihat wawancara CAVR dengan Antonio Tomas Amaral da Costa (Aitahan Matak), Dili, 29 Maret 1984.
566. Telegram, *Negotiations to End Insurgency in East Timor*, 11 Juni 1983, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta kepada Menteri Luar Negeri Amerika di Washington.
567. *Official Report of the Australian Parliamentary Delegation to Indonesia*, yang dipimpin oleh Yang Mulia W. L. Morrison, anggota parlemen (M.P), Juli-Agustus 1983.
568. Wawancara CAVR dengan Constantino dos Santos, mantan anggota Falintil Macadiquei, 26 Juni 2003; Juga lihat Francisco (Lu Olo) Guterres, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Internal 1974-76, 18 Desember 2003.
569. J. Jolliffe, ed., *Timor Newsletter*, Vol. II, No. 3, Oktober 1983, hal. 6, dikutip dalam Ernest Chamberlain, *The Struggle in Iliomar: Resistance in Rural East Timor*, 2003, hal. 23.
570. Lihat wawancara CAVR dengan Francisco (Lu Olo) Guterres, Dili, 26 Maret 2004; dengan Albino da Costa, Juni 2003; dengan Taur Matan Ruak, bagian II, Dili, 14 Juni 2004
571. Lihat Budiardjo dan Liem, *The War in East Timor*, hal. 131-5.
572. Lennox, *Fighting Spirit of East Timor*, hal. 215.
573. *Ibid*, hal. 185.
574. Patrick A. Smythe, *The Heaviest Blow The Catholic Church and the East Timor Issue*, hal. 38.
575. Ben Anderson, Arief Djati, dan Douglas Kammen, "Wawancara dengan Mário Carrascalão," *Indonesia* 76, Oktober 2003, hal. 7-8.
576. Carmel Budiardjo dan Liem Soei Liong, *The War Against East Timor*, Zed Books, London, 1984, hal. 139 dan 47.
577. Telegram, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta kepada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat di Washington, *Current developments in East Timor [tulisan tak jelas] on renewed fighting, access by foreigners, etc*, 23 September 1983.
578. Kedutaan Amerika di Jakarta kepada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat di Washington, *Briefing on the military situation in East Timor*, 17 November 1981.
579. Lihat Conboy, *Kopassus*, hal. 310.
580. Ben Anderson, Arief Djati, dan Douglas Kammen, "Wawancara dengan Mário Carrascalão," *Indonesia* 76 (Oktober 2003), hal. 8.
581. Telegram, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta kepada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat di Washington, *Negotiations to End Insurgency in East Timor*, 11 Juni 1983.
582. Lihat "Translation of Letter from Fretilin by K. Reppter (Canberra)", dalam *Official Report of the Australian Parliamentary Delegation to Indonesia*, led by honourable W. L. Morrison, M.P , Juli-Agustus 1983, hal. 169-170.
583. Lihat pernyataan HRVD 6957-01; 5330-01; 2369-02; 6205-01; 39977-01; 5344-02.
584. Laporan Tahunan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat tentang Indonesia, 1983, hal. 109.
585. Francisco (Lu Olo) Guterres, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Konflik Politik Internal 1974-76, 15-18 Desember 2003.
586. Wawancara CAVR dengan José Gomes, kepala desa Bibileo-Lalerek Mutin, Lacluta Viqueque, 13 Desember 2003.
587. Telegram, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta kepada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat di Washington, *Views on East Timor Developments*, 9 September 1983; juga lihat wawancara CAVR



- dengan José Gomes, kepala desa Bibileo-Lalerek Mutin, Lacluta Viqueque, 13 Desember 2003; juga lihat Taylor, *Indonesia's Forgotten War*, hal. 142.
588. Kedutaan Amerika Serikat di Jakarta kepada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat di Washington, Current developments in East Timor [tulisan tak jelas] on renewed fighting, access by foreigners, etc, 23 September 1983.
  589. Timor Information Service, Gough Whitlam Fails to Convince, Maret/April 1982, hal. 10.
  590. "Timor Bishop Accuses Military of Massacring 84 Villagers", Peter Millership, Reuters, Dili, 1 Maret 1984, dikutip dalam Taylor, East Timor, hal. 147.
  591. Wawancara CAVR dengan José Gomes, Kepala Desa Bibileo-Lalerek Mutin, Lacluta, Viqueque, 13 Desember 2003.
  592. Juga lihat Olinda Pinto Martins, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Pembantaian, November 2003.
  593. Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta kepada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat di Washington, Current developments in East Timor [tulisan tak jelas] on renewed fighting, access by foreigners, etc, 23 September 1983.
  594. Moerdani, artikel di Surat Kabar Sinar Harapan, 17 Agustus 1983, dikutip dalam Taylor, *Indonesia's Forgotten War*, hal. 143.
  595. Budiardjo dan Liem, The War in East Timor, hal. 139.
  596. Telegram, Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta kepada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat di Washington, [tulisan tak jelas] Views on East Timor Developments, 9 September 1983.
  597. ACFOA, East Timor Report No. 5, November 1983.
  598. "Letter to Bello from Indonesian Bishops Conference, 1983", disalin dalam Just Reading No 2, The Church And East Timor, Komisi Katolik untuk Keadilan, Pembangunan, dan Perdamaian 1993, hal. 18; juga lihat Taylor, *Indonesia's Forgotten War*, hal. 154.
  599. Lihat Xanana Gusmão, To Resist is to Win! The Autobiography of Xanana Gusmão, (ed) Sarah Niner, hal. 85-126.
  600. Ibid, hal.129-136.
  601. Wawancara CAVR dengan Antônio Tomàs Amaral da Costa (Aitahan Matak), Dili, 18 Desember 2003; lihat wawancara CAVR dengan Avelino Coelho, 17 Juli 2004; juga lihat Pinto dan Jardine, East Timor's Unfinished Struggle, Boston: South End Press, 1997, hal. 122.
  602. Pinto dan Jardine, East Timor's Unfinished Struggle: Inside the Timorese Resistance, South End Press, hal. 123.
  603. Lihat Abel Guterres, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional, 15-17 Maret 2004.
  604. Suster Monica Nakamura, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional, 15-17 Maret 2004.
  605. Lihat Antonio Tomas Amaral da Costa (Aitahan Matak) dan Mariano Soares, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pemenjaraan Politik, 17-18 Februari 2003.
  606. Lihat Marito Nicolau dos Reis, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pemenjaraan Politik, 17-18 Februari 2003.
  607. Ade Sitompul, kesaksian lisan pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pemenjaraan Politik, 17-18 Februari 2003.
  608. Wawancara CAVR dengan Aleixo da Silva Gama (Cobra), Dili, [wawancara tanpa tanggal]; Wawancara CAVR dengan Antônio Tomàs Amaral da Costa (Aitahan Matak), Dili, 18 Desember 2003; Wawancara CAVR dengan José Manuel Fernandes, Dili, 31 Oktober 2002; Wawancara CAVR dengan Avelino Coelho, Dili, 17 Juli 2004.
  609. Wawancara CAVR dengan Avelino Coelho, Dili, 17 Juli 2004; wawancara CAVR dengan Gregório Saldanha, Dili, 6 Mei 2004; serta wawancara CAVR dengan Octavio da Conceição, Dili, 3 November 2002.
  610. Wawancara CAVR dengan João Freitas da Câmara, Dili, 5 Juni 2004.
  611. Ibid

612. Lihat Arnold S. Kohen, *From the Place of the Dead: Bishop Belo and the Struggle for East Timor*, hal. 161.
613. Ibid, hal.151-152.
614. Ibid, hal.166; juga lihat Mário Carrascalão, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Perempuan dan Konflik, 28-29 April 2003.
615. Kohen, *From the Place of the Dead*, hal. 167.
616. Kohen, *From the Place of the Dead*, hal. 169.
617. Ibid, hal.169-173.
618. Resolusi Sidang Umum PBB No. 37/30, 1982.
619. Francesc Vendrell, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional 15-17 Maret, 2004.
620. Ian Martin, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional, 17 Maret 2004.
621. Francesc Vendrell, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional 15-17 Maret, 2004.
622. Kohen, *From the Place of the Dead*, hal. 177.
623. Ibid, hal.178.
624. Lihat Gregorio Saldanha, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pemenjaraan Politik, 17-18 Februari 2003.
625. Constancio Pinto, "The Student Movement and the Independence Struggle in East Timor: An Interview" dalam Richard Tanter, Mark Selden dan Stephen R Shalom (Eds), *Bitter Flowers, Sweet Flowers, East Timor, Indonesia and The World Community*, London, Rowman & Littlefield Publishers Inc., hal. 34.
626. Lihat, misalnya, wawancara CAVR dengan José Manuêl, Dili, 31 Oktober 2002; dan wawancara CAVR dengan Fernanda Soares, Kaikoli, Dili, 21 Januari 2003.
627. Wawancara CAVR dengan Gregório Saldanha, Dili, 6 Mei 2004; juga lihat Wawancara CAVR dengan Octavio da Conceição, Dili, 3 November 2002.
628. Wawancara CAVR dengan Gregório Saldanha, Dili, 6 Mei 2004.
629. Keputusan Presiden Republik Indonesia, Nomor 62 Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Provinsi Daerah Tingkat I Timor-Timur Triwulan IV, 1988, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, hal 1103-05.
630. East Timor: Keeping the Flame of Freedom Alive, ACFOA Development Dossier No. 29, Februari 1991.
631. Lihat Yeni Rosa Damayanti dan Nugroho Katjasungkana, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional, 15-17 Maret 2004.
632. "A Message to Catholic Youth in Timor-Leste and Students from Jakarta", 20 Mei 1986, disalin dalam Xanana Gusmão, *To Resist is to Win!*, (ed) Sarah Niner hal. 109-110.
633. Kesaksian Francesc Vendrell pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional, 15-17 Maret 2004.
634. Pidato Penutupan José Ramos-Horta pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pemindahan Paksa dan Kelaparan, 28-29 Juli 2003.
635. Constância Pinto dan Matthew Jardine, *East Timor's Unfinished Struggle: Inside the Timorese Resistance*, South End Press, Kata Pengantar.
636. Kesaksian Simplicio Celestino de Deus pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pembantaian 19-21 November 2003.
637. Kesaksian Max Stahl pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pembantaian 19-21 November 2003.
638. Kesaksian Simplicio Celestino de Deus pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pembantaian, 19-21 November 2003.
639. Lihat Kohen, *From the Place of the Dead*, hal 197-200.

640. Kesaksian Max Stahl pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pembantaian, 19-21 November 2003.
641. Kesaksian Alexandrino da Costa pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Anak dan Konflik, 29-30 Maret 2004.
642. Wawancara CAVR dengan Avelino Coelho Silva, Dili, 17 Juli 2004; wawancara CAVR dengan João Freitas da Camara, Dili, 5 Juni 2004; juga lihat Pinto dan Jardine, *East Timor's Unfinished Struggle*, hal. 196-197.
643. Lihat kesaksian Gregorio Saldanha pada Audiensi Publik Nasional CAVR, mengenai Pemenjaraan Politik 17-18 Februari 2003.
644. Kesaksian Luhut Pangaribuan dan Ade Rostina Sitompul pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pemenjaraan Politik, 17-18 Februari 2003.
645. *East Timor After Santa Cruz: Indonesia and the international order*, disusun oleh Peace is Possible in East Timor, Ed. Penerbit Peace is Possible in East Timor, Lisabon, Januari 1993.
646. Tony Parkinson, "Hawk Blasts Jakarta Over Sick Remarks", *The Australian*, November 22, 1991; juga lihat kesaksian Pinto di hadapan Subkomite operasi Internasional dan Hak Asasi Manusia, Komite Hubungan Internasional, Dewan Perwakilan Rakyat, Kongres ke-105, Sesi kedua; Mei 7, 1998.
647. Pernyataan HRVD 02049.
648. Submisi Assepol pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pemenjaraan Politik, 17-18 Februari 2003.
649. Pidato Xanana Gusmão pada Peresmian Kantor Pusat CAVR di bekas Penjara Balide, 17 Februari 2003.
650. Lihat Geoffrey Robinson, *East Timor 1999: Crimes Against Humanity – A Report Comissioned by the UN Office of the High Comissioner for Human Rights*, July, 2003, hal. 85 [Robinson, Submisi ONHCR kepada CAVR] Arsip CAVR.
651. AFP, *East Timor/Church*, Jakarta, 12 Juli 1994.
652. Amnesty International, *East Timor—Continuing Human Rights Violations*, 2 Februari 1995.
653. Kesaksian Alexandrino da Costa pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Anak-anak dan, 29-30 Maret 2004. Juga lihat artikel oleh Kieran Dwyer pada *Matebian News* April 1995, dipublikasikan oleh East Timor Relief Association (ETRA).
654. Kesaksian Ade Sitompul pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pemenjaraan Politik, 17-18 Februari 2003; Submisi Assepol pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Pemenjaraan Politik 17-18 Februari 2003.
655. Nugroho Katjasungkana, Kesaksian Lisan pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional, 15-17 Maret 2004.
656. Wawancara CAVR dengan Joaquim Fonseca, Dili, 23 Mei 2004; wawancara CAVR dengan Fernando de Araújo (Lasama), Dili, 5 Mei 2004; wawancara CAVR dengan Avelino Coelho, Dili, 17 Juli 2004.
657. Wawancara CAVR dengan Joaquim Fonseca, Dili, 23 Mei 2004; wawancara CAVR dengan Oscar da Silva, Dili, 23 Mei 2004.
658. Wawancara CAVR dengan Fernando de Araújo (Lasama), Dili, 5 Mei 2004.
659. Lihat kesaksian Yeni Rosa Damayanti pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional, 15-17 Maret 2004.
660. Lihat kesaksian Yeni Rosa Damayanti dan Nugroho Katjasungkana pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional, 15-17 Maret 2004.
661. Wawancara CAVR dengan Mariano Sabino Lopes, Dili, [wawancara tidak bertanggal].
662. Lihat wawancara CAVR dengan Virgilio da Silva Guterres, Dili, 21 Februari 2005; juga lihat wawancara CAVR dengan Avelino Coelho, 17 Juli 2004.
663. Wawancara CAVR dengan Virgilio da Silva Guterres, Dili, 21 Februari 2005.
664. *Kompas*, Jakarta 18 November 1995.
665. Wawancara CAVR dengan Naldo Rei, Dili 11 November 2003.
666. Wawancara CAVR dengan Mariano Sabino Lopes, Dili, 2004; juga lihat wawancara CAVR dengan Naldo Rei, Dili 11 November 2003.

667. Wawancara CAVR dengan Joaquim Fonseca, Dili, 23 Mei 2004.
668. Wawancara CAVR dengan Mariano Sabino Lopes, Dili, [tidak bertanggal].
669. Dunn, East Timor, 2003, hal. 338-339.
670. Kesaksian Francesc Vendrell pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional, 15-17 Maret 2004.
671. Kesaksian Suzannah Linton pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional, 15-17 Maret 2004.
672. Ibid
673. Pidato Hadiah Nobel Perdamaian, 10 Desember 1996, tersedia pada <http://nobelprize.org/peace/laureates/1996/presentation-speech.html>.
674. Pidato Penerimaan Hadiah Nobel Perdamaian Uskup Carlos Belo, 10 Desember 1996.
675. Kesaksian Francesc Vendrell pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Komunitas Internasional, 15-17 Maret 2004.
676. Ibid
677. Ibid
678. Jim Schiller, The 1997 Indonesian Elections: Festival of democracy or costly fiction?, Occasional Paper 22, Center for Asia Pacific Initiatives, University of Victoria, Mei 1999.
679. "Statement of the National Commission of Human Rights Concerning the Unrest in Jakarta and Surrounding Areas", Komnas HAM, Juni 2, 1998.
680. Don Greenless dan Robert Garran, Deliverance: The Inside Story of East Timor's Fight for Freedom, Allen & Unwin, Australia, 2002, hal. 28-29.
681. Dan Nicholson, "The Lorikeet Warriors: East Timor New Generation National Resistance 1989-1999", Tesis Sarjana, University of Melbourne, Oktober 2001, hal 38.
682. Wawancara CAVR dengan Basilio Dias Araújo, Kupang Timor Barat, 26 Juli 2004.
683. John Martinkus, A Dirty Little War: An Eyewitness of East Timor's Descent into Hell 1997-2000, Random House, Australia, 2001, hal. 54.
684. Komando Daerah Militer IX Udayana, Komando Resor Militer 164, "Rekapitulasi Kekuatan Personil Organik dan Penugasan", Juli 1998; lihat juga Komando Daerah Militer IX Udayana, Komando Resor Militer 164, "Rekapitulasi Kekuatan Personil Organik dan Penugasan Posisi, November 1997".
685. Komando Daerah Militer IX Udayana, Komando Resor Militer 164, "Kekuatan Personil Tim Tim Penugasan", Juli 1998.
686. Laporan dari Komisi Penyelidikan Indonesia mengenai berbagai kejahatan berat HAM yang dilanggar di Timor-Leste pada laporan 1999, (Laporan KPP HAM)), 31 Januari 2000, para. 68.
687. Lihat kesaksian saksi mata pada Audiensi Publik Nasional CAVR Rona Ami Nia Lian (Dengarkan Suara Kami) 11-12 November 2002.
688. Martinkus, A Dirty Little War, hal. 98.
689. Ibid, hal. 106.
690. Ibid, hal. 105; juga lihat KPP HAM, Report on East Timor, para. 68.
691. Lihat diskusi pada Geoffrey Robinson, "People's War: Militia in East Timor and Indonesia", South East Asia Research, 9, November 2001, hal. 296.
692. Lihat KPP HAM, Report on East Timor, para. 39; juga lihat Geoffrey Robinson, East Timor 1999: Crimes Against Humanity—A Report Commissioned by the UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Juli, 2003, hal. 90-93.
693. Lihat Samuel Moore, "The Indonesian Military's Last Years in East Timor: An Analysis of its Documents", Indonesia 72, Cornell South East Asia Program, Oktober 2001, hal. 31.
694. KPP HAM, Report on East Timor, para. 40 dan 49.
695. Robinson, People's War, hal. 276.
696. Laporan KPP HAM, para. 44; juga lihat Moore, "Indonesian Military's Last Years", hal. 30.
697. Laporan KPP HAM para. 48; juga lihat Robinson, East Timor, hal. 106.

698. Louise Williams, "Separatists fear bloodshed as military arms integrationists", Sydney Morning Herald, 28 Januari 1999; "Interview: Orders to Kill", Expresso, Lisbon, 17 September 1999.
699. KPP HAM, Report on East Timor, para. 47.
700. Danrem 164/WD ke Dandim 1627-1639. Telegram Rahasia No. TR/41/1999, Jan 28, dikutip dalam Robinson, East Timor, hal. 110; juga lihat KPP HAM, Report, para. 50.
701. Robinson, East Timor, hal. 98; KPP HAM Report on East Timor, para. 40.
702. KPP HAM Report on East Timor, para 54.
703. Ibid, para. 50.
704. Dikutip dalam Xanana Gusmão, To Resist is to Win—The Autobiography of Xanana Gusmão, (Ed) Sarah Niner, David Lovell Publishing, Melbourne 2000, hal. 233-234.
705. Dikutip dalam Ian Martin, Self-determination in East Timor: The United Nations, The Ballot, and International Intervention, Boulder, Lynne Rienner, 2001, hal. 21.
706. Alexander Downer, Konferensi Pers, Adelaide, 12 Januari 1999.
707. Susan Sim, The Straits Times, Singapura 2 Februari 1999, dikutip dalam Greenlees dan Garran, Deliverance-The Inside Story of East Timor's Fight for Freedom, Allen and Unwin, Sydney, 2002, hal. 93.
708. Moore, "Indonesian Military's Last Years", hal. 33.
709. Pemberitahuan kepada Pers tentang Timor-Leste, Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, 9 Februari, 1999, dikutip dalam Martin, hal. 24.
710. Lihat Lansell Taudevin, East Timor: To Little Too Late, Duffy & Snellgrove, Sydney, 2000, hal. 223.
711. Martinkus, A Dirty Little War, hal. 119.
712. Pesan CNRT kepada Sekretaris Jenderal PBB dan Duta Besar Australia untuk Indonesia, 26 Januari 1999 ditandatangani oleh Leandro Isaac, dikutip dalam Taudevin, East Timor, hal. 222.
713. Siaran Pers Falintil, "Falintil resumes their Mission in Defence of the People of East Timor" 5 April 1999, sebagian dikutip dalam Martin, hal. 30.
714. Robinson, East Timor, hal. 193; juga lihat KPP HAM, Report on East Timor, para. 104-114.
715. Ball McDonald (ed), Masters of Terror: Indonesia's Military and Violence in East Timor in 1999, Australian National University, Canberra, 2002, <http://yayasanhak.minihub.org/mot/cons92z%20-%20Eurico%20Guterres.htm>, pada Januari 2005.
716. KPP HAM, Report on East Timor, para. 119-121.
717. Lihat KPP HAM, Report on East Timor, para. 86-191; juga lihat Robinson, East Timor, Bab 10.
718. Tono Suratman, Untuk Negaraku, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hal. 112 dan 118.
719. Lihat, misalnya, KPP HAM Report on East Timor para. 108 dan 119-121.
720. Martin, Self Determination, hal. 70.
721. Ibid, hal 31.
722. Ibid, hal 33.
723. Annex 3 pasal pada Persetujuan 5 Mei, dikutip dalam Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), East Timor in Transition 1998-2000—An Australian Policy Challenge, Canberra, 2001.
724. Surat José Ramos-Horta untuk Kofi Annan, dikutip dalam Greenlees dan Garran, hal. 147.
725. Martin, Self Determination, hal. 33; juga lihat Francesc Vendrell dan Ian Martin, kesaksian pada Audiensi Publik CAVR tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional, 15-17 Maret 2004.
726. Moore, Indonesian Military's Last Years, hal 41.
727. Martin, Self Determination, hal. 60.
728. Annex II: Agreement Regarding the Modalities for the Popular Consultation of the East Timorese through a direct Ballot, Persetujuan 5 Mei disalin dalam Martin, Self Determination, hal. 144.
729. Martin, Self Determination, hal. 46.
730. Ibid, hal.93.

731. Ibid, hal 42.
732. Ibid, hal. 88.
733. Lihat Yeni Rosa Damayanti, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR mengenai Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional, 15-17 Maret 2004.
734. Martin, Self Determination, hal. 71.
735. Geoffrey Robinson, East Timor 1999: Crimes Against Humanity—A Report Commissioned by the UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Juli, 2003, hal. 216.
736. KPP HAM, Report on East Timor, 31 Januari 2000, para 124; juga lihat Robinson, East Timor, hal. 63.
737. Martin, Self Determination, hal 71.
738. Ibid, hal 71.
739. Ibid, hal. 70.
740. Lihat Robinson, East Timor, secara umum; juga lihat KPP HAM, Report on East Timor, ; Lihat Julieta Jesuirina dos Santos, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Anak-anak dan Konflik, 28-29 Maret 2004; juga lihat Bab Rekonsiliasi Komunitas, pada bagian mengenai latar belakang mandat CRP.
741. Surat Bupati Kepala Daerah Tk II Dili, Nomor 33 tahun 1999 tentang Pengamanan Swakarsa dan Ketertiban Kota Dili.
742. KPP HAM Report on East Timor para. 89; Moore, "Indonesian Military's Last Years", hal. 39.
743. Ross Coulthart, "Timor on the brink", Sunday Program, Channel 9, Sydney, Australia. Disiarkan pada Juni 1999.
744. Ian Martin, kesaksian dalam Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional, 15 - 17 Maret 2003.
745. Robinson, East Timor 1999, hal. 210-213.
746. Kesaksian Ian Martin, pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional, 15 - 17 Maret 2003.
747. Martin, Self Determination, hal. 48.
748. Laporan Sekretaris Jenderal, S/1999/803, 20 Juli 1999.
749. Ibid.
750. Martin, Self Determination, hal. 45.
751. Komisi Pemilihan, East Timor Popular Consultation. Determination: Registration of Voters, 25 August 1999, dikutip dalam Martin, Self Determination, hal. 61.
752. KPP HAM, Report on East Timor, para. 161.
753. Lihat Geoffrey Robinson, "People's War: Militia in East Timor and Indonesia", South East Asia Research, 9, November 2001, hal. 206.
754. Fernando de Araújo, "The CNRT Campaign for Independence" dalam James J. Fox dan Dionisio Babo Soares (Eds), East Timor: Out of the Ashes, Crawford House Publishing, Adelaide, 2000, hal. 111.
755. Wawancara CAVR dengan Agio Pereira, mantan Kepala CPCC National Department of Information., Arsip CAVR. Maret 2005.
756. Martin, ibid, hal 43.
757. Ibid, hal. 47.
758. Wawancara CAVR dengan Basilio Dias Araújo, mantan juru bicara FPDK, Hotel Astiti, Kupang Timor Barat, 26 Juli 2004.
759. Surat Gubernur No 200/827/SOSPOL/V/1999, tentang Tindakan terhadap PNS yang terlibat organisasi/kegiatan yang menentang Pemerintah RI, Dili 28 Mei 1999.
760. Robinson, East Timor, hal 35.
761. Surat Gubernur pada Bupati Liquiçá tertanggal 21 Mei 1999, koleksi Yayasan HAK, dikutip dalam Robinson, East Timor, hal 115.
762. Surat Gubernur 461/e.09/BIDRAM II/99 pada Bupati Lautém, Los Palos, Pengesahan Proposal

763. Martin, Self Determination, hal. 75.
764. Komando Resort Militer 164/Wira Dharma, Rencana Operasi Wira Dharma-99, Dili, Juli 1999. (Dokumen Yayasan Hak No. 34).
765. Tono Suratman, Untuk Negaraku, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hal. 51.
766. Martin, Self Determination, hal. 71.
767. Ibid, hal. 73.
768. "Clash Mars East Timor Registration", The Jakarta Post, 17 Juli 1999; "Fortilos: Situasi Dili 1/9/99 - 21:00", SiaR, 31 August 1999, dikutip dalam McDonald, Ball, et al, Masters of Terror: Indonesia's Military and Violence in East Timor in 1999, Canberra: Strategic and Defence Studies Centre, Australian National University (Canberra Paper #145), 2002, tersedia di: <http://www.yayasanhak.minihub.org/mot/Timbul%20Silaen.htm>; juga lihat KPP HAM, Report, para. 172.
769. KPP HAM, Report on East Timor, para. 48; juga lihat Robinson, East Timor, hal. 39.
770. Don Greenless dan Robert Garran, Deliverance-The Inside Story of East Timor's Fight for Freedom, Allen and Unwin, Sydney, 2002, hal. 187.
771. Martin, Self Determination, hal. 84.
772. Ibid, hal. 90.
773. Ibid, hal. 90.
774. Ibid, hal. 90.
775. Dikutip dalam Greenlees, hal. 191.
776. Laporan dari Komisi Pemilihan dikutip dalam Martin, Self Determination, hal. 91
777. Ibid, hal. 90.
778. Ibid, hal. 93.
779. Electoral Commission Determination, Dili 4 September 1999, dan lihat Martin, Self Determination, hal. 157-160.
780. Ian Martin, Self-determination in East Timor: The United Nations, The Ballot, and International Intervention, Boulder (Col), Lynne Rienner, 2001, hal. 93.
781. Report on East Timor, KPP HAM, 31/01/2000, para. 72.
782. Ibid, para 161.
783. Ibid, para 81.
784. Ibid, para 181.
785. Ibid, para. 84 dan 85; juga lihat Robinson, East Timor 1999: Crimes Against Humanity—A Report Commissioned by the UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Juli, 2003, hal. 44.
786. Robinson, East Timor 1999, hal. 221.
787. KPP HAM, Report on East Timor, para. 131-135; juga lihat Robinson, East Timor, hal. 225.
788. Ibid, para. 139.
789. Samuel Moore, "The Indonesian Military's Last Years in East Timor: An Analysis of its Documents", Indonesia 72, Cornell South East Asia Program, Oktober 2001, hal. 31.
790. Feliciano Cardoso, kesaksian pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Perempuan dan Konflik, 28– 29 April 2003
791. Greenlees dan Garran, hal. 231.
792. Lihat pernyataan HRVD 3530-04; 6160; 6229; 6762; 6173-03; 4266; 8259; 2104-02; 8255; 1061-05; 0710; juga lihat KPP HAM, Report, para. 171.
793. Martin, Self Determination, hal. 97.
794. Report on East Timor, KPP HAM, VI.6.
795. Ibid, para 50.
796. Ibid, para 162.
797. Submisi kepada CAVR, wawancara David Hicks, Maxine Hicks dan Phyllis Ferguson dengan Virgilio Smith, 7 Juli 2005, Arsip CAVR.

798. Ibid.
799. Lihat pembahasan Bab 7.7: Kekerasan Seksual dan, misalnya, kesaksian BM, pada Audiensi Publik Nasional CAVR Rona Ami Nia Lian di CAVR (Dengarkan Kesaksian Kami) 11-12 November 2002.
800. Report on East Timor, KPP HAM, para 142; juga lihat Deputy General Prosecutor for Serious Crimes, Maliana Indictment, Case No. 2003/18, para. 128-190.
801. Geoffrey Robinson, East Timor 1999: Crimes Against Humanity—A Report Commissioned by the UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Juli, 2003, hal. 185.
802. Kesaksian Ian Martin pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional, 15-17 Maret 2004.
803. Kesaksian Abel Guterres pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional, 15-17 Maret 2004.
804. Martin, Self Determination, hal. 104-105.
805. Lihat Martin, Self Determination, hal. 104-105; juga lihat kesaksian Martin pada Audiensi Publik Nasional CAVR dan Masyarakat Internasional, 15-17 Maret 2004.
806. Kesaksian Ian Martin pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional, 15-17 Maret 2004.
807. Lihat Report on East Timor, KPP HAM, para. 87.
808. Martin, Self Determination, hal. 111.
809. Kesaksian Ian Martin pada Audiensi Publik Nasional CAVR tentang Penentuan Nasib Sendiri dan Masyarakat Internasional, 15-17 Maret 2004.
810. Martin, Self-determination, hal. 101.
811. Report on East Timor, KPP HAM, para. 98.
812. Ibid, para. 83. Martin, Self Determination, hal. 115.
813. Report on East Timor, KPP HAM, para. 164.
814. Human Rights Watch, Laporan mengenai Nusa Tenggara Timur, 1999.
815. Ibid.
816. Report on East Timor, KPP HAM, para. 151; juga lihat Pernyataan . General Prosecutor of the UNTAET, Indictment against Joni Marques, et.al., Kasus No. 2000/9, para. 33-40. Special Panel for Serious Crimes, Judgement, 11 Desember 2001. Tujuh anggota milisi termasuk Marques dinyatakan bersalah oleh Special Panel for Serious Crimes.
817. Martin, Self Determination, hal. 115.
818. Truk F (Tim Relawan Untuk Kemanusiaan). Submisi yang disampaikan pada dengar pendapat publik CAVR mengenai Perempuan dan Konflik, April 2003.
819. Human Rights Watch, Laporan mengenai Nusa Tenggara Timur, 1999.
820. Martin, Self Determination, hal. 97.
821. KPP HAM, Report on East Timor, para. 185.
822. Human Rights Watch, World Report 2001, East Timor, pada <http://www.hrw.org/wr2k1/asia/etimor3.html>.
823. Martin, Self Determination, hal. 115.